



Katalog: 9199017

Edisi 74
Juli 2016

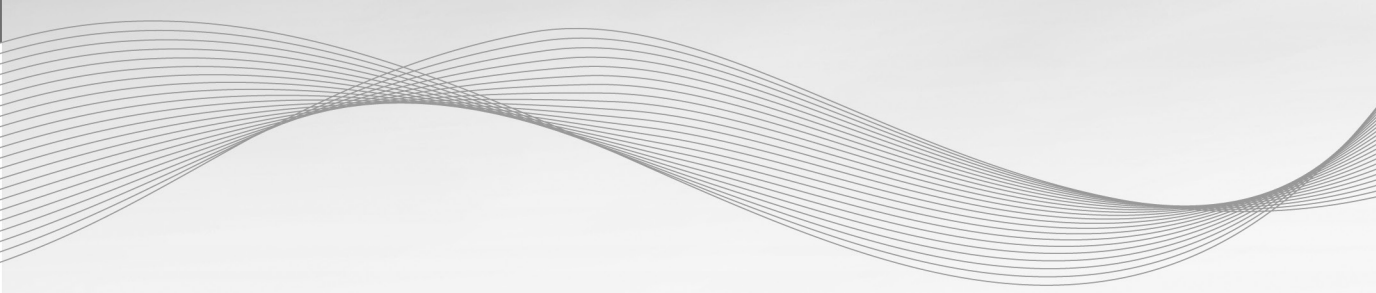
Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi



BADAN PUSAT STATISTIK

Edisi 74
Juli 2016

Laporan Bulanan
Data Sosial Ekonomi



Laporan Bulanan

Data Sosial Ekonomi

Juli 2016

ISSN: 2087-930X

Katalog BPS: 9199017

No. Publikasi: 03220.1611

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xxvi + 199 halaman

Naskah:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Direktorat Statistik Distribusi

Direktorat Neraca Produksi

Direktorat Statistik Harga

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata

Direktorat Neraca Pengeluaran

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Direktorat Statistik Industri

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penyunting:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Dicetak dan Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik, 2016

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

HEADLINES

1. Inflasi

Pada Juni 2016 terjadi inflasi sebesar 0,66 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2016 sebesar 1,06 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2016 terhadap Juni 2015) sebesar 3,45 persen.

2. Pertumbuhan PDB

- Ekonomi Indonesia triwulan I-2016 terhadap triwulan I-2015 (*y-on-y*) tumbuh 4,92 persen meningkat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,73 persen.
- Ekonomi Indonesia triwulan I-2016 dibanding triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,34 persen (*q-to-q*).

3. Ekspor

- Nilai ekspor Mei 2016 sebesar US\$11,51 miliar, naik 0,31 persen jika dibanding ekspor April 2016 dan turun 9,75 persen dibanding ekspor Mei 2015.
- Nilai ekspor nonmigas Mei 2016 mencapai US\$10,55 miliar yang terdiri dari produk hasil pertanian US\$0,22 miliar, hasil industri pengolahan US\$9,11 miliar, serta hasil tambang dan lainnya US\$1,23 miliar.

4. Impor

- Nilai impor Mei 2016 sebesar US\$11,14 miliar, naik 2,98 persen dibanding impor April 2016 dan turun 4,12 persen jika dibanding impor Mei 2015.
- Nilai impor menurut golongan penggunaan barang Mei 2016 mencakup barang konsumsi sebesar US\$1,00 miliar, bahan baku/penolong US\$8,49 miliar, dan barang modal US\$1,64 miliar.

5. Kependudukan

- Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 258.705 ribu orang.
- Piramida Penduduk Indonesia tahun 2016 termasuk tipe *expansive*, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda.

6. Ketenagakerjaan

- Pada Februari 2016, jumlah penganggur sebesar 7,02 juta orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,50 persen.

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun dari 5,81 persen pada Februari 2015 menjadi 5,50 persen pada Februari 2016.

7. Upah Buruh

- Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Mei 2016 naik masing-masing sebesar 0,14 persen dan 0,15 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya.
- Upah riil harian buruh tani Mei 2016 naik sebesar 0,01 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya, upah riil harian buruh bangunan Mei 2016 turun 0,09 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya.

8. Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Perdesaan dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

- NTP Juni 2016 turun 0,08 persen dibanding Mei 2016.
- Pada Juni 2016, terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,59 persen.
- NTUP Juni 2016 naik 0,24 persen dibanding Mei 2016.

9. Harga Pangan

- Rata-rata harga beras Juni 2016 sebesar Rp13.115,00 per kg, naik 0,58 persen dari bulan sebelumnya.
- Harga gula pasir naik 6,00 persen; telur ayam ras naik 5,86 persen; daging ayam ras naik 5,36 persen; ikan kembung naik 2,46 persen; dan daging sapi naik 1,29 persen.

10. a. Indeks Harga Produsen

Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) pada triwulan I-2016 naik 0,44 persen terhadap triwulan IV-2015 (*q-to-q*). Demikian pula terhadap triwulan I-2015 (*y-on-y*) naik 1,16 persen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

- IHPB Umum Nonmigas Juni 2016 naik sebesar 0,97 persen dibanding bulan sebelumnya.
- Pada Mei 2016 IHPB Umum naik sebesar 1,44 persen dibanding bulan sebelumnya.

11. Indeks Tendensi Bisnis dan Konsumen

- Kondisi bisnis triwulan I-2016 menurun dari triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 99,46). Pelaku usaha pesimis terhadap kondisi bisnis di triwulan I-2016.
- Kondisi bisnis triwulan II-2016 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 103,52). Tingkat optimisme pelaku bisnis diperkirakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I-2016 (nilai ITB sebesar 99,46).
- Kondisi ekonomi konsumen triwulan I-2016 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan I-2016 lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2015. Nilai ITK triwulan I-2016 sebesar 102,89 sementara triwulan IV-2015 sebesar 102,77.
- Kondisi ekonomi konsumen Triwulan II-2016 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan II-2016 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2016. Perkiraan nilai ITK triwulan II-2016 sebesar 106,56, sedangkan triwulan I-2016 hanya sebesar 102,89.

12. Produksi Tanaman Pangan Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015

- Produksi padi tahun 2015 sebanyak 75,40 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami peningkatan sebanyak 4,55 juta ton (6,42 persen) dibandingkan tahun 2014.
- Produksi jagung tahun 2015 sebanyak 19,61 juta ton pipilan kering, mengalami kenaikan sebanyak 0,60 juta ton (3,18 persen) dibandingkan tahun 2014.
- Produksi kedelai tahun 2015 sebanyak 963,18 ribu ton biji kering, meningkat sebanyak 8,19 ribu ton (0,86 persen) dibandingkan tahun 2014.

13. Industri

- Pertumbuhan produksi industri pengolahan/manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan I-2016 naik 4,08 persen dibanding triwulan I-2015 (*y-on-y*), dan mengalami penurunan 1,34 persen dari triwulan IV-2015 (*q-to-q*).
- Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan I-2016 naik 5,91 persen dibanding triwulan I-2015 (*y-on-y*), dan mengalami kenaikan 0,76 persen dari triwulan IV-2015 (*q-to-q*).

14. Pariwisata

- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman selama Januari–Mei 2016 mencapai 4,43 juta kunjungan atau naik 7,48 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2015.

- TPK Hotel Berbintang pada Mei 2016 mencapai 55,46 persen atau naik 1,74 poin dibanding TPK Mei 2015, dan mengalami kenaikan 1,08 poin dibandingkan TPK April 2016.

15. Transportasi

- Jumlah penumpang angkutan udara domestik Mei 2016 naik 12,05 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang angkutan udara internasional Mei 2016 naik 4,61 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Mei 2016 naik 10,35 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang kereta api Mei 2016 naik 7,98 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

16. a. Kemiskinan September 2015

Jumlah penduduk miskin pada September 2015 sebanyak 28,51 juta orang (11,13 persen), menurun 0,08 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen).

b. Ketimpangan Pengeluaran

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia periode Maret 2015–September 2015 yang diukur dengan *Gini Ratio* tercatat menurun sebesar 0,01 poin dari 0,41 (Maret 2015) menjadi 0,40 (September 2015).

17. Produksi Hortikultura

- Produksi cabai besar pada tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton.
- Produksi cabai rawit pada tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton.
- Produksi bawang merah pada tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton.

18. a. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2014

Biaya produksi per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai masing-masing adalah sebesar Rp12,7 juta; Rp7,8 juta; Rp9,1 juta; dan Rp9,1 juta. Sedangkan nilai produksinya masing-masing adalah sebesar Rp17,2 juta; Rp10,2 juta; Rp12,0 juta; dan Rp9,0 juta.

b. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah, dan Jeruk Tahun 2014

- Biaya produksi usaha tanaman cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 masing-masing mencapai Rp52,1 juta; Rp34,0 juta; dan Rp67,2 juta.

- Biaya produksi usaha tanaman jeruk per 100 pohon selama setahun yang dipanen sendiri dan yang ditebaskan tahun 2014 masing-masing mencapai Rp5,4 juta dan Rp5,7 juta.

c. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014

Rata-rata biaya produksi usaha setahun per hektar untuk komoditas kelapa sawit sebesar Rp9,7 juta (57,05 persen dari total nilai produksi); karet sebesar Rp9,2 juta (71,54 persen dari total nilai produksi); dan tebu Rp24,2 juta (77,98 persen dari total nilai produksi).

d. Struktur Ongkos Usaha Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Ras Petelur, dan Ayam Ras Pedaging Tahun 2014.

- Biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen).
- Biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen).
- Biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen).
- Biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen).

e. Struktur Ongkos Usaha Perikanan Tahun 2014

- Biaya produksi per hektar dalam satu siklus usaha budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta (48,36 persen terhadap nilai produksi); Rp4,2 juta (71,91 persen terhadap nilai produksi); dan Rp3,2 juta (44,16 persen terhadap nilai produksi).
- Biaya produksi per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor dan perahu motor tempel masing-masing sebesar Rp4,1 juta (66,54 persen terhadap nilai produksi) dan Rp436 ribu (53,71 persen terhadap nilai produksi).

f. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jati, Mahoni, Sengon Tahun 2014

Biaya produksi per 100 pohon untuk tanaman jati, mahoni, dan sengon masing-masing Rp0,9 juta; Rp1,2 juta; dan Rp0,8 juta atau masing-masing sebesar 10,20 persen; 19,30 persen; dan 20,71 persen terhadap nilai produksi.

g. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Tahun 2014

Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga. Sebesar 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan dan hanya 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah. Sebesar 37,35 persen rumah tangga di sekitar kawasan hutan melakukan pemungutan hasil hutan/menangkap satwa liar. Dari rumah tangga di sekitar kawasan hutan, sebesar 18,51 persen sumber pendapatannya berasal dari memungut hasil hutan/menangkap satwa liar.

19. Tipologi Wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014

- Berdasarkan hasil Podes 2014, pada bulan April 2014 tercatat 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa¹, 8.412 kelurahan dan 69 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota.
- Sebanyak 258 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain (desa/kelurahan terdepan), yaitu 62 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua.
- Terdapat 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) yang berada di 77 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005².
- Indeks Kesulitan Geografis (IKG) bervariasi antar desa dengan rentang antara 6,83 sampai 97,89.

20. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Mei 2016

- Rupiah terdepresiasi 3,14 persen terhadap dolar Amerika.
- Rupiah terapresiasi 3,13 persen terhadap dolar Australia.
- Rupiah terdepresiasi 3,31 persen terhadap yen Jepang.
- Rupiah terdepresiasi 1,55 persen terhadap euro.

¹ Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat.

² Menurut PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

21. Perdagangan Komoditas Strategis 2015

Alur distribusi perdagangan terpanjang cabai merah, bawang merah, dan jagung pipilan berada di Jawa Tengah, sedangkan beras dan daging ayam ras di DKI Jakarta. Alur distribusi perdagangan terpendek beras, cabai merah dan jagung pipilan berada di Sulawesi Utara, bawang merah di Maluku Utara; dan daging ayam ras di Kalimantan Barat.

22. Indeks Perilaku Anti Korupsi

- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2015 sebesar 3,59 pada skala 0 sampai 5. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan capaian sebesar 3,61.
- Indeks Persepsi meningkat dari tahun 2014 ke 2015, dari 3,71 menjadi 3,73. Sementara indeks pengalaman turun dari 3,49 pada tahun 2014 menjadi 3,39 pada tahun 2015.
- IPAK 2015 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (3,71) lebih tinggi dibanding di wilayah perdesaan (3,46).
- IPAK 2015 di kalangan laki-laki (3,63) sedikit lebih tinggi dibanding di kalangan perempuan (3,55).
- IPAK masyarakat dengan usia 40 sampai 59 tahun merupakan yang tertinggi dibandingkan IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun dan lebih dari 60 tahun. IPAK masyarakat usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,62, IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,59, sedangkan IPAK masyarakat usia 60 tahun ke atas sebesar 3,49.
- Pendidikan kemungkinan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi IPAK, atau semakin tinggi pendidikan semakin anti korupsi. IPAK 2015 untuk masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,49, SLTA sebesar 3,80 dan di atas SLTA sebesar 4,00.

23. Indeks Pembangunan Manusia

- Pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2015 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pada tahun 2015, IPM Indonesia telah mencapai 69,55. Angka ini meningkat sebesar 0,65 poin atau tumbuh sebesar 0,94 persen dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2014 yang sebesar 68,90.
- Pada tahun 2015, pembangunan manusia di Indonesia masih berstatus “sedang” yaitu masih berada pada kisaran 60 sampai dengan 70. Status tersebut masih sama dengan kondisi tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi ini diterbitkan setiap awal bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dan informasi yang dimuat tetap mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Indonesia.

Buku ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi Juli 2016 ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan inflasi (s.d. Juni 2016), perkembangan triwulanan pertumbuhan ekonomi (s.d. triwulan I-2016), ekspor-impor (s.d. Mei 2016), perkembangan tahunan penduduk (s.d. Juni 2014), ketenagakerjaan (s.d. Februari 2016), upah buruh (s.d. Mei 2016), nilai tukar petani dan harga pangan (s.d. Juni 2016), harga produsen (s.d. triwulan I-2016) dan harga perdagangan besar (s.d. Juni 2016), perkembangan triwulanan indeks tendensi bisnis dan konsumen (s.d. triwulan I-2016), produksi tanaman pangan (angka tetap tahun 2015 dan angka ramalan I tahun 2016), perkembangan triwulanan indeks produksi industri (s.d. triwulan I-2016), pariwisata dan transportasi (s.d. Mei 2016), data kemiskinan (September 2015), tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia September 2015, struktur ongkos usaha pertanian dan survei keehatan 2014, nilai tukar eceran rupiah Mei 2016, produksi cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah tahun 2014, perdagangan komoditas strategis 2015, indeks perilaku anti korupsi Indonesia (IPAK) 2015, serta indeks pembangunan manusia 2015.

Lebih lanjut, keseluruhan data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan statistik resmi (*official statistics*) yang menjadi rujukan resmi bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Apabila masih diperlukan data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, dipersilahkan melihat publikasi BPS lainnya atau melalui *website* BPS: <http://www.bps.go.id>.

Jakarta, 12 Juli 2016

Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Suryamin, M.Sc.

DAFTAR ISI

<i>HEADLINES</i>	iii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xxiii
FOKUS PERHATIAN	1
I. INFLASI JUNI 2016	15
II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I-2016	20
III. EKSPOR MEI 2016	34
IV. IMPOR MEI 2016	39
V. KEPENDUDUKAN JUNI 2016	46
VI. KETENAGAKERJAAN FEBRUARI 2016	52
VII. UPAH BURUH MEI 2016	58
VIII. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN JUNI 2016	60
IX. HARGA PANGAN JUNI 2016	67
X. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN I-2016 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR JUNI 2016	74
XI. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULANAN I-2016	83
XII. PRODUKSI TANAMAN PANGAN ANGKA TETAP (ATAP) 2015	91
XIII. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN I-2016	96
XIV. PARIWISATA MEI 2016	101
XV. TRANSPORTASI NASIONAL MEI 2016	105
XVI. KEMISKINAN DAN TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK INDONESIA SEPTEMBER 2015	108
XVII. PRODUKSI HORTIKULTURA 2014	119
XVIII. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERTANIAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN, 2014	124
XIX. TIPOLOGI WILAYAH HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2014	138

XX.	PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH MEI 2016	155
XXI.	PERDAGANGAN KOMODITAS STRATEGIS 2015	160
XXII.	INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2015	163
XXIII.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2015	172
XXIV.	SUPLEMEN: METODOLOGI	176

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota Juni 2016 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100).....	17
Tabel 1.2	Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi Juni 2016 Menurut Komponen Perubahan Harga (2012=100)	17
Tabel 1.3	Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen)	18
Tabel 1.4	Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen)	18
Tabel 1.5	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, April–Mei 2016 (persen)	19
Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)	21
Tabel 2.2	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah).....	22
Tabel 2.3	Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2015, Triwulan IV-2015 dan Triwulan I-2016 (persen)	24
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran (persen).....	25
Tabel 2.5	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (triliun rupiah)	26
Tabel 2.6	Struktur PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan I-2015, Triwulan IV-2015 dan Triwulan I-2016 (persen)	26
Tabel 2.7	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)	27
Tabel 2.8	Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan I-2016 (persen).....	28
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2015 (persen).....	30
Tabel 2.10	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2015 (triliun rupiah).....	31
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2015 (persen).....	32
Tabel 2.12	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2015 (triliun rupiah).....	32
Tabel 2.13	PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2010–2015.....	33
Tabel 3.1	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ($\Delta\%$).....	35

Tabel 3.2	Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$) Triwulanan 2015–2016	36
Tabel 3.3	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya (Δ)	36
Tabel 3.4	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ).....	37
Tabel 3.5	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2014–2016 (FOB:juta US\$)	37
Tabel 3.6	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang dan Pelabuhan Muat, Januari–Mei 2016	38
Tabel 4.1	Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya Januari–Mei 2015 dan 2016.....	41
Tabel 4.2	Perkembangan Impor Indonesia Mei 2015–Mei 2016.....	41
Tabel 4.3	Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit dan Perubahannya Januari–Mei 2015 dan 2016.....	42
Tabel 4.4	Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang Januari–Mei 2016.....	42
Tabel 4.5	Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang Januari–Mei 2015 dan 2016.....	43
Tabel 4.6	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2015–Mei 2016 (Nilai CIF: Juta US\$).....	43
Tabel 4.7	Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Mei 2016 (juta US\$).....	44
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Indonesia, Mei 2015–Mei 2016 (miliar US\$)	44
Tabel 4.9	Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Mei 2016	45
Tabel 5.1	Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2016 (ribu orang)	46
Tabel 5.2	Demografi Penduduk Indonesia, 2016.....	51
Tabel 6.1	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 2014–2016 (juta orang).....	52
Tabel 6.2	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2014–2016 (juta orang)	54
Tabel 6.3	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2014–2016 (juta orang)	55

Tabel 6.4	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2014–2016 (juta orang)	55
Tabel 6.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2014–2016 (persen)	56
Tabel 6.6	Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi 2015–2016.....	57
Tabel 7.1	Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah) Mei 2014–Mei 2016	59
Tabel 8.1	Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100)	62
Tabel 8.2	Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran Juni 2014–Juni 2016	65
Tabel 8.3	Tingkat Inflasi Perdesaan Juni 2016, Tahun Kalender dan <i>Year on Year</i> 2016 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)	66
Tabel 8.4	Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya, Juni 2016 (2012=100).....	66
Tabel 9.1	Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, Juni 2015–Juni 2016.....	68
Tabel 9.2	Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, Juni 2015–Juni 2016	70
Tabel 9.3	Rata-Rata Harga Beras di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>), Juni 2015–Juni 2016	71
Tabel 9.4	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok Juni 2015–Juni 2016 (rupiah).....	72
Tabel 10.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor Triwulan I-2016.....	75
Tabel 10.2	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor Triwulan I-2016.....	78
Tabel 10.3	Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia April 2016 – Juni 2016, (2010=100)	79
Tabel 10.4	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar Juni 2016 (2010=100).....	80
Tabel 10.5	Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia Juni 2016 Menurut Jenis Bangunan (2010=100)	81

Tabel 11.1	Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2016 Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha.....	84
Tabel 11.2	Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan II-2016 Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk	85
Tabel 11.3	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2015 dan Triwulan I-2016 Menurut Variabel Pembentuk.....	87
Tabel 11.4	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2016 Menurut Variabel Pembentuk	89
Tabel 11.5	Indeks Tendensi Konsumen Triwulan I-2015–Triwulan I-2016 dan Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan II-2016 Tingkat Nasional dan Provinsi	90
Tabel 12.1	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Wilayah, 2013–2015	91
Tabel 12.2	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut <i>Subround</i> , 2013–2015	92
Tabel 12.3	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Menurut Wilayah, 2013–2015	93
Tabel 12.4	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Menurut Wilayah, 2013–2015	94
Tabel 12.5	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Palawija Lainnya, 2013–2015	95
Tabel 13.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan 2014–2016 (persen) 2010=100	97
Tabel 13.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2014–2016 (persen) 2010=100	97
Tabel 13.3	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan I-2016 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)	98
Tabel 13.4	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan, Triwulan I-2014–Triwulan I-2016 (persen).....	100
Tabel 13.5	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan I-2016 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)	100
Tabel 14.1	Perkembangan Kunjungan Wisman ke Indonesia	101

Tabel 14.2	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Reguler, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Mei 2015–Mei 2016.....	104
Tabel 15.1	Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi Mei 2015–Mei 2016.....	107
Tabel 16.1	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2015–September 2015.....	109
Tabel 16.2	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), September 2015.....	110
Tabel 16.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2015–September 2015.....	112
Tabel 16.4	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, September 2015.....	113
Tabel 16.5	Nilai <i>Gini Ratio</i> Menurut Daerah, 2010–September 2015.....	114
Tabel 16.6	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Indonesia Maret dan September 2015 (Persentase).....	116
Tabel 16.7	Gini Rasio Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2015–September 2015.....	118
Tabel 17.1	Perkembangan Produksi Cabai Besar (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014.....	120
Tabel 17.2	Perkembangan Produksi Cabai Rawit (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014.....	121
Tabel 17.3	Perkembangan Produksi Bawang Merah (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014.....	123
Tabel 18.1	Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang (ribu rupiah), 2014.....	124
Tabel 18.2	Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha Tanaman Jagung dan Kedelai (ribu rupiah), 2014.....	125
Tabel 18.3	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah per Hektar per Musim Tanam, 2014.....	126
Tabel 18.4	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Rawit per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014.....	127

Tabel 18.5	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Bawang Merah per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014	127
Tabel 18.6	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jeruk per 100 Pohon yang Dipanen Sendiri dan Ditebaskan 2014	128
Tabel 18.7	Nilai Produksi Dan Biaya Per Hektar Usaha Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014	129
Tabel 18.8	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun Usaha Sapi Potong dan Sapi Perah 2014	130
Tabel 18.9	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Tahun Usaha Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging, 2014.....	132
Tabel 18.10	Nilai Produksi dan Biaya per Hektar per Siklus Usaha Budidaya Rumput Laut, Bandeng, dan Udang Windu, 2014.....	133
Tabel 18.11	Nilai Produksi dan Biaya per Trip Usaha Penangkapan Ikan di Laut Menggunakan Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel, 2014	134
Tabel 18.12	Nilai Produksi dan Ongkos Produksi per 100 Pohon Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014	135
Tabel 18.13	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah, 2004 dan 2014.....	136
Tabel 19.1	Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan Menurut Provinsi, 2014	143
Tabel 19.2	Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2014.....	144
Tabel 19.3	IKG Desa Menurut Provinsi, 2014	145
Tabel 21.1	Rata-rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Menurut Komoditi, 2015.....	162
Tabel 22.1	Nilai IPAK Tahun 2012–2015	164
Tabel 22.2	Indeks Menurut Dimensi, 2012–2015.....	164
Tabel 22.3	IPAK Menurut Wilayah, 2012–2015	165
Tabel 22.4	IPAK Menurut Jenis Kelamin, 2012–2015	165
Tabel 22.5	IPAK Menurut Umur, 2012–2015.....	166
Tabel 22.6	IPAK Menurut Pendidikan Tertinggi, 2012–2015	166
Tabel 22.7	Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Keluarga merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2015	167

Tabel 22.8	Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Komunitas merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2015	168
Tabel 22.9	Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Tingkat Publik merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2015.....	169
Tabel 23.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2014–2015 ...	175

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan 82 Kota, 2014–2016.....	15
Grafik 1.2	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2015–2016	19
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2015 s.d Triwulan I-2016 (persen)	20
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2016 (persen).....	21
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan I-2016 (persen).....	25
Grafik 2.4	Peranan Wilayah/Pulau Dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan I-2016 (persen).....	27
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2013–2015 (persen).....	29
Grafik 3.1	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB) Mei 2014–Mei 2016	34
Grafik 4.1	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF) Mei 2015–Mei 2016	39
Grafik 4.2	40Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF) Januari-Mei 2015 dan 2016	40
Grafik 5.1	Piramida Penduduk Indonesia, 2016	47
Grafik 5.2	Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2016	48
Grafik 5.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971–2016.....	49
Grafik 6.1	Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur 2014–2016 (juta orang)	53
Grafik 7.1	Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan Mei 2014–Mei 2016.....	58
Grafik 8.1	Nilai Tukar Petani (NTP), Juni 2015–Juni 2016 (2012=100)	60
Grafik 8.2	Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) Juni 2015–Juni 2016 (2012=100)	61
Grafik 8.3	Inflasi Perdesaan, Juni 2014–Juni 2016	64
Grafik 9.1	Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas Juni 2015–Juni 2016	67

Grafik 9.2	Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas Juni 2015–Juni 2016.....	69
Grafik 9.3	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok Mei 2015–Juni 2016 (rupiah) April 2015–Mei 2016 (rupiah).....	73
Grafik 10.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor Triwulan I-2013 s.d. Triwulan I-2016	75
Grafik 10.2	Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia Juni 2013–Juni 2016	80
Grafik 10.3	Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan Desember 2015–Juni 2016	82
Grafik 11.1	Indeks Tendensi Bisnis Triwulan I-2011–Triwulan I-2016 dan Perkiraan Triwulan II-2016.....	86
Grafik 11.2	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2016 Tingkat Nasional dan Provinsi	88
Grafik 11.3	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2016 Tingkat Nasional dan Provinsi.....	89
Grafik 12.1	Pola Panen Padi, 2013–2015	92
Grafik 13.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (<i>y-on-y</i>), Triwulan II-2014–Triwulan I-2016.....	96
Grafik 13.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (<i>y-on-y</i>), Triwulan I-2014–Triwulan I-2016.....	99
Grafik 14.1	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman menurut Pintu Masuk Mei 2014–Mei 2016.....	102
Grafik 14.2	Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Rata-rata 27 Provinsi di Indonesia, Mei 2014–Mei 2016	103
Grafik 15.1	Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi Mei 2015–Mei 2016	105
Grafik 16.1	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret 2015–September 2015.....	108
Grafik 16.2	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> , 2010–September 2015	115
Grafik 16.3	Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen terbawah, Maret 2015 dan September 2015	116
Grafik 17.1	Perkembangan Produksi Cabai Besar Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014.....	119

Grafik 17.2 Perkembangan Produksi Cabai Rawit Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014.....	121
Grafik 17.3 Perkembangan Produksi Bawang Merah Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014.....	123
Grafik 18.1 Persentase Ongkos Produksi Terhadap Nilai Produksi per 100 Pohon Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014	135
Grafik 18.2 Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan, 2004 dan 2014.....	137
Grafik 18.3 Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Pemungutan Hasil Hutan/Penangkapan Satwa Liar, 2014.....	137
Grafik 19.1 Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes, 2008–2014.....	138
Grafik 19.2 Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2014.....	139
Grafik 19.3 Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014.....	140
Grafik 19.4 Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014.....	140
Grafik 19.5 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama	141
Grafik 19.6 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik.....	141
Grafik 19.7 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih.....	142
Grafik 19.8 Persentase Desa Menurut Kelompok IKG, 2014	146
Grafik 20.1 Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Mei 2016 dibanding April 2016 M.IV)	159
Grafik 20.2 Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Minggu Terakhir).....	159
Grafik 21.1 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia, 2015	160
Grafik 23.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010–2015.....	172
Grafik 23.2 Tren Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2011–2015	173

Grafik 23.3 Indeks Komponen IPM Indonesia, 2014–2015	174
------------------------------------------------------------	-----

FOKUS PERHATIAN

1. Pada Juni 2016 terjadi inflasi sebesar 0,66 persen

Pada Juni 2016 terjadi inflasi sebesar 0,66 persen. Dari 82 kota, seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Pangkal Pinang sebesar 2,14 persen dengan IHK 127,07 dan terendah terjadi di Padang sebesar 0,10 persen dengan IHK 127,38. Inflasi Juni 2016 sebesar 0,66 persen lebih tinggi dibanding kondisi Juni 2015 yang mengalami inflasi sebesar 0,54 persen. Inflasi tahun kalender 2016 sebesar 1,06 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2016 terhadap Juni 2015) sebesar 3,45 persen.

2. Triwulan I-2016 perekonomian Indonesia tumbuh 4,92 persen

Ekonomi Indonesia triwulan I-2016 dibanding triwulan I-2015 (*y-on-y*) tumbuh 4,92 persen meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi produksi pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 0,66 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 9,10 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama didukung oleh semua komponen kecuali Ekspor yang tumbuh negatif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,38 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 5,57 persen.

Sementara bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2016 (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 0,34 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan diwarnai oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh ekspansif sebesar 14,43 persen. Pertumbuhan juga terjadi pada beberapa lapangan usaha lainnya. Namun pertumbuhan tersebut tidak mampu menahan terjadinya kontraksi ekonomi triwulan I-2016, disebabkan kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Ditinjau dari sisi pengeluaran, secara *q-to-q*

ekonomi Indonesia triwulan I-2016 didorong oleh pertumbuhan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,17 persen. Sementara itu, komponen-komponen lainnya menunjukkan penurunan.

3. Nilai ekspor Indonesia Mei 2016 mencapai US\$11,51 miliar, turun 9,75 persen (year-on-year)

Nilai ekspor Indonesia Mei 2016 mencapai US\$11,51 miliar, turun 9,75 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*), sementara dibanding ekspor April 2016 naik 0,31 persen. Nilai ekspor nonmigas Mei 2016 mencapai US\$10,55 miliar atau turun 0,29 persen dibanding ekspor nonmigas April 2016. Ekspor migas pada Mei 2016 mencapai US\$0,96 miliar atau naik 7,42 persen dibanding bulan sebelumnya. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Mei 2016 turun sebesar 5,35 persen dibanding ekspor nonmigas hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2015, dan ekspor nonmigas hasil tambang dan lainnya turun 26,91 persen, demikian juga ekspor nonmigas hasil pertanian turun 19,25 persen.

4. Nilai impor Indonesia Mei 2016 sebesar US\$11,14 miliar, turun sebesar 4,12 persen (year-on-year)

Nilai impor Indonesia Mei 2016 sebesar US\$11,14 miliar, atau naik sebesar 2,98 persen dibanding impor April 2016, dan turun 4,12 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor nonmigas Mei 2016 sebesar US\$9,47 miliar atau naik 0,16 persen dibanding April 2016. Sementara impor migas Mei 2016 tercatat sebesar US\$1,67 miliar, naik 22,50 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan nilai impor nonmigas terbesar Mei 2016 adalah golongan gula dan kembang gula sebesar US\$86,0 juta, atau naik 92,08 persen dibanding April 2016 (US\$93,4 juta). Negara asal barang impor nonmigas terbesar Jan-Mei 2016 ditempati oleh Tiongkok (US\$12,26 miliar) dengan pangsa 26,10 persen.

5. Jumlah penduduk Indonesia Juni 2016 sebanyak 258.705 ribu orang

Hasil proyeksi penduduk Indonesia keadaan Juni 2016 menunjukkan penduduk Indonesia berjumlah 258.705 ribu orang terdiri dari 129.988,7 ribu orang laki-

laki dan 128.716,3 ribu orang perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2010–2016 sekitar 1,36 persen per tahun.

6. Pada Februari 2016, jumlah penduduk yang bekerja turun 200 ribu orang dibandingkan Februari 2015

Dalam setahun terakhir (Februari 2015–Februari 2016), jumlah penduduk yang bekerja turun sebanyak 200 ribu orang, penurunan ini terutama terjadi di Sektor Pertanian, sedangkan Sektor Perdagangan dan Sektor Jasa Kemasyarakatan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, masing-masing sebanyak 1,8 juta orang (6,94 persen) dan 380 ribu orang (1,96 persen).

7. Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Mei 2016 masing-masing sebesar Rp47.796,00 dan Rp81.677,00

Rata-rata upah nominal buruh tani pada Mei 2016 sebesar Rp47.796,00, naik 0,14 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, dan upah riil naik sebesar 0,01 persen. Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Mei 2016 tercatat Rp81.677,00, naik 0,15 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, sedangkan upah riil turun sebesar 0,09 persen.

8. Nilai Tukar Petani (NTP) Juni 2016 tercatat 101,47, turun 0,08 persen dibanding Mei 2016, inflasi perdesaan sebesar 0,59 persen dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) naik sebesar 0,24 persen dibanding Mei 2016

NTP Juni 2016 tercatat 101,47 atau turun sebesar 0,08 persen dibanding NTP Mei 2016 sebesar 101,55. Penurunan NTP bulan ini disebabkan turunnya NTP di dua subsektor penyusun NTP yaitu Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat turun masing-masing 0,46 persen dan 0,69 persen, sebaliknya Subsektor Tanaman Pangan naik sebesar 0,08 persen, Peternakan naik 0,55 persen, dan Perikanan naik 0,46 persen.

Pada Juni 2016 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,59 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 128,00. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 32

provinsi dan deflasi perdesaan di 1 provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 1,19 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,06 persen, sedangkan deflasi perdesaan terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 0,25 persen.

Pada Juni 2016 terjadi kenaikan NTUP sebesar 0,24 persen. Hal ini terjadi karena kenaikan It (0,39 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan indeks BPPBM (0,15 persen). Kenaikan NTUP disebabkan oleh naiknya tiga subsektor penyusun NTUP yaitu NTUP Tanaman Pangan naik 0,39 persen, Peternakan naik sebesar 0,73 persen, dan Perikanan naik sebesar 0,83 persen, sebaliknya NTUP Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat turun masing-masing sebesar 0,06 persen dan 0,32 persen.

9. Rata-rata harga beras pada Juni 2016 sebesar Rp13.115,00 per kg, naik 0,58 persen

Rata-rata harga beras pada Juni 2016 sebesar Rp13.115,00 per kg, naik 0,58 persen dari bulan sebelumnya. Dibandingkan Juni 2015, harga beras naik 5,55 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 3,45 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah gula pasir 6,00 persen; telur ayam ras 5,86 persen; daging ayam ras 5,36 persen; ikan kembung 2,46 persen; dan daging sapi 1,29 persen.

10. a. Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) pada triwulan I-2016 naik 0,44 persen terhadap triwulan IV-2015 (*q-to-q*). Demikian pula terhadap triwulan I-2015 (*y-on-y*) naik 1,16 persen

Indeks Harga Produsen (IHP) gabungan (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) mengalami kenaikan sebesar 0,44 persen pada triwulan IV-2015 (*q-to-q*). Kenaikan terjadi pada IHP Sektor Pertanian (0,96 persen) dan IHP Sektor Industri Pengolahan (0,73 persen), sedangkan IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar 3,18 persen.

Dibandingkan terhadap triwulan I-2015 (*y-on-y*), IHP naik 1,16 persen. IHP Sektor Pertanian dan IHP Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 3,49 persen dan 2,79 persen. Sebaliknya Sektor Pertambangan dan Penggalian turun sebesar 15,12 persen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nonmigas Juni 2016 naik sebesar 0,97 persen dari bulan sebelumnya

IHPB Umum Nonmigas Juni 2016 naik sebesar 0,97 persen dari bulan sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada Sektor Pertanian, yaitu 2,58 persen dan terendah terjadi pada Kelompok Impor Nonmigas, yaitu 0,41 persen sedangkan Sektor Industri naik sebesar 1,19 persen. Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Kelompok Barang Ekspor Nonmigas turun masing-masing sebesar 1,38 persen dan 0,55 persen. Dibandingkan bulan sebelumnya, IHPB Umum Mei 2016 naik 1,44 persen. Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada Kelompok Barang Ekspor sebesar 5,98 persen. IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi Juni 2016 naik sebesar 0,16 persen. Kenaikan indeks terbesar terjadi pada jenis Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan sebesar 0,23 persen.

11. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2016 sebesar 99,46 dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2016 sebesar 102,89

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan I-2016 sebesar 99,46 berarti kondisi bisnis menurun dari triwulan sebelumnya. Hal ini karena adanya penurunan pendapatan usaha (nilai indeks sebesar 98,91), penggunaan kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 99,77), dan penurunan rata-rata jumlah jam kerja (nilai indeks sebesar 99,79). Pada triwulan II-2016 kondisi bisnis diprediksi meningkat dari triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 103,52).

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) nasional pada triwulan I-2016 sebesar 102,89 artinya kondisi ekonomi konsumen meningkat dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga, relatif rendahnya pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi, dan tingkat konsumsi yang meningkat. Meningkatnya kondisi ekonomi konsumen di tingkat

nasional terjadi karena adanya peningkatan kondisi ekonomi konsumen di 25 provinsi Indonesia (75,76 persen).

Pada triwulan II-2016 kondisi ekonomi konsumen diprediksi akan meningkat (ITK sebesar 106,56). Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan mendatang terjadi di seluruh provinsi.

12. Produksi padi tahun 2015 (ATAP 2015) sebanyak 75,40 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 6,42 persen dibanding tahun 2014

Produksi padi tahun 2015 sebanyak 75,40 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami peningkatan sebanyak 4,55 juta ton (6,42 persen) dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi terjadi karena peningkatan luas panen seluas 0,32 juta hektar (2,31 persen) dan produktivitas sebesar 2,06 kuintal/hektar (4,01 persen). Dibandingkan tahun 2014, produksi jagung tahun 2015 naik sebanyak 0,60 juta ton (3,18 persen) yang disebabkan oleh kenaikan produktivitas sebesar 2,24 kuintal/hektar (4,52 persen). Meskipun, terjadi penurunan luas panen seluas 49,65 ribu hektar (1,29 persen). Produksi kedelai tahun 2015 meningkat sebanyak 8,19 ribu ton (0,86 persen) dibandingkan tahun 2014 yang disebabkan adanya peningkatan produktivitas sebesar 0,17 kuintal/hektar (1,10 persen). Meskipun, terjadi penurunan luas panen seluas 1,59 ribu hektar (0,26 persen).

13. Pertumbuhan produksi IBS naik 4,08 persen dan IMK naik 5,91 persen pada triwulan I-2016 (year-on-year)

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan I-2016 naik 4,07 persen dibanding triwulan I-2015 (*year-on-year*) dan mengalami penurunan 1,34 persen dari triwulan IV-2015 (*q-to-q*). Pertumbuhan bulanan produksi IBS pada Januari 2016 turun 1,12 dari Desember 2015, Februari 2016 naik 2,30 persen dari Januari 2016, dan Maret 2016 naik 1,13 persen dari Februari 2016. Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan I-2016 naik 5,91 persen dibanding triwulan I-2015 (*y-on-y*), dan mengalami kenaikan 0,76 persen dari triwulan IV-2015 (*q-to-q*).

14. Jumlah kunjungan wisman Mei 2016 mencapai 915,2 ribu kunjungan

Kunjungan wisman ke Indonesia selama Mei 2016 sebanyak 915,2 ribu kunjungan, yang terdiri atas 865,4 ribu kunjungan wisman melalui 19 pintu utama dan 49,8 ribu kunjungan wisman selain dari 19 pintu utama.

Sementara itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi pada Mei 2016 mencapai 55,46 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 1,74 poin dibandingkan TPK Mei 2015.

15. Jumlah penumpang angkutan udara domestik Mei 2016 mencapai 6,9 juta orang, naik 16,44 persen (*year-on-year*)

Pada Mei 2016, jumlah penumpang angkutan udara domestik mencapai 6,9 juta orang atau naik 16,44 persen (*year-on-year*), angkutan udara internasional naik 5,34 persen, penumpang pelayaran dalam negeri turun 9,75 persen, dan penumpang kereta api naik 10,01 persen. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, angkutan udara domestik naik 12,05 persen, angkutan udara internasional naik 4,61 persen, penumpang pelayaran dalam negeri naik 10,35 persen, dan penumpang kereta api naik 7,98 persen.

16. a. Jumlah penduduk miskin pada September 2015 sebanyak 28,51 juta orang (11,13 persen), menurun 0,08 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen)

Selama periode Maret 2015–September 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 0,03 juta orang (dari 10,65 juta orang pada Maret 2015 menjadi 10,62 juta orang pada September 2015). Hal yang sama juga terjadi di daerah perdesaan, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,05 juta orang (dari 17,94 juta orang pada Maret 2015 menjadi 17,89 juta orang pada September 2015).

b. *Gini Ratio* pada September 2015 sebesar 0,40, menurun sebesar 0,01 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2015 yang sebesar 0,41

Selama periode Maret 2015–September 2015 *Gini Ratio* menurun sebesar 0,01 poin dari 0,41 (Maret 2015) menjadi 0,40 (September 2015). Hal yang

sama terjadi di daerah perkotaan dimana *Gini Ratio* menurun dari 0,43 (Maret 2015) menjadi 0,42 (September 2015). Sementara *Gini Ratio* di daerah pedesaan relatif tidak berubah yaitu sebesar 0,33 baik pada Maret 2015 maupun September 2015.

17. Produksi cabai besar sebesar 1,075 juta ton, cabai rawit sebesar 0,800 juta ton dan bawang merah sebesar 1,234 juta ton

Produksi cabai besar segar dengan tangkai tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, terjadi kenaikan produksi sebesar 61,73 ribu ton (6,09 persen). Produksi cabai rawit segar dengan tangkai tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, terjadi kenaikan produksi sebesar 86,98 ribu ton (12,19 persen). Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, produksi meningkat sebesar 223,22 ribu ton (22,08 persen).

18. a. Biaya produksi per musim tanam per hektar padi sawah sebesar 12,7 juta dengan komponen terbesar upah pekerja dan jasa pertanian sebesar 48,23 persen

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai masing-masing adalah sebesar Rp12,7 juta; Rp7,8 juta; Rp9,1 juta; dan Rp9,1 juta. Komponen terbesar dari total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai adalah untuk upah pekerja dan jasa pertanian yang masing-masing adalah sebesar 48,23 persen (Rp6,1 juta); 62,36 persen (Rp4,9 juta); 44,93 persen (Rp4,1 juta); dan 44,82 persen (Rp4,1 juta) dari total biaya.

b. Biaya produksi usaha tanaman cabai merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp52,1 juta

Total biaya produksi usaha per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri untuk tanaman cabai merah Rp52,1 juta; tanaman cabai rawit Rp34,0 juta; tanaman bawang merah Rp67,2 juta; tanaman jeruk Rp5,4 juta. Persentase biaya produksi terbesar adalah upah pekerja, yaitu

untuk cabai merah sebesar 47,74 persen; cabai rawit sebesar 54,85 persen; dan tanaman jeruk sebesar 32,07 persen. Untuk bawang merah persentase biaya produksi terbesar adalah biaya untuk benih sebesar 38,58 persen.

c. Rata-rata biaya produksi kelapa sawit setahun per hektar mencapai Rp9,7 juta

Pengeluaran paling besar digunakan untuk tenaga kerja sebesar 31,71 persen. Sedangkan rata-rata biaya usaha perkebunan karet setahun per hektar mencapai Rp9,2 juta dengan pengeluaran paling besar digunakan untuk biaya tenaga kerja sebesar 57,09 persen. Pada komoditas tebu, rata-rata biaya produksi setahun per hektar mencapai Rp24,2 juta, sebagian besar digunakan untuk pengeluaran sewa lahan yang mencapai 32,37 persen dari total biaya produksi.

d. Biaya produksi sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun

Total biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen). Total biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen). Total biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen). Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen).

e. Biaya produksi per hektar budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta; Rp4,2 juta; dan Rp3,2 juta

Jumlah biaya per hektar budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta; Rp4,2 juta; dan Rp3,2 juta. Biaya terbesar untuk budidaya rumput laut adalah benih/bibit sebesar Rp3,0 juta (41,33 persen). Sedangkan biaya terbesar usaha bandeng dan udang windu

adalah upah pekerja, yaitu sebesar Rp965 ribu (23,21 persen) dan Rp796 ribu (24,73 persen).

Jumlah biaya per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor sebesar Rp4,1 juta dan menggunakan perahu motor tempel sebesar Rp436 ribu. Biaya terbesar yang dikeluarkan adalah upah/gaji pekerja masing-masing sebesar Rp1,7 juta (40,94 persen) dan Rp177 ribu (40,47 persen).

f. Biaya produksi terbesar usaha tanaman jati selama setahun yang lalu adalah upah pekerja, yaitu sebesar 63,99 persen

Pengeluaran terbesar usaha tanaman jati selama setahun yang lalu adalah upah pekerja, yaitu sebesar 63,99 persen. Upah pekerja usaha untuk tanaman mahoni sebesar 63,00 persen dan tanaman sengon sebesar 59,00 persen.

g. Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga

Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga. Sebesar 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan dan hanya 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah. Sebesar 37,35 persen rumah tangga di sekitar kawasan hutan melakukan pemungutan hasil hutan/menangkap satwa liar. Dari rumah tangga di sekitar kawasan hutan, sebesar 18,51 persen sumber pendapatannya berasal dari memungut hasil hutan/menangkap satwa liar.

19. Tipologi Wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014

Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Berdasarkan hasil Podes 2014, pada April 2014 tercatat 82.190 wilayah

administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa³, 8.412 kelurahan dan 69 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota.

Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaan infrastruktur:

- Terdapat 10.985 desa/kelurahan (13,37 persen) tidak ada SD (termasuk MI).
- Terdapat 275 kecamatan (3,89 persen) tidak ada SLTP.
- Terdapat 816 kecamatan (11,54 persen) tidak ada SLTA.
- Sebanyak 117 kecamatan (1,65 persen) tidak tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu).
- Sebanyak 1.495 kecamatan (21,13 persen) tidak ada pasar dengan bangunan.
- Sebanyak 12.659 desa/kelurahan (15,40 persen) tidak ada keluarga pengguna listrik PLN.
- Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19 persen) tidak ada penerangan di jalan utama desa.
- Sebanyak 12.636 desa/kelurahan (15,73 persen) dari 80.337 desa/kelurahan yang sarana transportasinya darat, ternyata kondisi jalannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.

Berdasarkan Podes 2014 teridentifikasi sebanyak 258 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain (desa/kelurahan terdepan), yaitu 62 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua.

³ Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat

Menurut Podes 2014, terdapat 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) yang berada di 77 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005⁴.

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit tertimbang dengan skala 0–100 yang dihitung untuk setiap desa. Semakin besar indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. IKG bervariasi antar desa dengan rentang antara 6,83 sampai 97,89.

20. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Mei 2016

a. Rupiah terdepresiasi 3,14 persen terhadap dolar Amerika

Rupiah terdepresiasi 3,14 persen terhadap dolar Amerika pada Mei 2016. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Amerika terjadi pada minggu keempat Mei 2016 yang mencapai Rp13.571,96 per dolar Amerika.

b. Rupiah terapresiasi 3,13 persen terhadap dolar Australia

Rupiah terapresiasi 3,13 persen terhadap dolar Australia pada Mei 2016. Level tertinggi rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Australia terjadi pada minggu ketiga Mei 2016 yang mencapai Rp9.727,93 per dolar Australia.

c. Rupiah terdepresiasi 3,31 persen terhadap yen Jepang

Rupiah terdepresiasi 3,31 persen terhadap yen Jepang pada Mei 2016. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap yen Jepang terjadi pada minggu keempat Mei 2016 yang mencapai Rp122,83 per yen Jepang.

⁴ Menurut PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional

d. Rupiah terdepresiasi 1,55 persen terhadap euro

Rupiah terdepresiasi 1,55 persen terhadap euro pada Mei 2016. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap euro terjadi pada minggu keempat Mei 2016 yang mencapai Rp15.153,11 per euro.

21. Marjin perdagangan dan pengangkutan beras 10,42 persen, cabai merah 25,33 persen, bawang merah 22,61 persen, jagung pipilan 31,90 persen, dan daging ayam ras 11,63 persen

Dari Survei Poldis 2015 didapat informasi bahwa rata-rata rasio MPP beras adalah sebesar beras 10,42 persen, cabai merah 25,33 persen, bawang merah 22,61 persen, jagung pipilan 31,90 persen, dan daging ayam ras 11,63 persen. Distribusi perdagangan beras, cabai merah, bawang merah, jagung pipilan, dan daging ayam ras dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan dua hingga sembilan fungsi kelembagaan usaha perdagangan. Alur distribusi perdagangan terpanjang cabai merah, bawang merah, dan jagung pipilan berada di Jawa Tengah, sedangkan beras dan daging ayam ras di DKI Jakarta. Sedangkan alur distribusi perdagangan terpendek beras, cabai merah dan jagung pipilan berada di Sulawesi Utara, bawang merah di Maluku Utara; dan daging ayam ras di Kalimantan Barat.

22. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2015 sebesar 3,59

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2015 sebesar 3,59 pada skala 0 sampai 5. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan capaian 2014 sebesar 3,61. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama yakni persepsi dan pengalaman. Indeks Persepsi cenderung meningkat dari kondisi 2013 ke 2015, sebaliknya pada Indeks Pengalaman cenderung menurun. Turunnya angka IPAK dipengaruhi menurunnya angka indeks pengalaman. Hal ini menggambarkan

bahwa masyarakat semakin idealis ‘membenci korupsi’ namun hal ini tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

23. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2015 Sebesar 69,55

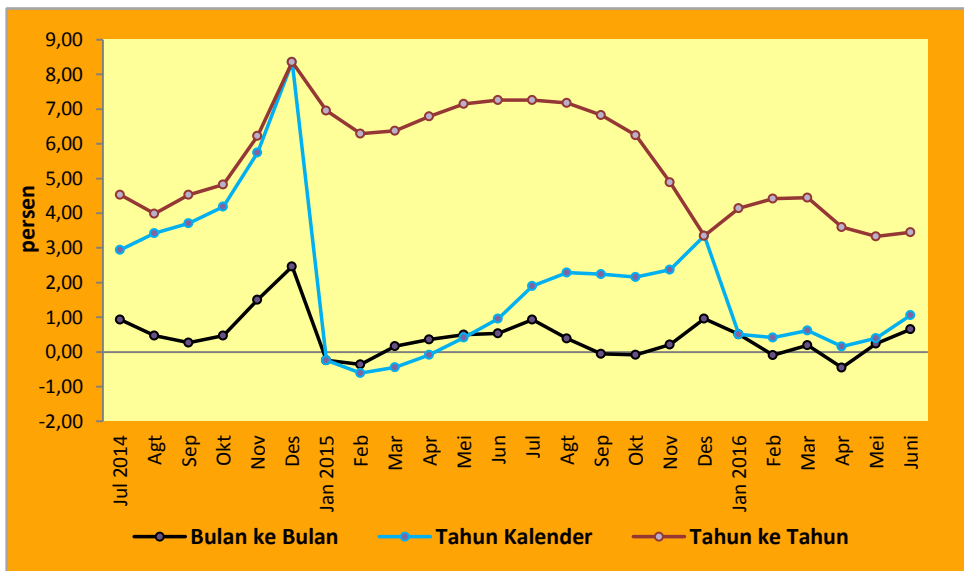
Pada tahun 2015, IPM Indonesia telah mencapai 69,55. Angka ini meningkat sebesar 0,65 poin atau tumbuh sebesar 0,94 persen dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2014. Hingga tahun 2015, pembangunan manusia di Indonesia masih berstatus “sedang”. Namun demikian, jika dilihat menurut provinsi, 8 provinsi telah mencapai status pembangunan manusia “tinggi” atau nilai IPM berada pada selang 70 hingga 80, yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (1,37%), Provinsi Jawa Timur (1,19%), dan Provinsi Sulawesi Barat (1,16%).

I. INFLASI JUNI 2016

1. Pada Juni 2016 terjadi inflasi sebesar 0,66 persen. Dari 82 kota, seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Pangkal Pinang sebesar 2,14 persen dengan IHK 127,07 dan terendah terjadi di Padang sebesar 0,10 persen dengan IHK 127,38. Inflasi Juni 2016 sebesar 0,66 persen lebih tinggi dibanding kondisi Juni 2015 yang mengalami inflasi sebesar 0,54 persen. Inflasi tahun kalender 2016 sebesar 1,06 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2016 terhadap Juni 2015) sebesar 3,45 persen.

Pada Juni 2016 terjadi inflasi sebesar 0,66 persen

Grafik 1.1
Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun
Gabungan 82 Kota, 2014–2016



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga, inflasi umum (*headline inflation*) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan 1,62 persen; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,58 persen; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,15 persen; sandang 0,70 persen; kesehatan 0,34 persen; pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,03 persen; dan transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,63 persen.

3. Dari inflasi 0,66 persen, andil tarif angkutan udara 0,08 persen; andil daging ayam ras 0,07 persen; andil ikan segar 0,06 persen; andil telur ayam ras dan gula pasir masing-masing 0,04 persen; andil kentang dan wortel masing-masing 0,03 persen; andil beras, bayam, apel, tarif listrik, emas perhiasan, dan tarif angkutan antar kota masing-masing sebesar 0,02 persen; serta andil ayam hidup, daging sapi, jengkol, kacang panjang, kangkung, ketimun, petai, jeruk, kelapa, nasi dengan lauk, rokok kretek, rokok kretek filter, upah tukang bukan mandor, dan mobil masing-masing 0,01 persen.
4. Inflasi Juni 2016 sebesar 0,66 persen, angka tersebut lebih tinggi dibanding kondisi Juni 2015 yang mengalami inflasi 0,54 persen. Inflasi tahun kalender 2016 sebesar 1,06 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2016 terhadap Juni 2015) sebesar 3,45 persen.
5. Menurut karakteristik perubahan harga, inflasi Juni 2016 sebesar 0,66 persen dipengaruhi oleh kenaikan indeks pada komponen inti (*core*) 0,33 persen; kenaikan indeks pada komponen yang harganya diatur pemerintah (*administered prices*) 0,72 persen; dan kenaikan indeks pada komponen bergejolak (*volatile*) 1,71 persen.
6. Inflasi Juni 2016 sebesar 0,66 persen berasal dari sumbangan inflasi komponen inti 0,19 persen, sumbangan inflasi komponen barang/jasa yang harganya diatur pemerintah 0,15 persen dan sumbangan inflasi komponen bergejolak 0,32 persen.
7. Inflasi komponen inti Juni 2016 sebesar 0,33 persen, tahun kalender 2016 sebesar 1,53 persen, dan tahun ke tahun (Juni 2016 terhadap Juni 2015) sebesar 3,49 persen.
8. Pada Mei 2016, Brazil menjadi negara yang mengalami inflasi tertinggi dibandingkan beberapa negara lain, yaitu 0,78 persen.

Tabel 1.1
Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota Juni 2016
Menurut Kelompok Pengeluaran
(2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2015	IHK Desember 2015	IHK Juni 2016	Inflasi Juni 2016 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2016 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	120,14	122,99	124,29	0,66	1,06	3,45	0,66
1. Bahan Makanan	127,48	133,01	137,38	1,62	3,29	7,77	0,34
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	122,76	126,47	130,32	0,58	3,04	6,16	0,11
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	118,07	119,41	119,46	0,15	0,04	1,18	0,04
4. Sandang	108,67	110,14	113,28	0,70	2,85	4,24	0,04
5. Kesehatan	114,06	116,90	119,07	0,34	1,86	4,39	0,01
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	111,13	114,75	115,12	0,03	0,32	3,59	0,00
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	123,75	125,32	122,53	0,63	-2,23	-0,99	0,12

¹⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2016 terhadap IHK bulan sebelumnya.

²⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2016 terhadap IHK Desember 2015.

³⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2016 terhadap IHK Juni 2015.

Tabel 1.2
Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi Juni 2016
Menurut Komponen Perubahan Harga
(2012=100)

Komponen	IHK Juni 2015	IHK Desember 2015	IHK Juni 2016	Inflasi Juni 2016 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2016 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	120,14	122,99	124,29	0,66	1,06	3,45	0,66
Inti	113,49	115,68	117,45	0,33	1,53	3,49	0,19
Harga Diatur Pemerintah	137,21	139,82	136,52	0,72	-2,36	-0,50	0,15
Bergejolak	128,43	134,20	138,86	1,71	3,47	8,12	0,32

Tabel 1.3
Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen)

Bulan	Tingkat Inflasi Nasional (bulan ke bulan)						Tingkat Inflasi Nasional (kalender)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari	0,89	0,76	1,03	1,07	-0,24	0,51	0,89	0,76	1,03	1,07	-0,24	0,51
Februari	0,13	0,05	0,75	0,26	-0,36	-0,09	1,03	0,81	1,79	1,33	-0,61	0,42
Maret	-0,32	0,07	0,63	0,08	0,17	0,19	0,70	0,88	2,43	1,41	-0,44	0,62
April	-0,31	0,21	-0,10	-0,02	0,36	-0,45	0,39	1,09	2,32	1,39	-0,08	0,16
Mei	0,12	0,07	-0,03	0,16	0,50	0,24	0,51	1,15	2,30	1,56	0,42	0,40
Juni	0,55	0,62	1,03	0,43	0,54	0,66	1,06	1,79	3,35	1,99	0,96	1,06
Juli	0,67	0,70	3,29	0,93	0,93		1,74	2,50	6,75	2,94	1,90	
Agustus	0,93	0,95	1,12	0,47	0,39		2,69	3,48	7,94	3,42	2,29	
September	0,27	0,01	-0,35	0,27	-0,05		2,97	3,49	7,57	3,71	2,24	
Oktober	-0,12	0,16	0,09	0,47	-0,08		2,85	3,66	7,66	4,19	2,16	
November	0,34	0,07	0,12	1,50	0,21		3,20	3,73	7,79	5,75	2,37	
Desember	0,57	0,54	0,55	2,46	0,96		3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	

Tabel 1.4
Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen)

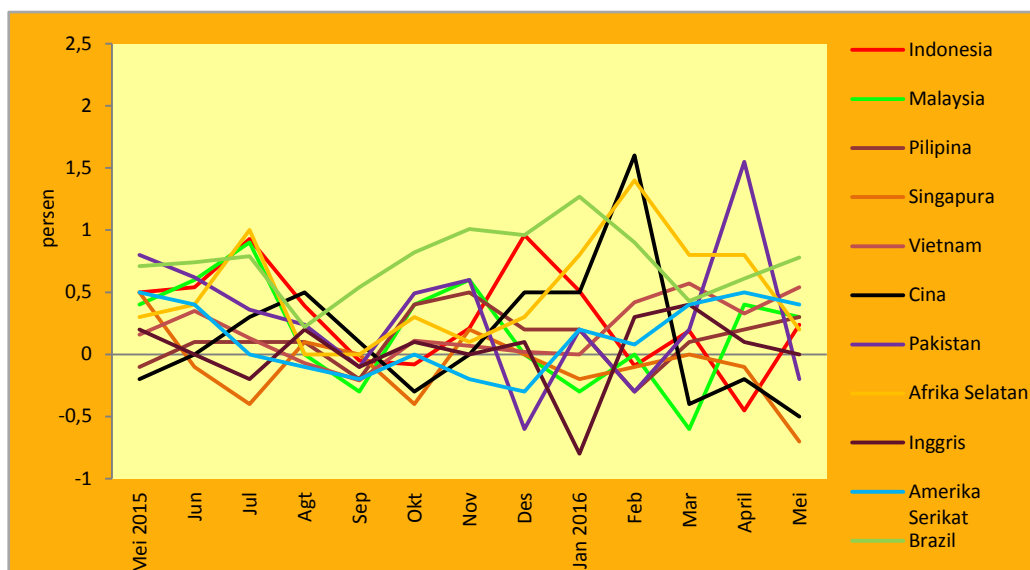
Bulan	2011:2010	2012:2011	2013:2012	2014:2013	2015:2014	2016:2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	7,02	3,65	4,57	8,22	6,96	4,14
Februari	6,84	3,56	5,31	7,75	6,29	4,42
Maret	6,65	3,97	5,90	7,32	6,38	4,45
April	6,16	4,50	5,57	7,25	6,79	3,60
Mei	5,98	4,45	5,47	7,32	7,15	3,33
Juni	5,54	4,53	5,90	6,70	7,26	3,45
Juli	4,61	4,56	8,61	4,53	7,26	
Agustus	4,79	4,58	8,79	3,99	7,18	
September	4,61	4,31	8,40	4,53	6,83	
Oktober	4,42	4,61	8,32	4,83	6,25	
November	4,15	4,32	8,37	6,23	4,89	
Desember	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	

Tabel 1.5
Tingkat Inflasi Beberapa Negara, April–Mei 2016 (persen)

Negara	Bulan ke Bulan		Tahun ke Tahun (<i>Y-on-Y</i>)	
	April 2016	Mei 2016	April 2016	Mei 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Indonesia	-0,45	0,24	3,60	3,33
2. Malaysia	0,40	0,30	2,10	2,00
3. Pilipina	0,20	0,30	1,10	1,60
4. Singapura	-0,10	-0,70	-0,50	-1,60
5. Vietnam	0,33	0,54	1,89	2,28
6. Cina	-0,20	-0,50	2,30	2,00
7. Pakistan	1,55	-0,20	4,17	3,20
8. Afrika Selatan	0,80	0,20	6,20	6,10
9. Inggris	0,10	0,00	0,30	0,30
10. Amerika Serikat	0,50	0,40	1,10	1,00
11. Brazil	0,61	0,78	9,28	9,32

Sumber: <http://www.stats.gov.cn>, <http://www.statistics.gov.my>, <http://www.statpak.gov.pk>,
<http://www.census.gov.ph>, <http://www.singstat.gov.sg>, <http://www.gso.gov.vn>,
<http://www.bls.gov>, <http://www.ibge.gov.br>, <http://www.statistics.gov.uk>,
<http://www.statssa.gov.za>, dan www.bloomberg.com

Grafik 1.2
Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2015–2016

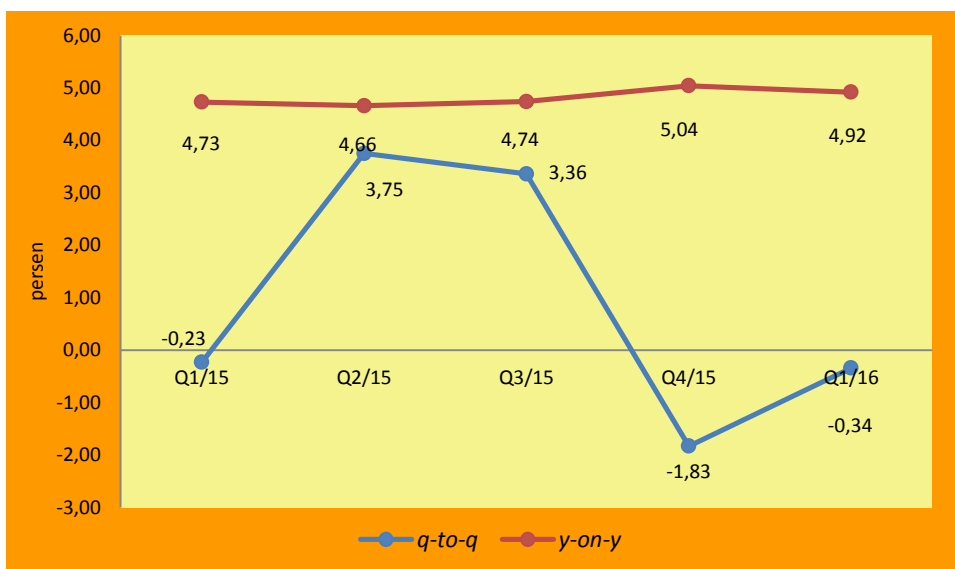


II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I-2016

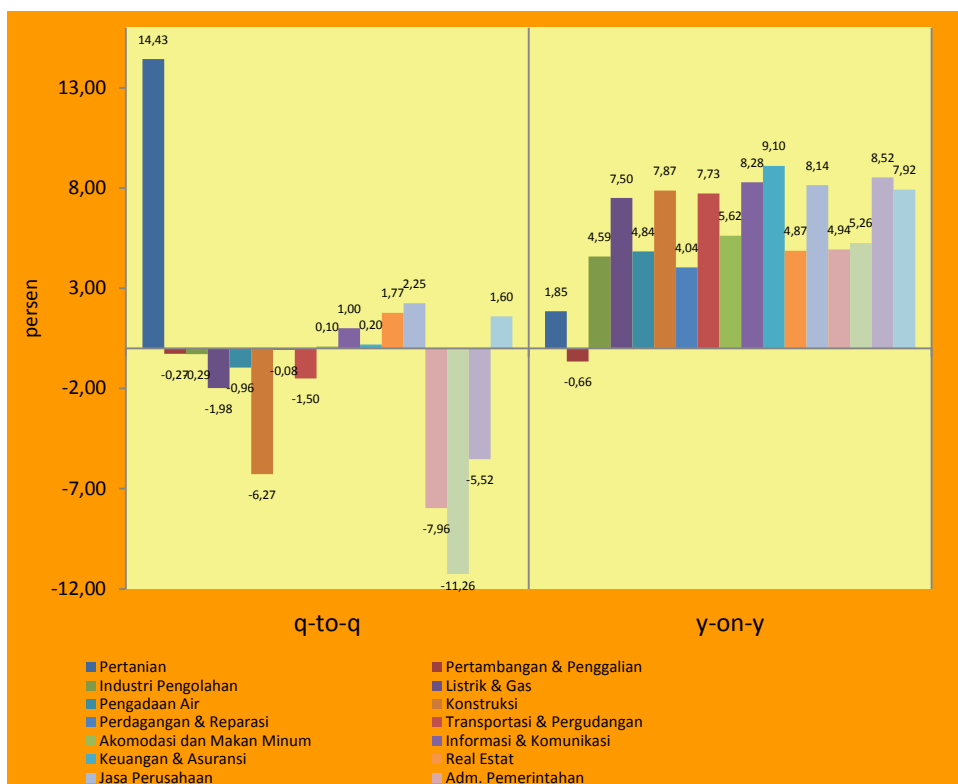
1. Ekonomi Indonesia triwulan I-2016 dibandingkan triwulan I-2015 (*y-on-y*) tumbuh 4,92 persen dan dibandingkan triwulan IV-2015 (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 0,34 persen.
2. Dari sisi produksi pertumbuhan triwulan I-2016 (*y-on-y*) terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 0,66 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 9,10 persen.
3. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi diwarnai oleh faktor musiman Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan khususnya komoditas padi yang mulai memasuki panen raya. Hal ini menyebabkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh 14,43 persen. Di samping itu pertumbuhan juga terjadi pada beberapa lapangan usaha lainnya seperti Jasa Perusahaan, Real Estat, Jasa Lainnya, Informasi dan Komunikasi tumbuh, Jasa Keuangan, dan Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Namun pertumbuhan lapangan usaha tersebut tidak dapat menahan laju penurunan pada beberapa lapangan usaha lainnya.

**Triwulan I-2016,
perekonomian Indonesia
tumbuh 4,92 persen**

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2015 s.d Triwulan I-2016 (persen)



Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha
Triwulan I-2016 (persen)



Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2016 Terhadap Triw IV-2015 (q-to-q)	Triw I-2016 Terhadap Triw I-2015 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2016 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,43	1,85	0,24
2. Pertambangan dan Penggalian	-0,27	-0,66	-0,06
3. Industri Pengolahan	-0,29	4,59	1,00
4. Pengadaan Listrik dan Gas	-1,98	7,50	0,08
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,96	4,84	0,00
6. Konstruksi	-6,27	7,87	0,75
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,08	4,04	0,55
8. Transportasi dan Pergudangan	-1,50	7,73	0,30

Lapangan Usaha	Triw I-2016 Terhadap Triw IV-2015 (<i>q-to-q</i>)	Triw I-2016 Terhadap Triw I-2015 (<i>y-on-y</i>)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2016 (<i>y-on-y</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,10	5,62	0,17
10. Informasi dan Komunikasi	1,00	8,28	0,39
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,20	9,10	0,36
12. Real Estat	1,77	4,87	0,15
13. Jasa Perusahaan	2,25	8,14	0,14
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-7,96	4,94	0,17
15. Jasa Pendidikan	-11,26	5,26	0,15
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5,52	8,52	0,09
17. Jasa lainnya	1,60	7,92	0,13
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	0,20	4,74	4,61
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	-15,81	11,53	0,31
PRODUK DOMESTIK BRUTO	-0,34	4,92	4,92

4. Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2016 mencapai Rp2.947,6 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.262,6 triliun.

Tabel 2.2
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw I-2015	Triw IV-2015	Triw I-2016	Triw I-2015	Triw IV-2015	Triw I-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	375,0	338,3	399,6	282,7	251,6	287,9
2. Pertambangan dan Penggalian	226,0	206,9	200,7	190,3	189,6	189,0
3. Industri Pengolahan	577,8	616,8	613	468,1	491,0	489,5
4. Pengadaan Listrik dan Gas	29,7	35,3	33,8	22,7	24,9	24,4
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,1	2,2	2,2	1,8	1,9	1,9
6. Konstruksi	273,1	332,5	321,8	206,8	237,9	223,0

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw I-2015	Triw IV-2015	Triw I-2016	Triw I-2015	Triw IV-2015	Triw I-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	364,8	392,1	394,2	291,6	303,6	303,4
8. Transportasi dan Pergudangan	131,8	154,5	149,9	82,9	90,7	89,3
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,7	88,2	88,5	65,5	69,1	69,2
10. Informasi dan Komunikasi	97,9	105,4	107,3	102,0	109,4	110,5
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	110,9	124,1	125,1	84,2	91,7	91,9
12. Real Estat	80,3	84,4	86,3	66,1	68,2	69,4
13. Jasa Perusahaan	45,5	49,6	51,4	36,1	38,1	39,0
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	99,7	123,6	112,4	74,4	84,8	78,0
15. Jasa Pendidikan	84,4	108,2	94,6	65,4	77,6	68,9
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28,0	33,9	31,7	23,0	26,4	25,0
17. Jasa lainnya	45,5	49,8	51,1	35,1	37,3	37,9
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	2 655,2	2 845,8	2 863,6	2 098,7	2 193,8	2 198,2
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	73,1	99,2	84,0	57,8	76,6	64,4
PRODUK DOMESTIK BRUTO	2 728,3	2 945,0	2 947,6	2 156,5	2 270,4	2 262,6

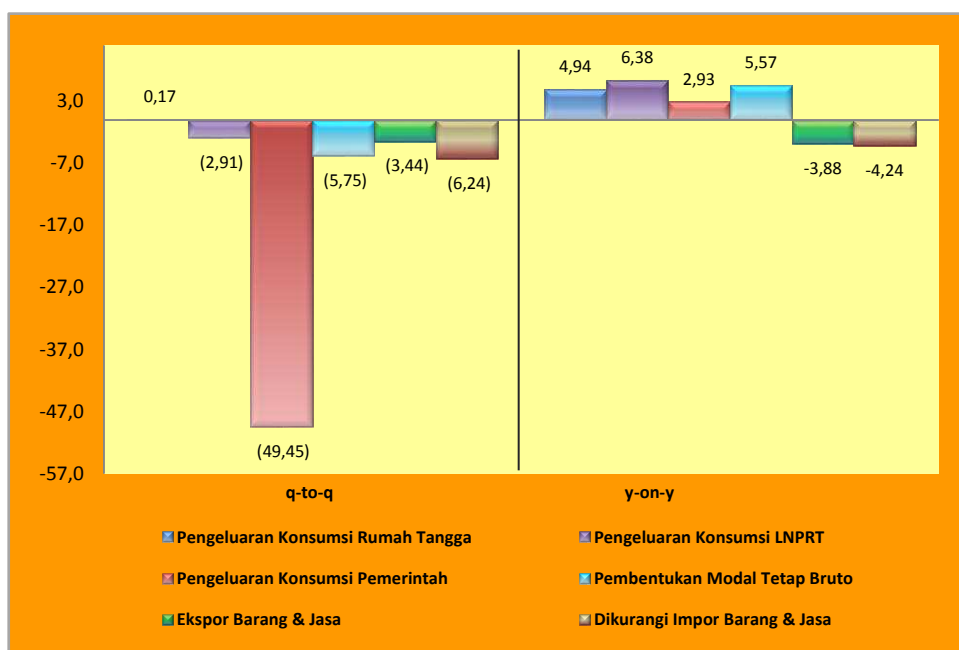
5. Struktur ekonomi Indonesia triwulan I-2016 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan; diikuti Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor dengan peran masing-masing sebesar 20,80 persen, 13,56 persen dan 13,37 persen. Selanjutnya Konstruksi; dan Pertambangan dan Penggalian memiliki peran masing-masing sebesar 10,92 persen dan 6,81 persen.

Tabel 2.3
Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2015, Triwulan IV-2015
dan Triwulan I-2016 (persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2015	Triw IV-2015	Triw I-2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,74	11,49	13,56
2. Pertambangan dan Penggalian	8,28	7,02	6,81
3. Industri Pengolahan	21,18	20,95	20,80
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1,09	1,20	1,15
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07
6. Konstruksi	10,01	11,29	10,92
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,37	13,32	13,37
8. Transportasi dan Pergudangan	4,83	5,25	5,08
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,03	3,00	3,00
10. Informasi dan Komunikasi	3,59	3,58	3,64
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,07	4,21	4,25
12. Real Estat	2,94	2,86	2,93
13. Jasa Perusahaan	1,67	1,68	1,74
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,66	4,20	3,81
15. Jasa Pendidikan	3,09	3,67	3,21
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,15	1,08
17. Jasa lainnya	1,67	1,69	1,73
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	97,32	96,63	97,15
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	2,68	3,37	2,85
PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00

6. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2016 dibandingkan dengan triwulan I-2015 (*y-o-y*) terutama terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 6,38 persen, di ikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 5,57 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,94 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 2,93 persen. Sedangkan Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh minus 3,88 persen, dan Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh minus 4,24 persen dibanding triwulan yang sama tahun 2015.

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan I-2016 (persen)



7. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran hanya didukung oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang meningkat sebesar 0,17 persen (*q-to-q*). Komponen lainnya tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran (persen)

Jenis Pengeluaran	Triw I-2016 Terhadap Triw IV-2015	Triw I-2016 Terhadap Triw I-2015	Sumber Pertumbuhan Triw I-2016 (<i>y-on-y</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,17	4,94	2,73
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,91	6,38	0,07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-49,45	2,93	0,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-5,75	5,57	1,79
5. Perubahan Inventori	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-3,44	-3,88	-0,90
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang dan Jasa	-6,24	-4,24	-0,92
PDB	-0,34	4,92	4,92

Tabel 2.5
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran
(triliun rupiah)

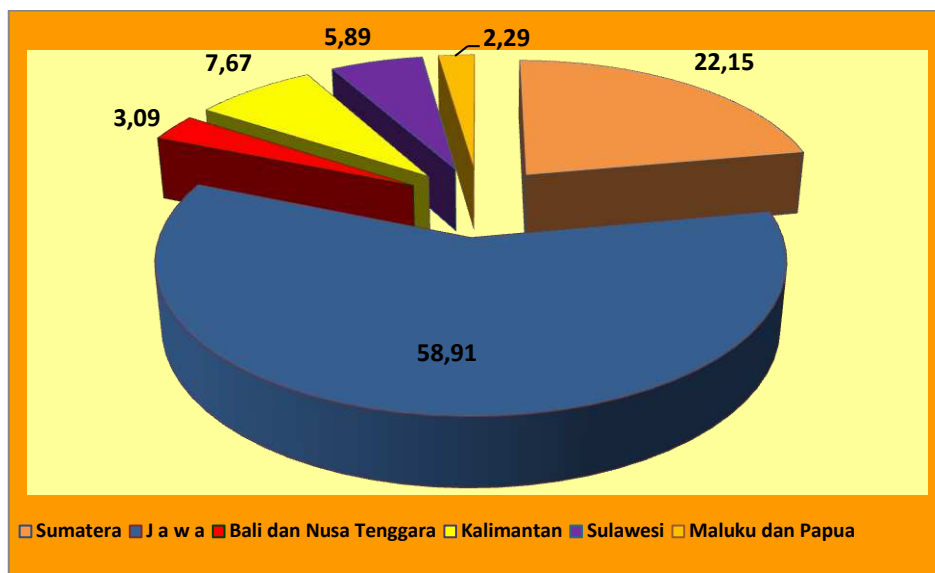
Jenis Pengeluaran	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw I-2015	Triw IV-2015	Triw I-2016	Triw I-2015	Triw IV-2015	Triw I-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1 547,7	1 668,0	1 676,0	1 188,7	1 245,4	1 247,5
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	30,7	34,9	34,1	23,6	25,9	25,1
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	180,4	398,4	200,3	133,9	272,6	137,8
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	896,2	1 030,0	977,3	691,6	774,6	730,1
5. Perubahan Inventori	77,8	-87,4	80,6	55,1	-57,6	53,1
6. Ekspor Barang dan Jasa	599,3	593,9	553,6	498,5	496,2	479,1
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang dan Jasa	584,6	612,7	553,2	468,6	478,5	448,7
8. Diskrepansi Statistik	-19,1	-80,0	-21,1	33,7	-8,2	38,6
PDB	2 728,3	2 945,0	2 947,6	2 156,5	2 270,4	2 262,6

8. Struktur perekonomian Indonesia dari sisi pengeluaran pada triwulan I-2016 didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 56,86 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah memberikan kontribusi masing-masing sebesar 33,16 persen, 18,78 persen, dan 6,80 persen.

Tabel 2.6
Struktur PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan I-2015, Triwulan IV-2015 dan Triwulan I-2016 (persen)

Jenis Pengeluaran	Triw I-2015	Triw IV-2015	Triw I-2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56,73	56,64	56,86
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,12	1,18	1,16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,61	13,53	6,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	32,85	34,97	33,16
5. Perubahan Inventori	2,85	-2,97	2,73
6. Ekspor Barang dan Jasa	21,97	20,16	18,78
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang dan Jasa	21,43	20,80	18,77
8. Diskrepansi Statistik	-0,70	-2,72	-0,72
PDB	100,00	100,00	100,00

Grafik 2.4
Peranan Wilayah/Pulau Dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan I-2016 (persen)



9. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan I-2016 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,91 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,15 persen, Pulau Kalimantan 7,67 persen, dan Pulau Sulawesi 5,89 persen, dan sisanya 5,38 persen di pulau-pulau lainnya.

Tabel 2.7
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)

Wilayah/Pulau (1)	2014 (2)	2015 (3)	2015		Triw I- 2016 (6)
			Triw I (4)	Triw IV (5)	
1. Sumatera	23,01	22,21	22,29	22,24	22,15
2. Jawa	57,39	58,29	58,36	58,20	58,91
3. Bali & Nusa Tenggara	2,87	3,06	2,98	3,10	3,09
4. Kalimantan	8,76	8,15	8,33	8,00	7,67
5. Sulawesi	5,65	5,92	5,72	6,01	5,89
6. Maluku dan Papua	2,32	2,37	2,32	2,45	2,29
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: atas dasar harga berlaku

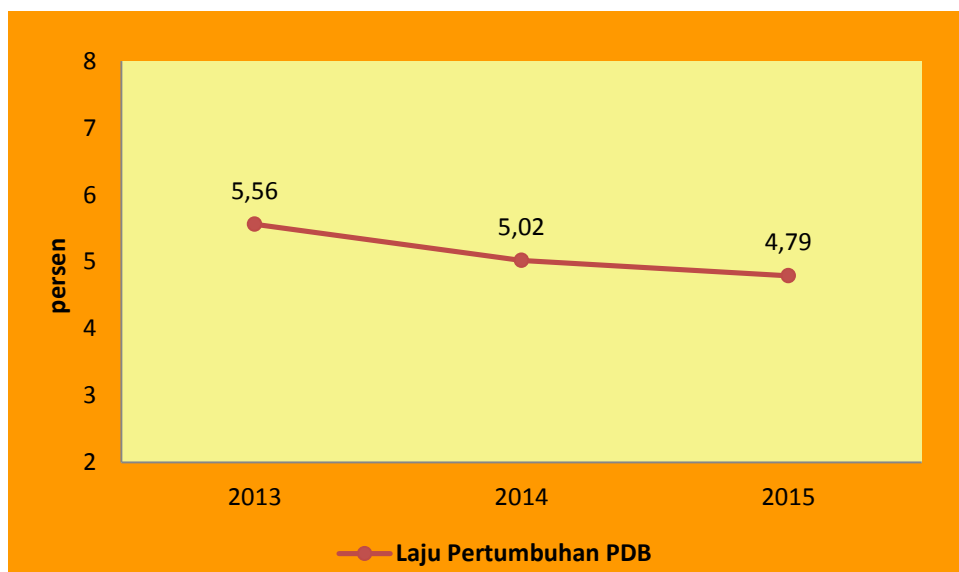
10. Pertumbuhan ekonomi secara spasial pada triwulan I-2016 menurut kelompok provinsi, dipengaruhi oleh empat provinsi penyumbang terbesar dengan total kontribusi sebesar 53,90 persen. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan pertumbuhan *y-on-y* masing-masing sebesar 5,62 persen; 5,34 persen; 5,08 persen dan 5,12 persen.

Tabel 2.8
Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan I-2016 (persen)

Provinsi	Pertumbuhan			Kontribusi	
	<i>q-to-q</i>	<i>y-on-y</i>	<i>c-to-c</i>	Terhadap Pulau	Terhadap Total 33 Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	-0,41	4,18	4,18	100,00	22,15
01. Aceh	-0,99	3,66	3,66	4,95	1,10
02. Sumatra Utara	1,42	5,02	5,02	22,67	5,02
03. Sumatra Barat	-0,56	5,48	5,48	6,97	1,54
04. Riau	-5,83	2,34	2,34	24,33	5,39
05. Jambi	0,56	3,42	3,42	6,05	1,34
06. Sumatra Selatan	1,04	4,94	4,94	12,72	2,82
07. Bengkulu	0,33	4,99	4,99	2,00	0,44
08. Lampung	6,51	5,05	5,05	10,00	2,21
09. Kep. Bangka Belitung	-1,39	3,30	3,30	2,33	0,52
10. Kepulauan Riau	-0,38	4,58	4,58	7,97	1,77
Jawa	0,21	5,31	5,31	100,00	58,91
11. DKI Jakarta	-0,61	5,62	5,62	29,27	17,24
12. Jawa Barat	0,31	5,08	5,08	22,30	13,13
13. Jawa Tengah	2,08	5,12	5,12	14,89	8,77
14. DI Yogyakarta	-0,14	5,04	5,04	1,50	0,88
15. Jawa Timur	0,09	5,34	5,34	25,06	14,76
16. Banten	-0,30	5,15	5,15	6,98	4,11
Bali dan Nusa Tenggara	-1,01	7,09	7,09	100,00	3,09
17. Bali	-1,46	6,04	6,04	49,70	1,54
18. Nusa Tenggara Barat	2,24	9,97	9,97	29,14	0,90
19. Nusa Tenggara Timur	-4,88	5,06	5,06	21,16	0,65
Kalimantan	-3,09	1,08	1,08	100,00	7,67
20. Kalimantan Barat	-0,73	5,93	5,93	16,92	1,30
21. Kalimantan Tengah	2,22	5,17	5,17	11,55	0,89
22. Kalimantan Selatan	-4,92	3,97	3,97	14,56	1,12
23. Kalimantan Timur	-4,09	-1,29	-1,29	56,98	4,37
Sulawesi	-2,77	7,52	7,52	100,00	5,89
24. Sulawesi Utara	-11,92	5,96	5,96	12,77	0,75
25. Sulawesi Tengah	-1,62	11,81	11,81	16,17	0,95
26. Sulawesi Selatan	0,76	7,41	7,41	49,62	2,92
27. Sulawesi Tenggara	-6,53	5,21	5,21	12,46	0,73
28. Gorontalo	3,25	6,61	6,61	4,34	0,26
29. Sulawesi Barat	-7,31	6,14	6,14	4,63	0,27
Maluku dan Papua	-9,53	1,24	1,24	100,00	2,29
30. Maluku	-2,79	5,46	5,46	12,77	0,29
31. Maluku Utara	-0,86	5,09	5,09	10,04	0,23
32. Papua Barat	-1,95	5,52	5,52	23,08	0,53
33. Papua	-15,08	-2,03	-2,03	54,11	1,24

11. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2015 meningkat sebesar 4,79 persen terjadi pada hampir semua lapangan usaha ekonomi, kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 5,08 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06 persen dan diikuti oleh Jasa Keuangan dan Asuransi serta Jasa Lainnya yang masing-masing tumbuh sebesar 8,53 persen dan 8,08 persen.

Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2013–2015 (persen)



12. Tahun 2015, Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian sebesar 20,84 persen diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,52 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,29 persen.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2015 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ¹			Distribusi ²		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,20	4,24	4,02	13,36	13,34	13,52
B Pertambangan dan Penggalian	2,53	0,72	-5,08	11,01	9,87	7,62
C Industri Pengolahan	4,37	4,61	4,25	21,03	21,01	20,84
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,23	5,57	1,21	1,03	1,08	1,14
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,32	5,87	7,17	0,08	0,07	0,07
F Konstruksi	6,11	6,97	6,65	9,49	9,86	10,34
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,81	5,16	2,47	13,21	13,44	13,29
H Transportasi dan Pergudangan	6,97	7,36	6,68	3,93	4,42	5,02
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,80	5,77	4,36	3,03	3,04	2,96
J Informasi dan Komunikasi	10,39	10,10	10,06	3,57	3,50	3,52
K Jasa Keuangan dan Asuransi	8,76	4,68	8,53	3,88	3,87	4,03
L Real Estat	6,54	5,00	4,82	2,77	2,79	2,86
M,N Jasa Perusahaan	7,91	9,81	7,69	1,52	1,57	1,65
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,56	2,38	4,75	3,90	3,83	3,91
P Jasa Pendidikan	7,44	5,55	7,45	3,22	3,24	3,37
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96	7,96	7,10	1,01	1,03	1,07
R,S,T,U Jasa Lainnya	6,40	8,93	8,08	1,47	1,55	1,65
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	5,20	5,02	4,10	97,51	97,51	96,86
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	21,80	5,13	31,98	2,49	2,49	3,14
PRODUK DOMESTIK BRUTO	5,56	5,02	4,79	100,00	100,00	100,00

¹⁾ Atas dasar harga konstan 2010

²⁾ Atas dasar harga berlaku

13. Besaran PDB Indonesia pada tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 11.540,8 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2010) mencapai Rp 8.976,9 triliun.

Tabel 2.10
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013–2015 (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 275,0	1 409,7	1 560,4	1 083,1	1 129,1	1 174,5
B Pertambangan dan Penggalian	1 050,7	1 042,9	879,4	791,1	796,7	756,2
C Industri Pengolahan	2 007,4	2 219,4	2 405,4	1 772,0	1 853,7	1 932,5
D Pengadaan Listrik dan Gas	98,7	114,6	131,3	88,8	93,8	94,9
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,2	7,9	8,6	6,5	6,9	7,4
F Konstruksi	906,0	1 041,9	1 193,3	772,7	826,6	881,6
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1 261,1	1 420,1	1 534,1	1 119,3	1 177,1	1 206,1
H Transportasi dan Pergudangan	375,3	467,0	579,0	304,5	326,9	348,8
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	289,5	321,1	341,8	243,7	257,8	269,1
J Informasi dan Komunikasi	341,0	369,4	406,9	349,2	384,4	423,0
K Jasa Keuangan dan Asuransi	370,2	408,4	464,7	305,5	319,8	347,1
L Real Estat	264,3	294,6	329,8	244,2	256,4	268,8
M,N Jasa Perusahaan	144,6	166,0	190,3	125,5	137,8	148,4
O Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	372,2	404,6	450,7	289,5	296,3	310,4
P Jasa Pendidikan	307,9	342,1	388,7	250,0	263,9	283,5
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96,9	109,1	123,4	84,6	91,4	97,8
R,S,T,U Jasa Lainnya	140,3	163,5	190,5	123,1	134,1	144,9
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	9.308,3	10 302,3	11 178,3	7 953,3	8 352,7	8 695,0
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	237,8	263,5	362,5	203,2	213,6	281,9
PRODUK DOMESTIK BRUTO	9.546,1	10 565,8	11 540,8	8 156,5	8 566,3	8 976,9

14. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,79 persen ditopang oleh hampir semua Komponen, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang mengalami kontraksi sebesar 1,97 persen dan 0,63 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 5,38 persen, dan diikuti oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, masing-masing tumbuh sebesar 5,07 persen, dan 4,96 persen.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2015 (persen)

Jenis Pengeluaran	Laju Pertumbuhan ¹			Distribusi ²		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,43	5,16	4,96	55,74	55,99	55,92
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,18	12,19	-0,63	1,09	1,18	1,13
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,75	1,16	5,38	9,52	9,43	9,75
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	5,01	4,57	5,07	31,97	32,58	33,19
5 Perubahan Inventori	-	-	-	1,87	1,99	1,38
6 Ekspor Barang dan Jasa	4,17	1,00	-1,97	23,92	23,63	21,09
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1,86	2,19	-5,84	24,71	24,42	20,85
PDB	5,56	5,02	4,79	100,00	100,00	100,00

¹⁾ Atas dasar harga konstan 2010

²⁾ Atas dasar harga berlaku

15. Tahun 2015, Komponen Konsumsi Rumah Tangga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian sebesar 55,92 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 33,19 persen, Ekspor Barang dan Jasa sebesar 21,09 persen, Impor Barang dan Jasa sebesar 20,85 persen, Konsumsi Pemerintah sebesar 9,75 persen, dan Komponen Konsumsi LNPRT sebesar 1,13 persen.

Tabel 2.12
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2015 (triliun rupiah)

Jenis Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 321,1	5 915,7	6 453,2	4 423,4	4 651,5	4 882,3
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	103,9	124,2	130,9	88,6	99,4	98,8
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	908,6	996,2	1 125,5	727,8	736,3	775,9
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3 051,5	3 442,0	3 830,0	2 654,4	2 775,7	2 916,6
5 Perubahan Inventori	178,1	210,4	158,8	124,5	156,7	112,8
6 Ekspor Barang dan Jasa	2 283,8	2 497,1	2 434,2	2 026,1	2 046,3	2 005,9
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2 359,2	2 580,5	2 405,8	1 945,9	1 988,5	1 872,4
Diskrepani Statistik	58,4	-39,4	-186,0	57,6	88,9	56,9
PDB	9.546,1	10 565,8	11 540,8	8 156,5	8 566,3	8 976,9

16. Dalam kurun waktu 2010-2015, PDB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp28,8 juta (tahun 2010), sebesar Rp32,4 juta (tahun 2011), sebesar Rp35,1 juta (tahun 2012), sebesar Rp38,4 juta (tahun 2013), sebesar Rp41,9 juta (tahun 2014), dan sebesar Rp45,2 juta (tahun 2015).

Tabel 2.13
PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2010–2015

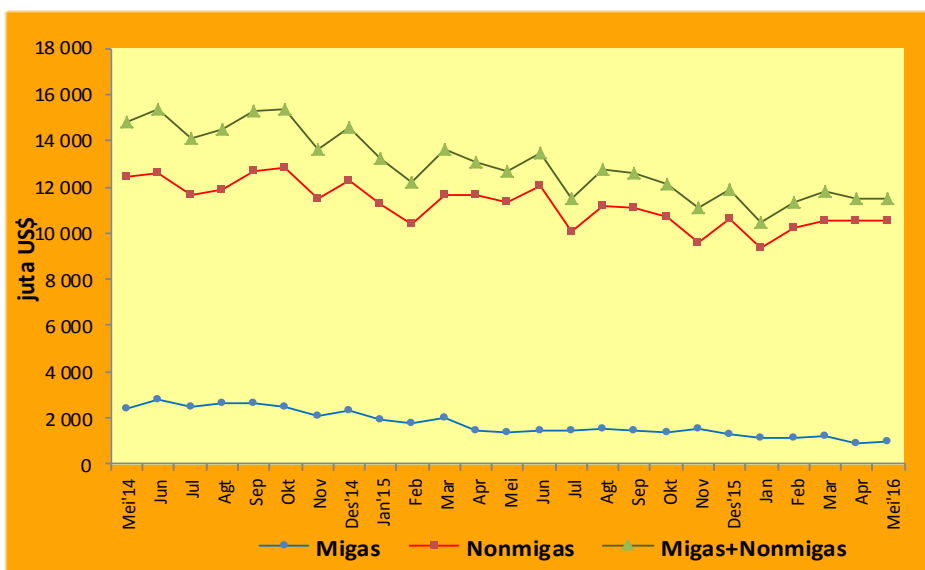
Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
PDB Per Kapita						
Atas Dasar Harga Berlaku						
a. Nilai (juta rupiah)	28,8	32,4	35,1	38,4	41,9	45,2
b. Indeks Peningkatan (persen)	-	12,46	8,47	9,29	9,21	7,82
c. Nilai (US\$)	3 171,8	3 691,9	3 740,9	3 666,8	3 530,6	3 377,1

III. EKSPOR MEI 2016

1. Nilai ekspor Indonesia Mei 2016 mencapai US\$11,51 miliar, atau naik sebesar 0,31 persen dibanding ekspor April 2016. Sementara dibanding Mei 2015, ekspor turun sebesar 9,75 persen.

Nilai ekspor Mei 2016 mencapai US\$11,51 miliar, naik 0,31 persen

Grafik 3.1
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB)
Mei 2014–Mei 2016



2. Ekspor nonmigas Mei 2016 mencapai US\$10,55 miliar, turun 0,29 persen dibanding ekspor nonmigas April 2016, demikian juga turun 7,12 persen dibanding ekspor Mei 2015.
3. Secara kumulatif nilai ekspor Januari–Mei 2016 mencapai US\$56,59 miliar atau turun 12,82 persen dibanding ekspor periode yang sama tahun 2015, demikian juga ekspor nonmigas mencapai US\$51,28 miliar atau turun 9,01 persen.
4. Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Mei 2016 terhadap April 2016 terjadi pada benda-benda dari besi dan baja sebesar US\$74,2 juta (62,59 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar US\$87,0 juta (17,56 persen).

5. Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat Mei 2016 mencapai angka terbesar, yaitu US\$1,28 miliar, disusul Jepang US\$1,00 miliar dan Tiongkok US\$0,98 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 30,95 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (27 negara) sebesar US\$1,20 miliar.
6. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Mei 2016 turun sebesar 5,35 persen dibanding ekspor hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2015, dan ekspor hasil tambang dan lainnya turun 26,91 persen, sementara ekspor hasil pertanian turun 19,25 persen.
7. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada periode Januari–Mei 2016 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US\$10,25 miliar (18,11 persen), diikuti Jawa Timur sebesar US\$8,17 miliar (14,44 persen) dan Kalimantan Timur sebesar US\$5,49 miliar (9,71 persen).

Tabel 3.1
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ($\Delta\%$)

Uraian	2015		2016			Δ (%)			Peran (%) Jan–Mei 2016
	Mei	Jan–Mei	April	Mei	Jan–Mei	y-on-y	m-on-m	y-on-y Jan–Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	12 754,7	64 911,0	11 475,9	11 511,0	56 589,5	-9,75	0,31	-12,82	100,00
Migas	1 392,8	8 552,2	891,8	957,9	5 310,3	-31,22	7,42	-37,91	9,38
Industri pengolahan hasil minyak	147,9	960,2	73,9	61,2	338,6	-58,61	-17,16	-64,74	0,60
Pengadaan Gas	5,9	8,7	0,1	2,6	5,3	-55,29	4 656,58	-39,32	0,01
Pertambangan	1 239,0	7 583,3	817,8	894,1	4 966,4	-27,84	9,33	-34,51	8,77
- Minyak Mentah	537,5	2 863,7	331,7	432,0	2 166,6	-19,63	30,22	-24,34	3,83
- Gas	701,5	4 719,6	486,1	462,1	2 799,8	-34,12	-4,93	-40,68	4,94
Nonmigas	11 361,9	56 358,8	10 584,1	10 553,1	51 279,2	-7,12	-0,29	-9,01	90,62
Pertanian	264,6	1 397,0	212,8	219,3	1 128,1	-17,11	3,08	-19,25	1,99
Industri Pengolahan	9 203,7	46 277,0	9 205,5	9 106,1	43 803,2	-1,06	-1,08	-5,35	77,41
Pertambangan dan Lainnya	1 893,6	8 684,8	1 165,8	1 227,7	6 347,9	-35,17	5,30	-26,91	11,22

Tabel 3.2
Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$)
Triwulanan 2015–2016

Uraian	2015				2016	Perubahan Triwulan (%)				
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	II'15	III'15	IV'15	I'16	I'16
						thd	thd	thd	thd	thd
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	I'15	II'15	III'15	IV'15	I'15
Total Ekspor	39 051,7	39 373,4	36 780,2	35 161,0	33 602,7	0,82	-6,59	-4,40	-4,43	-13,95
Migas	5 701,2	4 290,8	4 406,3	4 176,0	3 460,6	-24,74	2,69	-5,22	-17,13	-39,30
Industri pengolahan hasil minyak	607,5	510,8	375,3	260,5	203,5	-15,93	-26,51	-30,59	-21,88	-66,50
Pengadaan Gas	1,7	7,3	1,2	2,0	2,6	329,33	-83,92	73,96	26,93	52,42
Pertambangan	5 092,0	3 772,7	4 029,8	3 913,5	3 254,5	-25,91	6,81	-2,89	-16,84	-36,09
-Minyak Mentah	1 859,7	1 577,4	1 638,8	1 403,5	1 402,9	-15,18	3,89	-14,35	-0,04	-24,56
-Gas	3 232,3	2 195,3	2 391,0	2 510,0	1 851,6	-32,08	8,91	4,98	-26,23	-42,72
Nonmigas	33 350,5	35 082,6	32 373,9	30 985,0	30 142,1	5,19	-7,72	-4,29	-2,72	-9,62
Pertanian	842,7	867,7	1 090,7	925,4	696,1	2,96	25,70	-15,16	-24,78	-17,40
Industri Pengolahan	27 315,5	29 082,1	26 334,7	25 871,2	25 491,6	6,47	-9,45	-1,76	-1,47	-6,68
Pertambangan dan Lainnya	5 192,3	5 132,8	4 948,5	4 188,4	3 954,4	-1,15	-3,59	-15,36	-5,59	-23,84

Tabel 3.3
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya (Δ)

Golongan Barang (HS)	April 2016	Mei 2016	Δ	Δ%	Januari-Mei			
					2015	2016	Δ%	Peran (%) 2016
					(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Lemak dan minyak hewan/nabati (15)	1 406,4	1 358,9	-47,5	-3,38	7 955,7	6 630,8	-16,65	12,93
2. Perhiasan/permata (71)	616,0	683,7	67,7	10,99	2 983,0	3 417,4	14,56	6,66
3. Mesin/peralatan listrik (85)	670,1	641,0	-29,1	-4,34	3 562,0	3 296,9	-7,44	6,43
4. Mesin-mesin/pesawat mekanik (84)	495,3	408,3	-87,0	-17,56	2 140,3	2 051,6	-4,14	4,00
5. Berbagai produk kimia (38)	289,5	261,6	-27,9	-9,60	1 143,3	1 240,8	8,53	2,42
6. Bijih, kerak, dan abu logam (26)	139,1	192,3	53,2	38,16	1 197,0	992,4	-17,10	1,94
7. Benda-benda dari besi dan baja (73)	118,6	192,8	74,2	62,59	669,9	743,4	10,98	1,45
8. Timah (80)	120,8	71,0	-49,8	-41,24	588,6	332,9	-43,45	0,65
9. Kapal laut (89)	37,0	62,4	25,4	68,63	117,1	277,2	136,79	0,54
10. Pupuk (31)	7,6	37,5	29,9	395,95	59,5	104,5	75,73	0,20
Total 10 Golongan Barang	3 900,4	3 909,5	9,1	0,23	20 416,4	19 087,9	-6,51	37,22
Lainnya	6 683,7	6 643,6	-40,1	-0,60	35 942,4	32 191,3	-10,44	62,78
Total Ekspor Nonmigas	10 584,1	10 553,1	-31,0	-0,29	56 358,8	51 279,2	-9,01	100,00

Tabel 3.4
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ)

Negara Tujuan	April 2016	Mei 2016	Δ	Δ%	Januari-Mei			Peran (%) 2016
					2015	2016	Δ%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASEAN	2 334,2	2 302,2	-32,0	-1,37	11 384,1	11 149,9	-2,06	21,74
1 Singapura	778,3	709,5	-68,8	-8,83	3 700,0	3 700,7	0,02	7,22
2 Malaysia	484,6	453,7	-30,9	-6,39	2 727,0	2 319,1	-14,96	4,52
3 Thailand	377,2	383,9	6,7	1,77	2 003,9	1 832,3	-8,56	3,57
ASEAN Lainnya	694,1	755,1	61,1	8,80	2 953,2	3 297,8	11,67	6,43
Uni Eropa	1 183,5	1 197,2	13,7	1,17	6 278,9	5 808,0	-7,50	11,33
4 Jerman	222,0	217,2	-4,8	-2,15	1 125,5	1 065,6	-5,32	2,08
5 Belanda	249,5	263,0	13,5	5,42	1 523,3	1 193,1	-21,68	2,33
6 Italia	144,5	118,7	-25,8	-17,81	865,8	669,9	-22,63	1,31
Uni Eropa Lainnya	567,5	598,3	30,8	5,42	2 764,3	2 879,4	4,16	5,61
Negara Utama Lainnya	4 956,4	4 913,1	-43,3	-0,87	27 920,3	24 232,8	-13,21	47,25
7 Tiongkok	1 047,6	982,9	-64,7	-6,18	5 413,4	4 870,6	-10,03	9,50
8 Jepang	953,3	1 002,9	49,6	5,21	5 613,1	5 183,3	-7,66	10,11
9 Amerika Serikat	1 343,2	1 280,4	-62,8	-4,68	6 450,3	6 252,0	-3,07	12,19
10 India	799,1	726,7	-72,4	-9,06	5 348,2	3 642,0	-31,90	7,10
11 Australia	172,9	280,2	107,3	62,03	995,7	1 102,8	10,77	2,15
12 Korea Selatan	422,1	427,6	5,5	1,30	2 323,9	2 067,9	-11,02	4,03
13 Taiwan	218,2	212,4	-5,8	-2,65	1 775,7	1 114,2	-37,25	2,17
Total 13 Negara Tujuan Lainnya	7 212,5	7 059,1	-153,4	-2,13	39 865,8	35 013,5	-12,17	68,28
Total Ekspor Nonmigas	10 584,1	10 553,1	-31,0	-0,29	56 358,8	51 279,2	-9,01	100,00

Tabel 3.5
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2014–2016 (FOB:juta US\$)

Bulan	2014			2015			2016		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jan	2 501,7	11 970,6	14 472,3	1 959,0	11 285,9	13 244,9	1 108,0	9 372,6	10 480,6
Feb	2 729,2	11 904,9	14 634,1	1 753,4	10 419,4	12 172,8	1 113,3	10 198,7	11 312,0
Mar	2 641,3	12 551,3	15 192,6	1 988,9	11 645,1	13 634,0	1 239,3	10 570,7	11 810,0
Apr	2 651,4	11 641,1	14 292,5	1 458,2	11 646,4	13 104,6	891,8	10 584,1	11 475,9
Mei	2 375,7	12 447,9	14 823,6	1 392,8	11 361,9	12 754,7	957,9	10 553,1	11 511,0
Jun	2 786,0	12 623,5	15 409,5	1 439,9	12 074,2	13 514,1			
Jul	2 496,3	11 627,8	14 124,1	1 421,8	10 043,9	11 465,8			
Agt	2 598,1	11 883,5	14 481,6	1 530,9	11 195,2	12 726,0			
Sep	2 622,6	12 653,2	15 275,8	1 453,6	11 134,8	12 588,4			
Okt	2 413,2	12 879,5	15 292,8	1 379,6	10 742,2	12 121,7			
Nov	2 035,4	11 509,3	13 544,7	1 497,0	9 625,1	11 122,2			
Des	2 168,0	12 268,3	14 436,3	1 299,5	10 617,6	11 917,1			
Total	30 018,8	145 961,2	175 980,0	18 574,4	131 791,9	150 366,3	5 310,3	51 279,2	56 589,5

Tabel 3.6
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang
dan Pelabuhan Muat, Januari–Mei 2016

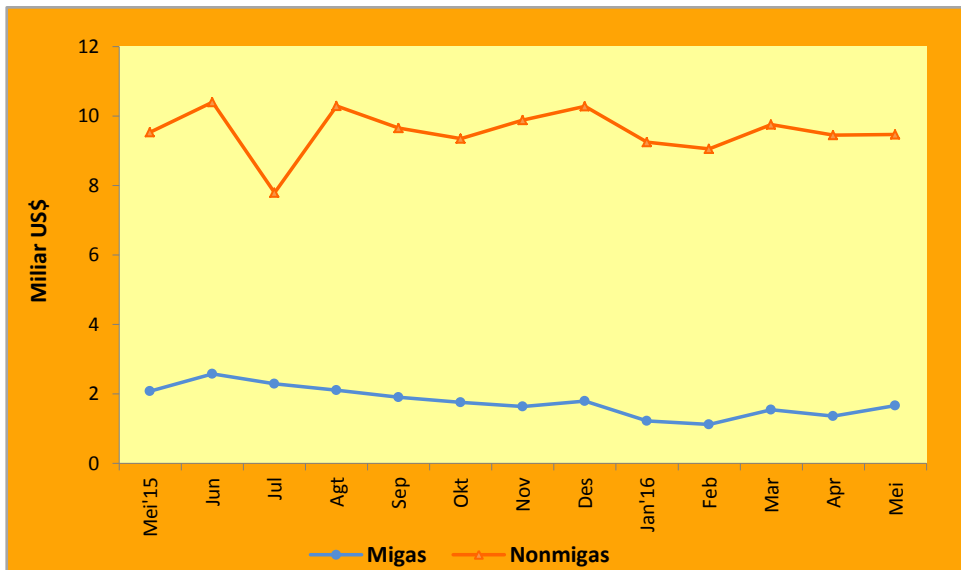
No Urut	Provinsi Asal Barang	Pelabuhan Muat						Total Ekspor		
		Prov Asal Barang			Prov Lain			Nilai	% Kolom	% Baris
		Nilai	% Kolom	% Baris	Nilai	% Kolom	% Baris			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	12,7	0,03	42,33	17,2	0,11	57,67	29,9	0,05	100,00
2	Sumatera Utara	2 875,1	6,97	99,53	13,4	0,09	0,47	2 888,5	5,10	100,00
3	Sumatera Barat	530,4	1,29	96,35	20,1	0,13	3,65	550,5	0,97	100,00
4	Riau	5 087,7	12,34	98,80	61,8	0,40	1,20	5 149,6	9,10	100,00
5	Kepulauan Riau	3 645,0	8,84	100,00	0,1	0,00	0,00	3 645,1	6,44	100,00
6	Jambi	320,1	0,78	43,34	418,5	2,73	56,66	738,5	1,31	100,00
7	Sumatera Selatan	727,0	1,76	94,57	41,7	0,27	5,43	768,7	1,36	100,00
8	Kep. Bangka Belitung	384,5	0,93	94,64	21,8	0,14	5,36	406,3	0,72	100,00
9	Bengkulu	22,3	0,05	42,37	30,3	0,20	57,63	52,6	0,09	100,00
10	Lampung	1 114,3	2,70	99,21	8,9	0,06	0,79	1 123,2	1,98	100,00
11	DKI Jakarta	4 533,8	10,99	99,85	6,7	0,04	0,15	4 540,6	8,02	100,00
12	Jawa Barat	235,0	0,57	2,29	10 014,4	65,25	97,71	10 249,4	18,11	100,00
13	Banten	487,6	1,18	13,27	3 185,5	20,76	86,73	3 673,1	6,49	100,00
14	Jawa Tengah	2 169,8	5,26	80,45	527,4	3,44	19,55	2 697,2	4,77	100,00
15	DI Yogyakarta	3,9	0,01	2,85	131,0	0,85	97,15	134,9	0,24	100,00
16	Jawa Timur	8 060,4	19,54	98,61	113,7	0,74	1,39	8 174,1	14,44	100,00
17	Bali	94,6	0,23	45,40	113,7	0,74	54,60	208,3	0,37	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	510,7	1,24	99,23	4,0	0,03	0,77	514,7	0,91	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	9,1	0,02	84,91	1,6	0,01	15,09	10,8	0,02	100,00
20	Kalimantan Barat	180,4	0,44	97,96	3,8	0,02	2,04	184,2	0,33	100,00
21	Kalimantan Tengah	125,4	0,30	32,11	265,1	1,73	67,89	390,5	0,69	100,00
22	Kalimantan Selatan	1 854,0	4,50	96,20	73,1	0,48	3,80	1 927,2	3,41	100,00
23	Kalimantan Timur	5 457,8	13,23	99,37	34,3	0,22	0,63	5 492,2	9,71	100,00
24	Kalimantan Utara	265,5	0,64	97,29	7,4	0,05	2,71	272,9	0,48	100,00
25	Sulawesi Utara	389,1	0,94	86,10	62,8	0,41	13,90	451,9	0,80	100,00
26	Gorontalo	1,3	0,00	88,04	0,2	0,00	11,96	1,4	0,00	100,00
27	Sulawesi Tengah	484,2	1,17	99,39	3,0	0,02	0,61	487,2	0,86	100,00
28	Sulawesi Selatan	390,6	0,95	97,14	11,5	0,07	2,86	402,0	0,71	100,00
29	Sulawesi Barat	–	–	–	118,3	0,77	100,00	118,3	0,21	100,00
30	Sulawesi Tenggara	39,8	0,10	59,37	27,2	0,18	40,63	67,0	0,12	100,00
31	Maluku	10,3	0,03	63,64	5,9	0,04	36,36	16,2	0,03	100,00
32	Maluku Utara	6,9	0,02	97,84	0,2	0,00	2,16	7,0	0,01	100,00
33	Papua	484,4	1,17	100,00	0,0	0,00	0,00	484,4	0,86	100,00
34	Papua Barat	728,1	1,77	99,56	3,2	0,02	0,44	731,3	1,29	100,00
Total Ekspor		41 241,6	100,00	–	15 348,0	100,00	–	56 589,5	100,00	–

IV. IMPOR MEI 2016

1. Nilai impor Indonesia Mei 2016 sebesar US\$11,14 miliar atau naik 2,98 persen dibanding impor April 2016. Dibanding impor Mei 2015 turun 4,12 persen.

**Impor Mei 2016
sebesar US\$11,14 miliar
atau naik 2,98 persen**

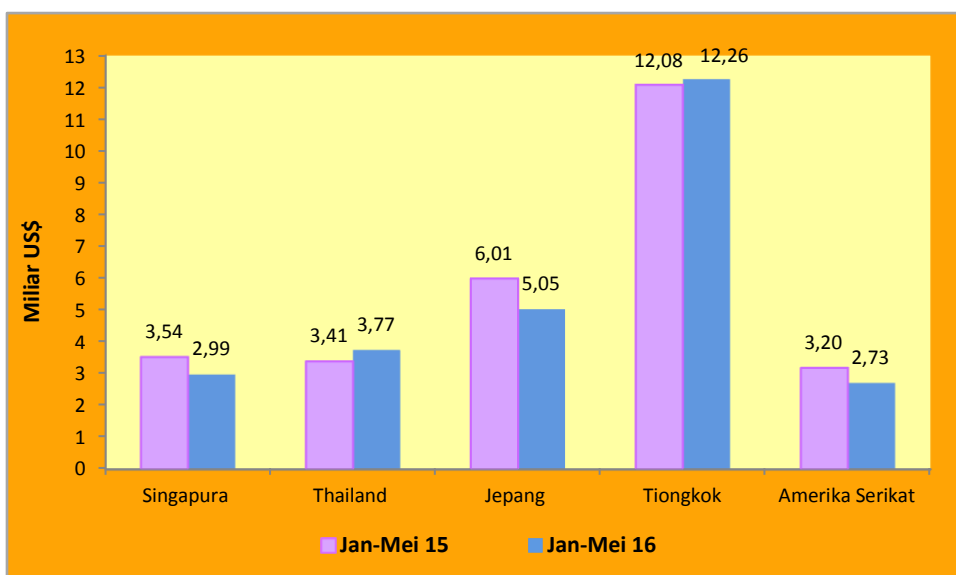
Grafik 4.1
Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF)
Mei 2015–Mei 2016



2. Impor nonmigas Mei 2016 sebesar US\$9,47 miliar, naik 0,16 persen dibanding April 2016 (US\$9,45 miliar). Selama Januari–Mei 2016 impor nonmigas mencapai US\$46,97 miliar atau turun 6,91 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$50,45 miliar).
3. Impor migas Mei 2016 sebesar US\$1,67 miliar, naik 22,50 persen dibanding April 2016 (US\$1,36 miliar). Selama Januari–Mei 2016 impor migas mencapai US\$6,93 miliar atau turun 34,15 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$10,52 miliar).

4. Peningkatan nilai impor nonmigas terbesar Mei 2016 adalah golongan gula dan kembang gula sebesar US\$86,0 juta, atau naik 92,08 persen dibanding April 2016 (US\$93,4 juta). Impor golongan barang tersebut pada Januari–Mei 2016 mencapai US\$737,2 juta, naik 12,38 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
5. Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar periode Januari–Mei 2016 ditempati Tiongkok 26,10 persen, Jepang 10,76 persen, dan Thailand 8,03 persen. Impor nonmigas dari ASEAN dan Uni Eropa masing-masing 22,26 persen dan 9,51 persen.

Grafik 4.2
Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF)
Januari-Mei 2015 dan 2016



6. Nilai impor selama Januari–Mei 2016 pada golongan konsumsi mengalami peningkatan sebesar 14,15 persen, sedangkan bahan baku/penolong dan barang modal menurun masing-masing 12,91 persen dan 16,68 persen dibanding impor periode yang sama tahun sebelumnya.
7. Neraca perdagangan Indonesia Mei 2016 surplus sebesar US\$0,37 miliar.

Tabel 4.1
Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya
Januari–Mei 2015 dan 2016

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Jan-Mei'16 (%)
	Apr 2016	Mei 2016	Jan-Mei 2015	Jan-Mei 2016	Mei 2016 thd Apr 2016	Jan-Mei 2016 thd Jan-Mei 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	10 813,6	11 135,4	60 971,3	53 893,3	2,98	-11,61	100,00
Migas	1 362,1	1 668,6	10 519,4	6 927,5	22,50	-34,15	12,85
- Minyak Mentah	555,0	761,1	3 353,0	2 657,4	37,14	-20,75	4,93
- Hasil Minyak	688,6	768,5	6 285,0	3 616,7	11,60	-42,46	6,71
- Gas	118,5	139,0	881,4	653,4	17,30	-25,87	1,21
Nonmigas	9 451,5	9 466,8	50 451,9	46 965,8	0,16	-6,91	87,15

Tabel 4.2
Perkembangan Impor Indonesia
Mei 2015–Mei 2016

Periode	Nilai CIF (Juta US\$)			Perubahan Terhadap Periode Sebelumnya (%)		
	Migas	Nonmigas	Total Impor	Migas	Nonmigas	Total Impor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015						
Triwulan I	6 102,6	30 628,8	36 731,4	-41,55	-8,20	-16,15
Mei	2 080,5	9 533,1	11 613,6	-10,95	-7,36	-8,02
Juni	2 577,5	10 400,6	12 978,1	23,89	9,10	11,75
Triwulan II	6 994,3	30 226,7	37 218,0	14,61	-1,32	1,32
Juli	2 294,3	7 787,6	10 081,9	-10,99	-25,12	-22,32
Agustus	2 108,0	10 291,2	12 399,2	-8,12	32,15	22,98
September	1 912,4	9 646,2	11 558,6	-9,28	-6,27	-6,78
Triwulan III	6 314,7	27 725,0	34 039,7	-9,72	-8,27	-8,54
Oktober	1 763,0	9 345,9	11 108,9	-7,81	-3,11	-3,89
November	1 640,4	9 879,1	11 519,5	-6,96	5,71	3,70
Desember	1 798,0	10 279,3	12 077,3	9,61	4,05	4,84
Triwulan IV	5 201,5	29 504,2	34 705,7	-17,63	6,42	1,96
Jan-Des	24 613,2	118 081,6	142 694,8	-43,37	-12,35	-19,91
2016						
Januari	1 221,5	9 245,5	10 467,0	-32,06	-10,06	-13,33
Februari	1 122,9	9 052,7	10 175,6	-8,07	-2,09	-2,78
Maret	1 552,4	9 749,3	11 301,7	38,25	7,69	11,07
Triwulan I	3 896,8	28 047,5	31 944,5	-25,08	-4,94	-7,96
April	1 362,1	9 451,5	10 813,6	-12,26	-3,05	-4,32
Mei	1 668,6	9 466,8	11 135,4	0,16	22,50	2,98

Tabel 4.3
Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit dan Perubahannya
Januari–Mei 2015 dan 2016

Golongan Barang (HS)	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Mei'16 (%)
	April 2016	Mei 2016	Jan-Mei 2015	Jan-Mei 2016	Mei 2016 Thd Apr 2016	Jan-Mei'16 thd Jan-Mei'15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Mesin dan Peralatan Mekanik (84)	1 730,7	1 601,7	9 296,7	8 431,6	-7,45	-9,31	17,95
2. Plastik dan Barang dari Plastik(39)	571,2	602,4	2 867,3	2 791,8	5,46	-2,63	5,94
3. Serealia (10)	217,2	252,6	1 327,9	1 688,9	16,30	27,19	3,60
4. Barang dari Besi dan Baja (73)	308,8	212,6	1 592,2	1 244,6	-31,15	-21,83	2,65
5. Kapas (52)	193,6	174,1	966,1	889,2	-10,07	-7,96	1,89
6. Gula dan Kembang Gula (17)	93,4	179,4	656,0	737,2	92,08	12,38	1,57
7. Biji-bijian berminyak (12)	95,1	138,2	651,6	533,7	45,32	-18,09	1,14
8. Kapal Terbang dan Bagiannya (88)	50,5	130,8	213,2	374,7	159,01	75,75	0,80
9. Kapal Laut dan Bangunan Terapung (89)	92,5	31,4	618,8	309,1	-66,05	-50,05	0,66
10. Kendaraan Bermotor dan Komponen (98)	41,3	15,4	194,4	129,4	-62,71	-33,44	0,28
Total 10 Golongan Barang	3 394,3	3 338,6	18 384,2	17 130,2	-1,64	-6,82	36,47
Barang Lainnya	6 057,2	6 128,2	32 067,7	29 835,6	1,17	-6,96	63,53
Total Impor Nonmigas	9 451,5	9 466,8	50 451,9	46 965,8	0,16	-6,91	100,00

Tabel 4.4
Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang
Januari–Mei 2016

Negara	Nilai CIF (Juta US\$)				Persentase thd Total (%)			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (2 s.d. 4)	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (6 s.d. 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 ASEAN	1 581,5	10 637,3	1 614,2	13 833,0	11,43	76,90	11,67	100,00
2 Jepang	185,7	3 666,1	1 213,9	5 065,7	3,67	72,37	23,96	100,00
3 Korea Selatan	162,5	2 341,9	230,9	2 735,3	5,94	85,62	8,44	100,00
4 Tiongkok	1 133,5	7 641,6	3 516,8	12 291,9	9,22	62,17	28,61	100,00
5 India	77,7	879,2	121,3	1 078,2	7,21	81,54	11,25	100,00
6 Australia	227,5	1 675,9	55,4	1 958,8	11,61	85,56	2,83	100,00
7 Selandia Baru	133,7	118,4	3,1	255,2	52,39	46,39	1,21	100,00
8 Amerika Serikat	272,5	2 118,2	363,6	2 754,3	9,89	76,91	13,20	100,00
9 Uni Eropa	574,8	2 739,2	1 168,2	4 482,2	12,82	61,11	26,06	100,00
10 Lainnya	667,4	8 340,8	430,5	9 438,7	7,07	88,37	4,56	100,00
Total Impor	5 016,8	40 158,6	8 717,9	53 893,3	9,31	74,51	16,18	100,00

Tabel 4.5
Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang
Januari–Mei 2015 dan 2016

Negara Asal	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Mei'16 (%)
	April 2016	Mei 2016	Jan-Mei 2015	Jan-Mei 2016	Mei'16 Thd Apr'16	Jan-Mei'16 thd Jan-Mei'15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASEAN	2 051,5	2 020,1	10 878,0	10 455,3	-1,53	-3,89	22,26
1 Singapura	621,1	570,2	3 539,3	2 987,9	-8,20	-15,58	6,36
2 Thailand	669,6	719,9	3 410,4	3 773,6	7,51	10,65	8,03
3 Malaysia	444,9	410,1	2 120,2	1 956,2	-7,82	-7,74	4,17
ASEAN Lainnya	315,9	319,9	1 808,1	1 737,6	1,27	-3,90	3,70
Uni Eropa	890,3	857,4	4 690,6	4 464,8	-3,70	-4,81	9,51
4 Jerman	255,4	245,9	1 544,6	1 221,0	-3,72	-20,95	2,60
5 Belanda	54,3	49,5	326,3	318,4	-8,84	-2,42	0,68
6 Italia	113,9	107,3	565,2	587,8	-5,79	4,00	1,25
Uni Eropa Lainnya	466,7	454,7	2 254,5	2 337,6	-2,57	3,69	4,98
Negara Utama Lainnya	5 532,7	5 397,1	28 874,9	26 533,6	-2,45	-8,11	56,50
7 Tiongkok	2 525,9	2 604,6	12 080,7	12 260,1	3,12	1,49	26,10
8 Jepang	1 093,1	951,4	6 012,5	5 052,5	-12,96	-15,97	10,76
9 Amerika Serikat	542,9	564,6	3 200,2	2 726,0	4,00	-14,82	5,80
10 Korea Selatan	480,0	503,2	2 811,3	2 425,4	4,83	-13,73	5,16
11 Australia	443,0	340,7	2 045,5	1 780,8	-23,09	-12,94	3,79
12 Taiwan	261,0	239,0	1 458,9	1 216,1	-8,43	-16,64	2,59
13 India	186,8	193,6	1 265,8	1 072,7	3,64	-15,26	2,28
Total 13 Negara Utama	7 691,9	7 500,0	40 380,9	37 378,5	-2,49	-7,44	79,59
Negara Lainnya	1 759,6	1 966,8	10 071,0	9 587,3	11,78	-4,80	20,41
Total Impor Nonmigas	9 451,5	9 466,8	50 451,9	46 965,8	0,16	-6,91	100,00

Tabel 4.6
Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2015–Mei 2016
(Nilai CIF: Juta US\$)

Bulan	2015				2016			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	786,3	9 618,3	2 208,1	12 612,7	1 160,8	7 496,8	1 809,4	10 467,0
Februari	823,8	8 762,8	1 923,5	11 510,1	1 005,2	7 376,4	1 794,0	10 175,6
Maret	930,3	9 331,1	2 347,3	12 608,7	986,8	8 614,9	1 700,0	11 301,7
April	910,4	9 680,9	2 035,0	12 626,3	865,5	8 177,6	1 770,5	10 813,6
Mei	944,2	8 720,0	1 949,4	11 613,6	998,5	8 492,9	1 644,0	11 135,4
Juni	1 027,9	9 773,5	2 176,7	12 978,1				
Juli	705,6	7 715,0	1 661,3	10 081,9				
Agustus	1 080,1	9 275,1	2 044,0	12 399,2				
September	823,1	8 691,9	2 043,6	11 558,6				
Oktober	773,6	8 262,7	2 072,6	11 108,9				
November	966,7	8 524,4	2 028,4	11 519,5				
Desember	1 104,6	8 725,3	2 247,4	12 077,3				
Total	10 876,5	107 081,0	24 737,3	142 694,8	5 016,8	40 158,6	8 717,9	53 893,3
Persentase thd Total (%)	7,62	75,05	17,33	100,00	9,31	74,52	16,18	100,00

Tabel 4.7
Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Mei 2016
 (juta US\$)

Negara Asal Barang	Maret 2016	April 2016	Mei 2016	Jan-Mei 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Tiongkok	2 253,1	2 527,8	2 606,3	12 291,9
2 Singapura	1 223,8	1 044,2	1 071,6	5 344,9
3 Jepang	1 086,0	1 094,8	955,2	5 065,6
4 Thailand	900,1	673,7	722,2	3 791,6
5 Malaysia	597,6	668,7	583,1	2 933,1
6 Amerika Serikat	606,4	549,0	583,9	2 754,3
7 Korea Selatan	546,3	562,8	558,2	2 735,4
8 Australia	407,2	501,8	405,8	1 958,9
9 Vietnam	311,4	239,2	236,4	1 344,2
10 Taiwan	272,7	262,6	253,7	1 240,0
11 Jerman	236,2	256,1	246,7	1 224,9
12 India	235,3	187,6	194,6	1 078,1
13 Saudi Arabia	248,5	164,0	258,7	1 026,4
14 Brazil	116,1	99,8	179,1	904,2
15 Hongkong	147,2	173,3	145,0	705,6
Total 15 Negara	9 187,9	9 005,4	9 000,5	44 399,1
Negara Lainnya	2 113,8	1 808,2	2 134,9	9 494,2
Total Impor	11 301,7	10 813,6	11 135,4	53 893,3
Persentase Terhadap Total				
Total 15 Negara	81,30	83,28	80,83	82,38
Negara Lainnya	18,70	16,72	19,17	17,62

Tabel 4.8
Neraca Perdagangan Indonesia, Mei 2015–Mei 2016
 (miliar US\$)

Bulan	Ekspor			Impor			Neraca		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2015									
Mei	1,39	11,36	12,75	2,08	9,53	11,61	-0,69	1,83	1,14
Juni	1,44	12,07	13,51	2,58	10,40	12,98	-1,14	1,67	0,53
Juli	1,42	10,04	11,46	2,29	7,79	10,08	-0,87	2,25	1,38
Agustus	1,53	11,20	12,73	2,11	10,29	12,40	-0,58	0,91	0,33
September	1,45	11,13	12,58	1,91	9,65	11,56	-0,46	1,48	1,02
Oktober	1,38	10,74	12,12	1,76	9,35	11,11	-0,38	1,39	1,01
November	1,50	9,62	11,12	1,64	9,88	11,52	-0,14	-0,26	-0,40
Desember	1,30	10,62	11,92	1,80	10,28	12,08	-0,50	0,34	-0,16
Jan–Des	18,57	131,79	150,36	24,61	118,08	142,69	-6,04	13,67	7,63
2016									
Januari	1,11	9,37	10,48	1,22	9,25	10,47	-0,11	0,12	0,01
Februari	1,11	10,20	11,31	1,12	9,05	10,17	-0,01	1,15	1,14
Maret	1,24	10,57	11,81	1,55	9,75	11,30	-0,31	0,82	0,51
April	0,89	10,58	11,47	1,36	9,45	10,81	-0,47	1,13	0,66
Mei	0,96	10,55	11,51	1,67	9,47	11,14	-0,71	1,08	0,37
Jan–Mei	5,31	51,28	56,59	6,93	46,97	53,89	-1,62	4,31	2,70

Tabel 4.9
Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Mei 2016

Periode	Ekspor		Impor	
	Berat Bersih (kg)	Nilai FOB (US\$)	Berat Bersih (kg)	Nilai CIF (US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	2 585 718	1 191 376	472 664 654	246 002 090
Triwulan I	174 680	244 309	114 269 033	62 697 096
Triwulan II	561 014	425 064	129 548 175	64 587 922
Triwulan III	131 620	203 161	109 668 226	56 043 208
Triwulan IV	1 718 404	318 842	119 179 220	62 673 864
2014	516 069	759 928	844 163 741	388 178 457
Triwulan I	85 560	169 269	60 796 853	26 870 252
Triwulan II	161 455	264 660	115 480 643	49 336 490
Triwulan III	82 694	123 665	164 561 686	72 532 308
Triwulan IV	186 360	202 334	503 324 559	239 439 407
2015	519 497	630 391	861 601 001	351 602 090
Triwulan I	39 985	51 936	66 562 915	29 213 209
Triwulan II	160 770	206 334	127 866 410	55 705 088
Triwulan III	152 844	195 941	35 181 781	14 964 060
Triwulan IV	165 898	176 180	631 989 895	251 719 733
2016	799 712	515 076	1 047 518 721	429 086 154
Januari	94 653	59 179	382 546 178	155 676 867
Februari	525 000	190 511	296 371 000	121 221 578
Maret	8 000	11 982	303 075 556	124 448 261
Triwulan I	627 653	261 673	981 992 734	401 346 706
April	149 933	209 052	36 579 487	14 936 303
Mei	22 126	44 351	28 946 500	12 803 145

V. KEPENDUDUKAN JUNI 2016

1. Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 258.705 ribu orang. Penduduk laki-laki sebanyak 129.988,7 ribu orang, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 128.716,3 ribu orang. Rasio Jenis Kelamin penduduk Indonesia sebesar 101, artinya diantara 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.

Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 258.705 ribu orang

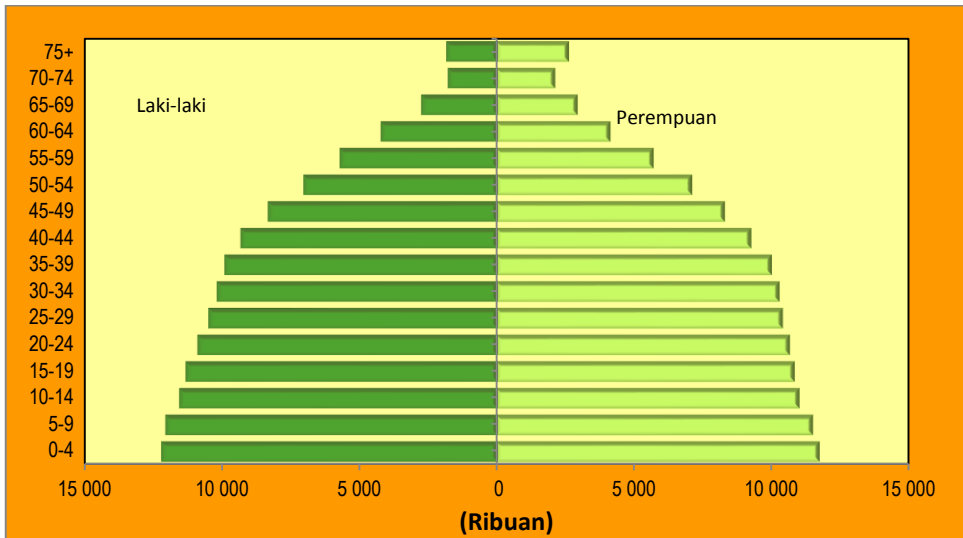
Tabel 5.1
Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2016
(ribu orang)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	12 221,6	11 738,7	23 960,3
5-9	12 069,5	11 490,0	23 559,5
10-14	11 571,9	11 005,2	22 577,1
15-19	11 335,7	10 825,3	22 161,0
20-24	10 911,7	10 657,3	21 569,0
25-29	10 513,3	10 398,1	20 911,4
30-34	10 210,3	10 286,7	20 497,0
35-39	9 931,1	10 005,4	19 936,5
40-44	9 347,0	9 262,3	18 609,3
45-49	8 352,9	8 304,0	16 657,0
50-54	7 064,2	7 114,8	14 179,0
55-59	5 737,3	5 719,8	11 457,1
60-64	4 247,2	4 150,5	8 397,8
65-69	2 780,8	2 962,0	5 742,8
70-74	1 817,9	2 145,6	3 963,5
75+	1 876,3	2 650,6	4 526,9
Total	129 988,7	128 716,3	258 705,0

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

2. Piramida Penduduk Indonesia tahun 2016 termasuk tipe *expansive*, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Grafik 5.1 menunjukkan piramida yang masih lebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah, sedangkan pada bagian atas meruncing.

Grafik 5.1
Piramida Penduduk Indonesia, 2016

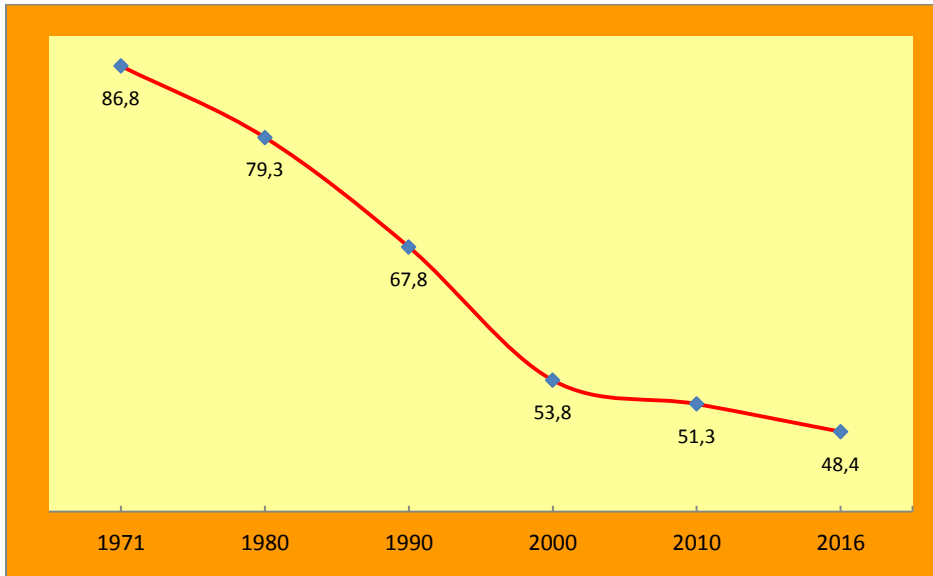


Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

3. Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2016. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (penduduk 0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hasil proyeksi penduduk menunjukkan rasio ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebesar 48,4. Angka ini mengandung makna bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung penduduk usia non produktif sekitar 48-49 orang. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rasio ketergantungan penduduk Indonesia memiliki tren yang menurun (Grafik 5.2). Jika pada tahun 1971 rasio ketergantungan sebesar 86,8 maka pada tahun 2016 kondisinya semakin membaik. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki era bonus demografi, dimana kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan. Era bonus demografi akan mencapai puncaknya pada periode 2025–2030. Pulau dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Bali dan Nusa Tenggara (55,1), dan yang terendah Pulau Jawa (45,9). Tiga provinsi dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (66), Sulawesi Tenggara (59,9) dan Maluku (59,3).

Sedangkan tiga provinsi dengan rasio ketergantungan terendah adalah DKI Jakarta (40,3), Jawa Timur (44,0) dan Kalimantan Timur (44,8).

Grafik 5.2
Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2016

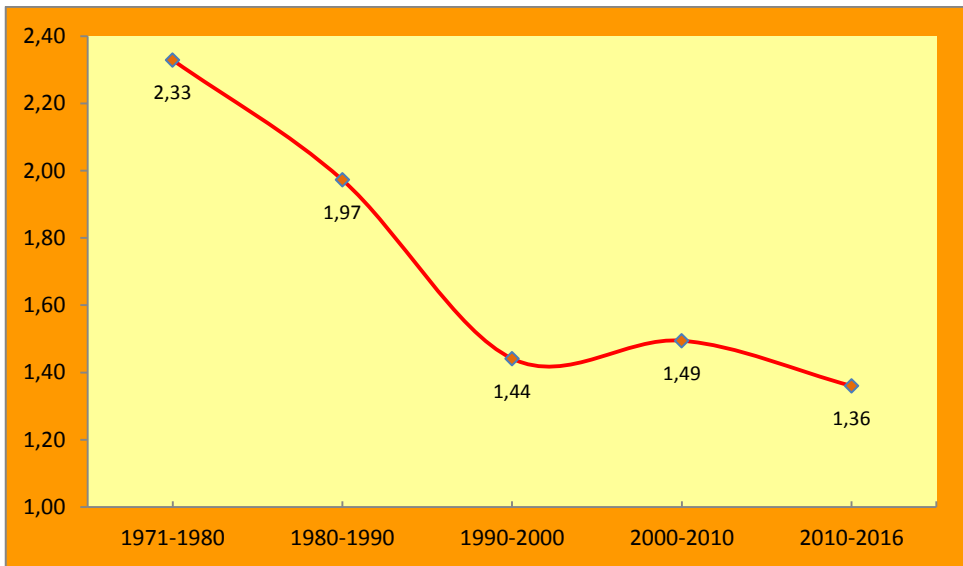


Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

- Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2010–2016 sebesar 1,36 persen. Dibandingkan dengan periode 1971–1980 (2,33 persen), 1980–1990 (1,97 persen), 1990–2000 (1,44 persen), dan 2000–2010 (1,49 persen), maka laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010–2016 menunjukkan penurunan.
- Pulau dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kalimantan, yaitu sebesar 2,04 persen. Lima pulau lainnya secara berurutan Maluku dan Papua (2,03 persen), Sumatera (1,65 persen), Bali dan Nusa Tenggara (1,43 persen), Sulawesi (1,42 persen) serta Jawa (1,14 persen). Menurut provinsi, tiga provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Provinsi Kalimantan Utara (3,93 persen), Kepulauan Riau (3,06 persen), dan Papua Barat (2,61 persen). Tiga provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Provinsi Jawa Timur (0,66 persen), Jawa Tengah (0,79 persen) dan DKI Jakarta (1,07 persen)

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2010–2016 sebesar 1,36 persen

Grafik 5.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971–2016



Sumber : SP1971, SP1980, SP1990, SP2000, SP2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

6. Penduduk Indonesia sebagian besar berdomisili di Pulau Jawa, yaitu sebesar 56,7 persen. Kemudian, secara berturut-turut diikuti Pulau Sumatera (21,7 persen), Sulawesi (7,3 persen), Kalimantan (6,0 persen), Bali dan Nusa Tenggara (5,5 persen) serta Maluku dan Papua (2,7 persen). Menurut provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi dengan proporsi penduduk terbesar yaitu masing-masing 18,3 persen; 15,1 persen; dan 13,1 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan tiga provinsi dengan proporsi penduduk terendah adalah Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Gorontalo yaitu masing-masing 0,3 persen; 0,3 persen; dan 0,4 persen.
7. Kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebesar 135 jiwa per km². Jawa merupakan pulau yang terpadat penduduknya (1.133 per km²), kemudian secara berurutan Pulau Bali dan Nusa Tenggara (196 per km²), Sumatera (117 per km²), Sulawesi (101 per km²), Kalimantan (29 per km²), dan yang paling jarang penduduknya adalah Kepulauan Maluku dan Papua (14 per km²). Kepadatan penduduk menurut provinsi, terpadat di DKI Jakarta (15.478 per km²), Jawa Barat (1.339 per km²) dan

**Kepadatan penduduk
Indonesia pada tahun 2016
sebesar 135 jiwa per km²**

Banten (1.263 per km²). Sedangkan tiga provinsi yang terjarang, yaitu Kalimantan Utara (8 per km²), Papua Barat (9 per km²), dan Papua (10 per km²).

8. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua yaitu sebesar 107,7 sedangkan yang terendah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 97,8. Tiga provinsi dengan rasio jenis kelamin tertinggi yaitu Kalimantan Utara (113,0), Papua (111,4), dan Papua Barat (111,3) sedangkan yang terendah Nusa Tenggara Barat (94,3), Sulawesi Selatan (95,5) dan Jawa Timur (97,5).
9. Penduduk lanjut usia (lansia) merupakan penduduk yang berumur 60 tahun ke atas. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, lansia di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 8,7 persen. Penduduk lansia terbesar terdapat di Pulau Jawa (10 persen), kemudian berturut-turut Bali dan Nusa Tenggara (8,5 persen), Sulawesi (8,3 persen), Sumatera (7 persen), Kalimantan (6,3 persen) serta Maluku dan Papua (4,5 persen). Menurut provinsi, tiga provinsi dengan penduduk lansia terbesar adalah Yogyakarta (13,6 persen), Jawa Tengah (12,2 persen) dan Jawa Timur (11,9 persen), sedangkan yang terkecil adalah Papua (3 persen), Papua Barat (4,1 persen) dan Kepulauan Riau (4,2 persen).
10. Umur Harapan Hidup adalah kemungkinan umur yang akan dicapai seseorang dari sejak lahir. Hasil proyeksi penduduk tahun 2016 menunjukkan umur harapan hidup penduduk Indonesia sebesar 70,9 tahun. Tiga provinsi dengan umur harapan hidup tertinggi adalah Yogyakarta (74,7 tahun), Kalimantan Timur (74,1 tahun) dan Jawa Tengah (73,8 tahun). Sedangkan tiga provinsi dengan umur harapan hidup terendah adalah Sulawesi Barat (64,1 tahun), Papua (65,2 tahun) dan Maluku (65,4 tahun).

**Hasil proyeksi tahun 2016
menunjukkan umur harapan
hidup penduduk Indonesia
sebesar 70,9 tahun**

Tabel 5.2
Demografi Penduduk Indonesia, 2016

Provinsi	Penduduk (000)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin	Rasio Ketergan- tungan	Pendu- duk Lansia (%)	Umur Harapan Hidup
	2010	2016	2010-2016					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Aceh	4 523	5 096	2,01	88	99,8	54,5	6,4	69,7
02. Sumatera Utara	13 029	14 103	1,33	193	99,6	56,1	7,0	68,5
03. Sumatera Barat	4 865	5 260	1,31	125	99,1	55,3	9,0	68,8
04. Riau	5 575	6 501	2,59	75	105,5	51,1	5,0	71,1
05. Kepulauan Riau	1 693	2 028	3,06	247	104,3	49,3	4,2	69,6
06. Jambi	3 108	3 459	1,80	69	104,2	46,7	6,7	70,8
07. Sumatera Selatan	7 482	8 161	1,46	89	103,3	49,3	7,2	69,3
08. Kep. Bangka Belitung	1 230	1 402	2,20	85	108,2	45,7	7,0	70,1
09. Bengkulu	1 722	1 905	1,69	96	104,0	47,4	6,7	68,8
10. Lampung	7 634	8 205	1,21	237	105,2	49,3	8,1	70,1
Sumatera	50 860	56 119	1,65	117	102,4	51,9	7,0	
11. DKI Jakarta	9 640	10 278	1,07	15478	100,8	40,3	6,8	72,4
12. Jawa Barat	43 227	47 379	1,54	1339	102,8	47,3	8,4	72,8
13. Banten	10 689	12 203	2,23	1263	104,0	46,1	5,5	69,5
14. Jawa Tengah	32 444	34 019	0,79	1037	98,4	47,9	12,2	73,8
15. Yogyakarta	3 468	3 721	1,18	1188	97,8	45,0	13,6	74,7
16. Jawa Timur	37 566	39 075	0,66	817	97,5	44,0	11,9	70,8
Jawa	137 033	146 675	1,14	1133	100,1	45,9	10,0	
17. Bali	3 907	4 200	1,21	727	101,4	45,2	10,5	71,6
18. Nusa Tenggara Barat	4 516	4 896	1,36	264	94,3	53,4	7,8	65,6
19. Nusa Tenggara Timur	4 706	5 204	1,69	107	98,2	66,0	7,6	66,4
Bali dan Nusa Tenggara	13 130	14 300	1,43	196	97,8	55,1	8,5	
20. Kalimantan Barat	4 411	4 862	1,63	33	103,8	50,6	7,0	70,2
21. Kalimantan Tengah	2 221	2 550	2,33	17	109,4	45,5	5,4	67,7
22. Kalimantan Selatan	3 643	4 055	1,81	105	102,8	48,5	6,7	68,0
23. Kalimantan Timur	3047	3501	2,34	28	110,3	44,8	5,4	74,1
24. Kalimantan Utara	529	666	3,93	8	113,0	50,9	5,6	73,2*)
Kalimantan	13 851	15 635	2,04	29	106,2	47,9	6,3	
24. Sulawesi Utara	2 278	2 437	1,13	176	104,2	46,4	10,1	71,3
25. Gorontalo	1 045	1 151	1,62	102	100,4	48,2	7,3	67,4
26. Sulawesi Tengah	2 646	2 922	1,67	47	104,4	50,2	7,5	67,9
27. Sulawesi Selatan	8 060	8 606	1,10	184	95,5	52,5	9,0	70,0
28. Sulawesi Barat	1 165	1 306	1,93	78	100,7	55,3	6,4	64,1
29. Sulawesi Tenggara	2 244	2 551	2,16	67	101,1	59,9	6,5	70,8
Sulawesi	17 437	18 973	1,42	101	99,3	52,2	8,3	
30. Maluku	1 542	1 716	1,79	37	101,7	59,3	6,7	65,4
31. Maluku Utara	1 043	1 186	2,16	37	104,2	58,1	5,7	67,8
32. Papua	2 857	3 207	1,95	10	111,4	46,6	3,0	65,2
33. Papua Barat	765	893	2,61	9	111,3	49,3	4,1	65,5
Maluku dan Papua	6 208	7 002	2,03	14	107,7	51,8	4,5	
Indonesia	238 519	258 705	1,36	135	101,0	48,4	8,7	70,9

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

*) Angka Sementara

VI. KETENAGAKERJAAN FEBRUARI 2016

A. Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2016

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2016 sebesar 5,50 persen menurun dibanding TPT Agustus 2015 (6,18 persen) dan TPT Februari 2015 (5,81 persen).

Jumlah penganggur Februari 2016 sebanyak 7,02 juta orang

Tabel 6.1
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 2014–2016
(juta orang)

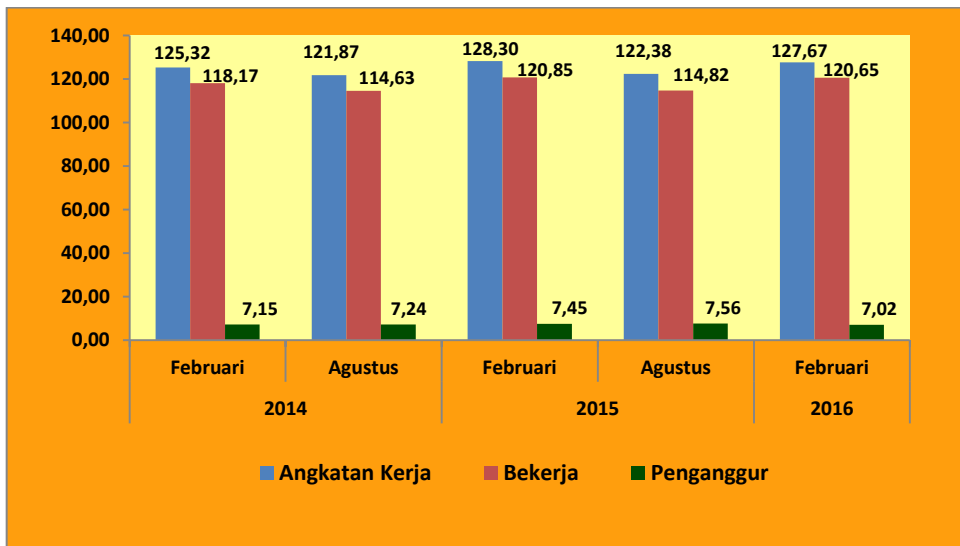
Jenis Kegiatan Utama	2014		2015		2016
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Angkatan Kerja	125,32	121,87	128,30	122,38	127,67
Bekerja	118,17	114,63	120,85	114,82	120,65
Penganggur	7,15	7,24	7,45	7,56	7,02
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,17	66,60	69,50	65,76	68,06
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,70	5,94	5,81	6,18	5,50
4. Pekerja tidak penuh	36,97	35,77	35,68	34,31	36,33
Setengah penganggur	10,57	9,68	10,04	9,74	10,46
Paruh waktu	26,40	26,09	25,64	24,57	25,87
Bekerja di bawah 15 jam perminggu	7,28	6,69	7,54	6,46	8,54

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia pada Februari 2016 sebesar 68,06 persen mengalami kenaikan sebesar 2,30 persen jika dibandingkan dengan TPAK Agustus 2015 sebesar 65,76 persen.
3. Pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) pada Februari 2016 sebanyak 36,33 juta orang (30,11 persen) mengalami kenaikan dibanding Agustus 2015 sebanyak 34,31 juta orang (29,88 persen).
4. Penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu pada Februari 2016 mencapai 8,54 juta orang (7,08 persen), mengalami kenaikan jika dibandingkan Agustus 2015 sebanyak 6,46 juta orang (5,63 persen).
5. Pada Februari 2016 terdapat 10,46 juta orang (8,67 persen) penduduk bekerja berstatus setengah penganggur, yaitu mereka yang bekerja tidak penuh dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

B. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Pengangguran

1. Angkatan kerja Indonesia pada Februari 2016 sebanyak 127,7 juta orang, bertambah sebanyak 5,3 juta orang dibanding Agustus 2015 dan berkurang sebanyak 630 ribu orang dibanding Februari 2015.

Grafik 6.1
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur
2014–2016 (juta orang)



2. Jumlah Penduduk yang bekerja pada Februari 2016 sebanyak 120,6 juta orang, bertambah 5,8 juta orang dibanding keadaan Agustus 2015, akan tetapi berkurang 200 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2015.
3. Pada Februari 2016, jumlah pengangguran mencapai 7,02 juta orang, mengalami penurunan yaitu sebanyak 540 ribu orang dibanding Agustus 2015 atau turun 430 ribu orang jika dibanding Februari 2015.

C. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

1. Struktur lapangan pekerjaan hingga Februari 2016 tidak mengalami perubahan, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa Kemasyarakatan, dan Sektor Industri masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Penduduk bekerja pada Sektor Perdagangan meningkat sebanyak 1,8 juta orang (6,94 persen), dan Sektor Jasa Kemasyarakatan meningkat sebanyak 380 ribu orang (1,96 persen). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan terutama adalah Sektor Pertanian sebanyak 1,8 juta orang (4,56 persen), Sektor Industri sebanyak 410 ribu orang (2,50 persen), dan Sektor Keuangan sebanyak 170 ribu orang (4,66 persen).

Tabel 6.2
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2014–2016
(juta orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	2014		2015		2016
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	40,83	38,97	40,12	37,75	38,29
2. Industri	15,39	15,26	16,38	15,25	15,97
3. Konstruksi	7,21	7,28	7,72	8,21	7,71
4. Perdagangan	25,81	24,83	26,65	25,68	28,50
5. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5,33	5,11	5,19	5,11	5,19
6. Keuangan	3,19	3,03	3,65	3,27	3,48
7. Jasa Kemasyarakatan	18,48	18,42	19,41	17,94	19,79
8. Lainnya ¹⁾	1,93	1,73	1,73	1,61	1,72
Jumlah	118,17	114,63	120,85	114,82	120,65

¹⁾Lapangan pekerjaan utama pada Sektor Lainnya terdiri dari: Sektor Pertambangan dan Sektor Listrik, Gas, dan Air

D. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

1. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Februari 2016 sebanyak 50,3 juta orang (41,72 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 70,3 juta orang (58,28 persen) bekerja pada kegiatan informal.
2. Dalam setahun terakhir (Februari 2015–Februari 2016), penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap berkurang sebanyak 180 ribu orang, begitu pula penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan berkurang sebanyak 320 ribu orang. Keadaan ini menyebabkan jumlah pekerja formal berkurang sekitar 500 ribu orang dan persentase pekerja formal turun dari 42,06 persen pada Februari 2015 menjadi 41,72 persen pada Februari 2016.
3. Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Dalam setahun terakhir (Februari 2015–Februari 2016), pekerja informal bertambah sebanyak 300 ribu orang, dan persentase pekerja informal meningkat dari 57,94 persen pada Februari 2015 menjadi 58,28 persen pada Februari 2016. Peningkatan pekerja informal berasal dari mereka yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja bebas baik di pertanian maupun nonpertanian, sementara penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri dan pekerja keluarga/tak dibayar justru mengalami penurunan.

Tabel 6.3
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2014–2016
(juta orang)

Status Pekerjaan Utama (1)	2014		2015		2016
	Februari (2)	Agustus (3)	Februari (4)	Agustus (5)	Februari (6)
1. Berusaha sendiri	20,32	20,49	21,65	19,53	20,39
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	19,74	19,27	18,80	18,19	21,00
3. Berusaha dibantu buruh tetap	4,14	4,18	4,21	4,07	4,03
4. Buruh/karyawan	43,35	42,38	46,62	44,43	46,30
5. Pekerja bebas di pertanian	4,74	5,09	5,08	5,09	5,24
6. Pekerja bebas di nonpertanian	6,75	6,41	6,80	7,45	7,00
7. Pekerja keluarga/tak dibayar	19,13	16,81	17,69	16,06	16,69
Jumlah	118,17	114,63	120,85	114,82	120,65

E. Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan

1. Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2016 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 52,4 juta orang (43,46 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 21,5 juta (17,80 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 13,7 juta orang mencakup sebanyak 3,2 juta orang (2,65 persen) berpendidikan Diploma dan sebanyak 10,5 juta orang (8,69 persen) berpendidikan Universitas.

Tabel 6.4
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2014–2016
(juta orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (1)	2014		2015		2016
	Februari (2)	Agustus (3)	Februari (4)	Agustus (5)	Februari (6)
1. SD ke bawah	55,31	53,96	54,61	50,83	52,43
2. Sekolah Menengah Pertama	21,06	20,35	21,47	20,70	21,48
3. Sekolah Menengah Atas	18,91	18,58	19,81	19,81	20,71
4. Sekolah Menengah Kejuruan	10,91	10,52	11,80	10,84	12,34
5. Diploma I/II/III	3,13	2,96	3,14	3,08	3,20
6. Universitas	8,85	8,26	10,02	9,56	10,49
Jumlah	118,17	114,63	120,85	114,82	120,65

2. Perbaikan kualitas penduduk bekerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas). Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan rendah menurun dari 76,1 juta orang (62,96 persen)

pada Februari 2015 menjadi 73,9 juta orang (61,26 persen) pada Februari 2016. Sementara penduduk bekerja berpendidikan tinggi meningkat dari 13,1 juta orang (10,89 persen) pada Februari 2015 menjadi 13,7 juta orang (11,34 persen) pada Februari 2016.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan

1. Jumlah pengangguran pada Februari 2016 mencapai 7,0 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun dari 5,81 persen pada Februari 2015 menjadi 5,50 persen pada Februari 2016.
2. Pada Februari 2016, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 9,84 persen, disusul oleh TPT Diploma I/II/III sebesar 7,22 persen, sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 3,44 persen.
3. Jika dibandingkan keadaan Februari 2015, TPT mengalami penurunan hampir pada setiap jenjang pendidikan kecuali pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Universitas.

Tabel 6.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2014–2016
(persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2014		2015		2016
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. SD ke bawah	3,69	3,04	3,61	2,74	3,44
2. Sekolah Menengah Pertama	7,44	7,15	7,14	6,22	5,76
3. Sekolah Menengah Atas	9,10	9,55	8,17	10,32	6,95
4. Sekolah Menengah Kejuruan	7,21	11,24	9,05	12,65	9,84
5. Diploma I/II/III	5,87	6,14	7,49	7,54	7,22
6. Universitas	4,31	5,65	5,34	6,40	6,22
Jumlah	5,70	5,94	5,81	6,18	5,50

G. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi

1. Pada Februari 2016, TPT tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Timur masing-masing sebesar 9,03 persen dan 8,86 persen sedangkan TPT terendah terjadi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Barat masing-masing sebesar 2,12 persen dan 2,72 persen.
2. Dibanding Agustus 2015, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yang mengalami peningkatan terbesar di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 2,83 persen poin, sedangkan TPT yang mengalami penurunan terbesar di Provinsi Maluku yaitu 2,95 persen poin.

Tabel 6.6
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi 2015–2016

Provinsi	2015				2016	
	Februari		Agustus		Februari	
	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	174,7	7,73	216,8	9,93	181,8	8,13
Sumatera Utara	421,2	6,39	428,8	6,71	428,0	6,49
Sumatera Barat	148,7	5,99	161,6	6,89	149,7	5,81
Riau	199,8	6,72	217,1	7,83	176,9	5,94
Jambi	46,2	2,73	70,3	4,34	79,1	4,66
Sumatera Selatan	202,2	5,03	238,9	6,07	159,5	3,94
Bengkulu	31,3	3,21	46,7	4,91	38,3	3,84
Lampung	139,5	3,44	196,9	5,14	183,5	4,54
Kep. Bangka Belitung	23,2	3,35	41,9	6,29	42,4	6,17
Kepulauan Riau	81,0	9,05	55,3	6,20	82,5	9,03
DKI Jakarta	463,9	8,36	368,2	7,23	306,2	5,77
Jawa Barat	1 875,9	8,40	1 794,9	8,72	1 899,7	8,57
Jawa Tengah	970,6	5,31	863,8	4,99	752,5	4,20
DI Yogyakarta	85,5	4,07	80,2	4,07	59,0	2,81
Jawa Timur	892,0	4,31	906,9	4,47	849,3	4,14
Banten	488,9	8,58	509,4	9,55	452,1	7,95
Bali	33,6	1,37	47,2	1,99	50,4	2,12
Nusa Tenggara Barat	120,1	4,98	128,4	5,69	87,2	3,66
Nusa Tenggara Timur	75,1	3,12	88,4	3,83	87,7	3,59
Kalimantan Barat	113,2	4,78	121,3	5,15	110,8	4,58
Kalimantan Tengah	40,4	3,14	57,8	4,54	47,2	3,67
Kalimantan Selatan	100,0	4,83	97,7	4,92	74,4	3,63
Kalimantan Timur	118,2	7,17	115,5	7,50	146,2	8,86
Kalimantan Utara	16,6	5,79	16,1	5,68	11,2	3,92
Sulawesi Utara	102,6	8,69	99,2	9,03	92,6	7,82
Sulawesi Tengah	42,6	2,99	56,8	4,10	51,7	3,46
Sulawesi Selatan	218,3	5,81	220,6	5,95	193,0	5,11
Sulawesi Tenggara	42,3	3,62	63,1	5,55	45,8	3,78
Gorontalo	16,3	3,06	24,1	4,65	21,9	3,88
Sulawesi Barat	11,7	1,81	20,6	3,35	17,4	2,72
Maluku	47,8	6,72	72,2	9,93	51,2	6,98
Maluku Utara	28,8	5,56	31,1	6,05	18,2	3,43
Papua Barat	18,8	4,61	33,4	8,08	25,0	5,73
Papua	63,6	3,72	69,5	3,99	51,7	2,97
Indonesia	7 454,8	5,81	7 560,8	6,18	7 024,2	5,50

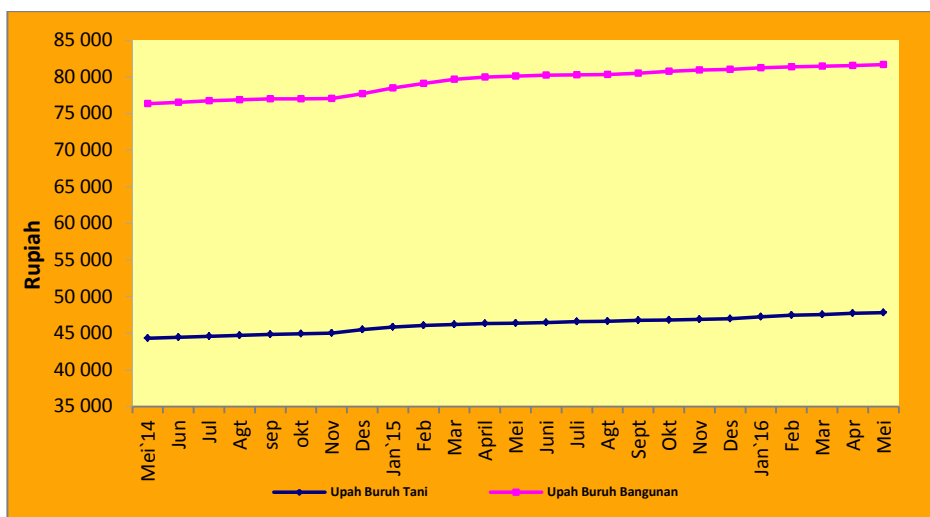
VII. UPAH BURUH MEI 2016

1. Upah Harian Buruh Tani

Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Mei 2016 naik sebesar 0,14 persen dibanding upah buruh tani bulan sebelumnya, yaitu dari Rp47.731,00 menjadi Rp47.796,00. Secara riil naik sebesar 0,01 persen, yaitu dari Rp37.559,00 menjadi Rp37.563,00.

Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Mei 2016 sebesar Rp47.796,00, naik 0,14 persen

Grafik 7.1
Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan
Mei 2014–Mei 2016



2. Upah Buruh Bangunan

Pada Mei 2016, rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) naik sebesar 0,15 persen dibanding upah nominal April 2016, yaitu dari Rp81.554,00 menjadi Rp81.677,00, sedangkan upah riil turun sebesar 0,09 persen, yaitu dari Rp66.202,00 menjadi Rp66.146,00.

Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan pada periode Mei 2016 sebesar Rp81.677,00, naik 0,15 persen

Tabel 7.1
Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah)
Mei 2014–Mei 2016

Bulan	Upah Buruh Tani (harian)		Upah Buruh Bangunan (harian)	
	Nominal	Riil ¹⁾	Nominal	Riil ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mei 2014	44 314	39 516	76 326	68 436
Juni	44 430	39 330	76 535	68 328
Juli	44 569	39 134	76 756	67 896
Agustus	44 717	39 119	76 854	67 665
September	44 833	39 045	76 991	67 601
Oktober	44 924	38 955	77 011	67 305
November	45 026	38 466	77 056	66 348
Desember	45 491	37 839	77 682	65 279
Januari 2015	45 846	38 144	78 484	66 114
Februari	46 059	38 605	79 083	66 861
Maret	46 180	38 522	79 657	67 233
April	46 306	38 546	79 970	67 253
Mei	46 386	38 383	80 087	67 019
Juni	46 458	38 130	80 237	66 786
Juli	46 572	37 887	80 293	66 216
Agustus	46 629	37 757	80 342	66 000
September	46 739	37 855	80 494	66 158
Oktober	46 800	37 918	80 744	66 418
November	46 881	37 822	80 946	66 447
Desember	46 995	37 486	81 002	65 861
Januari 2016	47 241	37 372	81 221	65 702
Februari	47 437	37 494	81 367	65 879
Maret	47 559	37 236	81 481	65 843
April	47 731	37 559	81 554	66 202
Mei	47 796	37 563	81 677	66 146

Catatan: ¹⁾ Upah riil = upah nominal/indeks konsumsi rumah tangga perdesaan, mulai Desember 2013 menggunakan tahun dasar (2012=100)

²⁾ Upah riil = upah nominal/IHK umum perkotaan menggunakan tahun dasar (2012=100)

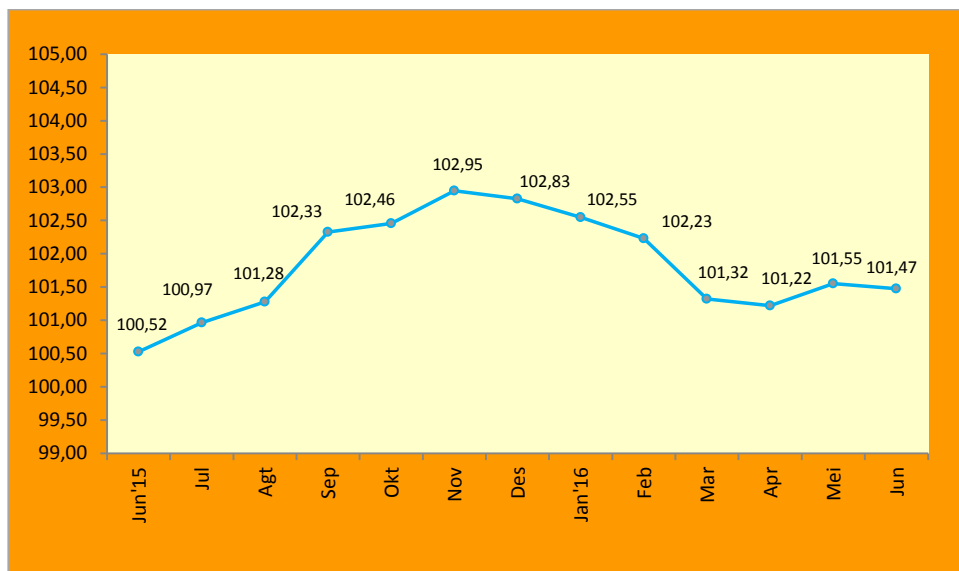
VIII. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN JUNI 2016

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

1. **NTP** Juni 2016 tercatat 101,47 atau turun sebesar 0,08 persen dibanding NTP Mei 2016 sebesar 101,55. Penurunan NTP bulan ini disebabkan turunnya NTP di dua subsektor penyusun NTP yaitu Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat turun masing-masing 0,46 persen dan 0,69 persen, sebaliknya Subsektor Tanaman Pangan naik sebesar 0,08 persen, Peternakan naik 0,55 persen, dan Perikanan naik 0,46 persen.

**NTP Juni 2016 naik
sebesar 0,32 persen**

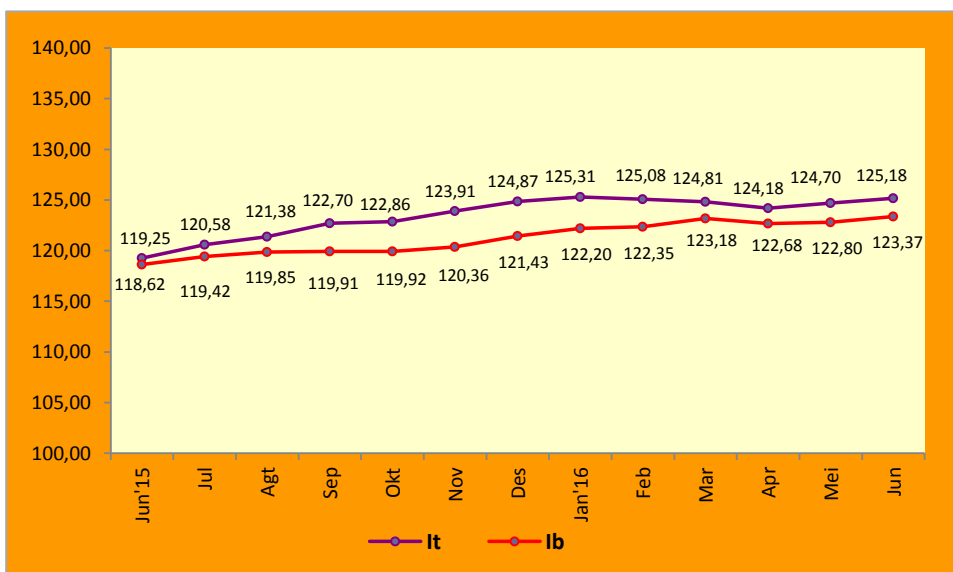
Grafik 8.1
Nilai Tukar Petani (NTP), Juni 2015–Juni 2016 (2012=100)



2. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada Juni 2016 naik 0,39 persen bila dibanding It pada Mei 2016, yaitu dari 124,70 menjadi 125,18. Kenaikan indeks tersebut disebabkan naiknya It di empat subsektor, yaitu Tanaman Pangan (0,58 persen), Tanaman Hortikultura (0,05 persen), Peternakan (0,90 persen), dan Perikanan (0,95 persen), sebaliknya Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun 0,22 persen.

- Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) pada Juni 2016 naik sebesar 0,46 persen dibanding Ib Mei 2016. Kenaikan indeks ini disebabkan naiknya indeks kelompok Konsumsi Rumah Tangga dan indeks kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal masing-masing sebesar 0,59 persen dan 0,15 persen.

Grafik 8.2
Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)
Juni 2015–Juni 2016 (2012=100)



- NTP Tanaman Pangan (NTPP) pada Juni 2016 naik sebesar 0,08 persen dibanding NTPP Mei 2016. Kenaikan NTPP disebabkan kenaikan It Tanaman Pangan (0,58 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Pangan (0,50 persen). NTP Tanaman Hortikultura (NTPH) turun sebesar 0,46 persen. Hal ini disebabkan kenaikan It Tanaman Hortikultura (0,05 persen) lebih kecil dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Hortikultura (0,51 persen). NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) turun sebesar 0,69 persen. Hal ini disebabkan It Tanaman Perkebunan Rakyat turun (0,22 persen), sebaliknya Ib Tanaman Perkebunan Rakyat naik (0,48 persen). NTP Peternakan (NTPT) naik sebesar 0,55 persen disebabkan kenaikan It Peternakan (0,90 persen) lebih besar dari kenaikan Ib Peternakan (0,35 persen). NTP Perikanan (NTNP) naik 0,46 persen disebabkan kenaikan It Perikanan (0,95 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Perikanan (0,49 persen).

Tabel 8.1
Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100)

Subsektor	Mei 2016	Juni 2016	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Gabungan/Nasional			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	101,55	101,47	-0,08
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	124,70	125,18	0,39
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	122,80	123,37	0,46
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	127,24	128,00	0,59
- Indeks BPPBM	114,02	114,19	0,15
Gabungan/Nasional tanpa Perikanan			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	101,49	101,39	-0,10
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	124,67	125,13	0,37
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	122,84	123,41	0,47
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	127,22	127,97	0,59
- Indeks BPPBM	114,09	114,26	0,15
1. Tanaman Pangan			
a. Nilai Tukar Petani (NTPP)	98,66	98,74	0,08
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	123,74	124,46	0,58
- Padi	120,09	120,87	0,66
- Palawija	134,14	134,59	0,34
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	125,42	126,05	0,50
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	127,78	128,54	0,60
- Indeks BPPBM	118,06	118,28	0,19
2. Tanaman Hortikultura			
a. Nilai Tukar Petani (NTPH)	103,21	102,74	-0,46
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	127,85	127,92	0,05
- Sayur-sayuran	125,28	124,23	-0,84
- Buah-buahan	130,13	131,18	0,80
- Tanaman Obat	120,86	119,82	-0,86
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	123,87	124,51	0,51
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	127,23	128,03	0,63
- Indeks BPPBM	113,67	113,80	0,11
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Nilai Tukar Petani (NTPR)	98,91	98,22	-0,69
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	121,83	121,56	-0,22
- Tanaman Perkebunan Rakyat	121,83	121,56	-0,22
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	123,17	123,77	0,48
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	126,35	127,10	0,60
- Indeks BPPBM	113,27	113,38	0,10

Subsektor	Mei 2016	Juni 2016	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
4. Peternakan			
a. Nilai Tukar Petani (NTPT)	106,86	107,45	0,55
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	126,27	127,40	0,90
- Ternak Besar	128,14	129,19	0,82
- Ternak Kecil	121,99	122,68	0,57
- Unggas	124,98	126,90	1,53
- Hasil Ternak	121,72	123,19	1,21
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	118,16	118,57	0,35
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	127,36	128,06	0,55
- Indeks BPPBM	109,93	110,11	0,16
5. Perikanan			
a. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	102,57	103,05	0,46
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan pembudidaya ikan (It)	124,61	125,80	0,95
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)	121,49	122,08	0,49
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	127,45	128,31	0,67
- Indeks BPPBM	111,52	111,66	0,12
5.1. Perikanan Tangkap			
a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,61	108,42	0,76
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It)	129,73	131,35	1,24
- Penangkapan Perairan Umum	128,88	129,53	0,50
- Penangkapan Laut	129,47	131,17	1,31
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	120,56	121,14	0,49
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	126,61	127,48	0,69
- Indeks BPPBM	111,10	111,20	0,09
5.2. Perikanan Budidaya			
a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	99,00	99,24	0,24
b. Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya Ikan (It)	120,94	121,83	0,74
- Budidaya Air Tawar	120,99	122,23	1,02
- Budidaya Laut	114,87	115,38	0,45
- Budidaya Air Payau	119,12	119,51	0,32
c. Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya Ikan (Ib)	122,16	122,77	0,49
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	128,08	128,93	0,66
- Indeks BPPBM	111,83	111,99	0,15

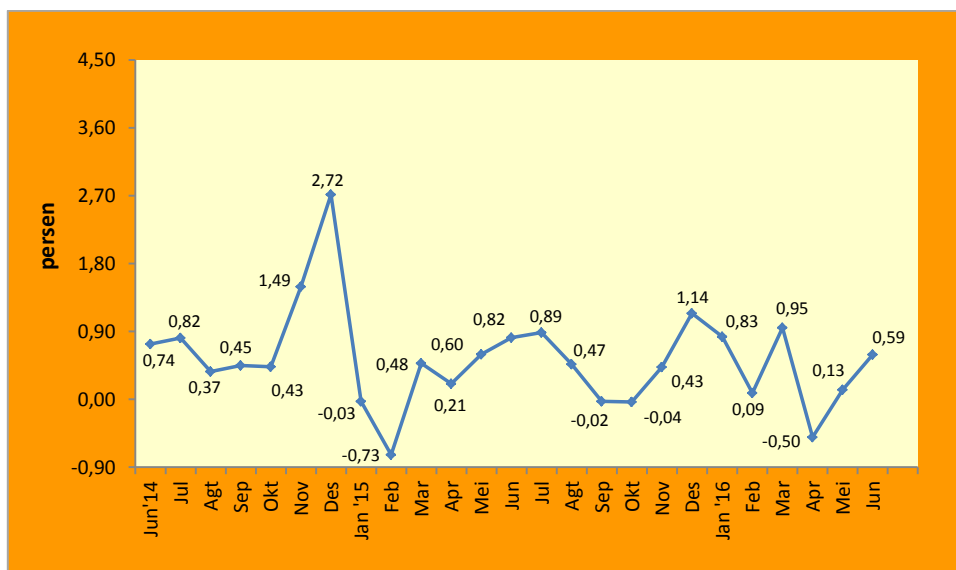
BPPBM = Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal

B. Inflasi Perdesaan

1. Pada Juni 2016 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,59 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 128,00. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 32 provinsi dan deflasi perdesaan di 1 provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 1,19 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,06 persen, sedangkan deflasi perdesaan terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 0,25 persen.

Pada Juni 2016 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,59 persen

Grafik 8.3
Inflasi Perdesaan, Juni 2014–Juni 2016



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga pada Juni 2016, terjadi kenaikan indeks harga di semua kelompok pengeluaran, yaitu: Bahan Makanan Makanan 0,63 persen; Minuman Jadi, Rokok, dan Tembakau 1,05 persen; Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 0,28 persen; Sandang 0,92 persen; Kesehatan 0,26 persen; Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 0,17 persen serta Transportasi dan Komunikasi 0,14 persen.
3. Inflasi perdesaan Juni 2016 sebesar 0,59 persen dipicu oleh naiknya harga komoditas gula pasir, daging ayam ras, telur ayam ras, rokok kretek filter, dan kentang.

Tabel 8.2
Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran
Juni 2014–Juni 2016

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi dan Komunikasi	Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Juni 2014	1,32	0,39	0,33	0,43	0,28	0,19	0,20	0,74
Juli	1,24	0,45	0,41	1,72	0,31	0,81	0,18	0,82
Agustus	0,48	0,36	0,26	0,17	0,33	0,27	0,22	0,37
September	0,48	0,51	0,61	0,08	0,38	0,22	0,33	0,45
Oktober	0,59	0,32	0,47	0,22	0,34	0,25	0,24	0,43
November	1,79	0,47	0,61	0,37	0,59	0,20	4,39	1,49
Desember	3,29	1,10	1,32	1,08	0,80	0,27	7,07	2,72
Januari 2015	0,52	0,88	1,18	0,70	0,83	0,42	-5,22	-0,03
Februari	-1,41	0,44	0,40	0,35	0,48	0,21	-2,68	-0,73
Maret	0,33	0,48	0,46	0,25	0,42	0,13	1,31	0,48
April	-0,68	0,60	0,52	0,38	0,43	0,18	2,24	0,21
Mei	0,97	0,46	0,31	0,38	0,26	0,08	0,30	0,60
Juni	1,35	0,70	0,36	0,53	0,23	0,30	0,15	0,82
Juli	1,52	0,38	0,28	1,65	0,31	0,56	0,24	0,89
Agustus	0,83	0,29	0,15	0,12	0,21	0,42	0,11	0,47
September	-0,40	0,26	0,26	0,25	0,26	0,25	0,17	-0,02
Oktober	-0,43	0,44	0,14	0,15	0,23	0,20	0,09	-0,04
November	0,62	0,47	0,28	0,18	0,21	0,18	0,13	0,43
Desember	2,22	0,61	0,26	0,21	0,22	0,13	0,14	1,14
Januari 2016	1,60	0,93	0,40	0,39	0,53	0,33	-1,28	0,83
Februari	-0,10	0,50	0,10	0,29	0,28	0,13	-0,16	0,09
Maret	1,88	0,48	0,18	0,25	0,29	0,09	0,03	0,95
April	-0,83	0,38	0,14	0,17	0,25	0,10	-2,28	-0,50
Mei	-0,22	0,90	0,21	0,24	0,23	0,14	-0,15	0,13
Juni	0,63	1,05	0,28	0,92	0,26	0,17	0,14	0,59

4. Tingkat inflasi perdesaan tahun kalender 2016 (Juni 2016 terhadap Desember 2015) adalah sebesar 2,10 persen dan tingkat inflasi perdesaan *year-on-year* (Juni 2016 terhadap Juni 2015) adalah sebesar 5,05 persen.

Tabel 8.3
Tingkat Inflasi Perdesaan Juni 2016, Tahun Kalender dan Year on Year 2016
Menurut Kelompok Pengeluaran
(2012=100)

Kelompok Pengeluaran	Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)			Inflasi Perdesaan Juni 2016	Tingkat Inflasi Perdesaan 2016	
	Juni 2015	Desember 2015	Juni 2016		Tahun Kalender	Year-on-Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	121,84	125,37	128,00	0,59	2,10	5,05
1. Bahan Makanan	128,24	133,89	137,87	0,63	2,97	7,51
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	117,38	120,28	125,47	1,05	4,31	6,89
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	117,29	118,91	120,49	0,28	1,33	2,73
4. Sandang	115,96	118,95	121,67	0,92	2,28	4,92
5. Kesehatan	113,56	115,22	117,35	0,26	1,85	3,33
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	110,91	112,86	113,95	0,17	0,96	2,74
7. Transportasi dan Komunikasi	123,20	124,29	119,75	0,14	-3,65	2,80

C. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

- Pada Juni 2016 terjadi kenaikan NTUP sebesar 0,24 persen. Hal ini terjadi karena kenaikan It (0,39 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan indeks BPPBM (0,15 persen). Kenaikan NTUP disebabkan oleh naiknya tiga subsektor penyusun NTUP yaitu NTUP Tanaman Pangan naik 0,39 persen, Peternakan naik sebesar 0,73 persen, dan Perikanan naik sebesar 0,83 persen, sebaliknya NTUP Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat turun masing-masing sebesar 0,06 persen dan 0,32 persen.
- Dari 33 provinsi yang dihitung NTUP-nya, 21 provinsi mengalami kenaikan dan 12 provinsi mengalami penurunan. Kenaikan NTUP tertinggi pada Juni 2016 terjadi di Provinsi Papua sebesar 1,56 persen, sebaliknya penurunan NTUP terbesar terjadi di Provinsi Bengkulu, yaitu sebesar 1,45 persen.

Tabel 8.4
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya,
Juni 2016 (2012=100)

Subsektor	Mei 2016	Juni 2016	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan	104,81	105,22	0,39
2. Tanaman Hortikultura	112,48	112,41	-0,06
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	107,55	107,21	-0,32
4. Peternakan	114,86	115,71	0,73
5. Perikanan	111,74	112,67	0,83
a. Tangkap	116,77	118,12	1,15
b. Budidaya	108,15	108,78	0,59
Nasional	109,36	109,63	0,24

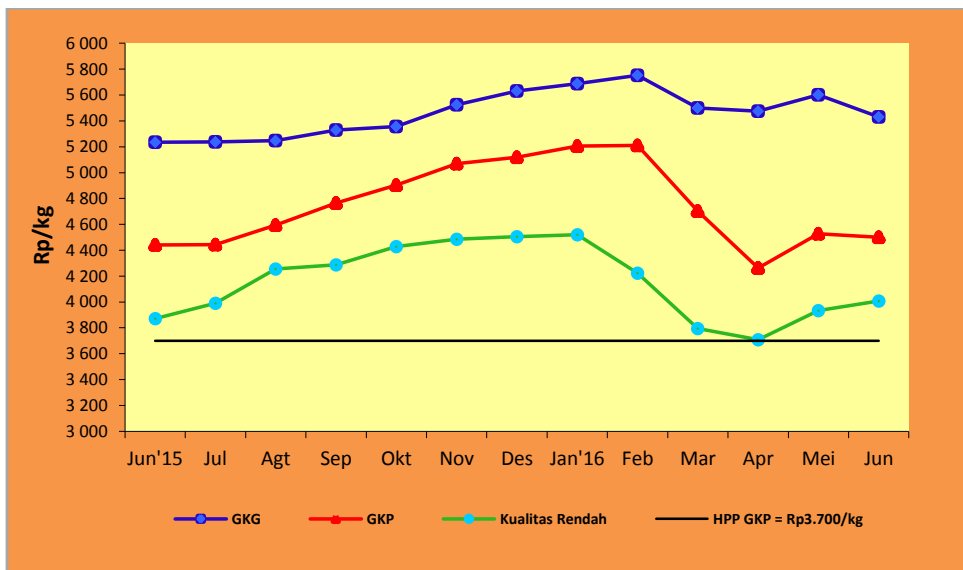
IX. HARGA PANGAN JUNI 2016

A. Harga Gabah dan Beras di Penggilingan

- Selama Juni 2016, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di petani naik 1,37 persen menjadi Rp4.501,00 per kg dan di penggilingan naik 1,56 persen menjadi Rp4.598,00 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Rata-rata harga GKP di petani Juni 2016 sebesar Rp4.501,00 per kg naik 1,37 perse

Grafik 9.1
Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas Juni 2015–Juni 2016



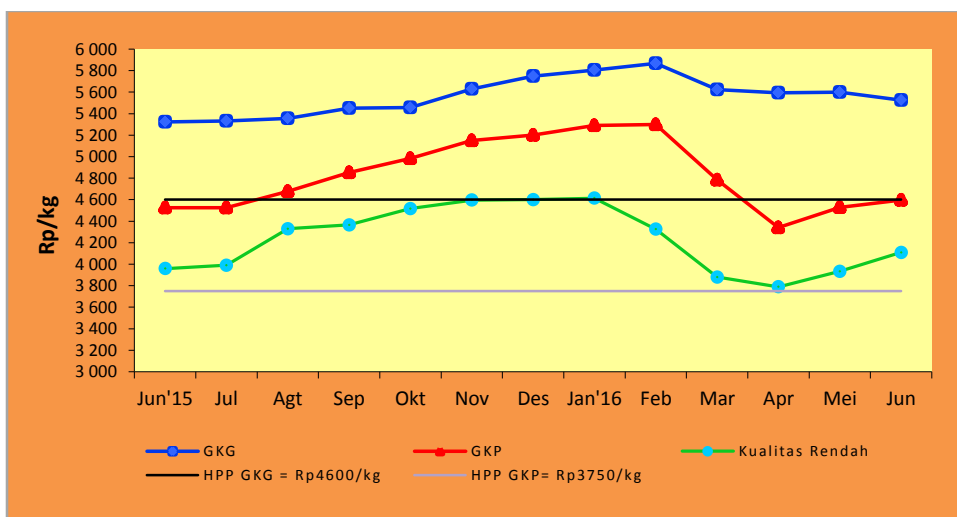
- Pada bulan yang sama, harga tertinggi di tingkat petani Rp9.183,00 per kg dan di tingkat penggilingan Rp9.285,00 per kg. Sedangkan harga terendah di tingkat petani dan penggilingan masing-masing Rp3.000,00 per kg dan Rp3.100,00 per kg. Harga tertinggi di tingkat petani dan penggilingan berasal dari GKG varietas Unus Mayang yang terjadi di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan). Sementara itu, harga terendah di tingkat petani dan penggilingan berasal dari gabah kualitas rendah varietas Ciherang yang terjadi di Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak (Banten).

Tabel 9.1
Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air
serta Perubahannya, Juni 2015–Juni 2016

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2015 Jun	18,18	4 442	0,30	12,69	5 235	7,14	25,09	3 873	4,71
Jul	18,53	4 444	0,05	12,70	5 238	0,06	25,23	3 902	0,76
Agt	18,54	4 595	3,40	12,20	5 248	0,19	24,91	4 256	9,06
Sep	18,47	4 765	3,70	12,56	5 330	1,57	25,22	4 287	0,74
Okt	18,22	4 905	2,93	12,54	5 356	0,48	25,13	4 428	3,29
Nov	18,36	5 070	3,38	12,33	5 524	3,13	28,57	4 485	1,28
Des	18,38	5 118	0,93	12,66	5 632	1,96	26,48	4 504	0,43
2016 Jan	17,81	5 206	1,72	12,23	5 689	1,02	26,09	4 520	0,35
Feb	18,01	5 211	0,10	12,64	5 753	1,13	25,78	4 223	-6,57
Mar	19,33	4 703	-9,76	12,72	5 501	-4,39	26,24	3 794	-10,15
Apr	18,98	4 262	-9,36	12,37	5 474	-0,49	25,36	3 709	-2,25
Mei	17,80	4 440	4,17	12,70	5 510	0,65	25,00	3 838	3,48
Jun	18,17	4 501	1,37	12,31	5 430	-1,45	24,54	4 008	4,42
Perubahan (%) Jun'16 thd Jun'15			1,33			3,72			3,49

- Rata-rata harga GKG di petani selama Juni 2016 turun 1,45 persen menjadi Rp5.430,00 per kg, sedangkan di penggilingan turun 1,32 persen menjadi Rp5.526,00 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama bulan lalu. Demikian juga harga gabah kualitas rendah di petani dan penggilingan mengalami kenaikan masing-masing 4,42 persen menjadi Rp4.008,00 per kg dan 4,48 persen menjadi Rp4.110,00 per kg.
- Selama periode Juni 2015–Juni 2016, rata-rata harga tertinggi di tingkat petani untuk GKP dan GKG, masing-masing Rp5.211,00 per kg dan Rp5.753,00 per kg terjadi pada Februari 2016, sedangkan gabah kualitas Rendah Rp4.520,00 per kg terjadi pada Januari 2016. Sebaliknya, rata-rata harga terendah pada GKP dan gabah kualitas Rendah masing-masing Rp4.262,00 per kg dan Rp3.709,00 per kg terjadi pada April 2016, sedangkan GKG Rp5.235,00 per kg terjadi pada Juni 2015.

Grafik 9.2
Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas
Juni 2015–Juni 2016



5. Pada periode Juni 2015–Juni 2016, di tingkat penggilingan, rata-rata harga tertinggi untuk GKP dan GKG, masing-masing Rp5.298,00 per kg dan Rp5.869,00 per kg terjadi pada Februari 2016, sedangkan gabah kualitas Rendah Rp4.614,00 per kg terjadi pada Januari 2016. Untuk rata-rata harga terendah pada GKG Rp5.322,00 terjadi pada Juni 2015, sedangkan GKP dan gabah kualitas Rendah masing-masing Rp4.340,00 per kg dan Rp3.790,00 per kg terjadi pada April 2016.
6. Dibandingkan Juni 2015, rata-rata harga di tingkat petani pada Juni 2016 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,33 persen, 3,72 persen, dan 3,49 persen. Di tingkat penggilingan pada Juni 2016 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,61 persen, 3,83 persen, dan 3,79 persen
7. Berdasarkan 1.007 observasi pada transaksi penjualan gabah di 22 provinsi selama Juni 2016, masih didominasi transaksi penjualan GKP sebanyak 732 observasi (72,69 persen), gabah kualitas rendah sebanyak 161 observasi (15,99 persen), dan GKG sebanyak 114 observasi (11,32 persen). Dari sejumlah observasi tersebut, terdapat 0,14 persen kasus harga GKP di tingkat petani di bawah HPP. Sementara di tingkat penggilingan terdapat 1,18 persen kasus harga GKP dan GKG di bawah HPP.

Tabel 9.2
Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air
serta Perubahannya, Juni 2015–Juni 2016

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2015 Jun	18,18	4 525	0,35	12,69	5 322	6,97	25,09	3 960	4,43
Jul	18,53	4 525	0,01	12,70	5 331	0,17	25,23	3 990	0,77
Agt	18,54	4 677	3,35	12,20	5 356	0,46	24,91	4 329	8,49
Sep	18,47	4 852	3,73	12,56	5 450	1,76	25,22	4 365	0,84
Okt	18,22	4 984	2,73	12,54	5 457	0,12	25,13	4 518	3,49
Nov	18,36	5 151	3,36	12,33	5 629	3,15	28,57	4 597	1,75
Des	18,38	5 202	0,98	12,66	5 748	2,12	26,48	4 601	0,09
2016 Jan	17,81	5 291	1,71	12,23	5 805	1,00	26,09	4 614	0,29
Feb	18,01	5 298	0,14	12,64	5 869	1,09	25,78	4 325	-6,26
Mar	19,33	4 783	-9,72	12,72	5 622	-4,20	26,24	3 881	-10,28
Apr	18,98	4 340	-9,27	12,37	5 593	-0,53	25,36	3 790	-2,34
Mei	17,80	4 527	4,32	12,70	5 600	0,14	25,00	3 934	3,80
Jun	18,17	4 598	1,56	12,31	5 526	-1,32	24,54	4 110	4,48
Perubahan (%) Jun'16 thd Jun'15			1,61			3,83			3,79

8. Pada Juni 2016 rata-rata harga beras kualitas premium di tingkat penggilingan sebesar Rp9.354,00 per kg naik sebesar 1,88 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata harga beras kualitas medium di tingkat penggilingan sebesar Rp8.973,00 per kg naik sebesar 1,55 persen. Sedangkan rata-rata harga beras kualitas rendah di tingkat penggilingan sebesar Rp8.582,00 per kg naik sebesar 1,10 persen.

Pada Juni 2016 rata-rata harga beras Medium di Penggilingan sebesar Rp8.973,00 per kg, naik 1,55 persen

9. Dibandingkan dengan Juni 2015, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Juni 2016 untuk kualitas premium naik 4,92 persen, kualitas medium naik 4,26 persen dan kualitas rendah naik 5,68 persen.

Tabel 9.3
Rata-Rata Harga Beras di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah (*Broken*), Juni 2015–Juni 2016

Tahun/ Bulan	Premium			Medium			Rendah		
	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>) (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>) (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2015 Jun	8 915	2,36	7,55	8 606	1,00	15,48	8 121	0,73	24,03
Jul	8 945	0,33	7,28	8 648	0,49	16,00	8 308	2,30	23,34
Agt	9 127	2,03	7,51	8 741	1,07	15,56	8 725	5,02	23,55
Sep	9 444	3,48	7,48	8 940	2,27	15,32	8 906	2,08	23,37
Okt	9 455	0,12	7,34	8 961	0,24	15,56	8 917	0,12	22,91
Nov	9 564	1,16	7,46	9 272	3,47	15,29	9 032	1,29	22,85
Des	9 664	1,04	7,54	9 451	1,93	15,40	9 203	1,90	23,04
2016 Jan	9 723	0,62	7,17	9 548	1,03	15,29	9 280	0,84	23,52
Feb	9 785	0,63	7,17	9 622	0,77	15,41	9 195	-0,93	23,61
Mar	9 572	-2,18	7,33	9 444	-1,84	15,37	8 995	-2,17	23,39
Apr	9 128	-4,64	7,29	8 959	-5,14	15,51	8 511	-5,39	23,40
Mei	9 182	0,59	7,24	8 836	-1,38	15,74	8 488	-0,26	22,90
Jun	9 354	1,88	7,35	8 973	1,55	15,55	8 582	1,10	23,04
Perubahan (%) Jun'16 thd Jun'15		4,92			4,26			5,68	

Keterangan: Premium: Maksimum beras patah (*Broken*) s.d. 10%
Medium: Beras patah (*Broken*) 10,1% - 20%
Rendah: Beras patah (*Broken*) 20,1% - 25%

B. Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok

- Secara nasional, rata-rata harga beras pada Juni 2016 naik 0,58 persen dibanding Mei 2016. Dibandingkan Juni 2015, harga beras naik 5,55 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 3,45 persen. Artinya, pemilik beras (pedagang, petani, konsumen, BULOG, dan industri berbahan baku beras) mengalami kenaikan nilai riil sebesar 2,10 persen. Kenaikan tertinggi terjadi di Bungo (4 persen) serta Bekasi, Depok, dan Batam (masing-masing 3 persen).

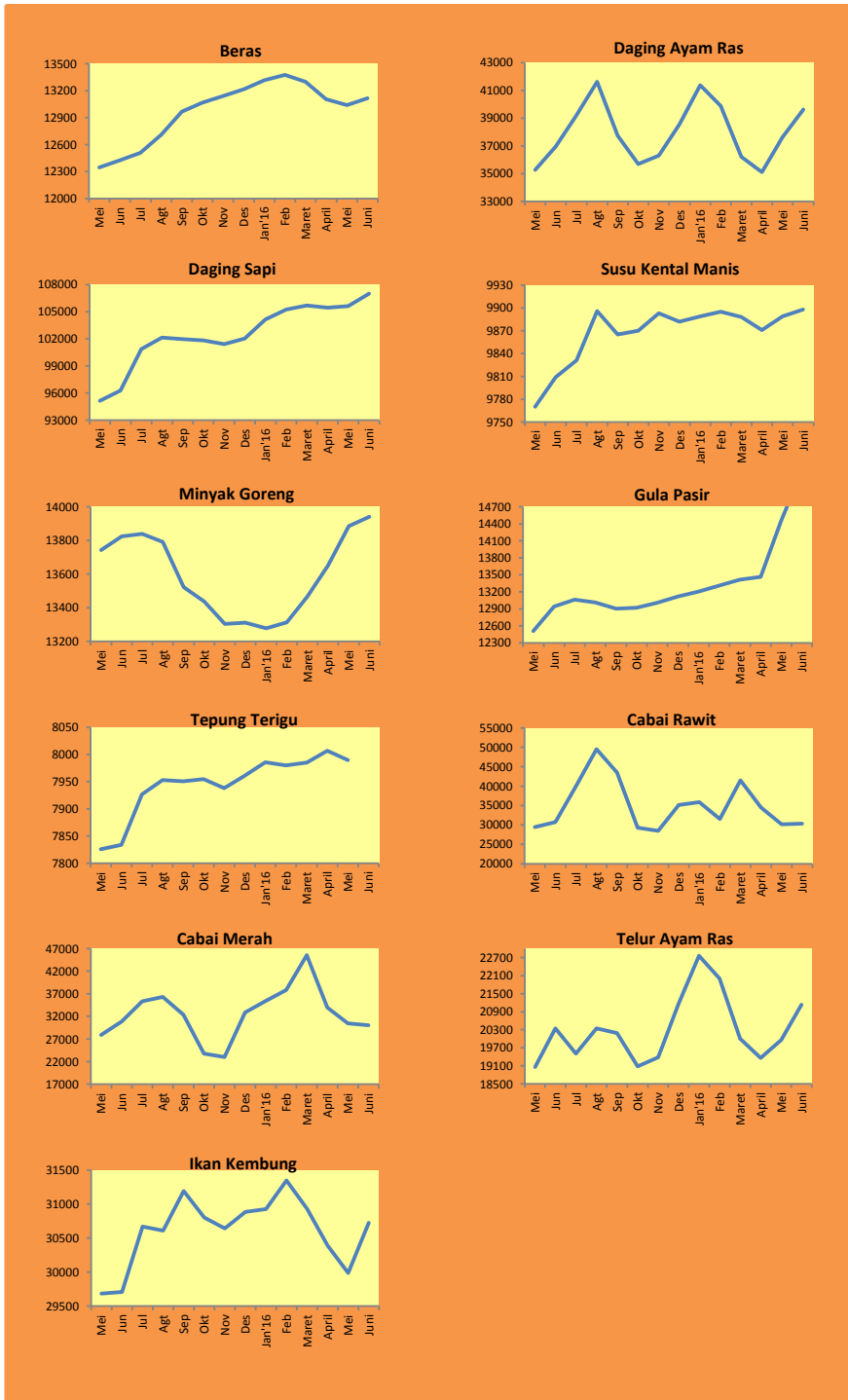
Rata-rata harga beras Juni 2016 sebesar Rp13.115 per kg, naik 0,58 persen

2. Harga gula pasir naik 6,00 persen dibanding Mei 2016 atau naik 18,44 persen dibanding Juni 2015. Kenaikan tertinggi terjadi di Balikpapan (17 persen) dan Tanjung (15 persen). Harga telur ayam ras naik 5,86 persen dibanding Mei 2016 atau naik 3,86 persen dibanding Juni 2015. Kenaikan tertinggi terjadi di Palu (20 persen) dan Sorong (16 persen). Harga daging ayam ras naik 5,36 persen dibanding Mei 2016 atau naik 7,28 persen dibanding Juni 2015. Kenaikan tertinggi terjadi di Bima (28 persen) dan Lhokseumawe (24 persen). Harga ikan kembung naik sebesar 2,46 persen dibanding Mei 2016 atau naik 3,43 persen dibanding Juni 2015. Kenaikan tertinggi terjadi di Mamuju (29 persen) dan Tanjung Pandan (19 persen). Harga daging sapi naik 1,29 persen dibanding Mei 2016 atau naik 11,12 persen dibanding Juni 2015. Kenaikan tertinggi terjadi di Ternate (9 persen) dan Tembilahan (8 persen).
3. Komoditas lain seperti cabai rawit, minyak goreng, tepung terigu, susu kental manis, dan cabai merah perubahannya relatif rendah.

Tabel 9.4
Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok
Juni 2015–Juni 2016 (rupiah)

Bulan	Beras (kg)	Daging Ayam Ras (kg)	Daging Sapi (kg)	Susu Kental Manis (385 gram)	Minyak Goreng (liter)	Gula Pasir (kg)	Tepung Terigu (kg)	Cabai Rawit (kg)	Cabai Merah (kg)	Telur Ayam Ras (kg)	Ikan Kembung (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Juni'15	12 425	36 944	96 279	9 809	13 824	12 941	7 834	30 698	30 884	20 350	29 708
Juli	12 509	39 231	100 862	9 831	13 838	13 065	7 927	39 957	35 319	19 512	30 671
Agustus	12 709	41 616	102 143	9 896	13 790	13 013	7 953	49 551	36 333	20 345	30 610
September	12 968	37 742	101 959	9 865	13 521	12 906	7 951	43 471	32 344	20 194	31 195
Oktober	13 067	35 693	101 826	9 870	13 436	12 918	7 955	29 282	23 740	19 079	30 805
November	13 139	36 296	101 409	9 893	13 302	13 008	7 938	28 465	23 028	19 379	30 642
Desember	13 217	38 550	102 038	9 882	13 310	13 116	7 961	35 157	32 831	21 156	30 884
Januari'16	13 319	41 372	104 120	9 889	13 277	13 208	7 986	35 881	35 412	22 760	30 927
Februari	13 376	39 862	105 224	9 895	13 313	13 310	7 980	31 557	37 845	22 007	31 348
Maret	13 301	36 203	105 676	9 888	13 466	13 415	7 985	41 504	45 554	20 009	30 931
April	13 105	35 102	105 444	9 871	13 649	13 463	8 007	34 498	33 979	19 361	30 390
Mei	13 039	37 619	105 623	9 889	13 885	14 459	7 990	30 158	30 445	19 965	29 989
Juni	13 115	39 635	106 986	9 898	13 941	15 327	8 019	30 339	30 031	21 135	30 727
Juni'16 thd Mei'16	0,58	5,36	1,29	0,09	0,40	6,00	0,36	0,60	-1,36	5,86	2,46
Juni'16 thd Juni'15	5,55	7,28	11,12	0,91	0,85	18,44	2,36	-1,17	-2,76	3,86	3,43
(dalam persen)											

Grafik 9.3
Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok
Mei 2015–Juni 2016 (rupiah)



X. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN I-2016 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR JUNI 2016

A. INDEKS HARGA PRODUSEN

Indeks Harga Produsen (IHP) gabungan dari Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan pada triwulan I-2016 sebesar 128,64. Pada triwulan I-2016, IHP gabungan tersebut mengalami

Pada triwulan I-2016 terjadi inflasi harga produsen sebesar 0,44 persen

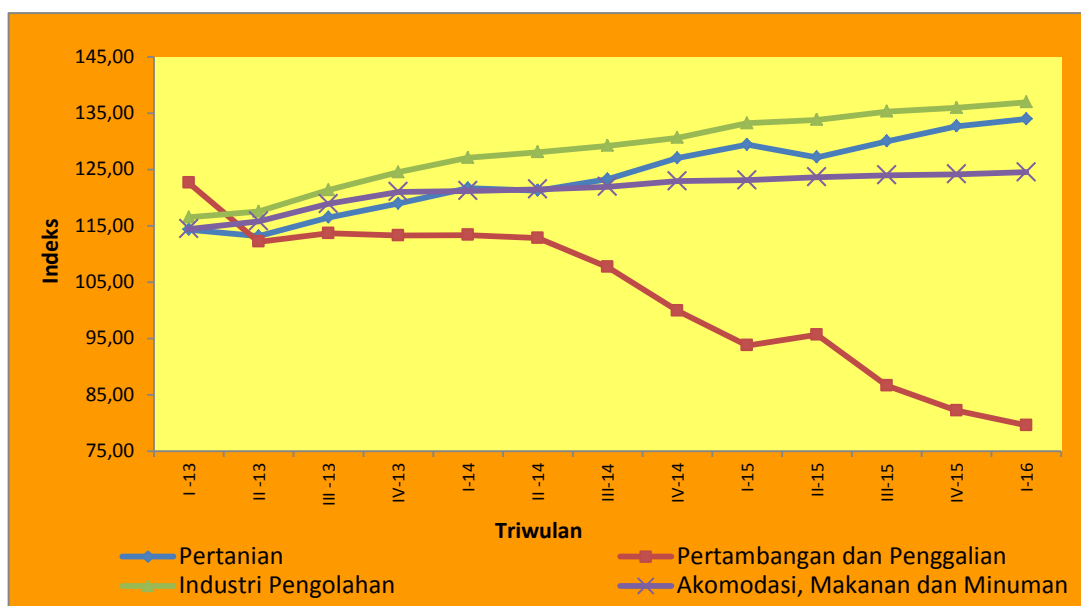
kenaikan sebesar 0,44 persen dibandingkan IHP triwulan IV-2015 sebesar 128,07 (*q-to-q*). IHP Sektor Pertanian dan IHP Sektor Industri Pengolahan naik masing-masing sebesar 0,96 persen dan 0,73 persen, sebaliknya IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar 3,18 persen. Adapun IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan I-2016 sebesar 124,55 naik 0,30 persen dibandingkan IHP triwulan IV-2015 sebesar 124,18 (*q-to-q*). Perubahan IHP triwulan I-2016 terhadap triwulan I-2015 (*y-on-y*) sebesar 1,16 persen, yaitu dari 127,16 pada triwulan I-2015 menjadi 128,64 pada triwulan I-2016. Kenaikan indeks tersebut disebabkan oleh naiknya indeks atau inflasi harga produsen pada Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan, masing-masing sebesar 3,49 persen dan 2,79 persen. Sebaliknya Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami deflasi (*y-on-y*) sebesar 15,12 persen. IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan I-2016 terhadap triwulan I-2015 (*y-on-y*) mengalami kenaikan sebesar 1,15 persen, yaitu dari 123,13 pada triwulan I-2015 menjadi 124,55 pada triwulan I-2016.

Tabel 10.1
Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor
Triwulan I-2016

Sektor	IHP Triw I- 2015	IHP Triw IV- 2015	IHP Triw I- 2016	Inflasi Harga Produsen (q-to-q) ¹⁾ (%)		Inflasi Harga Produsen (y-on-y) ²⁾ (%)	
				Triw IV- 2015	Triw I- 2016	Triw I- 2015	Triw I- 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gabungan (1+2+3)	127,16	128,07	128,64	0,29	0,44	2,41	1,16
1. Pertanian	129,44	132,69	133,96	2,06	0,96	6,35	3,49
2. Pertambangan dan Penggalian	93,76	82,20	79,59	-5,10	-3,18	-17,30	-15,12
3. Industri Pengolahan	133,23	135,95	136,95	0,47	0,73	4,82	2,79
4. Akomodasi, Makanan dan Minuman	123,13	124,18	124,55	0,16	0,30	1,59	1,15

Keterangan: 1). Inflasi Produsen (q-to-q) adalah persentase perubahan IHP triwulan t terhadap triwulan t-1
2). Inflasi Produsen (y-on-y) adalah persentase perubahan IHP triwulan t-2016 terhadap triwulan t-2015

Grafik 10.1
Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor
Triwulan I-2013 s.d. Triwulan I-2016



1. Sektor Pertanian

IHP Sektor Pertanian pada triwulan I-2016 naik 0,96 persen (*q-to-q*), yaitu dari 132,69 pada triwulan IV-2015 menjadi 133,96 pada triwulan I-2016. Tiga subsektor pada Sektor Pertanian mengalami inflasi tinggi, diantaranya adalah Subsektor Perkebunan (1,65 persen), Subsektor Peternakan (1,49 persen), dan Subsektor Kehutanan (1,00 persen). Apabila dibandingkan dengan triwulan I-2015, Sektor Pertanian pada triwulan I-2016 mengalami inflasi harga produsen (*y-on-y*) sebesar 3,49 persen, yaitu dari 129,44 pada triwulan I-2015 menjadi 133,96 pada triwulan I-2016. Subsektor Tanaman Bahan Makanan merupakan penyebab utama kenaikan IHP pada periode tersebut yaitu sebesar 5,27 persen, diikuti oleh Subsektor Peternakan sebesar 5,23 persen dan Subsektor Kehutanan sebesar 4,98 persen. Sebaliknya Subsektor Perkebunan mengalami deflasi sebesar 2,14 persen.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan I-2016 sebesar 79,59 mengalami penurunan sebesar 3,18 persen dibandingkan IHP pada triwulan sebelumnya sebesar 82,20 (*q-to-q*). Deflasi harga produsen pada sektor ini dipengaruhi oleh turunnya IHP pada Subsektor Pertambangan sebesar 4,63 persen. Sedangkan IHP Subsektor Penggalian naik sebesar 0,98 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian triwulan I-2016 terhadap triwulan I-2015 (*y-on-y*) mengalami penurunan sebesar 15,12 persen, yaitu dari 93,76 pada triwulan I-2015 menjadi 79,59 pada triwulan I-2016. Deflasi harga produsen (*y-on-y*) pada Sektor Pertambangan dan Penggalian dipengaruhi oleh turunnya IHP Subsektor Pertambangan sebesar 19,93 persen. Sedangkan pada Sektor Penggalian mengalami kenaikan sebesar 1,42 persen terhadap triwulan I-2015 (*y-on-y*).

3. Sektor Industri Pengolahan

Pada triwulan I-2016, IHP Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan sebesar 0,73 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 135,95 pada triwulan IV-2015 menjadi 136,95 pada triwulan I-2016 (*q-to-q*). Tiga subsektor pada Sektor Industri Pengolahan yang mengalami inflasi tinggi adalah Subsektor Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak (3,29 persen); Subsektor Industri Minuman dan Rokok (2,14 persen); dan Subsektor Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak (1,38 persen). Sedangkan untuk subsektor yang mengalami deflasi antara lain Subsektor Pengilangan Minyak Bumi dan Gas (2,09 persen); Subsektor Industri Pupuk (1,38

persen); dan Subsektor Industri Logam Dasar (1,22 persen). Dibandingkan triwulan I-2015, IHP Sektor Industri Pengolahan pada triwulan I-2016 (*y-on-y*) mengalami kenaikan (2,79 persen) dari 133,23 menjadi 136,95. Penyebab kenaikan IHP terutama terjadi pada Subsektor Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak (6,61 persen); Subsektor Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak (6,11 persen); dan Subsektor Industri Minuman dan Rokok (5,50 persen). Sedangkan untuk subsektor yang mengalami deflasi adalah Subsektor Industri Logam Dasar (2,98 persen); Subsektor Pengilangan Minyak Bumi dan Gas (1,91 persen); dan Subsektor Industri Karet, Plastik, dan Hasil-hasilnya (0,77 persen).

4. Sektor Akomodasi, Makanan, dan Minuman

IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman pada triwulan I-2016 sebesar 124,55 mengalami kenaikan 0,30 persen dibandingkan IHP pada triwulan sebelumnya yang sebesar 124,18 (*q-to-q*). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan IHP Subsektor Makanan dan Minuman dan Subsektor Akomodasi masing-masing sebesar 0,33 persen dan 0,08 persen. IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan I-2016 terhadap triwulan I-2015 (*y-on-y*) naik sebesar 1,15 persen, yaitu dari 123,13 menjadi 124,55. Hal ini diakibatkan oleh Inflasi Harga Produsen Subsektor Makanan dan Minuman dan Subsektor Akomodasi masing-masing sebesar 1,20 persen dan 0,86 persen.

Tabel 10.2
Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor
Triwulan I-2016

Sektor/Subsektor	IHP Triw I- 2015	IHP Triw IV- 2015	IHP Triw I- 2016	Inflasi Harga Produsen (q-to-q) ¹⁾ (%)		Inflasi Harga Produsen (y-on-y) ²⁾ (%)	
				Triw IV- 2015	Triw I- 2016	Triw I- 2015	Triw I- 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian	129,44	132,69	133,96	2,06	0,96	6,35	3,49
1. Tanaman Bahan Makanan	138,62	144,82	145,93	5,53	0,77	8,75	5,27
2. Perkebunan	119,65	115,18	117,08	-2,50	1,65	0,43	-2,14
3. Peternakan	121,41	125,89	127,76	-0,08	1,49	5,87	5,23
4. Perikanan	123,75	126,54	126,97	0,03	0,34	6,58	2,59
5. Kehutanan	135,12	140,45	141,85	0,28	1,00	7,40	4,98
Pertambangan dan Penggalian	93,76	82,20	79,59	-5,10	-3,18	-17,30	-15,12
1. Pertambangan	86,24	72,41	69,06	-6,79	-4,63	-22,66	-19,93
2. Penggalian	133,91	134,49	135,81	0,15	0,98	8,58	1,42
Industri Pengolahan	133,23	135,95	136,95	0,47	0,73	4,82	2,79
1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-Buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak	136,89	141,29	145,94	0,81	3,29	3,77	6,61
2. Industri Susu dan Makanan Dari Susu	113,68	116,33	116,41	0,23	0,06	4,37	2,40
3. Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak	143,72	150,43	152,51	3,16	1,38	10,53	6,11
4. Industri Makanan Lainnya	127,01	130,34	132,09	0,67	1,35	5,15	4,00
5. Industri Minuman dan Rokok	132,84	137,21	140,14	0,66	2,14	6,44	5,50
6. Industri Pemintalan dan Pertununan Tekstil	126,01	131,07	132,12	1,13	0,80	2,42	4,85
7. Industri Pakaian Jadi dan Alas Kaki	148,66	152,88	154,25	0,36	0,90	5,44	3,76
8. Industri Kayu Gergajian dan Olahan	156,28	159,06	158,39	0,57	-0,42	3,97	1,35
9. Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Cetakan	131,24	132,90	131,84	1,03	-0,80	8,70	0,46
10. Industri Pupuk	129,59	130,58	128,78	-1,35	-1,38	2,47	-0,63
11. Industri Kimia Dasar, Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	143,79	144,65	144,41	-0,39	-0,17	10,46	0,43
12. Pengilangan Minyak Bumi dan Gas	126,86	127,09	124,43	-0,93	-2,09	-4,29	-1,91
13. Industri Karet, Plastik, dan Hasil-Hasilnya	114,78	114,16	113,90	-1,72	-0,23	1,33	-0,77
14. Industri Barang Mineral Bukan Logam	141,38	141,15	142,86	0,44	1,21	6,34	1,05
15. Industri Logam Dasar	113,11	111,10	109,74	-0,52	-1,22	5,30	-2,98
16. Industri Barang-Barang dari Logam	118,73	119,00	119,04	-0,16	0,03	5,23	0,26
17. Industri Mesin, Listrik, Elektronik, dan Perlengkapannya	134,58	137,63	139,17	0,10	1,12	5,44	3,41
18. Industri Alat Angkutan	127,67	130,86	131,50	0,80	0,49	2,40	3,00
19. Industri Perabot Rumah Tangga dan Barang Lainnya	143,70	147,71	148,51	0,69	0,54	4,58	3,35
Akomodasi, Makanan dan Minuman	123,13	124,18	124,55	0,16	0,30	1,59	1,15
1. Akomodasi	138,14	139,21	139,32	0,23	0,08	0,67	0,86
2. Makanan dan Minuman	120,93	121,98	122,38	0,14	0,33	1,74	1,20

Keterangan: 1) Inflasi Produsen (q-to-q) adalah persentase perubahan IHP triwulan t terhadap triwulan t-1

2) Inflasi Produsen (y-on-y) adalah persentase perubahan IHP triwulan t-2016 terhadap triwulan t-2015

B. INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR (IHPB)

1. Pada Juni 2016, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum tanpa impor migas dan ekspor migas naik sebesar 0,97 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada Sektor Pertanian, yaitu sebesar 2,58 persen dan terendah pada Kelompok Barang Impor Nonmigas sebesar 0,41 persen.

Pada Juni 2016 IHPB tanpa impor migas dan ekspor migas naik sebesar 0,97 persen

Pada Mei 2016 IHPB Umum naik sebesar 1,44 persen dibandingkan IHPB Umum bulan sebelumnya. Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada Kelompok Barang Ekspor sebesar 5,98 persen dan yang terkecil adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,12 persen. Sektor Pertanian, Sektor Industri, dan Kelompok Barang Impor naik masing-masing sebesar 0,25 persen; 0,53 persen; dan 0,33 persen.

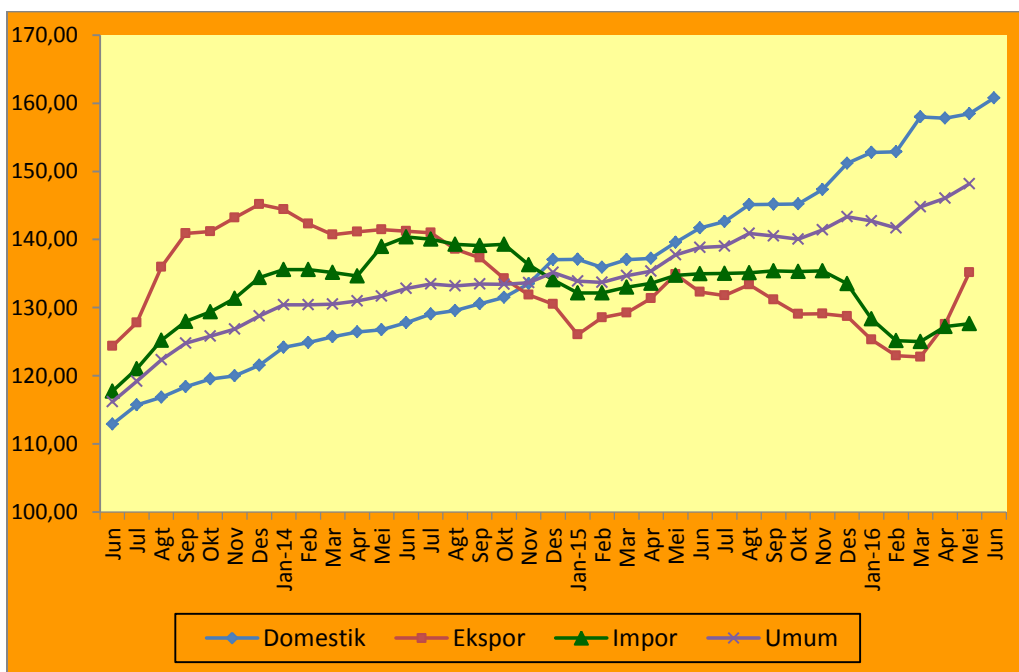
Tabel 10.3
Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia
April 2016 – Juni 2016, (2010=100)

Sektor/Kelompok	April 2016	Mei 2016	Juni 2016	Perubahan	
				Mei 2016 terhadap April 2016 (%)	Juni 2016 terhadap Mei 2016 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	348,58	349,45	358,46	0,25	2,58
2. Pertambangan dan Penggalian	117,93	118,07	116,44	0,12	-1,38
3. Industri	132,01	132,70	134,28	0,53	1,19
Domestik	157,80	158,48	160,77	0,43	1,45
4. Impor Nonmigas	135,42	135,76	136,32	0,25	0,41
Impor	127,23	127,65		0,33	
5. Ekspor Nonmigas	141,29	149,04	148,23	5,49	-0,55
Ekspor	127,54	135,17		5,98	
Umum Nonmigas	151,51	153,37	154,86	1,23	0,97
Umum	146,07	148,17		1,44	

Tabel 10.4
Tingkat Inflasi Perdagangan Besar Juni 2016 (2010=100)

Sektor/Kelompok	IHPB				Perubahan Juni terhadap Mei 2016	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar	
	Juni 2015	Desember 2015	Mei 2016	Juni 2016		Tahun Kalender 2016	Year-on-Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	233,63	303,63	349,45	358,46	2,58	18,06	53,43
2. Pertambangan dan Penggalian	119,43	119,17	118,07	116,44	-1,38	-2,29	-2,50
3. Industri	129,50	130,55	132,70	134,28	1,19	2,85	3,68
4. Impor Nonmigas	130,76	132,86	135,76	136,32	0,41	2,60	4,25
5. Ekspor Nonmigas	134,84	138,38	149,04	148,23	-0,55	7,11	9,93
Umum Nonmigas	138,84	146,14	153,37	154,86	0,97	5,97	11,54

Grafik 10.2
Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia
Juni 2013–Juni 2016



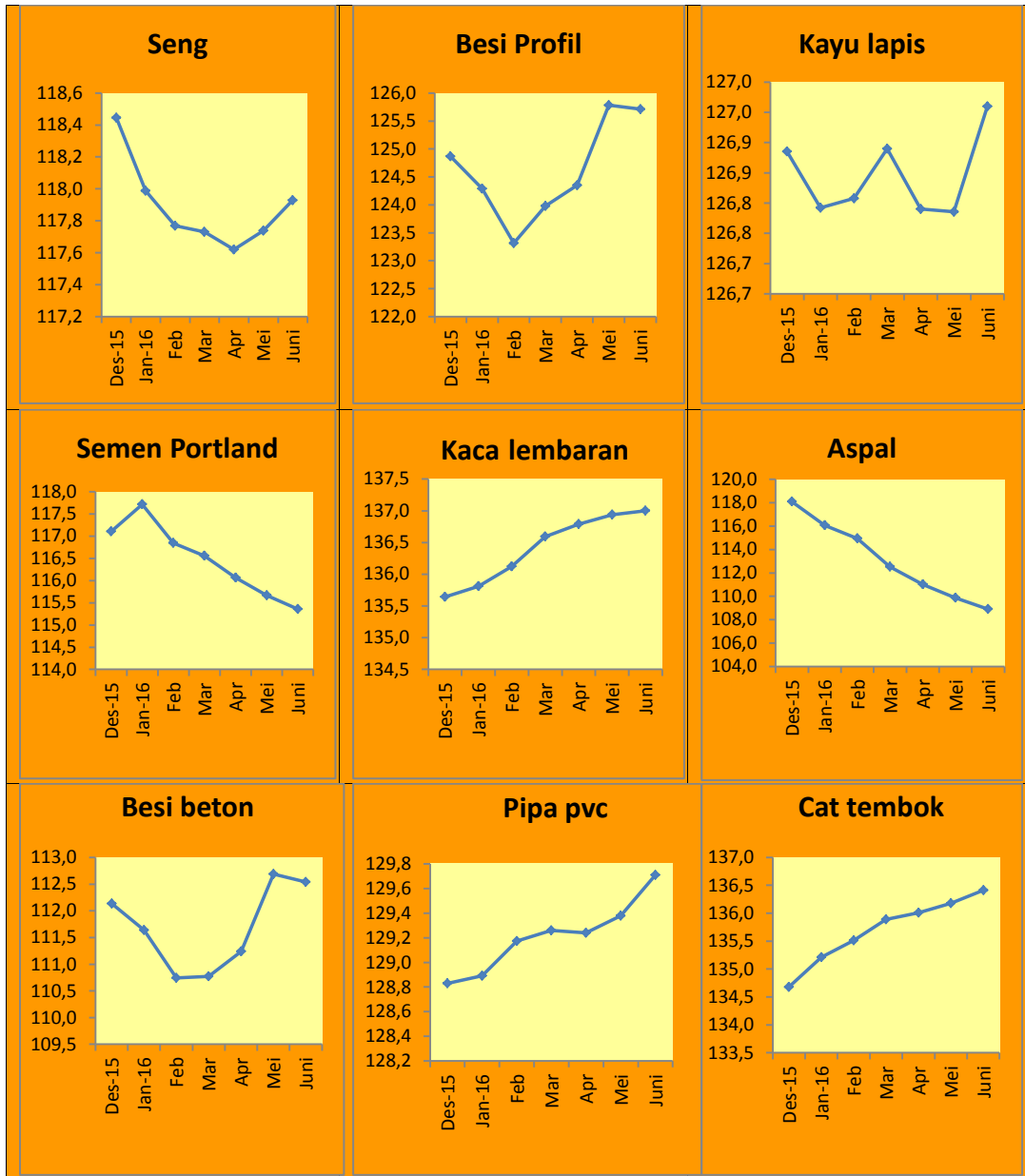
2. IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi yang terdiri dari lima jenis bangunan/konstruksi pada Juni 2016 naik sebesar 0,16 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan indeks terbesar terjadi pada jenis Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan sebesar 0,23 persen.

Tabel 10.5
Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia Juni 2016
Menurut Jenis Bangunan (2010=100)

Jenis Bangunan	Juni 2015	Desember 2015	Mei 2016	Juni 2016	Perubahan Juni terhadap Mei 2016	Tingkat Inflasi	
						Tahun Kalender 2016	Year-on-Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal	130,15	131,08	131,95	132,15	0,15	0,82	1,54
Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian	126,68	128,24	128,52	128,76	0,18	0,40	1,64
Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan	124,29	125,19	124,73	125,02	0,23	-0,14	0,59
Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi	127,65	129,55	130,16	130,35	0,15	0,62	2,12
Bangunan Lainnya	126,30	127,50	127,95	128,02	0,05	0,40	1,36
Konstruksi Indonesia	127,95	129,10	129,57	129,78	0,16	0,53	1,43

3. IHPB beberapa bahan bangunan/konstruksi (seng, kayu lapis, pipa pvc, cat tembok, kaca lembaran) pada Juni 2016 naik dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi pada pipa pvc sebesar 0,25 persen dan terkecil terjadi pada kaca lembaran sebesar 0,05 persen. Seng lembaran dan cat tembok naik masing-masing sebesar 0,17 persen sedangkan kayu lapis naik sebesar 0,14 persen. Aspal, semen portland, besi beton, dan besi profil turun masing-masing sebesar 0,86 persen; 0,26 persen; 0,14 persen; dan 0,06 persen.

Grafik 10.3
Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan Desember 2015 – Juni 2016



XI. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULANAN I-2016

A. INDEKS TENDENSI BISNIS (ITB)

A.1. ITB TRIWULAN I-2016

1. Secara umum kondisi bisnis di Indonesia pada triwulan I-2016 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya dengan nilai ITB sebesar 99,46. Pelaku bisnis di Indonesia pada triwulan I-2016 lebih pesimis dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 105,22).
- Kondisi bisnis triwulan I-2016 menurun dengan nilai Indeks Tendensi Bisnis (ITB) sebesar 99,46**
2. Penurunan kondisi bisnis pada triwulan I-2016 terjadi pada 10 lapangan usaha, sedangkan 7 lapangan usaha lainnya mengalami peningkatan kondisi bisnis. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan kondisi bisnis tertinggi adalah Informasi dan Komunikasi (nilai ITB sebesar 118,27), diikuti oleh Jasa Perusahaan (nilai ITB sebesar 108,67), Jasa Keuangan (nilai ITB sebesar 106,64), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (nilai ITB sebesar 106,10), Real Estat (nilai ITB sebesar 106,01), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (nilai ITB sebesar 103,04), dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (nilai ITB sebesar 100,42). Penurunan kondisi bisnis terbesar terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (nilai ITB sebesar 86,03).
 3. Kondisi bisnis pada triwulan I-2016 menurun karena adanya penurunan pada semua komponen indeks, yaitu pendapatan usaha (nilai indeks sebesar 98,91), penggunaan kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 99,77), dan rata-rata jumlah jam kerja (nilai ITB sebesar 99,79).

Tabel 11.1
Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2016
Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk ITB Triwulan I-2016			ITB Triwulan I-2016
	Pendapatan Usaha	Penggunaan Kapasitas Produksi/ Usaha	Rata-Rata Jumlah Jam Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	106,10	-	106,10
2. Pertambangan dan Penggalan	85,25	82,65	88,09	86,03
3. Industri Pengolahan	97,25	96,51	97,65	97,29
4. Pengadaan Listrik dan Gas	98,30	99,34	100,90	99,65
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	98,14	98,86	101,55	99,79
6. Konstruksi	86,71	98,41	95,99	93,02
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	98,77	101,63	99,78	99,75
8. Transportasi dan Pergudangan	93,79	101,49	104,05	99,79
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108,26	96,51	101,45	103,04
10. Informasi dan Komunikasi	123,96	128,03	109,43	118,27
11. Jasa Keuangan	109,33	104,59	105,26	106,64
12. Real Estat	105,88	92,65	111,76	106,01
13. Jasa Perusahaan	111,15	109,26	106,35	108,67
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	98,18	105,98	98,18	99,64
15. Jasa Pendidikan	100,62	98,30	99,30	99,60
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99,50	101,76	100,63	100,42
17. Jasa Lainnya	89,36	81,91	101,06	93,16
Indeks Tendensi Bisnis (ITB)	98,91	99,77	99,79	99,46

A.2. PERKIRAAN ITB TRIWULAN II-2016

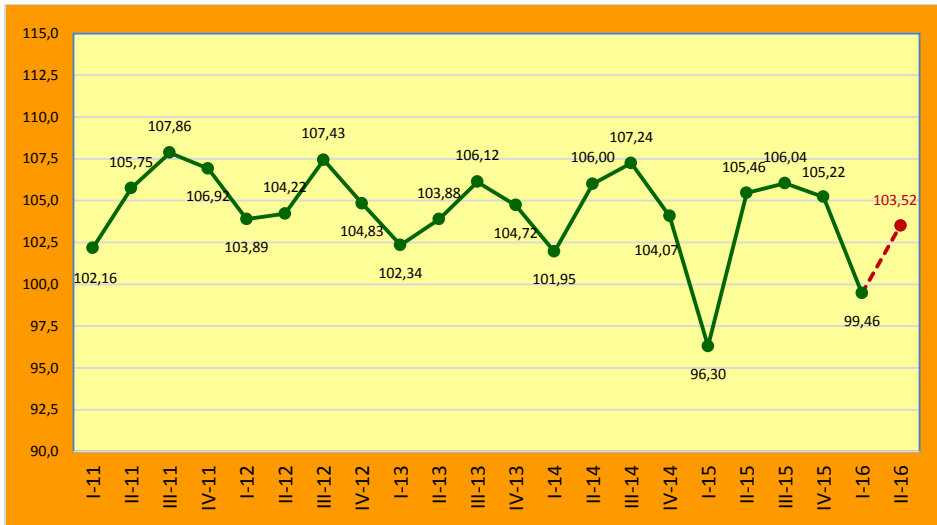
1. Selain pada triwulan berjalan, indeks komposit persepsi pengusaha mengenai kondisi bisnis dan perekonomian secara umum pada triwulan mendatang juga dihitung. Nilai ITB triwulan II-2016 diprediksi sebesar 103,52, artinya secara umum kondisi bisnis pada triwulan II-2016 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan I-2016. Tingkat optimisme pelaku bisnis dalam melihat potensi bisnis pada triwulan II-2016 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2016 (nilai ITB sebesar 99,46). Peningkatan kondisi bisnis pada triwulan II-2016 terjadi di semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (nilai ITB sebesar 94,54). Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi diperkirakan mengalami peningkatan bisnis tertinggi dengan nilai Indeks sebesar 123,47.

Kondisi bisnis pada triwulan II-2016 diprediksi meningkat (ITB 103,52)

Tabel 11.2
Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan II-2016
Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk Perkiraan ITB Triwulan II-2016				Perkiraan ITB Triwulan II-2016
	Order dari Dalam Negeri	Order dari Luar Negeri	Harga Jual Produk	Order Barang Input	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	105,22	92,05	110,05	-	103,44
2. Pertambangan dan Penggalian	97,78	88,25	93,41	95,10	94,54
3. Industri Pengolahan	104,63	93,70	110,17	104,10	103,85
4. Pengadaan Listrik dan Gas	102,78	-	101,00	100,55	101,42
5. Pengadaan Air	101,15	-	100,14	102,58	101,53
6. Konstruksi	103,99	-	112,97	102,43	105,35
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	104,32	95,71	108,91	102,41	102,40
8. Transportasi dan Pergudangan	111,33	-	102,77	-	107,94
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	105,84	-	111,05	-	107,90
10. Informasi dan Komunikasi	130,19	-	113,21	-	123,47
11. Jasa Keuangan	121,09	-	98,11	-	111,99
12. Real Estat	101,47	-	117,65	-	107,87
13. Jasa Perusahaan	110,28	-	105,66	-	108,45
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	106,11	-	113,52	-	109,04
15. Jasa Pendidikan	115,35	-	103,23	-	110,55
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	104,50	-	110,50	-	106,88
17. Jasa Lainnya	98,94	-	108,51	-	102,73
Indeks Tendensi Bisnis (ITB)	106,56	93,60	108,17	102,74	103,52

Grafik 11.1
Indeks Tendensi Bisnis¹⁾ Triwulan I-2011–Triwulan I-2016 dan
Perkiraan Triwulan II-2016²⁾



Keterangan:

¹⁾ ITB berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:

- Nilai ITB < 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITB = 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITB > 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan lebih baik (meningkat) dibanding triwulan sebelumnya.

²⁾ Angka perkiraan ITB triwulan II-2016.

B. INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK)

B.1. ITK TRIWULAN I-2016

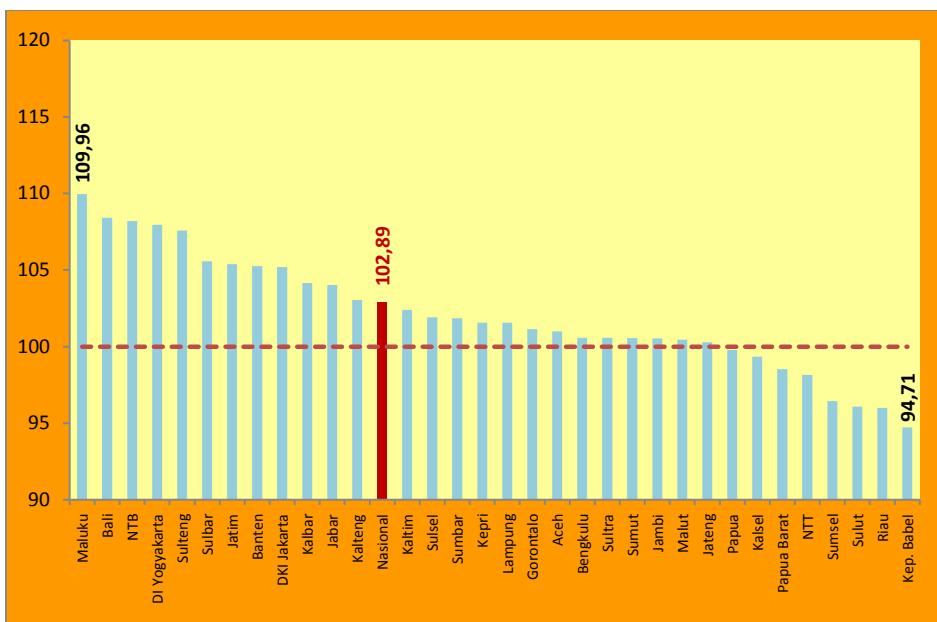
1. Kondisi ekonomi konsumen triwulan I-2016 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan I-2016 sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2015. Nilai ITK triwulan I-2016 sebesar 102,89 sedangkan triwulan IV-2015 hanya sebesar 102,77. Peningkatan kondisi ekonomi konsumen disebabkan oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga, meningkatnya daya beli karena inflasi yang relatif lebih rendah, serta tingkat konsumsi yang meningkat dibanding triwulan IV-2015.
2. Meningkatnya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional terjadi karena adanya peningkatan kondisi ekonomi konsumen di 25 dari 33 provinsi di Indonesia. Provinsi yang memiliki nilai ITK tertinggi adalah Maluku (nilai ITK sebesar 109,96). Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat memiliki nilai ITK terendah, yaitu sebesar 94,71.

Kondisi ekonomi konsumen triwulan I-2016 meningkat (ITK 102,89)

Tabel 11.3
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2015 dan Triwulan I-2016
Menurut Variabel Pembentuk

Variabel Pembentuk	ITK Triw IV-2015	ITK Triw I-2016
(1)	(2)	(3)
Pendapatan rumah tangga	103,14	102,43
Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi	101,89	103,83
Tingkat konsumsi bahan makanan, makanan jadi di restoran/rumah makan, dan bukan makanan (pakaian, perumahan, pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, dan rekreasi)	102,99	102,80
Indeks Tendensi Konsumen	102,77	102,89

Grafik 11.2
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2016
Tingkat Nasional dan Provinsi



B.2. PERKIRAAN ITK TRIWULAN II-2016

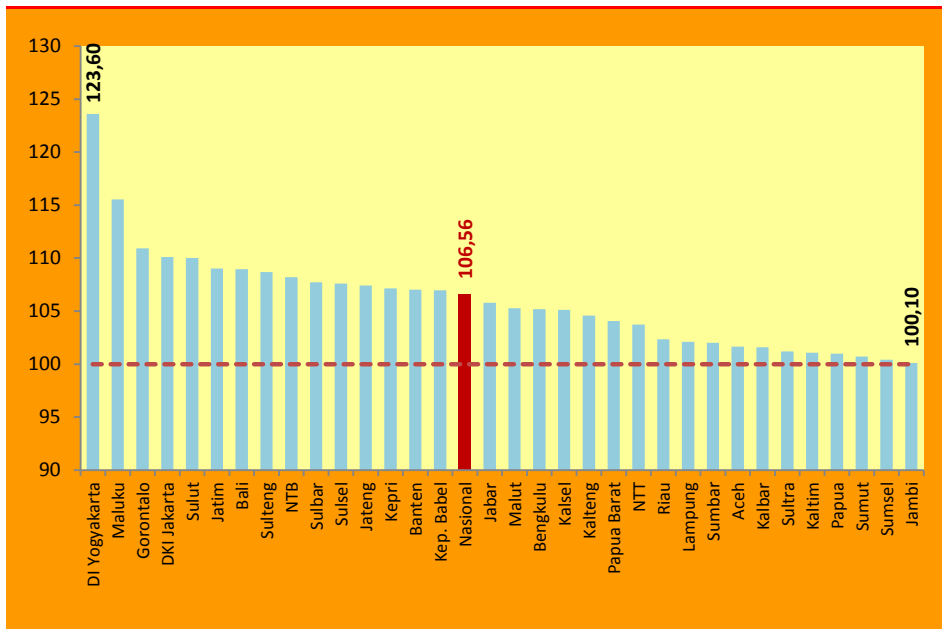
- Kondisi ekonomi konsumen Triwulan II-2016 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan II-2016 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2016. Perkiraan nilai ITK triwulan II-2016 sebesar 106,56 sedangkan triwulan I-2016 sebesar 102,89.
- Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, dimana 15 provinsi diantaranya (45,45 persen) diperkirakan memiliki nilai indeks di atas nasional. Provinsi yang memiliki nilai perkiraan ITK tertinggi adalah Provinsi D.I. Yogyakarta (nilai ITK sebesar 123,60), sementara Provinsi Jambi memiliki nilai perkiraan ITK terendah (nilai ITK sebesar 100,10).

Kondisi ekonomi konsumen triwulan II-2016 diprediksi meningkat (ITK 106,56)

Tabel 11.4
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2016
Menurut Variabel Pembentuk

Variabel Pembentuk	Perkiraan ITK Triw II-2016
(1)	(2)
Perkiraan pendapatan rumah tangga	108,72
Rencana pembelian barang-barang tahan lama (elektronik, perhiasan, perangkat komunikasi, meubelair, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, tanah, rumah), rekreasi, dan pesta/hajatan	102,78
Indeks Tendensi Konsumen	106,56

Grafik 11.3
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2016
Tingkat Nasional dan Provinsi



Tabel 11.5
Indeks Tendensi Konsumen¹⁾ Triwulan I-2015–Triwulan I-2016 dan
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen²⁾ Triwulan II-2016 Tingkat Nasional dan Provinsi

No,	Provinsi	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan
		I-2015	II-2015	III-2015	IV-2015	I-2016	II-2016 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aceh	100,33	107,92	110,29	102,21	100,99	101,64
2.	Sumatera Utara	100,48	101,60	102,17	102,52	100,55	100,71
3.	Sumatera Barat	94,58	101,07	100,61	99,10	101,85	102,00
4.	R i a u	90,72	104,74	105,65	94,27	95,99	102,33
5.	J a m b i	91,66	99,57	101,02	100,94	100,53	100,10
6.	Sumatera Selatan	99,97	101,97	107,31	100,35	96,44	100,42
7.	Bengkulu	96,54	105,55	107,07	101,20	100,57	105,17
8.	Lampung	93,38	102,57	101,51	101,19	101,55	102,11
9.	Kep. Bangka Belitung	92,19	97,90	105,54	93,91	94,71	106,98
10.	Kep. R i a u	101,80	108,82	101,92	100,68	101,56	107,15
11.	DKI Jakarta	103,97	109,71	111,88	106,64	105,20	110,11
12.	Jawa Barat	104,43	105,67	109,69	102,38	104,03	105,78
13.	Jawa Tengah	99,71	103,60	109,81	99,87	100,28	107,41
14.	D.I. Yogyakarta	97,18	111,73	110,33	103,02	107,96	123,60
15.	Jawa Timur	100,75	103,88	115,98	102,12	105,38	109,03
16.	Banten	104,07	108,19	111,21	103,29	105,25	107,01
17.	B a l i	102,36	105,42	111,66	105,84	108,40	108,95
18.	Nusa Tenggara Barat	97,50	101,43	109,07	106,47	108,20	108,21
19.	Nusa Tenggara Timur	93,45	100,30	102,42	106,32	98,15	103,72
20.	Kalimantan Barat	100,44	105,05	106,86	104,07	104,15	101,59
21.	Kalimantan Tengah	94,98	106,37	104,46	104,74	103,04	104,57
22.	Kalimantan Selatan	94,25	107,21	103,25	101,51	99,34	105,11
23.	Kalimantan Timur	101,03	107,40	110,92	105,90	102,40	101,08
24.	Sulawesi Utara	93,15	103,46	100,28	108,42	96,08	110,02
25.	Sulawesi Tengah	91,78	105,03	111,42	103,85	107,58	108,69
26.	Sulawesi Selatan	96,29	106,24	103,38	102,68	101,91	107,60
27.	Sulawesi Tenggara	92,52	102,70	110,64	106,06	100,57	101,19
28.	Gorontalo	95,18	109,08	108,02	101,40	101,14	110,93
29.	Sulawesi Barat	100,69	111,64	107,24	109,15	105,58	107,71
30.	Maluku	102,18	107,38	108,48	112,03	109,96	115,53
31.	Maluku Utara	103,19	103,81	108,94	99,14	100,45	105,27
32.	Papua Barat	99,77	109,12	109,31	110,22	98,53	104,06
33.	Papua	93,88	107,57	109,13	111,72	99,78	100,97
Indonesia		100,87	105,22	109,00	102,77	102,89	106,56

Keterangan:

- ¹⁾ *ITK berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:*
- Nilai ITK < 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.*
 - Nilai ITK = 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.*
 - Nilai ITK > 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan meningkat dibanding triwulan sebelumnya.*

²⁾ *Angka perkiraan ITK triwulan II-2016.*

XII. PRODUKSI TANAMAN PANGAN ANGKA TETAP (ATAP) 2015

A. PADI

1. Produksi Padi tahun 2015 sebanyak 75,40 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami peningkatan sebanyak 4,55 juta ton (6,42 persen) dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi padi tahun 2015 terjadi di Pulau Jawa sebanyak 2,31 juta ton, dan di luar Pulau Jawa sebanyak 2,24 juta ton. Peningkatan produksi terjadi karena peningkatan luas panen seluas 0,32 juta hektar (2,31 persen) dan produktivitas sebesar 2,06 kuintal/hektar (4,01 persen).

Produksi padi tahun 2015 sebanyak 75,40 juta ton GKG atau naik 6,42 persen dibandingkan tahun 2014

Tabel 12.1
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Wilayah, 2013–2015

URAIAN	2013	2014	2015	Perkembangan			
				2013–2014		2014–2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Jawa	6 467 073	6 400 038	6 429 126	-67 035	-1,04	29 088	0,45
- Luar Jawa	7 368 179	7 397 269	7 687 512	29 090	0,39	290 243	3,92
- Indonesia	13 835 252	13 797 307	14 116 638	-37 945	-0,27	319 331	2,31
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Jawa	57,98	57,29	60,61	-0,69	-1,19	3,32	5,80
- Luar Jawa	45,85	46,21	47,39	0,36	0,79	1,18	2,55
- Indonesia	51,52	51,35	53,41	-0,17	-0,33	2,06	4,01
c. Produksi (ton)							
- Jawa	37 493 020	36 663 049	38 970 026	-829 971	-2,21	2 306 977	6,29
- Luar Jawa	33 786 689	34 183 416	36 427 815	396 727	1,17	2 244 399	6,57
- Indonesia	71 279 709	70 846 465	75 397 841	-433 244	-0,61	4 551 376	6,42

Keterangan: Kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

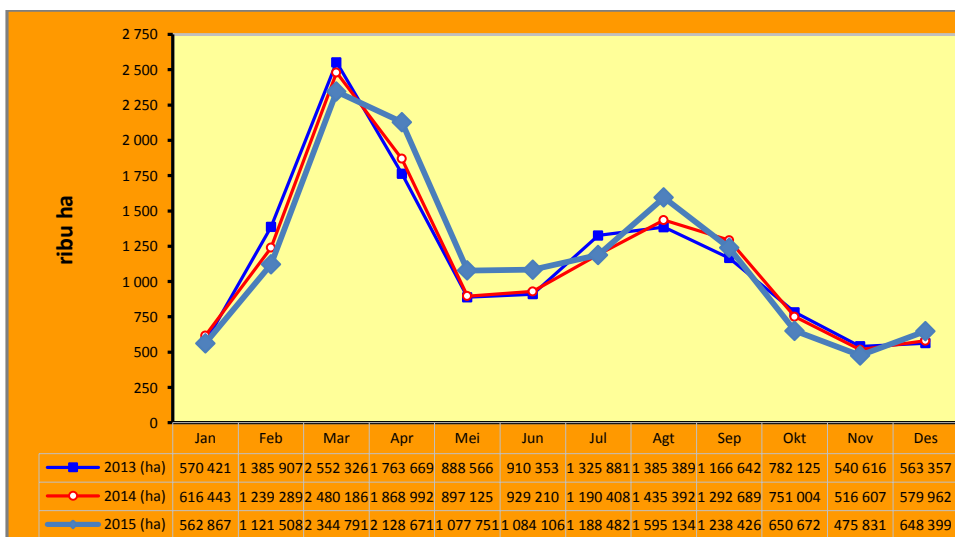
Tabel 12.2
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut *Subround*, 2013–2015

URAIAN	2013	2014	2015	Perkembangan			
				2013–2014		2014–2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Januari–April	6 272 323	6 204 910	6 157 837	-67 413	-1,07	-47 073	-0,76
- Mei–Agustus	4 510 189	4 452 135	4 945 473	-58 054	-1,29	493 338	11,08
- September–Desember	3 052 740	3 140 262	3 013 328	87 522	2,87	-126 934	-4,04
- Januari–Desember	13 835 252	13 797 307	14 116 638	-37 945	-0,27	319 331	2,31
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Januari–April	51,65	50,87	53,68	-0,78	-1,51	2,81	5,52
- Mei–Agustus	50,92	51,12	52,12	0,20	0,39	1,00	1,96
- September–Desember	52,13	52,63	54,97	0,50	0,96	2,34	4,45
- Januari–Desember	51,52	51,35	53,41	-0,17	-0,33	2,06	4,01
c. Produksi (ton)							
- Januari–April	32 398 677	31 562 789	33 057 115	-835 888	-2,58	1 494 326	4,73
- Mei–Agustus	22 967 655	22 757 916	25 776 257	-209 739	-0,91	3 018 341	13,26
- September–Desember	15 913 377	16 525 760	16 564 469	612 383	3,85	38 709	0,23
- Januari–Desember	71 279 709	70 846 465	75 397 841	-433 244	-0,61	4 551 376	6,42

Keterangan: Kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

2. Pola panen padi pada periode Januari–Desember tahun 2015 relatif sama dengan pola panen tahun 2014 dan tahun 2013. Puncak panen padi pada periode Januari–Desember tahun 2015, 2014, dan 2013 terjadi pada bulan Maret.

Grafik 12.1
Pola Panen Padi, 2013–2015



B. JAGUNG

1. Produksi jagung tahun 2015 sebanyak 19,61 juta ton pipilan kering, mengalami kenaikan sebanyak 0,60 juta ton (3,18 persen) dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi jagung tersebut terjadi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing sebanyak 0,46 juta ton dan 0,15 juta ton. Kenaikan produksi terjadi karena kenaikan produktivitas sebesar 2,24 kuintal/hektar (4,52 persen). Meskipun, terjadi penurunan luas panen seluas 49,65 ribu hektar (1,29 persen).

Produksi jagung tahun 2015 sebanyak 19,61 juta ton pipilan kering, naik 3,18 persen dibandingkan tahun 2014

Tabel 12.3
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Menurut Wilayah, 2013–2015

URAIAN	2013	2014	2015	Perkembangan			
				2013–2014		2014–2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Jawa	1 958 883	1 954 175	1 952 289	-4 708	-0,24	-1 886	-0,10
- Luar Jawa	1 862 621	1 882 844	1 835 078	20 223	1,09	-47 766	-2,54
- Indonesia	3 821 504	3 837 019	3 787 367	15 515	0,41	-49 652	-1,29
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Jawa	51,54	51,98	54,37	0,44	0,85	2,39	4,60
- Luar Jawa	45,19	47,00	49,03	1,81	4,01	2,03	4,32
- Indonesia	48,44	49,54	51,78	1,10	2,27	2,24	4,52
c. Produksi (ton)							
- Jawa	10 095 486	10 158 725	10 614 441	63 239	0,63	455 716	4,49
- Luar Jawa	8 416 367	8 849 701	8 997 994	433 334	5,15	148 293	1,68
- Indonesia	18 511 853	19 008 426	19 612 435	496 573	2,68	604 009	3,18

Keterangan: kualitas produksi jagung adalah pipilan kering

C. KEDELAI

1. Produksi kedelai tahun 2015 sebanyak 963,18 ribu ton biji kering, meningkat sebanyak 8,19 ribu ton (0,86 persen) dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi kedelai tersebut terjadi di Luar Pulau Jawa sebanyak 30,50 ribu ton sedangkan di Pulau Jawa terjadi penurunan produksi kedelai sebanyak 22,31 ribu ton. Peningkatan produksi kedelai terjadi karena kenaikan produktivitas sebesar 0,17 kuintal/hektar (1,10 persen). Meskipun, terjadi penurunan luas panen seluas 1,59 ribu hektar (0,26 persen).

Produksi kedelai tahun 2015 sebanyak 963,18 ribu ton biji kering atau naik 0,86 persen dibandingkan tahun 2014

Tabel 12.4
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Menurut Wilayah, 2013–2015

URAIAN	2013	2014	2015	Perkembangan			
				2013–2014		2014–2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Jawa	342 796	378 986	358 070	36 190	10,56	-20 916	-5,52
- Luar Jawa	207 997	236 699	256 025	28 702	13,80	19 326	8,16
- Indonesia	550 793	615 685	614 095	64 892	11,78	-1 590	-0,26
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Jawa	15,23	16,42	16,75	1,19	7,81	0,33	2,01
- Luar Jawa	12,41	14,06	14,19	1,65	13,30	0,13	0,92
- Indonesia	14,16	15,51	15,68	1,35	9,53	0,17	1,10
c. Produksi (ton)							
- Jawa	521 954	622 155	599 843	100 201	19,20	-22 312	-3,59
- Luar Jawa	258 038	332 842	363 340	74 804	28,99	30 498	9,16
- Indonesia	779 992	954 997	963 183	175 005	22,44	8 186	0,86

Keterangan: kualitas produksi kedelai adalah biji kering

Tabel 12.5
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Palawija Lainnya, 2013–2015

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	Perkembangan				
					2013–2014		2014–2015		
					Absolut	%	Absolut	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1 Kacang Tanah									
-Luas Panen	ha	519 056	499 338	454 349	-19 718	-3,80	-44 989	-9,01	
-Produktivitas	ku/ha	13,52	12,79	13,33	-0,73	-5,40	0,54	4,22	
-Produksi (biji kering)	ton	701 680	638 896	605 449	-62 784	-8,95	-33 447	-5,24	
2 Kacang Hijau									
-Luas Panen	ha	182 075	208 016	229 475	25 941	14,25	21 459	10,32	
-Produktivitas	ku/ha	11,24	11,76	11,83	0,52	4,63	0,07	0,60	
-Produksi (biji kering)	ton	204 670	244 589	271 463	39 919	19,50	26 874	10,99	
3 Ubi Kayu									
-Luas Panen	ha	1 065 752	1 003 494	949 916	-62 258	-5,84	-53 578	-5,34	
-Produktivitas	ku/ha	224,60	233,55	229,51	8,95	3,98	-4,04	-1,73	
-Produksi (umbi basah)	ton	23 936 921	23 436 384	21 801 415	-500 537	-2,09	-1 634 969	-6,98	
4 Ubi Jalar									
-Luas Panen	ha	161 850	156 758	143 125	-5 092	-3,15	-13 633	-8,70	
-Produktivitas	ku/ha	147,47	152,00	160,53	4,53	3,07	8,53	5,61	
-Produksi (umbi basah)	ton	2 386 729	2 382 658	2 297 634	-4 071	-0,17	-85 024	-3,57	

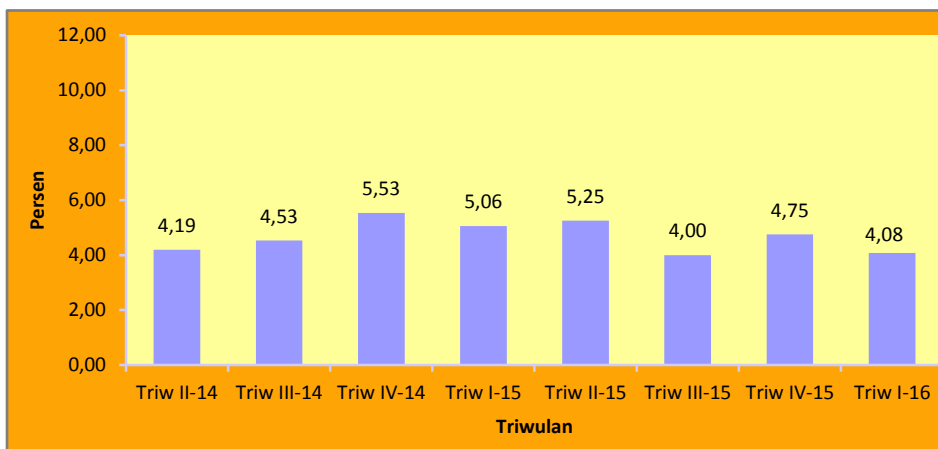
XIII. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN I-2016

A. Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBS)

1. Pertumbuhan IBS triwulan I-2016 naik sebesar 4,08 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2015, triwulan IV-2015 naik sebesar 4,75 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2014, triwulan III-2015 naik sebesar 4,00 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2014, triwulan II-2015 naik sebesar 5,25 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2014, triwulan I-2015 naik sebesar 5,06 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2014, triwulan IV-2014 naik sebesar 5,53 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2013, triwulan III-2014 naik sebesar 4,53 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2013, dan triwulan II-2014 naik 4,19 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2013.

Pertumbuhan produksi IBS triwulan I-2016 naik sebesar 4,08 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2015

Grafik 13.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (*y-on-y*) Triwulan II-2014–Triwulan I-2016



2. Pertumbuhan produksi IBS triwulan I-2016 turun sebesar 1,34 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2015, triwulan IV-2015 naik sebesar 2,41 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2015, triwulan III-2015 naik sebesar 0,83 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2015, triwulan II-2015 naik sebesar 2,16 persen (*q-to-q*) dari triwulan I-2015, triwulan I-2015 turun sebesar 0,70 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2014, dan triwulan IV-2014 naik sebesar 1,68 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2014.

3. Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan I-2016 (*y-on-y*) adalah industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional yang naik 10,50 persen, industri barang galian bukan logam yang naik sebesar 8,58 persen, serta industri logam dasar naik 7,61 persen.
4. Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan I-2016 (*q-to-q*) adalah industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya naik 5,60 persen, industri logam dasar naik 3,76 persen, dan industri alat angkutan lainnya naik 3,51 persen.
5. Pertumbuhan produksi IBS *m-to-m* Januari 2016 mengalami penurunan sebesar 1,12 persen. Sementara pada Februari 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,30 persen dan pada Maret 2016 juga mengalami kenaikan sebesar 1,13 persen.

Tabel 13.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan 2014–2016 (persen) 2010=100

Tahun	<i>q-to-q</i>				<i>y-on-y</i>				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014	-0,25	1,97	2,04	1,68	3,51	4,19	4,53	5,53	4,76
2015	-0,70	2,16	0,83	2,41	5,06	5,25	4,00	4,75	4,76
2016	-1,34				4,08				

Tabel 13.2
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2014–2016 (persen) 2010=100

Bulan	<i>y-on-y</i>			<i>m-to-m</i>		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	2,99	5,12	1,70 ^{*)}	-0,03	-1,29	-1,12 ^{*)}
Februari	3,82	2,63	7,21 ^{**)}	-0,61	-2,97	2,30 ^{**)}
Maret	3,74	7,42	3,41 ^{***)}	0,17	4,84	1,13 ^{***)}
April	2,74	8,41		0,39	1,31	
Mei	3,79	2,39		2,48	-3,21	
Juni	6,07	5,02		0,05	2,62	
Juli	1,54	4,41		-2,64	-3,20	
Agustus	5,96	5,73		2,63	3,93	
September	9,77	2,01		6,34	2,60	
Oktober	5,35	6,20		-2,64	1,35	
November	4,76	6,60		-2,12	-1,74	
Desember	6,47	1,52		2,64	-2,26	

Catatan: *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara
 ***) Angka Sangat Sangat Sementara

Tabel 13.3
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan I-2016
Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)

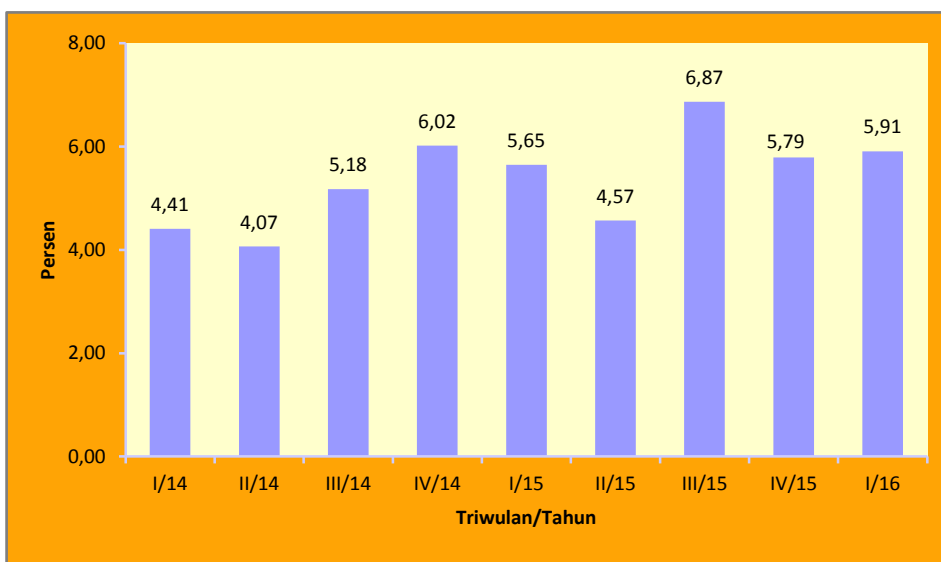
KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan	
		q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Makanan	-0,72	4,54
11	Minuman	-0,10	-0,95
12	Pengolahan Tembakau	-9,20	-1,40
13	Tekstil	-1,40	2,41
14	Pakaian Jadi	2,23	-9,97
15	Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	-0,24	7,14
16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	5,51	7,22
17	Kertas dan Barang dari Kertas	-5,94	-9,18
18	Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-3,02	-0,37
20	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	-0,06	-10,85
21	Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	2,52	10,50
22	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-7,38	-3,84
23	Barang Galian Bukan Logam	-2,42	8,58
24	Logam Dasar	3,63	7,61
25	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-0,03	6,75
26	Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	-2,91	6,25
27	Peralatan Listrik	-4,39	-9,97
28	Mesin dan Perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya	-1,11	6,87
29	Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	-4,31	0,82
30	Alat Angkutan Lainnya	3,64	0,14
31	Furnitur	-0,64	0,40
32	Pengolahan Lainnya	-3,29	-1,06
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-1,03	-2,23
Industri Manufaktur Besar dan Sedang		-1,34	4,08

B. Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)

1. Pertumbuhan produksi IMK triwulan I-2016 naik sebesar 5,91 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2015, triwulan IV-2015 naik sebesar 5,79 persen dari triwulan IV-2014, triwulan III-2015 naik sebesar 6,87 persen dari triwulan III-2014, dan triwulan II-2015 naik sebesar 4,57 persen dari triwulan II-2014.

Pertumbuhan produksi IMK triwulan I-2016 naik 5,91 persen dari triwulan I-2015

Grafik 13.2
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (*y-on-y*)
Triwulan I-2014–Triwulan I-2016



2. Pertumbuhan Produksi IMK triwulan I-2016 naik 0,76 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2015, triwulan IV-2015 naik 1,35 persen dari triwulan III-2015, triwulan III-2015 turun 1,31 persen dari triwulan II-2015, triwulan II-2015 naik 5,09 persen dari triwulan I-2015, dan triwulan I-2015 naik 0,64 persen dari triwulan IV-2014.
3. Pertumbuhan Produksi IMK tertinggi pada triwulan I-2016 (*y-on-y*) adalah industri komputer, barang elektronika dan optik naik 24,26 persen serta industri mesin dan perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk dalam lainnya) naik 24,17 persen.
4. Pertumbuhan Produksi IMK tertinggi pada triwulan I-2016 (*q-to-q*) adalah industri kertas dan barang dari kertas naik 13,95 persen serta industri komputer, barang elektronika dan optik naik 13,35 persen.

Tabel 13.4
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan
Triwulan I-2014–Triwulan I-2016 (persen)

Tahun	q-to-q				y-on-y				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014	0,99	6,17	-3,43	2,39	4,41	4,07	5,18	6,02	4,91
2015	0,64	5,09	-1,31	1,35	5,65	4,57	6,87	5,79	5,71
2016	0,76				5,91				

Tabel 13.5
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan I-2016
Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)

KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan	
		q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Makanan	1,36	6,16
11	Minuman	1,29	7,49
12	Pengolahan tembakau	-6,71	11,38
13	Tekstil	1,56	5,50
14	Pakaian jadi	2,06	5,79
15	Kulit, barang dari kulit dan alas kaki	-0,04	8,74
16	Kayu, barang dari kayu dan gabus (kecuali furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya)	0,82	-2,27
17	Kertas dan barang dari kertas	13,95	11,82
18	Percetakan dan reproduksi media rekaman	11,94	23,31
20	Bahan kimia dan barang dari bahan kimia	0,33	16,04
21	Farmasi, obat kimia dan obat tradisional	9,60	16,27
22	Karet, barang dari karet dan plastik	1,07	-4,22
23	Barang galian bukan logam	-0,40	2,59
24	Logam dasar	-2,45	-0,28
25	Barang logam, bukan mesin & peralatannya	-7,70	-11,07
26	Komputer, barang elektronik dan optik	13,35	24,26
27	Peralatan listrik	5,06	15,97
28	Mesin dan perlengkapan ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya)	12,37	24,17
29	Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	9,89	5,64
30	Alat angkutan lainnya	5,39	7,44
31	Furnitur	0,75	0,41
32	Pengolahan lainnya	-0,57	0,28
33	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	-7,75	-14,43
Industri Manufaktur Mikro dan Kecil		0,76	5,91

XIV. PARIWISATA MEI 2016

A. Kunjungan Wisman

1. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama Januari–Mei 2016 mencapai 4,43 juta kunjungan atau naik 7,48 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2015, yang tercatat sebanyak 4,13 juta kunjungan.

Jumlah kunjungan wisman selama Januari–Mei 2016 mencapai 4,43 juta kunjungan atau naik 7,48 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2015

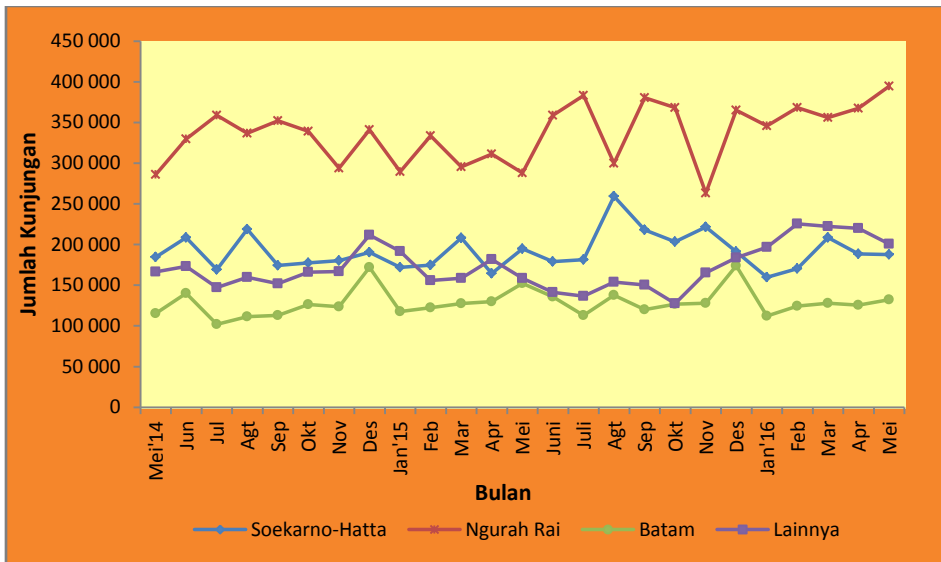
Tabel 14.1
Perkembangan Kunjungan Wisman ke Indonesia

Jenis Pengunjung	Mei 2015 (kunjungan)	April 2016 (kunjungan)	Mei 2016 (kunjungan)	Januari–Mei 2015 (kunjungan)	Januari–Mei 2016 (kunjungan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Wisman melalui 19 pintu utama					
a. Wisman Reguler	776 637	834 861	865 419	3 735 970	4 082 547
b. Wisman khusus (wisman lansia, rohaniawan, diklat, riset, dll)	25 010	23 628	23 696	120 267	157 298
2. Wisman non 19 pintu utama	75 751	66 234	49 787	389 263	351 385
a. Pos Lintas Batas ^{*)}	33 084	22 151	18 976	147 869	142 068
b. Pintu lainnya ^{*)}	42 667	44 083	30 811	241 394	209 317
Jumlah	852 388	901 095	915 206	4 125 233	4 433 932

^{*)} angka sementara

2. Jumlah kunjungan wisman selama Mei 2016 mencapai 915,2 ribu kunjungan atau naik 7,37 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan selama Mei 2015, yang tercatat sebanyak 852,4 ribu kunjungan. Demikian pula jika dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman bulan Mei 2016 naik sebesar 1,57 persen.

Grafik 14.1
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman menurut Pintu Masuk
Mei 2014–Mei 2016



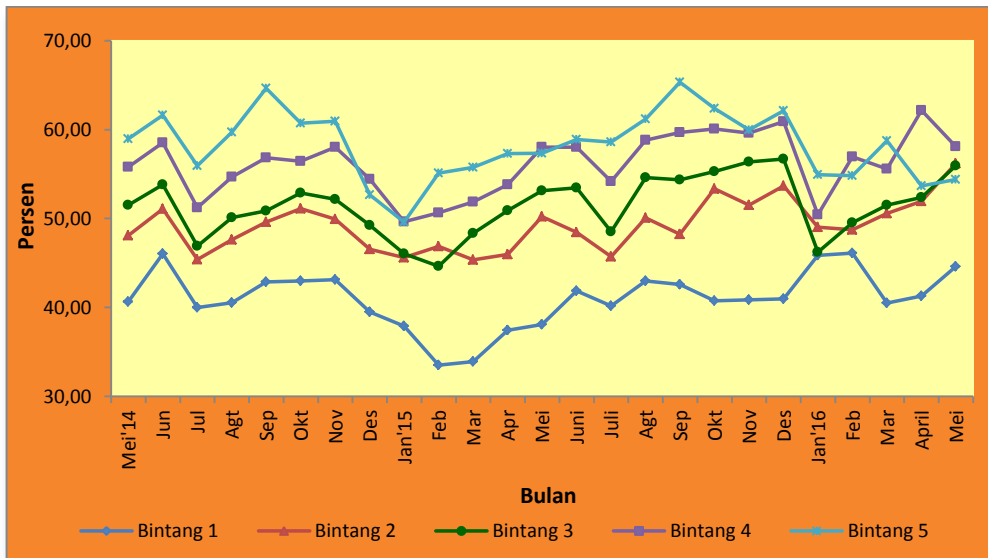
- Jumlah kunjungan wisman melalui Bandara Ngurah Rai, Bali pada Mei 2016 mengalami kenaikan sebesar 36,94 persen dibandingkan Mei 2015, yaitu dari 288,0 ribu kunjungan menjadi 394,4 ribu kunjungan. Demikian pula jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman ke Bali mengalami kenaikan sebesar 7,37 persen.
- Dari sekitar 915,2 ribu kunjungan wisman yang datang ke Indonesia pada Mei 2016, sebanyak 14,79 persen diantaranya dilakukan oleh wisman berkebangsaan Singapura, diikuti oleh wisman Malaysia (14,10 persen), Tionghoa (12,61 persen), Australia (11,67 persen), dan India (4,03 persen).

B. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Lama Menginap Tamu Hotel Berbintang

1. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi selama Mei 2016 mencapai 55,46 persen, yang berarti terjadi kenaikan 1,74 poin dibandingkan rata-rata TPK hotel berbintang pada periode yang sama tahun 2015. Demikian pula jika dibandingkan bulan sebelumnya, TPK Mei 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,08 poin.
2. Naik turunnya angka TPK tidak selalu mencerminkan kinerja di sektor perhotelan. Angka TPK hanya menggambarkan rata-rata tingkat hunian di masing-masing hotel tanpa memperhatikan adanya perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel. Kinerja sektor perhotelan tidak hanya diukur dari besaran TPK tetapi juga harus memperhatikan perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel yang siap dijual atau dipasarkan.

TPK Hotel Berbintang Mei 2016 mencapai 55,46 persen atau naik 1,74 poin dibanding TPK Mei 2015

Grafik 14.2
Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Rata-rata 27 Provinsi di Indonesia, Mei 2014–Mei 2016



3. TPK Hotel Berbintang di Bali pada Mei 2016 sebesar 60,06 persen, atau naik sebesar 2,53 poin dibandingkan TPK Mei 2015. Demikian pula jika dibandingkan dengan April 2016, TPK Mei 2016 di Bali mengalami kenaikan sebesar 4,96 poin.

4. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang selama Mei 2016 mencapai 1,75 hari, atau mengalami penurunan 0,37 hari dibandingkan rata-rata lama menginap selama Mei 2015. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada Mei 2016 mengalami penurunan sebesar 0,13 poin.

Tabel 14.2
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Reguler, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Mei 2015–Mei 2016

Bulan/ Tahun	Wisman Reguler		Wisman Bali (Ngurah Rai)		TPK 27 Prov.		TPK Bali		Lama Menginap Tamu (hari)	
	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata	Peru- Bahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2015	10 230 775	3,12	3 936 066	5,15	53,04	1,20	60,55	0,21	1,98	-0,01
Jan-Mei	3 842 669	3,85	1 513 614	9,65	49,79	-0,59	55,99	-3,93	2,08	0,07
Mei	838 030	6,06	288 048	-7,96	53,72	2,44	57,51	2,81	2,12	-0,07
Juni	858 359	2,37	358 749	19,71	54,14	0,42	61,76	4,25	2,20	0,08
Juli	860 703	0,27	383 280	6,40	51,25	-2,89	64,29	2,53	1,90	-0,30
Agustus	895 420	3,88	299 594	-27,93	55,61	4,36	67,49	3,20	1,93	0,03
September	905 806	1,15	380 491	21,26	56,26	0,65	67,65	0,16	1,96	0,03
Oktober	861 505	-5,14	368 026	-3,39	56,60	0,34	65,01	-2,64	1,92	-0,04
November	820 669	-4,98	263 232	-39,81	56,08	-0,52	59,09	-5,92	1,75	-0,17
Desember	971 866	15,56	364 903	27,86	57,25	1,17	60,32	1,23	1,83	0,08
2016	4 433 932	7,37	1 827 278	37,37	52,85	3,06	58,08	2,09	1,82	-0,26
Januari	814 303	-16,21	345 727	-5,55	49,33	-7,92	54,38	-5,94	1,83	0,00
Februari	888 309	9,09	368 389	6,15	52,15	2,82	62,46	8,08	1,83	0,00
Maret	915 019	3,01	356 198	-3,31	52,88	0,73	58,56	-3,90	1,81	-0,02
April	901 095	-1,52	367 370	3,55	54,38	1,50	55,08	-3,48	1,88	0,07
Mei	915 206	1,57	394 443	7,37	55,46	1,08	60,06	4,96	1,75	-0,13

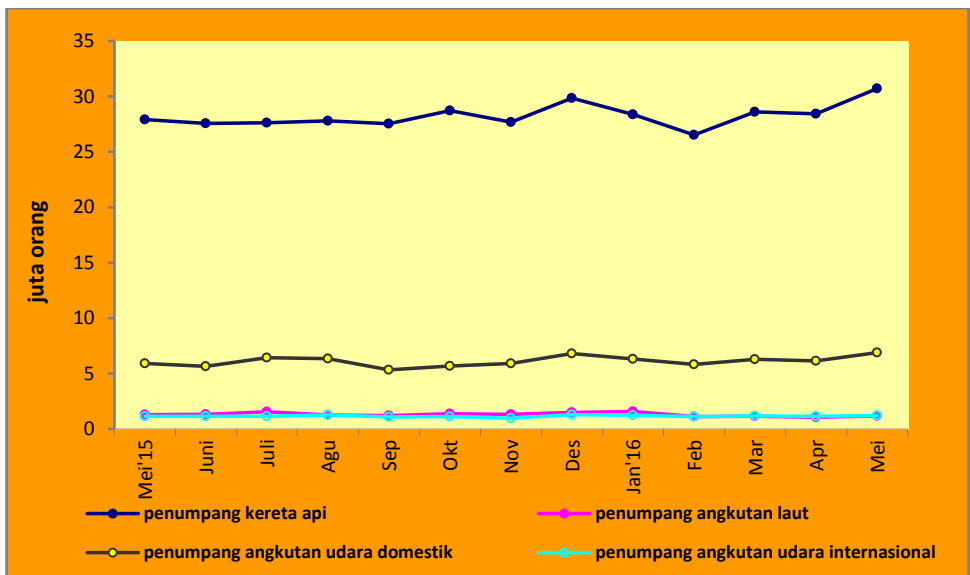
XV. TRANSPORTASI NASIONAL MEI 2016

A. Angkutan Udara

1. Jumlah penumpang angkutan udara tujuan dalam negeri (domestik) Mei 2016 mencapai 6,9 juta orang atau naik 12,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 16,44 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.

Jumlah penumpang angkutan udara domestik Mei 2016 mencapai 6,9 juta orang, naik 12,05 persen

Grafik 15.1
Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi Mei 2015–Mei 2016



2. Jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional) Mei 2016 mencapai 1,2 juta orang atau naik 4,61 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 5,34 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.

B. Angkutan Laut Dalam Negeri

1. Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Mei 2016 mencapai 1,2 juta orang atau naik 10,35 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun turun 9,75 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.
2. Jumlah barang yang diangkut pelayaran dalam negeri Mei 2016 mencapai 21,7 juta ton atau naik 4,04 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,74 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.

Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Mei 2016 mencapai 1,2 juta orang, naik 10,35 persen

C. Angkutan Kereta Api

1. Jumlah penumpang kereta api Mei 2016 mencapai 30,7 juta orang atau naik 7,98 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 10,01 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.
2. Jumlah barang yang diangkut kereta api Mei 2016 mencapai 2,7 juta ton atau turun 6,94 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun naik 1,59 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.

Jumlah penumpang kereta api Mei 2016 mencapai 30,7 juta orang, naik 7,98 persen

Tabel 15.1
Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi
Mei 2015–Mei 2016

Tahun/ Bulan	Angkutan Udara				Angkutan Laut				Angkutan Kereta Api			
	Domestik		Internasional		Penumpang		Barang		Penumpang		Barang	
	(000 org)	Peru- bahan (%)	(000 org)	Peru- bahan (%)	(000 org)	Peru- bahan (%)	(000 ton)	Peru- bahan (%)	(000 org)	Peru- bahan (%)	(000 ton)	Peru- bahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2015	68 780,8	-	13 658,2	-	15 130,0	-	238 308,5	-	325 945	-	32 035	-
Mei	5 911,3	8,68	1 157,6	3,16	1 301,0	2,92	20 134,4	12,50	27 910	5,06	2 641	13,06
Juni	5 656,6	-4,31	1 152,2	-0,47	1 329,2	2,17	19 870,0	-1,31	27 562	-1,25	2 805	6,21
Juli	6 421,0	13,51	1 162,8	0,92	1 565,8	17,80	17 947,8	-9,67	27 612	0,18	2 678	-4,53
Agustus	6 343,9	-1,20	1 268,5	9,09	1 271,9	-18,76	20 065,6	11,80	27 796	0,67	2 881	7,58
September	5 330,6	-15,97	1 092,9	-13,84	1 195,8	-5,98	21 474,2	7,02	27 549	-0,89	2 801	-2,78
Oktober	5 676,5	6,49	1 125,1	2,95	1 375,2	15,00	21 906,2	2,01	28 718	4,24	2 844	1,54
November	5 903,8	4,00	985,6	-12,40	1 330,1	-3,28	22 081,7	0,80	27 669	-3,65	2 677	-5,87
Desember	6 799,1	15,16	1 287,2	30,60	1 509,7	13,50	22 345,7	1,20	29 831	7,81	2 887	7,84
2016	31 457,6	-	5 927,3	-	6 115,6	-	102 722,9	-	142 623	-	13 918	-
Januari	6 322,5	-7,01	1 229,6	-4,47	1 593,1	5,52	20 141,5	-9,86	28 358	-4,94	2 941	1,87
Februari	5 815,8	-8,01	1 133,7	-7,80	1 122,8	-29,52	19 594,5	-2,72	26 511	-6,51	2 682	-8,81
Maret	6 293,5	8,21	1 178,9	3,99	1 161,4	3,44	20 444,9	4,34	28 617	7,94	2 729	1,75
April	6 142,8	-2,39	1 165,7	-1,12	1 064,1	3,38	20 849,9	1,98	28 434	-0,64	2 883	5,64
Mei	6 883,0	12,05	1 219,4	4,61	1 174,2	10,35	21 692,1	4,04	30 703	7,98	2 683	-6,94

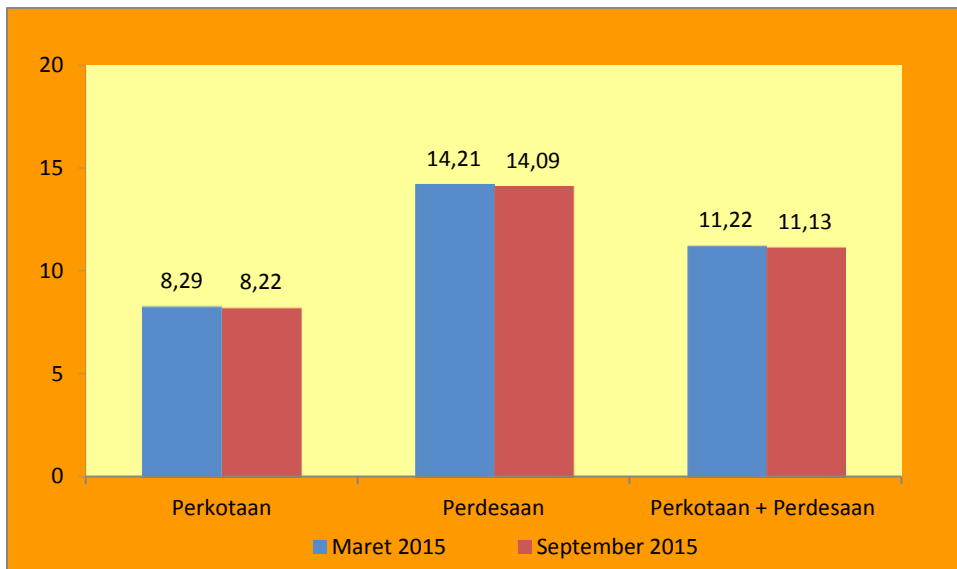
XVI. KEMISKINAN DAN TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK INDONESIA SEPTEMBER 2015

A. Perkembangan Kemiskinan Maret 2015–September 2015

- Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2015 mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen), menurun 0,08 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2015 yang sebanyak 28,59 juta orang (11,22 persen). Perkembangan penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal dapat dilihat pada Grafik 16.1. dan Tabel 16.1.

Jumlah penduduk miskin pada September 2015 sebanyak 28,51 juta orang

Grafik 16.1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Maret 2015–September 2015



- Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan menurun lebih banyak dibanding penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan. Selama periode Maret 2015–September 2015, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sekitar 0,03 juta orang, sementara di daerah perdesaan menurun sekitar 0,05 juta orang.

3. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Pada September 2015, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebesar 62,76 persen dari seluruh penduduk miskin, sementara pada Maret 2015 sebesar 62,74 persen.

Tabel 16.1
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2015–September 2015

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan (GKM)	Bukan Makanan (GKBM)	Total (GK)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Maret 2015	238.278	104.263	342.541	10,65	8,29
September 2015	247.840	108.538	356.378	10,62	8,22
Perdesaan					
Maret 2015	245.357	72.524	317.881	17,94	14,21
September 2015	256.120	76.914	333.034	17,89	14,09
Perkotaan+Perdesaan					
Maret 2015	242.241	88.535	330.776	28,59	11,22
September 2015	251.943	92.866	344.809	28,51	11,13

Beberapa faktor terkait penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2015–September 2015 adalah:

- Selama periode Maret 2015–September 2015 terjadi inflasi umum relatif rendah, yaitu tercatat sebesar 2,69 persen.
- Secara nasional, rata-rata harga beras mengalami penurunan sebesar 0,92 persen yaitu dari Rp13.089,- per kg pada Maret 2015 menjadi Rp12.968,- per kg pada September 2015. Selain beras, harga eceran komoditas bahan pokok lain yang mengalami penurunan adalah minyak goreng yaitu mengalami penurunan 2,80 persen.
- Perekonomian Indonesia Triwulan III-2015 tumbuh sebesar 7,12 persen terhadap Triwulan I-2015
- Perbaikan penghasilan petani yang ditunjukkan oleh kenaikan NTP (Nilai Tukar Petani) sebesar 0,79 persen dari 101,53 pada Maret 2015 menjadi 102,33 pada September 2015.

B. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2015–September 2015

1. Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode Maret 2015 – September 2015, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,24 persen, yaitu dari Rp330.776,- per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp344.809,- per kapita per bulan pada September 2015. Garis Kemiskinan (GK), terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Peranan GKM terhadap GK sangat dominan, yaitu mencapai 73,07 persen pada bulan September 2015.

Tabel 16.2
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap
Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), September 2015

Komoditi (1)	Perkotaan (2)	Komoditi (3)	Perdesaan (4)
Makanan			
Beras	22,10	Beras	28,74
Rokok kretek filter	8,08	Rokok kretek filter	7,68
Telur ayam ras	3,57	Gula Pasir	3,11
Daging ayam ras	3,20	Telur ayam ras	3,09
Mie instan	2,61	Mie instan	2,46
Tempe	2,18	Tempe	2,08
Gula pasir	2,15	Tahu	1,81
Tahu	2,07	Daging ayam ras	1,79
Kue Basah	1,73	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,72
Roti	1,67	Bawang merah	1,71
Bukan Makanan			
Perumahan	9,07	Perumahan	7,37
Bensin	3,07	Bensin	2,44
Listrik	2,87	Listrik	1,58
Pendidikan	2,74	Pendidikan	1,45
Angkutan	1,70	Perlengkapan mandi	1,07
Perlengkapan mandi	1,36	Kayu bakar	1,04

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2015

2. Pada September 2015, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, tempe, gula pasir, dan tahu. Sementara itu, terdapat komoditi lain yang memberi sumbangan berbeda terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan, seperti roti dan kue basah yang hanya memberi sumbangan terhadap GK di perkotaan. Demikian juga untuk komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan hampir sama antara daerah perkotaan dan perdesaan, seperti perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Sementara itu, terdapat komoditi lain yang memberi sumbangan berbeda terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan, seperti angkutan yang hanya memberi sumbangan terhadap GK di perkotaan. Nama komoditi makanan dan bukan makanan beserta nilai kontribusinya terhadap Garis Kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 16.2.

C. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

1. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
2. Pada periode Maret 2015 – September 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2015 sebesar 1,97 dan mengalami penurunan menjadi 1,84 pada September 2015. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,54 menjadi 0,51 pada periode yang sama (Tabel 16.3).
3. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2015, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,29 sedangkan di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,40. Pada periode yang sama nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,35 sedangkan di daerah perdesaan mencapai sebesar 0,67.

Tabel 16.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2015–September 2015

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
Maret 2015	1,40	2,55	1,97
September 2015	1,29	2,40	1,84
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
Maret 2015	0,36	0,71	0,54
September 2015	0,35	0,67	0,51

Tabel 16.4
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, September 2015

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita / bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	P ₀	Garis Kemiskinan (Rp/kapita / bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	P ₀	Garis Kemiskinan (Rp/kapita / bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	P ₀
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	420.324	155,81	10,92	394.419	703,60	19,56	401.773	859,41	17,11
Sumatera Utara	379.898	727,76	10,51	352.637	780,38	11,06	366.137	1.508,14	10,79
Sumatera Barat	423.339	118,48	5,73	391.178	231,05	7,35	403.947	349,53	6,71
Riau	417.768	174,79	7,05	416.780	388,13	9,95	417.164	562,92	8,82
Jambi	423.855	125,60	12,11	329.895	185,97	7,82	358.426	311,57	9,12
Sumatera Selatan	378.739	360,73	12,51	319.994	751,80	14,47	340.958	1.112,53	13,77
Bengkulu	425.642	106,00	18,15	404.179	216,83	16,71	410.840	322,83	17,16
Lampung	386.728	197,94	9,25	346.088	902,74	15,05	356.771	1.100,68	13,53
Bangka Belitung	516.835	18,83	2,77	542.732	47,79	6,83	529.979	66,62	4,83
Kepulauan Riau	485.496	83,09	5,00	456.933	31,75	9,75	480.812	114,84	5,78
DKI Jakarta	503.038	368,67	3,61				503.038	368,67	3,61
Jawa Barat	318.297	2.706,52	8,58	319.228	1.779,14	11,61	318.602	4.485,66	9,57
Jawa Tengah	308.163	1.789,57	11,50	310.295	2.716,21	14,86	309.314	4.505,78	13,32
DI Yogyakarta	359.470	292,64	11,93	324.386	192,92	15,62	347.721	485,56	13,16
Jawa Timur	314.320	1.571,15	8,41	318.443	3.204,82	15,84	316.464	4.775,97	12,28
Banten	365.672	418,95	5,11	336.592	271,71	7,12	356.436	690,66	5,75
Bali	341.554	115,80	4,52	314.218	102,99	6,42	331.028	218,79	5,25
Nusa Tenggara Barat	335.284	377,28	18,40	313.466	425,01	15,18	322.689	802,29	16,54
Nusa Tenggara Timur	374.355	97,06	9,41	290.363	1.063,47	25,89	307.224	1.160,53	22,58
Kalimantan Barat	347.516	88,15	6,00	337.288	317,36	9,51	340.413	405,51	8,44
Kalimantan Tengah	339.239	48,72	5,68	374.938	99,41	6,02	362.729	148,13	5,91
Kalimantan selatan	371.793	72,48	4,27	352.972	116,68	5,06	360.949	189,16	4,72
Kalimantan Timur	504.551	80,82	3,73	476.614	129,16	10,13	494.207	209,98	6,10
Kalimantan Utara	505.262	13,32	3,68	477.645	27,61	9,67	493.086	40,93	6,32
Sulawesi Utara	302.378	58,00	5,26	311.068	159,14	12,10	307.104	217,14	8,98
Sulawesi Tengah	376.496	79,25	11,06	353.080	327,09	15,07	358.892	406,34	14,07
Sulawesi Selatan	274.140	157,18	4,93	254.524	707,34	13,22	261.854	864,52	10,12
Sulawesi Tenggara	282.230	56,77	7,84	264.371	288,25	16,12	269.516	345,02	13,74
Gorontalo	274.581	27,01	6,84	275.163	179,51	24,17	274.961	206,52	18,16
Sulawesi Barat	269.080	22,51	8,69	279.594	130,70	12,70	277.479	153,21	11,90
Maluku	404.929	51,60	7,83	405.502	276,17	26,70	405.279	327,77	19,36
Maluku Utara	378.538	8,29	2,61	356.325	64,35	7,57	362.370	72,64	6,22
Papua Barat	478.699	18,82	5,68	457.222	206,72	37,94	465.348	225,54	25,73
Papua	445.057	30,28	3,61	392.446	867,93	37,34	406.385	898,21	28,40
INDONESIA	356.378	10.619,87	8,22	333.034	17.893,73	14,09	344.809	28.513,60	11,13

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2015

D. Perkembangan Gini Ratio Tahun 2010–September 2015

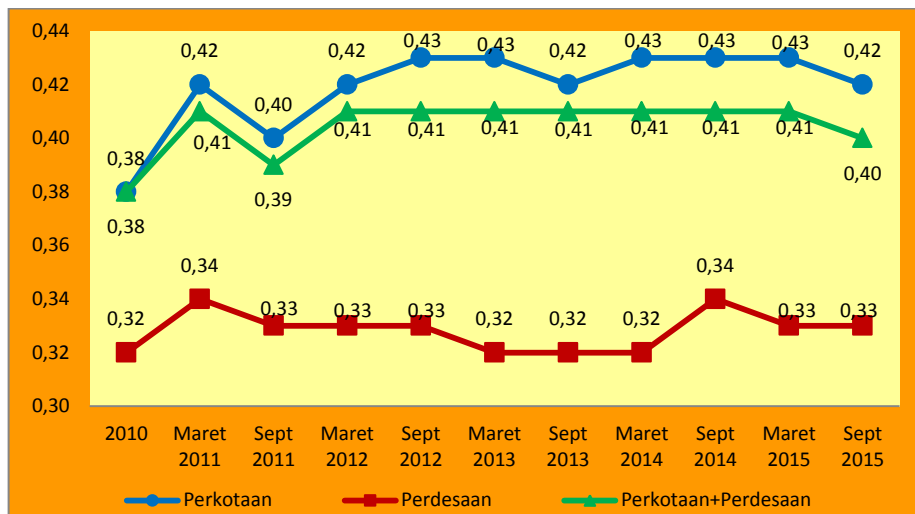
1. Tingkat ketimpangan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya tingkat ketimpangan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan adalah *Gini Ratio*.

***Gini Ratio* pada September 2015
adalah sebesar 0,40**
2. *Gini Ratio* pada tahun 2010 tercatat sebesar 0,38 dan meningkat terus hingga Maret 2015 yang mencapai 0,41. Pada September 2015, *Gini Ratio* tercatat sebesar 0,40, menurun 0,01 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* pada Maret 2015 yang sebesar 0,41. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia selama periode Maret 2015–September 2015.
3. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2015–September 2015, *Gini Ratio* di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,01 poin yaitu dari 0,43 pada maret 2015 menjadi 0,42 pada September 2015. Sementara di daerah perdesaan nilai *Gini Ratio* relatif tetap yaitu sebesar 0,33 baik pada Maret 2015 maupun September 2015.

Tabel 16.5
Nilai *Gini Ratio* Menurut Daerah, 2010–September 2015

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	0,38	0,32	0,38
Maret 2011	0,42	0,34	0,41
Sept 2011	0,40	0,33	0,39
Maret 2012	0,42	0,33	0,41
Sept 2012	0,43	0,33	0,41
Maret 2013	0,43	0,32	0,41
Sept 2013	0,42	0,32	0,41
Maret 2014	0,43	0,32	0,41
Sept 2014	0,43	0,34	0,41
Maret 2015	0,43	0,33	0,41
Sept 2015	0,42	0,33	0,40

Grafik 16.2
Perkembangan Gini Ratio, 2010-September 2015



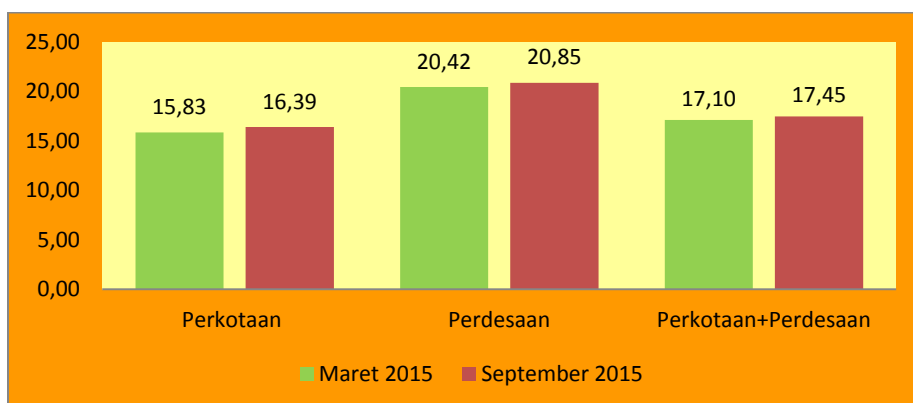
E. Perkembangan Distribusi pengeluaran Maret 2015–September 2015

1. Disamping *Gini Ratio* ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen. Pada September 2015, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,45 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dibanding kondisi Maret 2015 yang sebesar 17,10 persen.
2. Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan tercatat sebesar 16,39 yang berarti ada pada kategori ketimpangan sedang. Namun demikian, kondisi ini mengarah kepada perbaikan distribusi pengeluaran dibanding kondisi Maret 2015 yang sebesar 15,83 persen. Sementara di daerah perdesaan, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah tercatat sebesar 20,85 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah dan angkanya membaik dibanding kondisi Maret.

Tabel 16.6
Distribusi Pengeluaran Penduduk di Indonesia
Maret dan September 2015 (Persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2015	15,83	34,60	49,57
September 2015	16,39	34,57	49,04
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2015	20,42	37,53	42,05
September 2015	20,85	37,14	42,01
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>			
Maret 2015	17,10	34,65	48,25
September 2015	17,45	34,70	47,84

Grafik 16.3
Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk
40 Persen terbawah, Maret 2015 dan September 2015



F. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perbaikan Tingkat ketimpangan

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap adanya perbaikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia selama periode Maret 2015–September 2015 diantaranya adalah:

- Kenaikan upah buruh pertanian dari Rp46.180,- pada Maret 2015 menjadi Rp46.739,- pada September 2015 atau naik sebesar 1,21 persen pada periode Maret 2015-September 2015.

- b. Kenaikan upah buruh bangunan dari Rp79.657,- pada Maret 2015 menjadi Rp80.494,- pada September 2015 atau naik sebesar 1,05 persen pada periode Maret 2015–September 2015.
- c. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), terjadi peningkatan jumlah pekerja bebas baik pekerja bebas pertanian maupun non pertanian dari 11,9 juta orang (Februari 2015) menjadi 12,5 juta orang (Agustus 2015).
- d. Berdasarkan data Susenas, kenaikan pengeluaran kelompok penduduk bawah lebih cepat dibandingkan dengan kelompok penduduk atas pada periode Maret 2015-September 2015.
- e. Kenaikan pengeluaran yang merefleksikan peningkatan pendapatan kelompok penduduk bawah tidak lepas dari upaya pembangunan infrastruktur padat karya, bantuan sosial (pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan), serta perbaikan pendapatan PNS golongan bawah.
- f. Berdasarkan proyeksi penduduk, persentase penduduk perkotaan naik dari 52,55 persen pada Maret 2015 menjadi 53,19 persen pada September 2015. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan migrasi dari desa ke kota yang menyebabkan semakin tingginya upah yang diterima oleh buruh kasar.

G. *Gini Ratio* menurut Provinsi

1. Pada September 2015, *Gini Ratio* tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Barat dan Papua Barat yaitu masing-masing sebesar 0,43. Sementara yang terendah yaitu di Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,27 disusul Provinsi Maluku Utara sebesar 0,29. Tercatat ada empat provinsi yang mempunyai angka *Gini Ratio* diatas angka nasional, yaitu: Provinsi Jawa Barat dan Papua Barat (0,43) serta Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta (0,42).
2. Di daerah perkotaan, pada September 2015 tercatat ada tiga provinsi yang mempunyai angka *Gini Ratio* diatas angka nasional perkotaan yaitu Provinsi Jawa Barat (0,45) serta Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur masing-masing sebesar 0,43. Sementara di daerah perdesaan, angka *Gini Ratio* tertinggi pada September 2015 ada di Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 0,46 dan yang terendah ada di Provinsi Bangka Belitung, Banten, dan Maluku Utara yaitu masing-masing sebesar 0,26.

Tabel 16.7
Gini Rasio Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2015–September 2015

Provinsi	Maret 2015			September 2015		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,37	0,29	0,33	0,37	0,29	0,34
Sumatera Utara	0,36	0,30	0,34	0,33	0,28	0,33
Sumatera Barat	0,36	0,30	0,34	0,33	0,28	0,32
Riau	0,39	0,33	0,36	0,38	0,33	0,37
Jambi	0,38	0,34	0,36	0,35	0,32	0,34
Sumatera Selatan	0,39	0,31	0,36	0,35	0,29	0,33
Bengkulu	0,41	0,35	0,38	0,40	0,34	0,37
Lampung	0,40	0,35	0,38	0,40	0,31	0,35
Bangka Belitung	0,29	0,26	0,28	0,28	0,26	0,27
Kepulauan Riau	0,36	0,29	0,36	0,33	0,28	0,34
DKI Jakarta	0,43	-	0,43	0,42	-	0,42
Jawa Barat	0,43	0,32	0,41	0,45	0,31	0,43
Jawa Tengah	0,42	0,33	0,38	0,40	0,34	0,38
DI Yogyakarta	0,44	0,33	0,43	0,43	0,33	0,42
Jawa Timur	0,44	0,34	0,42	0,43	0,33	0,40
Banten	0,41	0,27	0,40	0,39	0,26	0,39
Bali	0,38	0,33	0,38	0,41	0,35	0,40
Nusa Tenggara Barat	0,40	0,33	0,37	0,38	0,34	0,36
Nusa Tenggara Timur	0,33	0,29	0,34	0,30	0,30	0,35
Kalimantan Barat	0,35	0,30	0,33	0,36	0,29	0,33
Kalimantan Tengah	0,37	0,29	0,33	0,34	0,27	0,30
Kalimantan selatan	0,38	0,30	0,35	0,37	0,28	0,33
Kalimantan Timur	0,31	0,29	0,32	0,32	0,27	0,32
Kalimantan Utara	0,30	0,27	0,29	0,32	0,28	0,31
Sulawesi Utara	0,39	0,32	0,37	0,36	0,34	0,37
Sulawesi Tengah	0,43	0,33	0,37	0,41	0,30	0,37
Sulawesi Selatan	0,42	0,38	0,42	0,39	0,35	0,40
Sulawesi Tenggara	0,41	0,37	0,40	0,41	0,36	0,38
Gorontalo	0,42	0,37	0,42	0,39	0,37	0,40
Sulawesi Barat	0,39	0,35	0,36	0,38	0,34	0,36
Maluku	0,31	0,32	0,34	0,33	0,31	0,34
Maluku Utara	0,28	0,26	0,28	0,31	0,26	0,29
Papua Barat	0,34	0,48	0,44	0,35	0,46	0,43
Papua	0,34	0,38	0,42	0,35	0,39	0,39
INDONESIA	0,43	0,33	0,41	0,42	0,33	0,40

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2015 dan September 2015

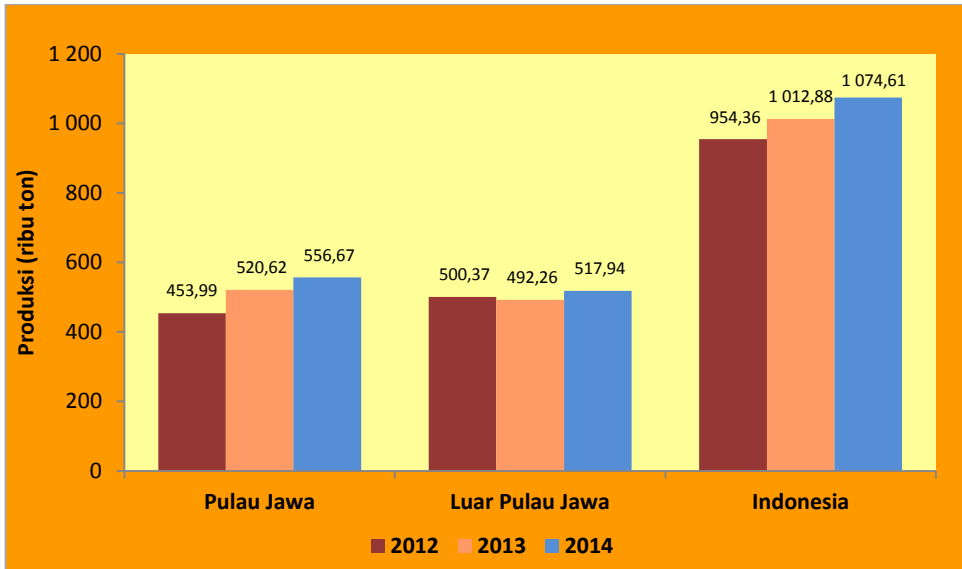
XVII. PRODUKSI HORTIKULTURA 2014

A. CABAI BESAR

1. Produksi cabai besar Indonesia tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton, mengalami peningkatan sebesar 61,73 ribu ton (6,09 persen) dibandingkan tahun 2013. Peningkatan produksi cabai besar tahun 2014 tersebut terjadi di Pulau Jawa sebesar 36,05 ribu ton dan di luar Pulau Jawa sebesar 25,68 ribu ton.

Produksi cabai besar tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton

Grafik 17.1
Perkembangan Produksi Cabai Besar Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014



2. Tahun 2014, persentase produksi cabai besar menurut wilayah di Pulau Jawa sebesar 51,80 persen dan di luar Pulau Jawa sebesar 48,20 persen. Dalam periode 2012–2014, produksi tertinggi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terjadi pada tahun 2014, yaitu masing-masing sebesar 556,67 ribu ton dan 517,94 ribu ton.
3. Pada periode tahun 2013–2014, peningkatan produksi cabai besar terjadi pada setiap triwulan, yaitu triwulan I sebesar 17,97 ribu ton (6,77 persen), pada triwulan II sebesar 5,33 ribu ton (1,86 persen), triwulan III sebesar 23,11 ribu ton (9,02 persen), dan triwulan IV sebesar 15,33 ribu ton (7,51 persen).

Tabel 17.1
Perkembangan Produksi Cabai Besar (ton)
Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014

Uraian	2012	2013	2014	Perkembangan			
				2012–2013		2013–2014	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Wilayah							
Pulau Jawa	453 990	520 616	556 671	66 626	14,68	36 055	6,93
Luar Pulau Jawa	500 373	492 263	517 940	-8 110	-1,62	25 677	5,22
Indonesia	954 363	1 012 879	1 074 611	58 516	6,13	61 732	6,09
Triwulan							
Triwulan I	264 887	265 446	283 411	559	0,21	17 965	6,77
Triwulan II	255 277	287 063	292 390	31 786	12,45	5 327	1,86
Triwulan III	235 559	256 319	279 433	20 760	8,81	23 114	9,02
Triwulan IV	198 640	204 051	219 377	5 411	2,72	15 326	7,51

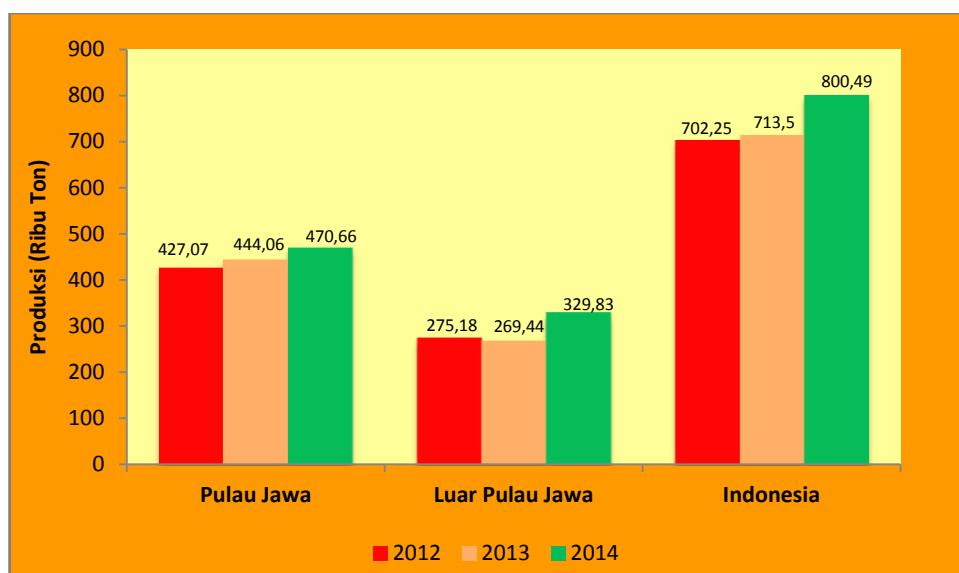
Keterangan: Bentuk hasil produksi cabai besar adalah buah segar dengan tangkai
 Cabai besar terdiri dari cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau *keriting*

B. CABAI RAWIT

- Produksi cabai rawit tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 86,98 ribu ton (12,19 persen) dibandingkan tahun 2013. Kenaikan produksi cabai rawit dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi di Pulau Jawa sebesar 26,59 ribu ton (5,99 persen) dan di luar Pulau Jawa sebesar 60,39 ribu ton (22,41 persen).
- Persentase produksi cabai rawit tahun 2014 sebesar 58,80 persen di Pulau Jawa dan 41,20 persen di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2012–2014, Pulau Jawa masih menjadi sentra produksi cabai rawit Indonesia. Produksi cabai rawit tertinggi terjadi pada tahun 2014 dibanding dua tahun sebelumnya, di Pulau Jawa sebesar 470,66 ribu ton dan di luar Pulau Jawa sebesar 329,83 ribu ton.
- Dari tahun 2013 ke tahun 2014, peningkatan produksi terjadi pada triwulan I sebesar 11,89 ribu ton (7,93 persen), triwulan II sebesar 36,28 ribu ton (18,77 persen), triwulan III sebesar 38,73 ribu ton (20,50 persen), dan triwulan IV sebesar 81 ton (0,04 persen).

**Produksi cabai rawit tahun
 2014 sebesar 0,800 juta ton**

Grafik 17.2
Perkembangan Produksi Cabai Rawit Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014



Tabel 17.2
Perkembangan Produksi Cabai Rawit (ton)
Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014

Uraian	2012	2013	2014	Perkembangan			
				2012–2013		2012–2013	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Wilayah							
Pulau Jawa	427 068	444 062	470 655	16 994	3,98	26 593	5,99
Luar Pulau Jawa	275 184	269 440	329 829	-5 744	-2,09	60 389	22,41
Indonesia	702 252	713 502	800 484	11 250	1,60	86 982	12,19
Triwulan							
Triwulan I	151 785	149 858	161 749	-1 927	-1,27	11 891	7,93
Triwulan II	215 936	193 289	229 573	-22 647	-10,49	36 284	18,77
Triwulan III	186 691	188 898	227 624	2 207	1,18	38 726	20,50
Triwulan IV	147 840	181 457	181 538	33 617	22,74	81	0,04

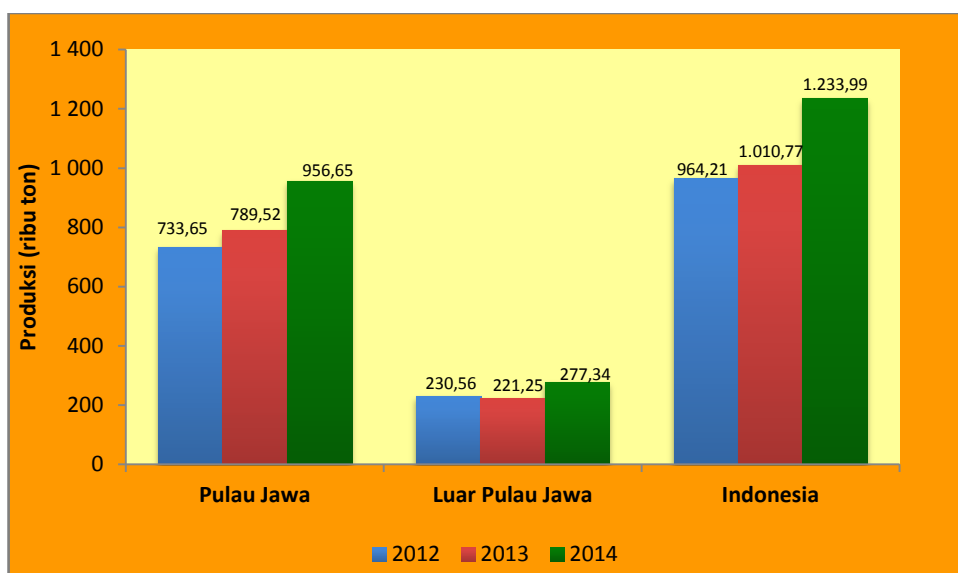
Keterangan: Bentuk hasil produksi cabai rawit adalah buah segar dengan tangkai
 Cabai rawit terdiri dari cabai rawit merah dan cabai rawit hijau

C. BAWANG MERAH

1. Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak 223,22 ribu ton (22,08 persen) dibandingkan pada tahun 2013. Peningkatan produksi tersebut disebabkan meningkatnya produksi di Pulau Jawa sebesar 167,13 ribu ton atau sebesar 21,17 persen dan di luar Pulau Jawa sebesar 56,08 ribu ton atau sebesar 25,35 persen.
2. Persentase produksi bawang merah Indonesia tahun 2014 menurut wilayah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing sebesar 77,53 persen dan 22,47 persen. Produksi tertinggi di Pulau Jawa dicapai pada tahun 2014, dimana produksi mencapai 956,65 ribu ton. Produksi tertinggi di luar Pulau Jawa juga dicapai pada tahun 2014, dimana produksi mencapai 277,34 ribu ton.
3. Dari tahun 2013 ke tahun 2014, peningkatan produksi terjadi pada triwulan I sebesar 30,82 ribu ton (12,69 persen), triwulan II sebesar 85,14 ribu ton (35,81 persen), triwulan III sebesar 38,02 ribu ton (12,70 persen), dan triwulan IV sebesar 69,23 ribu ton (30,00 persen).

Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton

Grafik 17.3
Perkembangan Produksi Bawang Merah Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014



Tabel 17.3
Perkembangan Produksi Bawang Merah (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014

Uraian	2012	2013	2014	Perkembangan			
				2012–2013		2013–2014	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Wilayah							
Pulau Jawa	733 657	789 520	956 653	55 863	7,61	167 133	21,17
Luar Pulau Jawa	230 564	221 253	277 336	- 9 311	-4,04	56 083	25,35
Indonesia	964 221	1 010 773	1 233 989	46 552	4,83	223 216	22,08
Triwulan							
Triwulan I	227 560	242 929	273 753	15 369	6,75	30 824	12,69
Triwulan II	231 068	237 753	322 892	6 685	2,89	85 139	35,81
Triwulan III	300 968	299 299	337 319	-1 669	-0,55	38 020	12,70
Triwulan IV	204 625	230 792	300 025	26 167	12,79	69 233	30,00

Keterangan: Bentuk hasil produksi bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun

XVIII. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERTANIAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN, 2014

A. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI TAHUN 2014

A.1 PADI

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah sebesar Rp12,7 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman padi sawah yang terbesar adalah upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencapai 48,23 persen dari total biaya atau sebesar Rp 6,1 juta (Tabel 18.1). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp17,2 juta.

**Total biaya per musim tanam
untuk satu hektar luas panen
padi sawah sebesar Rp12,7 juta**

Tabel 18.1
Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha
Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang (ribu rupiah), 2014

Uraian	Padi Sawah		Padi Ladang	
	Nilai	% biaya	Nilai	% biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	17 174,66	-	10 249,76	-
B. Biaya Produksi	12 677,27	100,00	7 821,90	100,00
1. Bibit/Benih	406,97	3,21	282,23	3,61
2. Pupuk	1 318,60	10,40	607,27	7,76
3. Pestisida	233,96	1,85	135,33	1,73
4. Upah Pekerja dan Jasa Pertanian	6 114,71	48,23	4 877,45	62,36
5. Sewa Lahan	3 785,42	29,86	1 387,50	17,74
6. Sewa Alat/Sarana Usaha	328,92	2,59	175,30	2,24
7. Bahan Bakar	86,48	0,68	70,99	0,91
8. Lainnya	402,22	3,17	285,82	3,65

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi ladang sebesar Rp7,8 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman padi ladang yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencakup 62,36 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,9 juta. (Tabel 18.1). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp 10,2 juta.

**Total biaya per musim tanam
untuk satu hektar luas panen
padi ladang sebesar Rp 7,8 juta**

A.2 JAGUNG

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen jagung sebesar Rp9,1 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman jagung yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencapai 44,93 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,1 juta. (Tabel 18.2). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp12,0 juta.

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen jagung sebesar Rp9,1 juta

Tabel 18.2
Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha
Tanaman Jagung dan Kedelai (ribu rupiah), 2014

Uraian	Jagung		Kedelai	
	Nilai	% biaya	Nilai	% biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	12 045,23	–	9 020,14	–
B. Biaya Produksi	9 140,12	100,00	9 136,50	100,00
1. Bibit/Benih	728,59	7,97	628,06	6,87
2. Pupuk	1 096,30	11,99	433,62	4,75
3. Pestisida	110,88	1,21	200,87	2,20
4. Upah Pekerja dan Jasa Pertanian	4 106,99	44,93	4 095,18	44,82
5. Sewa Lahan	2 532,35	27,71	3 255,84	35,64
6. Sewa Alat/Sarana Usaha	172,50	1,89	164,69	1,80
7. Bahan Bakar	79,83	0,87	72,62	0,79
8. Lainnya	312,68	3,42	285,62	3,13

A.3 KEDELAI

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen kedelai sebesar Rp9,1 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman kedelai yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencakup 44,82 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,1 juta (Tabel 18.2). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp9,0 juta.

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen kedelai sebesar Rp9,1 juta

B. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN CABAI MERAH, CABAI RAWIT, BAWANG MERAH, DAN JERUK TAHUN 2014

B.1 CABAI MERAH

1. Total biaya produksi usaha tanaman cabai merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp52,1 juta. Biaya produksi terbesar adalah upah pekerja sebesar 47,74 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp77,1 juta.
2. Biaya produksi tanaman cabai merah yang ditanam pada Musim Kemarau (MK) lebih tinggi dibandingkan dengan pada Musim Hujan (MH).

Tabel 18.3
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah per Hektar per Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	83 935,48	–	63 692,23	–
B. Biaya Produksi	54 135,84	100,00	48 051,34	100,00
1. Benih	2 048,61	3,78	2 030,19	4,23
2. Pupuk	9 274,20	17,14	8 264,54	17,19
3. Pestisida	2 928,23	5,41	2 949,24	6,14
4. Bahan bakar	705,01	1,30	206,31	0,43
5. Jaring pelindung	51,47	0,10	22,59	0,05
6. Mulsa	3 174,66	5,86	3 426,54	7,13
7. Upah pekerja	26 257,40	48,50	22 125,04	46,05
8. Sewa lahan	5 126,78	9,47	4 837,84	10,06
9. Pengeluaran lainnya	4 569,48	8,44	4 189,05	8,72

B.2 CABAI RAWIT

1. Total biaya produksi usaha tanaman cabai rawit per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp34,0 juta. Biaya produksi terbesar adalah upah pekerja sebesar 54,85 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp55,2 juta.
2. Biaya produksi tanaman cabai rawit yang ditanam pada MK sebesar Rp37,2 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan pada MH sebesar Rp28,3 juta.

Tabel 18.4
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Rawit per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	63 352,41	–	40 660,34	–
B. Biaya Produksi	37 247,92	100,00	28 288,78	100,00
1. Benih	1 744,94	4,68	1 522,83	5,38
2. Pupuk	4 887,27	13,11	4 288,91	15,16
3. Pestisida	958,42	2,57	660,67	2,34
4. Bahan bakar	298,10	0,80	106,89	0,38
5. Jaring pelindung	13,90	0,04	26,34	0,09
6. Mulsa	915,26	2,46	587,71	2,08
7. Upah pekerja	20 689,82	55,54	15 061,49	53,23
8. Sewa lahan	5 263,37	14,14	4 091,63	14,47
9. Pengeluaran lainnya	2 476,84	6,66	1 942,31	6,87

B.3 BAWANG MERAH

1. Total biaya produksi usaha tanaman bawang merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp67,2 juta. Biaya produksi terbesar adalah biaya untuk benih sebesar 38,58 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp77,2 juta.
2. Pada tahun 2014, biaya produksi tanaman bawang merah yang ditanam pada MK (Rp64,6 juta) lebih rendah dibandingkan pada MH (Rp72,2 juta).

Tabel 18.5
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Bawang Merah per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	86 575,83	–	59 833,57	–
B. Biaya Produksi	64 565,21	100,00	72 189,79	100,00
1. Benih	22 851,62	35,39	31 684,00	43,89
2. Pupuk	5 509,96	8,53	5 206,93	7,22
3. Pestisida	4 915,77	7,61	5 590,41	7,74
4. Bahan bakar	588,77	0,91	858,46	1,19
5. Jaring pelindung	27,93	0,04	23,01	0,03
6. Mulsa	571,09	0,89	599,50	0,83
7. Upah pekerja	20 185,58	31,27	20 697,02	28,68
8. Sewa lahan	6 830,34	10,58	5 180,37	7,18
9. Pengeluaran lainnya	3 084,15	4,78	2 350,09	3,24

B.4 JERUK

Total biaya produksi tanaman jeruk per 100 pohon selama setahun yang dipanen sendiri mencapai Rp5,4 juta dan yang ditebaskan mencapai Rp5,7 juta. Persentase biaya produksi terbesar tanaman jeruk yang dipanen sendiri adalah upah pekerja sebesar 32,07 persen (Rp1,7 juta) dan yang ditebaskan adalah biaya untuk pupuk sebesar 28,41 persen (Rp1,6 juta). Nilai produksi usaha tanaman jeruk per 100 pohon yang dipanen sendiri dan ditebaskan masing-masing sebesar Rp10,1 juta dan Rp13,0 juta.

Tabel 18.6
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jeruk per 100 Pohon yang Dipanen Sendiri dan Ditebaskan 2014

Uraian	Dipanen Sendiri		Ditebaskan	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	10 087,43	–	12 967,35	–
B. Biaya Produksi	5 441,21	100,00	5 666,30	100,00
1. Benih	195,35	3,59	119,65	2,11
2. Pupuk	1 078,92	19,82	1 609,97	28,41
3. Pestisida	402,93	7,41	558,95	9,86
4. Bahan bakar	52,91	0,97	117,02	2,07
5. Jaring pelindung	2,63	0,05	4,90	0,09
6. Mulsa	3,56	0,07	0,30	0,01
7. Upah pekerja	1 744,85	32,07	1 033,32	18,24
8. Sewa lahan	1 533,95	28,20	1 536,18	27,11
9. Pengeluaran lainnya	426,11	7,82	686,01	12,10

C. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN KELAPA SAWIT, KARET, DAN TEBU TAHUN 2014

1. Rata-rata biaya produksi usaha perkebunan tebu per hektar Setahun mencapai 77,98 persen (Rp24,2 juta) dari nilai produksi. Sementara untuk komoditas karet mencapai 71,54 persen (Rp9,2 juta) dan kelapa sawit sebesar 57,05 persen (Rp9,7 juta). Secara relatif kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit lebih menguntungkan dibandingkan usaha perkebunan karet atau tebu.

Secara relatif kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit lebih menguntungkan dibandingkan usaha perkebunan karet atau tebu

2. Pada usaha perkebunan kelapa sawit sebagian besar biaya digunakan untuk membayar upah tenaga kerja sebesar 31,71 persen. Demikian pula untuk

usaha perkebunan karet, pengeluaran terbesar untuk tenaga kerja sebesar 57,09 persen.

3. Pada usaha perkebunan tebu pengeluaran terbesar adalah untuk sewa lahan sebesar 32,37 persen dari seluruh total biaya. Pada komoditas tebu, rata-rata biaya untuk jasa pertanian relatif cukup besar yaitu mencapai 4,74 persen.

Tabel 18.7
Nilai Produksi Dan Biaya Per Hektar Usaha Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014

Subsektor	Komoditas					
	Kelapa Sawit		Karet		Tebu	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. A. Nilai Produksi	17 026,01	-	12 877,97	-	31 044,66	-
B. B. Biaya Produksi	9 712,16	100,00	9 211,69	100,00	24 214,17	100,00
1. Benih/Penyisipan/Tanaman Pelindung	106,95	1,10	83,68	0,91	3 055,32	12,62
2. Pupuk	1 791,14	18,44	300,64	3,27	2 913,26	12,04
3. Stimulan	4,97	0,05	5,56	0,06	20,03	0,08
4. Pestisida	225,95	2,33	104,99	1,14	83,70	0,34
5. Tenaga Kerja	3 079,94	31,71	5 259,37	57,09	6 346,06	26,21
6. Sewa Lahan	3 008,30	30,97	2 244,74	24,37	7 838,92	32,37
7. Sewa Alat dan Sarana	231,72	2,38	183,12	1,99	259,86	1,07
8. Jasa Pertanian	156,35	1,61	48,31	0,52	1 147,87	4,74
9. Pengeluaran Lainnya	1 106,84	11,41	981,28	10,65	2 549,15	10,53

D. STRUKTUR ONGKOS USAHA SAPI POTONG, SAPI PERAH, AYAM RAS PETELUR, DAN AYAM RAS PEDAGING TAHUN 2014

D.1 SAPI POTONG

1. Total biaya produksi usaha sapi potong di rumah tangga untuk setiap ekor dalam setahun sebesar Rp3,6 juta. Sebagian besar biaya digunakan untuk pakan Rp2,1 juta per ekor per tahun (57,78 persen) dan biaya pekerja Rp1,2 juta per ekor per tahun (33,53 persen). Biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp.71 ribu per ekor per tahun dan Rp123 ribu per ekor per tahun, sedangkan sisa biaya lainnya adalah untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan air.

Total biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen)

2. Dengan nilai produksi sebesar Rp4,1 juta per ekor per tahun maka usaha peternakan sapi potong mendapat keuntungan Rp523 ribu per ekor per tahun. Pada umumnya sebagian kegiatan pengusahaan sapi potong dilakukan sendiri oleh peternak dan pakan ternak tidak membeli.

Tabel 18.8
Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun Usaha Sapi Potong dan Sapi Perah 2014

Uraian	Sapi Potong		Sapi Perah	
	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	4 115	–	7 753	–
B. Biaya Produksi	3 592	100,00	5 596	100,00
1. Upah Pekerja	1 204	33,53	1 373	24,53
2. Pakan	2 075	57,78	3 723	66,52
Hijauan Pakan Ternak	1 662	46,27	2 007	35,86
Pakan Buatan Pabrik	45	1,24	904	16,16
Pakan Lainnya	369	10,27	812	14,50
3. Bahan Bakar Minyak	69	1,91	126	2,25
4. Listrik	18	0,50	22	0,39
5. Air	32	0,88	28	0,51
6. Pemeliharaan Kesehatan	71	1,97	77	1,37
7. Pengeluaran Lain-lain	123	3,43	248	4,43

D.2 SAPI PERAH

1. Total biaya produksi usaha sapi perah di rumah tangga untuk setiap ekor dalam setahun sebesar Rp5,6 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu sebesar Rp3,7 juta per ekor per tahun (66,52 persen) dan biaya pekerja yaitu sebesar Rp1,4 juta per ekor per tahun (24,53 persen). Biaya untuk pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp77 ribu per ekor per tahun (1,37 persen) dan Rp248 ribu per ekor per tahun (4,43 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.

Total biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen)

2. Dengan nilai produksi mencapai Rp7,8 juta per ekor per tahun, maka peternak sapi perah mendapat keuntungan Rp2,2 juta per ekor per tahun.

D.3 AYAM RAS PETELUR

1. Total biaya produksi usaha ayam ras petelur untuk 1.000 ekor dalam setahun membutuhkan Rp123,6 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu Rp103,3 juta per 1.000 ekor per tahun (83,58 persen) dan biaya pekerja yaitu sebesar Rp12,5 juta per 1.000 ekor per tahun (10,14 persen). Biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp3,1 juta per 1.000 ekor per tahun (2,47 persen) dan Rp2,7 juta per 1.000 ekor per tahun (2,15 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.
2. Dengan nilai produksi mencapai Rp146 juta per 1.000 ekor per tahun, maka peternak ayam ras petelur mendapat keuntungan Rp22,3 juta per 1.000 ekor per tahun. Produktivitas ayam ras petelur mencapai 703 butir per 1.000 ekor per hari. Dalam setahun, rata-rata periode produksi telur selama 261 hari, sedangkan rata-rata rontok bulu selama 43 hari.

Total biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen)

D.4 AYAM RAS PEDAGING

1. Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging untuk 5.000 ekor membutuhkan Rp113,2 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu sebesar Rp73,2 juta per 5.000 ekor (64,69 persen) dan pembelian *Day Old Chick* (DOC) sebesar Rp21,9 juta per 5.000 ekor (19,36 persen). Selain itu, biaya untuk pekerja sebesar Rp10,8 juta per 5.000 ekor (9,57 persen), pemeliharaan kesehatan sebesar Rp2 juta per 5.000 ekor (1,81 persen), dan

Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen)

biaya lain-lain Rp3,7 juta per 5.000 ekor (3,30 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.

2. Dengan nilai produksi mencapai Rp158 juta per 5.000 ekor, peternak ayam ras pedaging mendapat keuntungan Rp44,8 juta per 5.000 ekor. Rumah tangga usaha ayam ras pedaging rata-rata memelihara 5,11 siklus setahun, dengan rata-rata lama siklus 40 hari, dan rata-rata bobot ayam per ekor 1,69 kg.

Tabel 18.9
Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Tahun Usaha Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging, 2014

Uraian	Ayam Ras Petelur		Ayam Ras Pedaging	
	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per 1.000 Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per 5.000 Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	145 970	-	158 001	-
B. Biaya Produksi	123 640	100,00	113 239	100,00
1 Upah Pekerja	12 534	10,14	10 838	9,57
2 Pakan	103 336	83,58	73 248	64,69
- Biji-bijian	18 484	14,95	620	0,55
- Pakan Buatan Pabrik	53 027	42,89	69 079	61,00
- Pakan Lainnya	31 825	25,74	3 549	3,14
3 Bahan Bakar Minyak (BBM)	885	0,72	593	0,52
4 Listrik	727	0,59	488	0,43
5 Air	438	0,35	366	0,32
6 Pemeliharaan Kesehatan	3 055	2,47	2 050	1,81
7 Pengeluaran Lain-lain	2 665	2,15	3 735	3,30
8 Pembelian <i>Day Old Chick</i> (DOC)	-	-	21 921	19,36

E. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERIKANAN TAHUN 2014

E.1 BUDIDAYA IKAN

1. Jumlah biaya per hektar dalam satu siklus usaha budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta (48,36 persen), Rp4,2 juta (71,91 persen), dan Rp3,2 juta (44,16 persen) terhadap nilai produksi. Keuntungan yang diperoleh sebesar masing-masing sebesar Rp7,8 juta (51,64 persen), Rp1,6 juta (28,09 persen), dan Rp4,1 juta (55,84 persen).
2. Biaya terbesar untuk budidaya rumput laut adalah benih/bibit yang mencapai Rp3 juta (41,33 persen), diikuti upah pekerja sebesar Rp2,5 juta (33,60 persen). Biaya terbesar usaha bandeng adalah untuk upah pekerja yang mencapai Rp965 ribu (23,21 persen) diikuti sewa lahan sebesar Rp960 ribu (23,08 persen). Sedangkan biaya terbesar usaha udang windu adalah upah pekerja yang mencapai Rp796 ribu (24,73 persen) diikuti oleh biaya sewa lahan sebesar Rp758 ribu (23,56 persen).

Tabel 18.10
Nilai Produksi dan Biaya per Hektar per Siklus
Usaha Budidaya Rumput Laut, Bandeng, dan Udang Windu, 2014

Uraian	Rumput Laut		Bandeng		Udang Windu	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Nilai Produksi	15 182,9	–	5 784,24	–	7 290,35	–
B. Biaya Produksi	7 342,8	100,00	4 159,74	100,00	3 219,76	100,00
- Benih/Bibit	3 034,7	41,30	480,28	11,54	553,68	17,20
- Pupuk dan Obat-obatan	2,9	0,04	482,71	11,61	286,01	8,89
- Pakan	0,1	0,00	716,37	17,22	331,86	10,31
- Upah Pekerja	2 467,4	33,60	965,31	23,21	795,98	24,73
- Sewa Lahan	361,5	4,92	960,23	23,08	758,43	23,56
- Alat/Sarana Usaha	304,4	4,15	83,85	2,02	78,95	2,45
- Lainnya	1 171,8	15,96	470,99	11,32	414,70	12,88

E.2 PENANGKAPAN IKAN

Jumlah biaya per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor sebesar Rp4,1 juta dan menggunakan perahu motor tempel sebesar Rp436 ribu. Biaya terbesar yang dikeluarkan adalah upah/gaji pekerja masing-masing

mencapai Rp1,7 juta (40,94 persen) dan Rp177 ribu (40,47 persen) diikuti oleh biaya BBM masing-masing sebesar Rp876 ribu (21,21 persen) dan Rp96 ribu (21,93 persen).

Tabel 18.11
Nilai Produksi dan Biaya per Trip Usaha Penangkapan Ikan di Laut
Menggunakan Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel, 2014

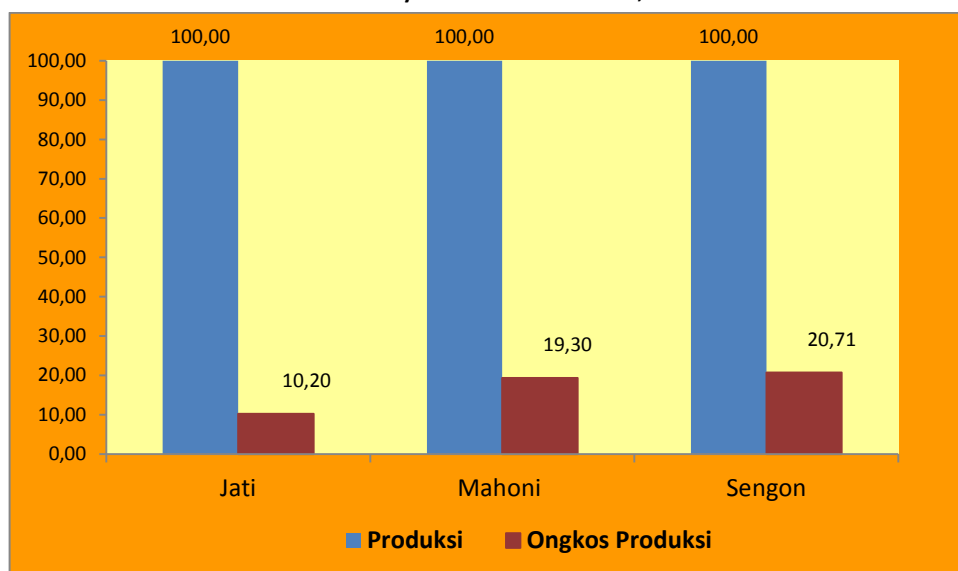
Uraian (1)	Kapal Motor		Perahu Motor Tempel	
	Nilai (ribu Rp) (2)	% (3)	Nilai (ribu Rp) (4)	% (5)
A. Produksi Hasil Penangkapan	6 211	-	813	-
B. Biaya Penangkapan	4 133	100,00	436	100,00
-Upah/gaji pekerja	1 692	40,94	177	40,47
-BBM	876	21,21	96	21,93
-Oli/Pelumas	72	1,73	13	2,93
-Garam/Es	181	4,37	15	3,55
-Perbekalan	661	15,99	64	14,58
-Sewa sarana/alat	213	5,16	19	4,28
-Pemeliharaan sarana/alat	140	3,40	14	3,15
-Penyusutan barang modal	151	3,66	16	3,74
-Biaya lainnya	146	3,53	23	5,37

F. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN JATI, MAHONI, DAN SENGON TAHUN 2014

1. Persentase ongkos produksi terhadap nilai produksi per 100 pohon untuk masing-masing tanaman jati, mahoni, dan sengon sebesar 10,20 persen, 19,30 persen, dan 20,71 persen (Gambar 18.1).
2. Pengeluaran terbesar untuk usaha tanaman kehutanan adalah untuk upah pekerja. Upah pekerja untuk usaha tanaman jati, mahoni dan sengon masing-masing sebesar 63,99 persen, 63,00 persen, dan 59,00 persen dari total pengeluaran/ongkos produksi (Tabel 18.12).

Total pengeluaran/ ongkos produksi per 100 pohon untuk tanaman jati, mahoni, sengon lebih dari Rp 0,5 juta

Grafik 18.1
Persentase Ongkos Produksi Terhadap Nilai Produksi per 100 Pohon
Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014



Tabel 18.12
Nilai Produksi dan Ongkos Produksi per 100 Pohon
Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014

Uraian	Komoditas					
	Jati		Mahoni		Sengon	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Produksi	8 791,18	-	6 069,90	-	3 963,07	-
B. Ongkos Produksi	896,42	100,00	1 171,57	100,00	820,60	100,00
1. Pupuk	61,31	6,84	66,50	5,68	129,67	15,80
2. Pestisida	10,78	1,20	22,60	1,93	23,37	2,85
3. Upah Pekerja	573,63	63,99	738,13	63,00	484,17	59,00
a. Pemeliharaan/penyiangan	459,01	51,21	608,67	51,95	347,84	42,39
b. Pemupukan	35,55	3,97	50,53	4,31	76,41	9,31
c. Pengendalian OPT	7,22	0,81	21,40	1,83	15,30	1,86
d. Pemanenan/penebangan	71,84	8,01	57,53	4,91	44,61	5,44
4. Jasa Pertanian	55,58	6,20	83,09	7,09	35,33	4,31
5. Penyusutan Barang Modal	31,18	3,48	31,58	2,70	22,03	2,68
6. Sewa Alat Tanpa Operator	18,22	2,03	9,20	0,79	2,74	0,33
7. Sewa Lahan dan Bunga Modal	9,83	1,10	35,44	3,02	23,14	2,82
8. Pengeluaran Lainnya	135,90	15,16	185,04	15,79	100,15	12,20

G. KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2014

1. Jumlah rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan hutan pada tahun 2014 sebanyak 8.643.228 rumah tangga; 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan. Dari yang menguasai lahan kawasan hutan tersebut, 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah.

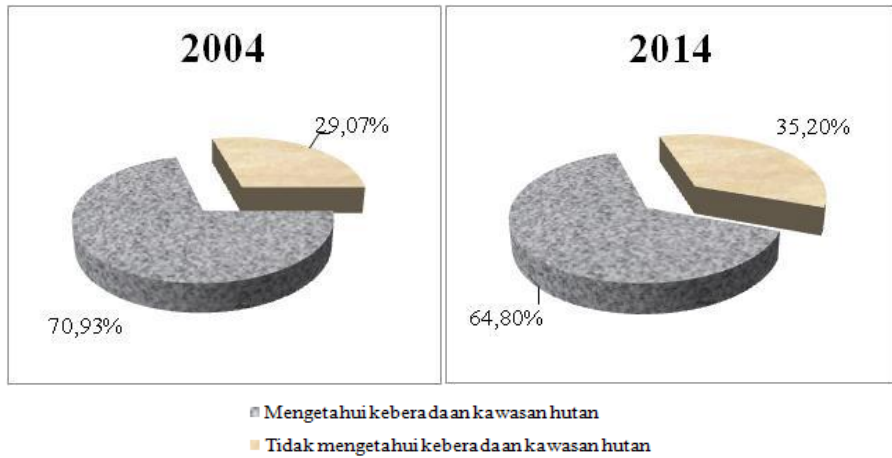
Persentase rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang menguasai lahan kawasan hutan sebesar 20,39 persen

2. Masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mengetahui keberadaan kawasan hutan sebesar 64,80 persen dan tidak mengetahui sebesar 35,20 persen. Terjadi penurunan dari tahun 2004, hal ini dapat disebabkan karena kawasan hutan tidak semuanya berupa hutan tegakan/tumbuhan yang ada kayunya namun ada yang berupa padang savana (padang rumput) (Grafik 18.2).

Tabel 18.13
Jumlah dan Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah, 2004 dan 2014

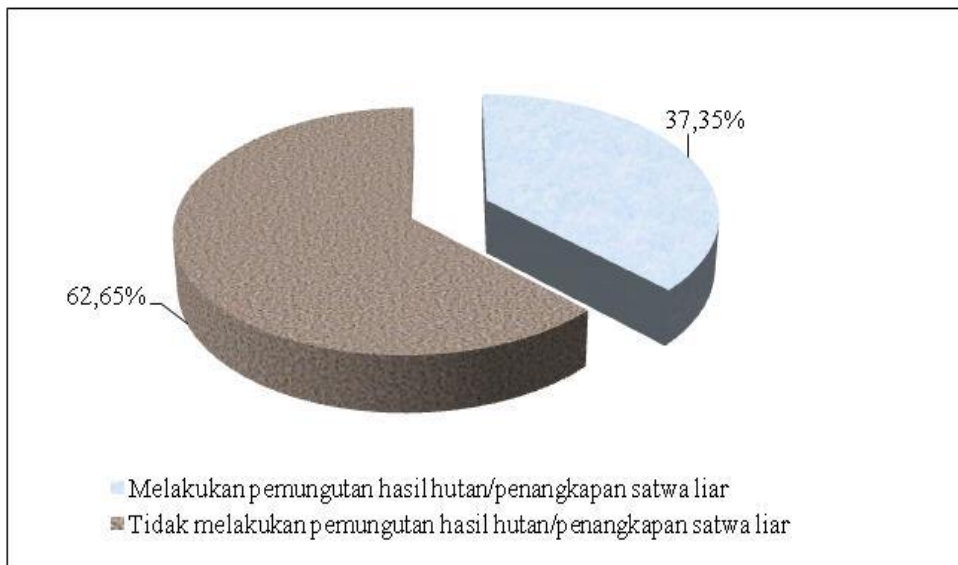
Uraian	Tahun	
	2004	2014
(1)	(2)	(3)
Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan	7 804 970	8 643 228
Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan berpindah	259 959	242 866
Persentase	3,33%	2,81%

Grafik 18.2
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan, 2004 dan 2014



- Hutan merupakan sumber daya alam yang juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Dari hasil Survei Kehutanan 2014 (SKH 2014) rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang melakukan pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar sebanyak 37,35 persen.

Grafik 18.3
Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Pemungutan Hasil Hutan/Penangkapan Satwa Liar, 2014

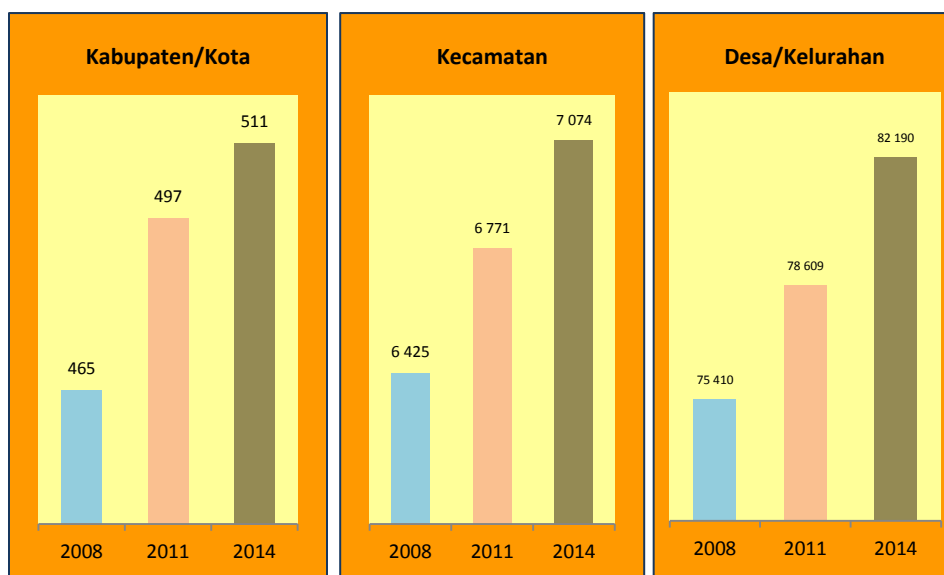


XIX. TIPOLOGI WILAYAH HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2014

A. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pendataan Podes dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang didata harus memenuhi 3 syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah, 2) mempunyai penduduk, dan 3) mempunyai pemerintahan desa. Menurut Podes 2014, tercatat sebanyak 82.190 wilayah setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa⁵, 8.412 kelurahan, dan 69 UPT. Selain itu, juga tercatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota. Lihat Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Grafik 19.1
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes, 2008–2014



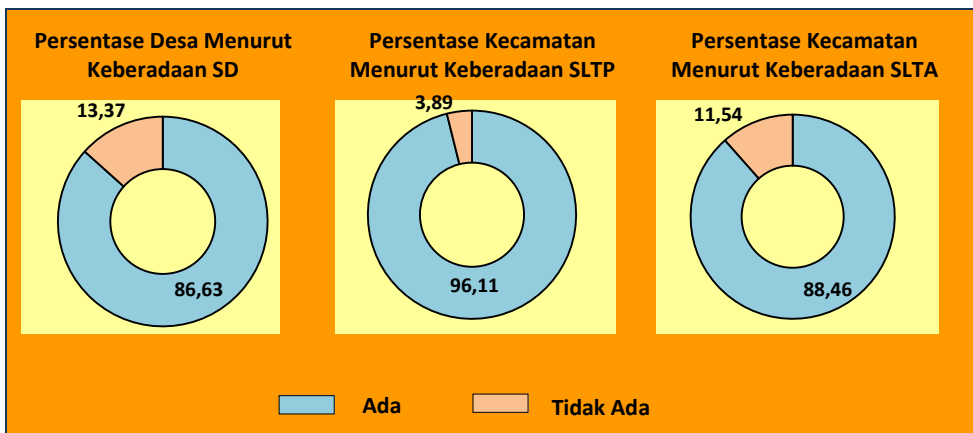
⁵ Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat

B. Infrastruktur

B.1 Pendidikan

1. Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa 86,63 persen desa/kelurahan mempunyai sarana SD (termasuk Madrasah Ibtidaiyah). Hanya 10.985 desa/kelurahan (13,37 persen) yang tidak mempunyai SD. Untuk desa/kelurahan tanpa SD, 2.438 desa/kelurahan (22,19 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SD terdekat lebih dari 3 km.
2. Sarana pendidikan SLTP telah ada di 6.799 kecamatan (96,11 persen). Sehingga, masih terdapat 275 kecamatan (3,89 persen) yang tidak ada SLTP. Untuk kecamatan tanpa SLTP, sebanyak 184 kecamatan (66,91 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SLTP terdekat lebih dari 6 km.
3. Sarana pendidikan SLTA telah ada di 88,46 persen kecamatan. Sehingga, masih terdapat 816 kecamatan (11,54 persen) yang tidak ada SLTA. Untuk kecamatan tanpa SLTA, sebanyak 508 kecamatan (62,33 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SLTA terdekat lebih dari 6 km.

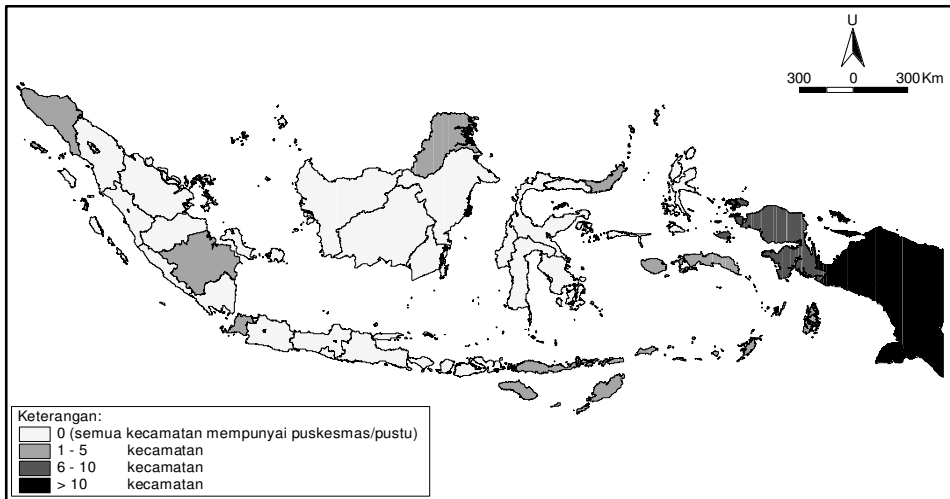
Grafik 19.2
Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2014



B.2 Kesehatan

Tersedianya pelayanan kesehatan dasar merupakan hak masyarakat yang menjadi pelayanan publik pemerintah. Podes 2014 menunjukkan bahwa 6.957 kecamatan (98,35 persen) telah mempunyai Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu). Sebanyak 117 kecamatan yang belum mempunyai Puskesmas/Pustu tersebar di 9 provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Lihat Lampiran 5.

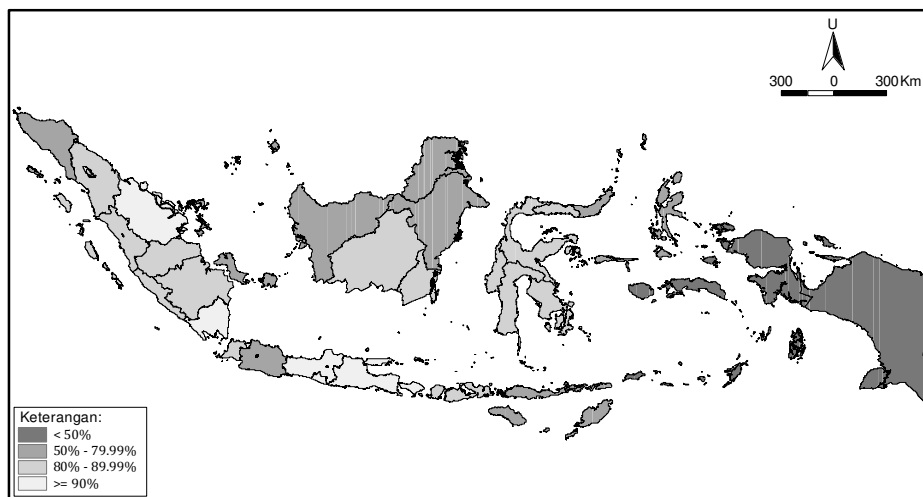
Grafik 19.3
Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014



B.3 Pasar dengan Bangunan

Tersedianya pasar di suatu wilayah menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian wilayah tersebut. Podes 2014 mencatat sebanyak 15.340 desa/kelurahan (18,66 persen) di 5.579 kecamatan, ternyata sudah ada pasar dengan bangunan (permanen atau semi permanen). Masih terdapat 1.495 kecamatan (21,13 persen) yang tidak ada pasar dengan bangunan. Lihat Lampiran 7.

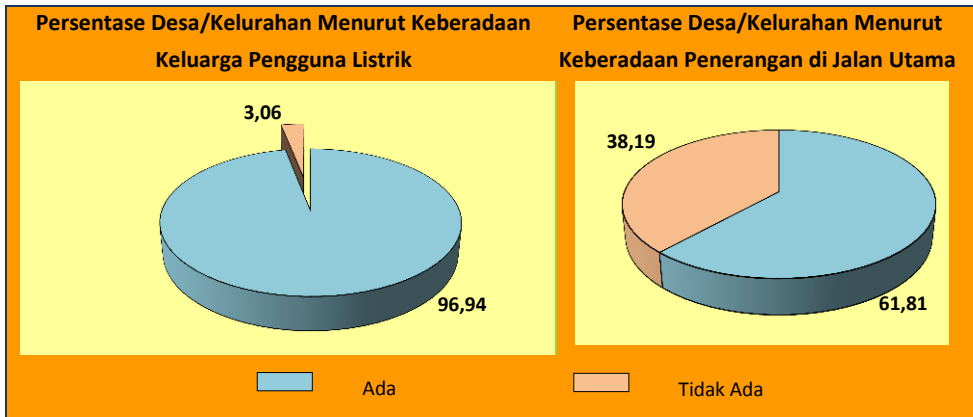
Grafik 19.4
Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014



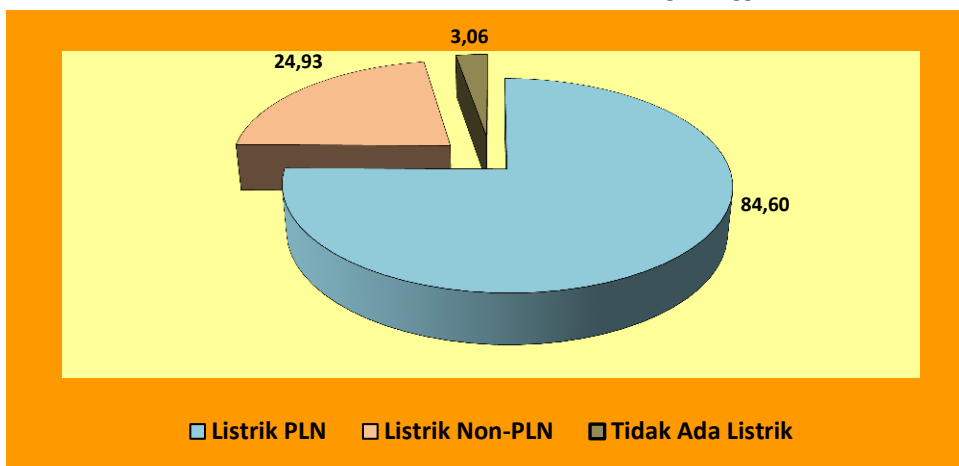
B.4 Listrik

1. Ketersediaan energi listrik sangat penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah. Tercatat sebanyak 69.531 desa/kelurahan (84,60 persen) telah ada keluarga pengguna listrik PLN. Selain itu, ada 4 provinsi yang seluruh desa/kelurahannya yang sudah ada keluarga pengguna listrik PLN. Keempat provinsi tersebut, yaitu: DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali. Lihat Lampiran 6.
2. Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19 persen) belum tersedia penerangan di jalan utama desa/kelurahan. Papua dan Nusa Tenggara Timur adalah dua provinsi dengan persentase tertinggi desa/kelurahan yang tidak ada penerangan di jalan utama (diatas 90 persen).

Grafik 19.5
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama



Grafik 19.6
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik

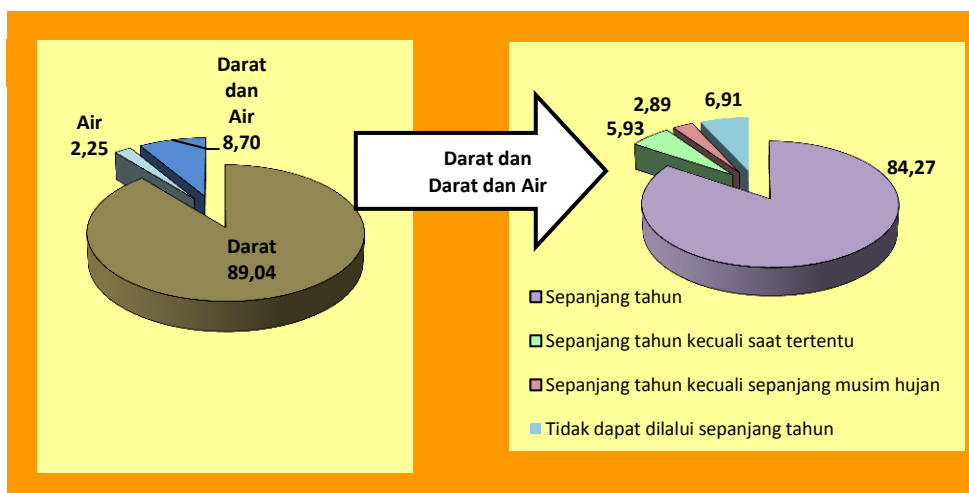


B.5 Jalan

Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ketersediaan jalan akan meningkatkan efisiensi proses produksi dan distribusi. Hasil Podes 2014 menunjukkan sebanyak 80.337 desa/kelurahan yang menggunakan sarana transportasi darat, dimana 67.701 desa/kelurahan (84,27 persen) diantaranya sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Sebaliknya, masih ada 12.636 desa/kelurahan (15,73 persen) yang lalu-lintasnya bergantung pada kondisi jalan dan musim. Lihat Lampiran 8.

Grafik 19.7

Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih



C. Desa/Kelurahan Terdepan

Desa/kelurahan terdepan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain. Menurut Podes 2014, sebanyak 258 desa/kelurahan yang letaknya terdepan, berbatasan darat secara langsung dengan wilayah negara lain. Jumlah penduduk yang menghuni desa/kelurahan terdepan sebanyak 191.043 jiwa. Ke-256 desa/kelurahan tersebut berada di 67 kecamatan, 17 kabupaten, dan 5 provinsi, yaitu: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua.

Tabel 19.1
Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan Menurut Provinsi, 2014

No	Provinsi	Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan			
		Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	
				Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nusa Tenggara Timur	4	17	62	78 443
2	Kalimantan Barat	5	14	65	68 606
3	Kalimantan Timur	1	1	1	513
4	Kalimantan Utara	2	13	81	26 504
5	Papua	5	22	49	16 977
Indonesia		17	67	258	191 043

D. Desa/Kelurahan Terluar

Desa/kelurahan terluar adalah desa/kelurahan yang sebagian atau seluruh wilayahnya berada di pulau kecil terluar. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 mencantumkan sebanyak 92 pulau kecil terluar. Podes 2014 mencatat ada sebanyak 313 desa/kelurahan yang wilayahnya berada di dalam 77 pulau dari 92 pulau kecil terluar. Jumlah penduduk yang menghuni desa/kelurahan terluar sebanyak 375.883 jiwa. Sementara itu, ada 15 pulau kecil terluar yang bukan bagian dari wilayah suatu desa/kelurahan atau tanpa penduduk. Ke-15 pulau tersebut adalah Pulau Mega (Bengkulu); Pulau Barung, Pulau Sekel, dan Pulau Panehan (Jawa Timur); Pulau Manuk (Jawa Barat); Pulau Batek (Nusa Tenggara Timur); Pulau Gosong Makasar (Kalimantan Utara); Pulau Sambit (Kalimantan Timur); Pulau Batarkusu dan Pulau Meatimjarang (Maluku); Pulau Jiew (Maluku Utara); Pulau Budd, Pulau Fani, dan Pulau Mioosu (Papua Barat); dan Pulau Laag (Papua). Secara lengkap, berikut disajikan jumlah wilayah administrasi pemerintahan terluar menurut provinsi.

Tabel 19.2
Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2014

No	Provinsi	Jumlah Pulau Kecil Terluar		Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar			
		Menurut PP No 78 Tahun 2005	Ada Wilayah Desa/Kelurahan (Podes 2014)	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	6	6	4	6	6	2 925
2	Sumatera Utara	3	3	3	3	8	4 077
3	Sumatera Barat	2	2	1	2	2	5 714
4	Riau	1	1	1	1	1	5 994
5	Bengkulu	2	1	1	1	6	3 001
6	Lampung	1	1	1	1	1	1 761
7	Kepulauan Riau	19	19	5	11	17	19 194
8	Jawa Barat	1	-	-	-	-	-
9	Jawa Tengah	1	1	1	2	2	21 831
10	Jawa Timur	3	-	-	-	-	-
11	Banten	1	1	1	1	1	6 194
12	Nusa Tenggara Barat	1	1	1	1	1	12 357
13	Nusa Tenggara Timur	5	4	4	14	123	150 027
14	Kalimantan Timur	2	1	1	1	4	3 677
15	Kalimantan Utara	2	1	1	5	19	37 734
16	Sulawesi Utara	11	11	5	7	18	8 484
17	Sulawesi Tengah	3	3	1	3	3	5 392
18	Maluku	18	16	3	15	72	71 134
19	Maluku Utara	1	-	-	-	-	-
20	Papua Barat	3	-	-	-	-	-
21	Papua	6	5	3	6	29	16 387
Indonesia		92	77	37	80	313	375 883

E. Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG)

1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, salah satu komponen yang digunakan untuk pengalokasian dana desa adalah IKG. BPS telah menyusun IKG untuk seluruh desa. IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala 0–100 yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.
2. Tabel 19.3. menyajikan IKG setiap provinsi. IKG terendah sebesar 6,83 di desa Sudagaran (Jawa Tengah) dan IKG tertinggi sebesar 97,89 di desa Dorera (Papua). Nilai tengah IKG desa secara nasional adalah sebesar 40,91.

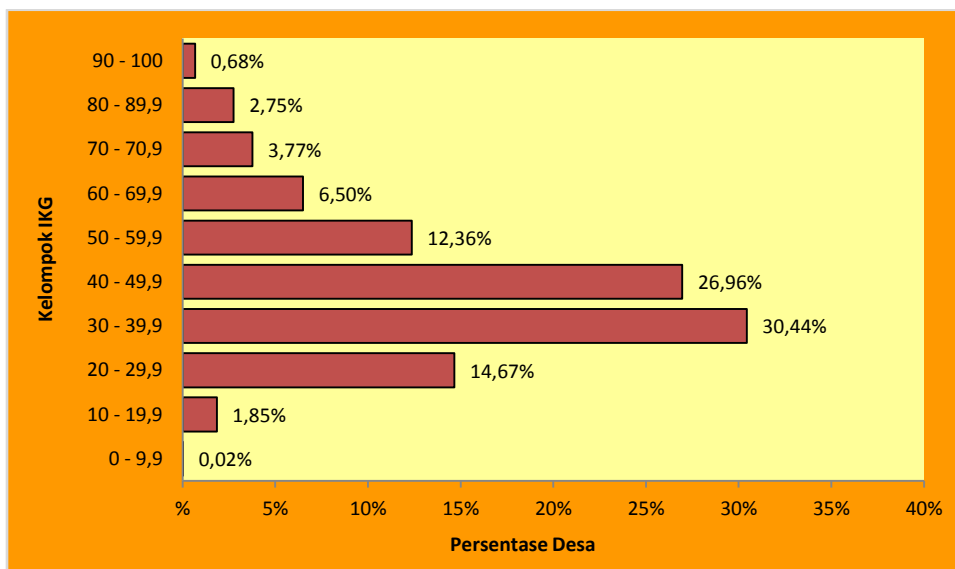
Tabel 19.3
IKG Desa Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,10	44,65	79,90
Sumatera Utara	10,17	42,31	86,58
Sumatera Barat	12,51	33,19	87,49
Riau	14,38	40,24	77,64
Jambi	14,83	39,96	77,84
Sumatera Selatan	12,05	42,38	78,24
Bengkulu	16,66	42,65	80,55
Lampung	11,71	40,51	77,95
Kep. Bangka Belitung	15,95	34,17	70,04
Kepulauan Riau	18,28	45,60	77,64
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	9,42	32,58	82,37
Jawa Tengah	6,83	34,27	64,10
DI Yogyakarta	9,96	27,73	48,17
Jawa Timur	9,03	35,23	67,36
Banten	13,99	39,79	70,72
Bali	8,79	30,20	58,60
Nusa Tenggara Barat	16,41	35,69	67,96
Nusa Tenggara Timur	20,21	49,87	80,77
Kalimantan Barat	10,47	51,10	84,83
Kalimantan Tengah	16,42	46,94	90,52

Provinsi	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalimantan Selatan	16,75	40,98	85,77
Kalimantan Timur	14,78	42,61	90,20
Kalimantan Utara	19,82	59,47	87,98
Sulawesi Utara	9,54	40,21	75,81
Sulawesi Tengah	16,93	42,70	84,79
Sulawesi Selatan	14,44	36,95	80,11
Sulawesi Tenggara	19,09	48,52	79,59
Gorontalo	12,57	39,05	67,98
Sulawesi Barat	17,74	46,18	84,58
Maluku	15,11	51,91	88,24
Maluku Utara	14,33	51,69	85,20
Papua Barat	18,42	65,43	96,02
Papua	17,05	76,33	97,89

3. Jika dibedakan berdasarkan 10 kelompok, maka lebih dari 50 persen (57,40 persen) desa termasuk dalam kelompok IKG antara 30 sampai dengan 50. Sementara itu, kurang dari 10 persen (7,20 persen) desa termasuk dalam kelompok IKG di atas 70.

Grafik 19.8
Persentase Desa Menurut Kelompok IKG, 2014



Lampiran 1. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	23	289	6 512
Sumatera Utara	33	440	6 104
Sumatera Barat	19	179	1 145
Riau	12	164	1 835
Jambi	11	138	1 551
Sumatera Selatan	17	231	3 237
Bengkulu	10	127	1 532
Lampung	15	225	2 632
Kep Bangka Belitung	7	47	381
Kepulauan Riau	7	66	415
DKI Jakarta	6	44	267
Jawa Barat	27	626	5 962
Jawa Tengah	35	573	8 578
DI Yogyakarta	5	78	438
Jawa Timur	38	664	8 502
Banten	8	155	1 551
Bali	9	57	716
Nusa Tenggara Barat	10	116	1 141
Nusa Tenggara Timur	22	306	3 270
Kalimantan Barat	14	176	2 109
Kalimantan Tengah	14	136	1 569
Kalimantan Selatan	13	152	2 008
Kalimantan Timur	10	103	1 026
Kalimantan Utara	5	50	479
Sulawesi Utara	15	167	1 836
Sulawesi Tengah	13	172	1 986
Sulawesi Selatan	24	306	3 030
Sulawesi Tenggara	14	209	2 272
Gorontalo	6	77	736
Sulawesi Barat	6	69	648
Maluku	11	113	1 088
Maluku Utara	10	115	1 196
Papua Barat	13	175	1 567
Papua	29	529	4 871
INDONESIA	511	7 074	82 190

Lampiran 2. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Desa	Kelurahan	UPT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	6 510	-	2	6 512
Sumatera Utara	5 406	695	3	6 104
Sumatera Barat	886	259	-	1 145
Riau	1 603	232	-	1 835
Jambi	1 389	162	-	1 551
Sumatera Selatan	2 851	385	1	3 237
Bengkulu	1 356	172	4	1 532
Lampung	2 423	206	3	2 632
Kep.Bangka Belitung	309	72	-	381
Kepulauan Riau	272	143	-	415
DKI Jakarta	-	267	-	267
Jawa Barat	5 321	641	-	5 962
Jawa Tengah	7 809	769	-	8 578
DI Yogyakarta	392	46	-	438
Jawa Timur	7 721	781	-	8 502
Banten	1 237	314	-	1 551
Bali	636	80	-	716
Nusa Tenggara Barat	995	142	4	1 141
Nusa Tenggara Timur	2 951	319	-	3 270
Kalimantan Barat	2 009	99	1	2 109
Kalimantan Tengah	1 427	138	4	1 569
Kalimantan Selatan	1 864	144	-	2 008
Kalimantan Timur	836	190	-	1 026
Kalimantan Utara	444	35	-	479
Sulawesi Utara	1 505	331	-	1 836
Sulawesi Tengah	1 809	174	3	1 986
Sulawesi Selatan	2 240	783	7	3 030
Sulawesi Tenggara	1 891	371	10	2 272
Gorontalo	657	72	7	736
Sulawesi Barat	575	71	2	648
Maluku	1 050	33	5	1 088
Maluku Utara	1 066	117	13	1 196
Papua Barat	1 492	75	-	1 567
Papua	4 777	94	-	4 871
INDONESIA	73 709	8 412	69	82 190

Lampiran 3. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada SD dan Kecamatan yang Ada SLTP dan SLTA Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Desa/Kelurahan yang Ada SD	Kecamatan yang Ada SLTP	Kecamatan yang Ada SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3 358	289	281
Sumatera Utara	4 957	439	414
Sumatera Barat	1 100	179	170
Riau	1 779	164	164
Jambi	1 457	137	133
Sumatera Selatan	2 938	231	225
Bengkulu	1 180	126	108
Lampung	2 499	225	218
Kep.Bangka Belitung	375	47	45
Kepulauan Riau	390	66	61
DKI Jakarta	264	44	44
Jawa Barat	5 949	626	606
Jawa Tengah	8 461	573	552
DI Yogyakarta	438	78	76
Jawa Timur	8 450	664	648
Banten	1 543	155	154
Bali	709	57	56
Nusa Tenggara Barat	1 130	116	114
Nusa Tenggara Timur	3 129	306	257
Kalimantan Barat	2 028	176	164
Kalimantan Tengah	1 540	136	131
Kalimantan Selatan	1 869	152	141
Kalimantan Timur	970	103	103
Kalimantan Utara	299	50	43
Sulawesi Utara	1 537	167	147
Sulawesi Tengah	1 882	171	153
Sulawesi Selatan	2 929	306	282
Sulawesi Tenggara	1 837	208	199
Gorontalo	658	76	67
Sulawesi Barat	627	69	68
Maluku	1 017	113	108
Maluku Utara	1 092	115	114
Papua Barat	835	144	72
Papua	1 979	291	140
INDONESIA	71 205	6 799	6 258

Lampiran 4. Jumlah Wilayah yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut Jarak ke Sarana Pendidikan Terdekat dan Provinsi, 2014

Provinsi	Jumlah Desa/ Kelurahan Tidak Ada SD	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Jarak ke SD > 3 km	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada SLTP	Jumlah Kecamatan yang Jarak ke SLTP > 6 km	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada SLTA	Jumlah Kecamatan yang Jarak ke SLTA > 6 km
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3 154	162	-	-	8	-
Sumatera Utara	1 147	132	1	-	26	9
Sumatera Barat	45	-	-	-	9	5
Riau	56	4	-	-	-	-
Jambi	94	5	1	-	5	3
Sumatera Selatan	299	19	-	-	6	-
Bengkulu	352	18	1	-	19	3
Lampung	133	9	-	-	7	2
Kep.Bangka Belitung	6	1	-	-	2	2
Kepulauan Riau	25	2	-	-	5	2
DKI Jakarta	3	-	-	-	-	-
Jawa Barat	13	3	-	-	20	2
Jawa Tengah	117	2	-	-	21	2
DI Yogyakarta	-	-	-	-	2	-
Jawa Timur	52	-	-	-	16	5
Banten	8	-	-	-	1	1
Bali	7	-	-	-	1	-
Nusa Tenggara Barat	11	-	-	-	2	2
Nusa Tenggara Timur	141	12	-	-	49	23
Kalimantan Barat	81	24	-	-	12	10
Kalimantan Tengah	29	13	-	-	5	4
Kalimantan Selatan	139	5	-	-	11	3
Kalimantan Timur	56	14	-	-	-	-
Kalimantan Utara	180	28	-	-	7	6
Sulawesi Utara	299	9	-	-	20	6
Sulawesi Tengah	104	11	1	-	19	9
Sulawesi Selatan	101	3	-	-	24	7
Sulawesi Tenggara	435	31	1	-	10	5
Gorontalo	78	3	1	-	10	3
Sulawesi Barat	21	2	-	-	1	1
Maluku	71	9	-	-	5	5
Maluku Utara	104	5	-	-	1	1
Papua Barat	732	233	31	20	103	81
Papua	2 892	1 679	238	164	389	306
INDONESIA	10 985	2 438	275	184	816	508

Lampiran 5. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Kecamatan yang Ada Puskesmas/Pustu	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Aceh	288	99,65
Sumatera Utara	440	100,00
Sumatera Barat	179	100,00
Riau	164	100,00
Jambi	138	100,00
Sumatera Selatan	230	99,57
Bengkulu	127	100,00
Lampung	225	100,00
Kep.Bangka Belitung	47	100,00
Kepulauan Riau	66	100,00
DKI Jakarta	44	100,00
Jawa Barat	626	100,00
Jawa Tengah	573	100,00
DI Yogyakarta	78	100,00
Jawa Timur	664	100,00
Banten	154	99,35
Bali	57	100,00
Nusa Tenggara Barat	116	100,00
Nusa Tenggara Timur	303	99,02
Kalimantan Barat	176	100,00
Kalimantan Tengah	136	100,00
Kalimantan Selatan	152	100,00
Kalimantan Timur	103	100,00
Kalimantan Utara	49	98,00
Sulawesi Utara	163	97,60
Sulawesi Tengah	172	100,00
Sulawesi Selatan	306	100,00
Sulawesi Tenggara	209	100,00
Gorontalo	77	100,00
Sulawesi Barat	69	100,00
Maluku	112	99,12
Maluku Utara	115	100,00
Papua Barat	166	94,86
Papua	433	81,85
INDONESIA	6 957	98,35

Lampiran 6. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik		Ada Penerangan Di Jalan Utama
	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6 427	296	3 663
Sumatera Utara	5 543	1 475	3 662
Sumatera Barat	1 099	350	862
Riau	1 301	1 194	1 036
Jambi	1 339	613	784
Sumatera Selatan	2 886	1 123	2 086
Bengkulu	1 470	244	693
Lampung	2 402	779	1 701
Kep. Bangka Belitung	377	153	307
Kepulauan Riau	294	293	257
DKI Jakarta	267	2	264
Jawa Barat	5 960	257	5 064
Jawa Tengah	8 566	115	8 330
DI Yogyakarta	438	9	428
Jawa Timur	8 457	291	8 055
Banten	1 551	34	950
Bali	716	20	700
Nusa Tenggara Barat	1 114	122	840
Nusa Tenggara Timur	2 624	1 694	298
Kalimantan Barat	1 380	1 239	521
Kalimantan Tengah	838	1 079	421
Kalimantan Selatan	1 903	401	1 634
Kalimantan Timur	647	662	462
Kalimantan Utara	180	380	133
Sulawesi Utara	1 789	258	1 132
Sulawesi Tengah	1 601	897	1 257
Sulawesi Selatan	2 777	734	2 165
Sulawesi Tenggara	1 786	896	785
Gorontalo	690	298	534
Sulawesi Barat	403	440	184
Maluku	654	540	366
Maluku Utara	785	598	453
Papua Barat	443	914	364
Papua	824	2 093	412
INDONESIA	69 531	20 493	50 803

Lampiran 7. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Kecamatan yang Ada Pasar Dengan Bangunan	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Aceh	227	78,55
Sumatera Utara	367	83,41
Sumatera Barat	161	89,94
Riau	157	95,73
Jambi	117	84,78
Sumatera Selatan	203	87,88
Bengkulu	109	85,83
Lampung	208	92,44
Kep. Bangka Belitung	37	78,72
Kepulauan Riau	37	56,06
DKI Jakarta	41	93,18
Jawa Barat	469	74,92
Jawa Tengah	560	97,73
DI Yogyakarta	78	100,00
Jawa Timur	639	96,23
Banten	124	80,00
Bali	57	100,00
Nusa Tenggara Barat	93	80,17
Nusa Tenggara Timur	244	79,74
Kalimantan Barat	104	59,09
Kalimantan Tengah	109	80,15
Kalimantan Selatan	133	87,50
Kalimantan Timur	78	75,73
Kalimantan Utara	25	50,00
Sulawesi Utara	109	65,27
Sulawesi Tengah	151	87,79
Sulawesi Selatan	271	88,56
Sulawesi Tenggara	188	89,95
Gorontalo	68	88,31
Sulawesi Barat	61	88,41
Maluku	54	47,79
Maluku Utara	58	50,43
Papua Barat	58	33,14
Papua	184	34,78
INDONESIA	5 579	78,87

Lampiran 8. Jumlah Desa/Kelurahan yang Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan Melalui Darat atau Darat dan Air Menurut Kondisi Jalan dan Provinsi, 2014

Provinsi	Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih				Total
	Sepanjang Tahun	Sepanjang Tahun Kecuali Saat Tertentu	Sepanjang Tahun Kecuali Sepanjang Musim Hujan	Tidak Dapat Dilalui Sepanjang Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5 742	445	241	71	6 499
Sumatera Utara	5 004	344	307	422	6 077
Sumatera Barat	1 068	34	15	22	1 139
Riau	1 279	170	107	237	1 793
Jambi	1 311	114	49	73	1 547
Sumatera Selatan	2 652	288	168	98	3 206
Bengkulu	1 381	85	56	5	1 527
Lampung	2 261	239	89	40	2 629
Kep. Bangka Belitung	370	2	4	2	378
Kepulauan Riau	295	12	5	29	341
DKI Jakarta	259	2	-	2	263
Jawa Barat	5 761	118	77	6	5 962
Jawa Tengah	8 448	78	46	4	8 576
DI Yogyakarta	436	2	-	-	438
Jawa Timur	8 356	87	45	13	8 501
Banten	1 472	42	28	4	1 546
Bali	709	3	4	-	716
Nusa Tenggara Barat	1 073	47	13	6	1 139
Nusa Tenggara Timur	2 608	383	189	63	3 243
Kalimantan Barat	1 123	448	161	270	2 002
Kalimantan Tengah	804	314	123	158	1 399
Kalimantan Selatan	1 698	118	22	146	1 984
Kalimantan Timur	741	158	44	44	987
Kalimantan Utara	238	98	32	49	417
Sulawesi Utara	1 717	37	5	51	1 810
Sulawesi Tengah	1 674	86	30	144	1 934
Sulawesi Selatan	2 686	143	79	75	2 983
Sulawesi Tenggara	1 937	150	67	83	2 237
Gorontalo	669	37	12	17	735
Sulawesi Barat	468	67	45	65	645
Maluku	556	97	39	256	948
Maluku Utara	736	108	46	154	1 044
Papua Barat	867	98	49	285	1 299
Papua	1 302	309	124	2658	4 393
INDONESIA	67 701	4 763	2 321	5 552	80 337

XX. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH MEI 2016

A. Dolar Amerika (USD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap dolar Amerika pada Mei 2016 cenderung terdepresiasi dibanding minggu terakhir April 2016. Level terendah nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah pada minggu terakhir April 2016 tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp13.250,00 per dolar AS, sementara pada minggu terakhir Mei 2016 terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Rp13.691,67 per dolar AS. Sedangkan untuk level tertinggi, nilai tukar pada minggu terakhir April 2016 terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp12.959,00 per dolar AS dan pada minggu terakhir Mei 2016 terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai tengah Rp13.201,17 per dolar AS.
2. Pada minggu pertama Mei 2016, jika dibanding minggu terakhir April 2016, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika secara rata-rata nasional melemah 15,88 poin atau 0,12 persen. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Lampung sebesar 212,50 poin atau 1,62 persen. Sebaliknya, apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 164,08 poin atau 1,24 persen.
3. Pada minggu terakhir Mei 2016, rata-rata nasional nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah 413,00 poin atau 3,14 persen dibanding kurs pada minggu terakhir April 2016. Depresiasi rupiah terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdepresiasi sebesar 605,00 poin atau 4,62 persen. Sebaliknya, depresiasi terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 19,92 poin atau 0,15 persen. Pada minggu ini, seluruh provinsi mengalami depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Rupiah terdepresiasi 413,00 poin atau 3,14 persen terhadap dolar Amerika pada Mei 2016. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

B. Dolar Australia (AUD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap dolar Australia pada Mei 2016 cenderung terapresiasi dibanding minggu terakhir April 2016. Rata-rata nasional kurs eceran rupiah terapresiasi sebesar 161,30 poin pada minggu pertama Mei 2016 atau menguat sebesar 1,59 persen. Selanjutnya, pada minggu terakhir Mei 2016 juga terapresiasi sebesar 316,59 poin atau 3,13 persen dibanding minggu terakhir April 2016.
2. Level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia pada minggu terakhir April 2016 terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp9.680,75 per dolar Australia, sementara pada minggu terakhir Mei 2016 terjadi di Provinsi Aceh sebesar Rp9.500,00 per dolar Australia. Di sisi lain, level terendah nilai tukar terhadap dolar Australia pada minggu terakhir April 2016 tercatat di Provinsi Maluku, sebesar Rp10.247,50 per dolar Australia, dan pada minggu terakhir Mei 2016 tercatat di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebesar Rp10.207,83 per dolar Australia.
3. Pada minggu pertama Mei 2016, penguatan rupiah yang terbesar terjadi di Provinsi Aceh yaitu sebesar 313,70 poin atau terapresiasi sebesar 3,07 persen dibanding minggu terakhir April 2016. Pada minggu terakhir Mei 2016, penguatan rupiah yang terbesar juga terjadi di Provinsi Aceh, yaitu terapresiasi sebesar 713,70 poin atau menguat sebesar 6,99 persen dibanding minggu terakhir bulan April 2016.

Rupiah terapresiasi 316,59 poin atau 3,13 persen terhadap dolar Australia pada Mei 2016. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Aceh

C. Yen Jepang (JPY)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap yen Jepang pada minggu pertama Mei 2016 secara rata-rata nasional melemah 3,45 poin atau 2,90 persen dibanding minggu terakhir April 2016. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu 5,53 poin atau 4,66 persen.
2. Nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang pada minggu terakhir Mei 2016 secara rata-rata nasional tercatat melemah 3,93 poin atau 3,31 persen dibanding minggu terakhir April 2016. Depresiasi terbesar tercatat di Provinsi Gorontalo, yaitu 6,03 poin atau melemah 5,09 persen.
3. Level terendah nilai tukar rupiah terhadap mata uang yen Jepang pada minggu terakhir April 2016 tercatat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp129,34 per yen Jepang, sedangkan level tertingginya terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp113,50 per yen Jepang. Sementara itu, pada minggu terakhir Mei 2016, level terendah tercatat di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp125,35 per yen Jepang, sedangkan level tertingginya terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, sebesar Rp107,21 per yen Jepang.

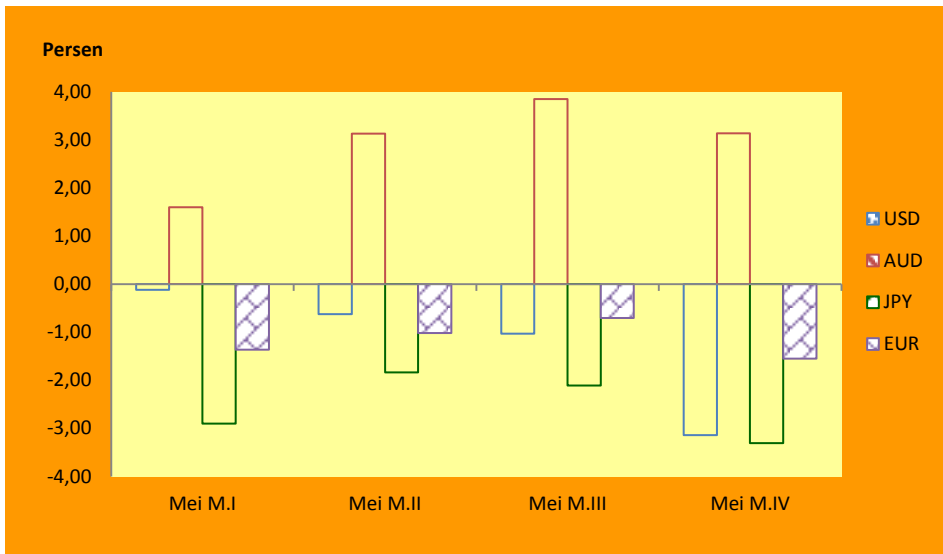
Rupiah terdepresiasi 3,93 poin atau 3,31 persen terhadap yen Jepang pada Mei 2016. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Gorontalo

D. Euro (EUR)

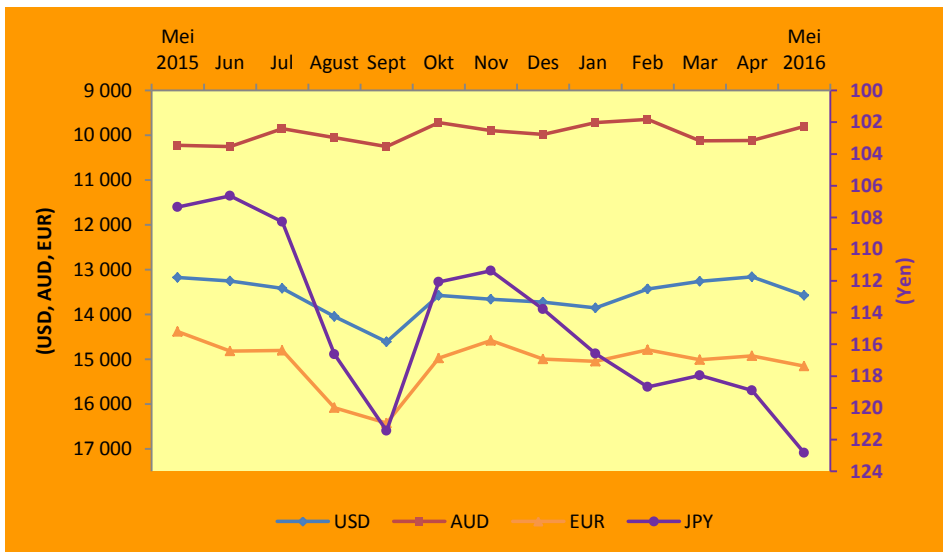
1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap euro pada Mei 2016 cenderung mengalami pelemahan dibanding minggu terakhir April 2016. Secara rata-rata nasional, rupiah terdepresiasi sebesar 203,43 poin pada minggu pertama atau melemah sebesar 1,36 persen dan terdepresiasi kembali sebesar 230,96 poin pada minggu terakhir atau melemah sebesar 1,55 persen dibanding minggu terakhir April 2016.

Rupiah terdepresiasi 230,96 poin atau 1,55 persen terhadap euro pada Mei 2016. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Gorontalo
2. Level terendah nilai tukar rupiah terhadap euro tercatat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp15.446,25 per euro pada minggu terakhir April 2016 dan di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp15.278,50 per euro pada minggu terakhir Mei 2016. Sementara itu, level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap euro (kurs tengah), pada minggu terakhir April 2016 terjadi di Sumatera Barat, yaitu Rp14.762,50 per euro dan pada minggu terakhir Mei 2016 terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Rp14.397,50 per euro.
3. Pada minggu pertama Mei 2016, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 347,00 poin atau 2,33 persen. Sebaliknya, apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai 325,50 poin atau 2,11 persen. Pada minggu terakhir Mei 2016, depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Gorontalo yang mencapai 399,00 poin atau 2,68 persen. Sebaliknya, apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 446,25 poin atau 3,01 persen.

Grafik 20.1
Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR
 (Mei 2016 dibanding April 2016 M.IV)



Grafik 20.2
Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR
 (Minggu Terakhir)



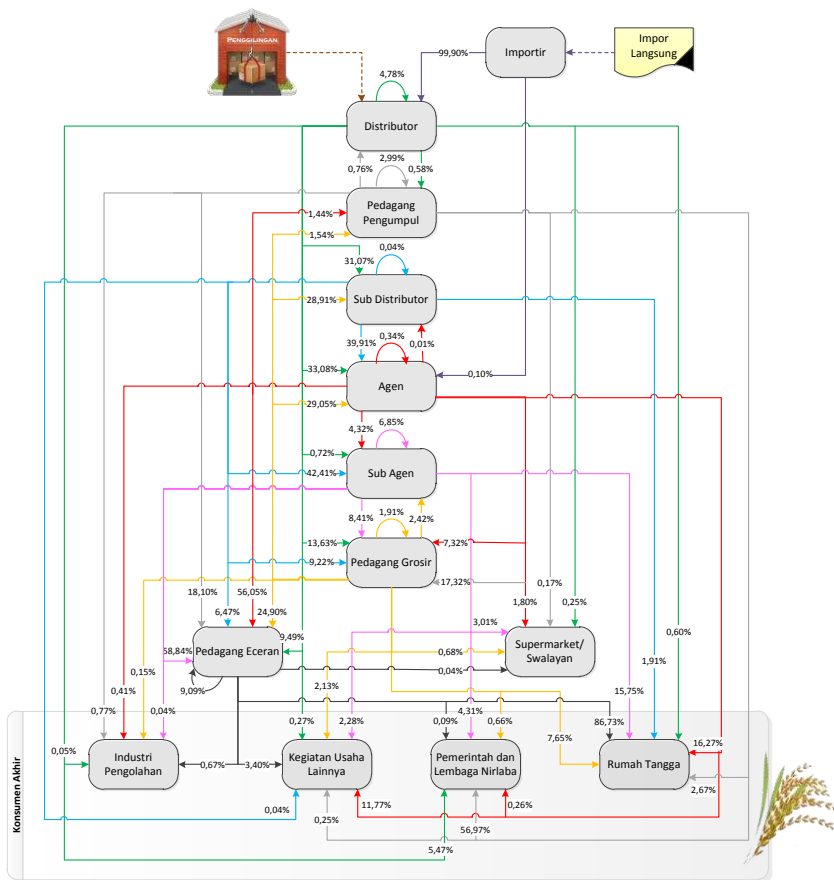
XXI. PERDAGANGAN KOMODITAS STRATEGIS 2015

A. Pola Distribusi Perdagangan

1. Distribusi perdagangan beras, cabai merah, bawang merah, jagung pipilan, dan daging ayam ras dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan dua hingga sembilan fungsi kelembagaan usaha perdagangan.

Distribusi perdagangan komoditi dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan antara 2 s.d. 9 fungsi kelembagaan usaha perdagangan

Grafik 21.1
Pola Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia, 2015



2. Alur distribusi perdagangan terpanjang cabai merah, bawang merah, dan jagung pipilan berada di Jawa Tengah, sedangkan beras dan daging ayam ras di DKI Jakarta. Sementara itu, alur distribusi perdagangan terpendek beras, cabai merah dan jagung pipilan berada di Sulawesi Utara, bawang merah di Maluku Utara, dan daging ayam ras di Kalimantan Barat.

B. Peta Distribusi Perdagangan

1. Persentase komoditi yang masuk terhadap ketersediaan beras dan cabai merah Kalimantan Utara adalah yang terbesar di Indonesia dengan persentase mencapai 99,81 persen untuk masing-masing komoditas. Sedangkan untuk bawang merah adalah Maluku, yaitu mencapai 99,83 persen, jagung pipilan adalah DKI Jakarta yaitu mencapai 99,12 persen, dan daging ayam ras adalah Papua, yaitu mencapai 95,57 persen.
2. Persentase komoditi yang keluar terhadap ketersediaan beras Sumatera Barat adalah yang terbesar di Indonesia dengan persentase sebesar 15,49%. Sedangkan untuk komoditas cabai merah adalah di DI Yogyakarta (76,24%), bawang merah adalah di Nusa Tenggara Barat (56,53%), jagung pipilan adalah di Gorontalo (93,82%), dan daging ayam ras adalah di Kalimantan Utara (16,05%).
3. Jaringan terluas pendistribusian beras, cabai merah, dan daging ayam ras dilakukan oleh Jawa Tengah. Sedangkan untuk bawang merah adalah Jawa Barat dan jagung pipilan adalah Gorontalo.

Jaringan terluas pendistribusian beras, cabai merah, dan daging ayam ras dilakukan oleh Jawa Tengah. Sedangkan untuk bawang merah adalah Jawa Barat dan jagung pipilan adalah Gorontalo

C. Margin Perdagangan dan Pengangkutan

1. Rata-rata rasio MPP beras secara nasional berdasarkan Survei Poldis 2015 sebesar 10,42 persen, cabai merah 25,33 persen, bawang merah 22,61 persen, jagung pipilan 31,90 persen dan daging ayam ras 11,63 persen.

Rata-rata rasio MPP beras secara nasional berdasarkan Survei Poldis 2015 sebesar 10,42 persen, cabai merah 25,33 persen, bawang merah 22,61 persen, jagung pipilan 31,90 persen, dan daging ayam ras 11,63 persen.

Tabel 21.1
Rata-rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)
Menurut Komoditi, 2015

No	Komoditi	MPP (persen)
(1)	(2)	(3)
1	Beras	10,42
2	Cabai Merah	25,33
3	Bawang Merah	22,61
4	Jagung Pipilan	31,90
5	Daging Ayam Ras	11,63

XXII. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2015

A. Indeks Perilaku Anti Korupsi 2015

1. Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) mengugaskan BPS untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini telah dilaksanakan setiap tahun mulai tahun 2012. Untuk tahun 2015, SPAK dilaksanakan pada November yang mencakup 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan jumlah sampel 10.000 rumah tangga. Analisis mengenai perilaku anti korupsi dalam survei ini hanya untuk representasi level nasional.
2. SPAK ditujukan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal perilaku anti korupsi. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).
3. Contoh pertanyaan penyuapan adalah pengalaman masyarakat membayar uang lebih untuk mempercepat proses pengurusan KTP/KK. Contoh pemerasan ialah pengalaman masyarakat diminta uang lebih oleh petugas dalam urusan sertifikat tanah. Contoh nepotisme adalah pengalaman masyarakat ditawarkan bantuan oleh saudara/teman untuk dapat diterima menjadi pegawai negeri/swasta.
4. IPAK dihitung tiap tahun untuk menggambarkan dinamika perilaku anti korupsi masyarakat. IPAK Indonesia 2015 sebesar 3,59 dalam skala 0 sampai 5. Angka tersebut sedikit lebih rendah (0,02 poin) dibandingkan dengan 2014 yang besarnya 3,61.
5. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka lima menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, yang berarti bahwa budaya *zero tolerance* terhadap korupsi semakin melekat dan mewujud dalam perilaku masyarakat. Sebaliknya, nilai IPAK yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

**Indeks Perilaku Anti
Korupsi (IPAK) Indonesia
2015 sebesar 3,59 dari
skala 0 sampai 5.**

Tabel 22.1
Nilai IPAK Tahun 2012–2015

Tahun	IPAK
(1)	(2)
2012	3,55
2013	3,63
2014	3,61
2015	3,59

B. IPAK Berdasarkan Dimensi Utama

1. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama, yakni pertama persepsi yang berupa pendapat/penilaian terhadap kebiasaan perilaku koruptif di masyarakat, dan kedua adalah pengalaman (pengalaman perilaku koruptif).
2. Tabel 2 menunjukkan tren indeks persepsi menunjukkan pola meningkat dari tahun 2012 hingga 2015, dari 3,54 menjadi 3,73 (indeks tersebut juga dalam skala 0 sampai 5). Sementara, indeks pengalaman terus turun dari 3,58 menjadi 3,39.
3. Dari hasil pengukuran IPAK terlihat fenomena yang menarik untuk dicermati. Indeks dari dimensi persepsi menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun 2012 ke 2015. Hal ini menggambarkan sisi pemahaman dan penilaian masyarakat cenderung semakin idealis anti korupsi.
4. Sebaliknya dari dimensi pengalaman cenderung menurun. Keadaan demikian menggambarkan bahwa masyarakat dalam tataran praktek ketika berhadapan dengan pelayanan publik masih melakukan perilaku korupsi. Dengan kata lain, terkesan masyarakat semakin membenci korupsi (idealisme) namun tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 22.2
Indeks Menurut Dimensi, 2012–2015

Dimensi	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Persepsi	3,54	3,66	3,71	3,73
Indeks Pengalaman	3,58	3,58	3,49	3,39
IPAK Indonesia	3,55	3,63	3,61	3,59

C. IPAK Berdasarkan Karakteristik Demografi

1. IPAK 2015 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding di wilayah perdesaan. Gambaran tersebut nampak pada 2012–2015 yang disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan klasifikasi wilayah, IPAK perkotaan dibandingkan perdesaan pada tahun 2015 adalah 3,71 banding 3,46.

IPAK masyarakat di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi

Tabel 22.3
IPAK Menurut Wilayah, 2012–2015

Klasifikasi Wilayah	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	3,66	3,71	3,71	3,71
Perdesaan	3,46	3,55	3,51	3,46

2. IPAK lebih tinggi pada jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan, meski perbedaannya tidak terlalu signifikan. IPAK 2015 di kalangan laki-laki sedikit lebih tinggi (3,63) dibanding di kalangan perempuan (3,55). Konsisten sejak tahun 2012 sampai 2015 menunjukkan gambaran serupa.

IPAK laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan

Tabel 22.4
IPAK Menurut Jenis Kelamin, 2012–2015

Jenis Kelamin	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	3,59	3,66	3,64	3,63
Perempuan	3,53	3,60	3,59	3,55

3. Gambaran pada 2012–2015 menunjukkan IPAK penduduk dengan usia 40 hingga 60 tahun selalu menjadi yang tertinggi disusul IPAK penduduk kurang usia kurang dari 40 tahun. Pada 2015, IPAK masyarakat usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,62, IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,59, sedangkan IPAK masyarakat usia 60 tahun ke atas sebesar 3,49. Dengan kata lain, IPAK penduduk usia lebih dari 60 tahun lebih rendah dibandingkan IPAK usia yang lebih muda.

IPAK masyarakat usia 40–59 tahun lebih tinggi dibandingkan IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun dan lebih dari 60 tahun

Tabel 22.5
IPAK Menurut Umur, 2012–2015

Umur (Tahun)	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kurang dari 40	3,57	3,63	3,63	3,59
40 sampai 59	3,58	3,65	3,64	3,62
60 atau lebih	3,45	3,55	3,54	3,49

4. Secara konsisten (tahun 2012–2015) tampak bahwa semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka cenderung semakin anti korupsi. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi IPAK. IPAK 2015 untuk responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,49, SLTA sebesar 3,80 dan di atas SLTA sebesar 4,00.

Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi IPAK

Tabel 22.6
IPAK Menurut Pendidikan Tertinggi, 2012–2015

Pendidikan Tertinggi	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SLTP ke bawah	3,47	3,55	3,52	3,49
SLTA	3,78	3,82	3,85	3,80
SLTA ke atas	3,94	3,94	4,01	4,00

D. Indikator Tunggal IPAK 2015

1. Pendapat Terhadap Kebiasaan/Perilaku di Masyarakat

Berikut merupakan persepsi masyarakat terhadap kebiasaan/perilaku di masyarakat dalam tiga ruang lingkup.

a) Lingkup Keluarga

Tabel 22.7
Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Keluarga
merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2015

Kebiasaan/Perilaku	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Istri yang menerima uang pemberian suami diluar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut	68,69	76,43	78,65	76,04
Seorang Pegawai Negeri bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi	72,95	76,16	78,11	79,05
Orang tua mengajak anaknya dalam kampanye PEMILU/PILKADA demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak	80,15	82,70	86,07	85,64
Seseorang mengetahui saudaranya tanpa izin mengambil uang orang tuanya tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya	95,06	96,56	97,44	97,31

1. Sekitar 76 persen masyarakat menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku istri yang menerima uang pemberian suami diluar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal-usul uang tersebut.
2. Sekitar 79 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi.
3. Sekitar 86 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku orang tua yang mengajak anaknya dalam kampanye PILKADA/PEMILU demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak.
4. Sekitar 97 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang mengetahui saudaranya tanpa izin mengambil uang orang tuanya tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya.

b) Lingkup Komunitas

Tabel 22.8
Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Komunitas
merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2015

Kebiasaan/Perilaku	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memberi uang/barang kepada tokoh adat/agama/masyarakat ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian, dsb)	30,77	36,30	37,76	36,32
Memberi uang/barang kepada tokoh adat/agama/masyarakat ketika menjelang hari raya keagamaan.	38,25	42,33	45,17	46,42
Memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian, dsb)	52,97	57,49	60,57	60,37
Memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika menjelang hari raya keagamaan	65,24	68,40	71,12	72,56

1. Sekitar 36 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh adat/agama/masyarakat ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian).
2. Sekitar 46 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh adat/agama/masyarakat ketika menjelang hari raya keagamaan.
3. Sekitar 60 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh formal (Ketua RT/RW/Kades/Lurah) ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian).
4. Sekitar 73 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh formal (Ketua RT/RW/Kades/Lurah) ketika menjelang hari raya keagamaan.

c) Lingkup Publik

Tabel 22.9
Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Tingkat Publik merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2015

Kebiasaan/Perilaku	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Demi mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan, seseorang menjamin keluarga/ saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri/swasta	53,39	61,10	67,20	68,39
Memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta	81,38	84,28	87,21	87,51
Memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP, KK)	55,09	57,20	58,34	62,28
Memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK	60,67	62,96	65,08	69,44
Pelanggar lalu lintas yang memberi uang damai kepada Polisi	67,58	70,99	73,80	77,20
Petugas KUA meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah	66,95	71,80	71,57	74,76
Guru mendapat jaminan (jatah) anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar	64,45	69,69	70,95	73,32
Guru meminta uang/barang dari orangtua murid ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor	83,16	87,93	89,00	89,49
Memberi uang/barang kepada pihak sekolah agar anaknya dapat diterima di sekolah tersebut.	84,05	88,17	88,96	90,63
Pegawai melakukan pekerjaan/usaha sampingan di luar tugasnya pada saat jam kerja	87,14	88,04	88,00	87,86
Membagikan uang/barang kepada calon pemilih	72,15	72,57	77,38	78,20
Mengharapkan pembagian uang/barang pada pelaksanaan PEMILU/PILKADA	72,90	72,69	76,90	77,61

1. Sekitar 68 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri atau swasta demi mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan.

2. Sekitar 88 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang yang memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta.
3. Sekitar 62 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK).
4. Sekitar 69 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK.
5. Sekitar 77 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang damai kepada polisi.
6. Sekitar 75 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku petugas KUA meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah.
7. Sekitar 73 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku guru yang mendapatkan jaminan (jatah) agar anaknya diterima di sekolah tempatnya mengajar.
8. Sekitar 89 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku guru yang meminta uang/barang ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor.
9. Sekitar 91 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada pihak sekolah agar anaknya dapat diterima di sekolah tersebut.
10. Sekitar 88 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku pegawai melakukan pekerjaan/usaha sampingan di luar tugasnya pada saat jam kerja.
11. Sekitar 78 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap tindakan membagikan uang/barang kepada calon pemilih.
12. Sekitar 78 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku membagikan atau mengharapkan uang/barang pada pelaksanaan PILKADA/PEMILU.

2. Pengalaman Masyarakat

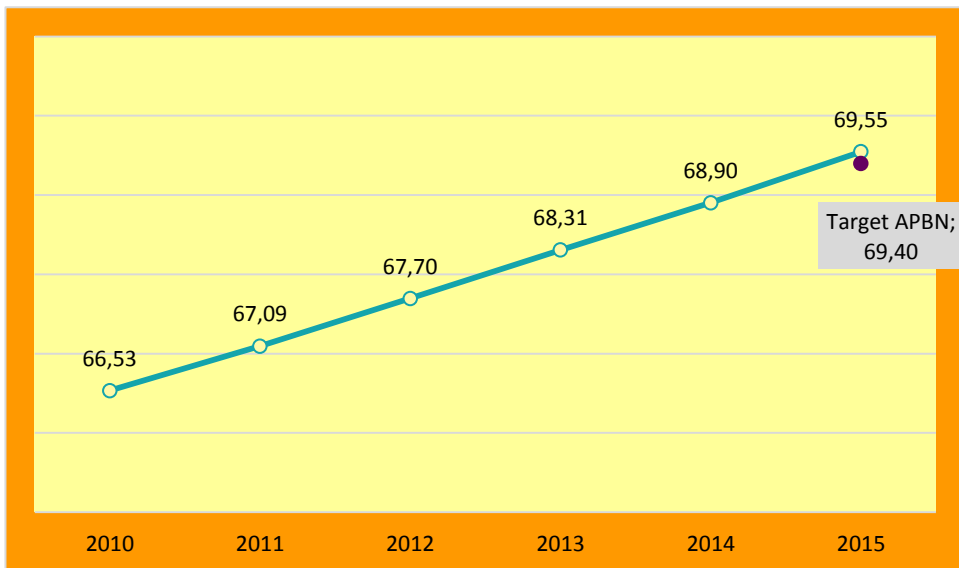
1. Pengalaman masyarakat dalam survei ini mencakup sepuluh layanan publik dan lima tawaran, yakni di RT/RW, Kelurahan/Kecamatan, Kepolisian, PLN, Rumah Sakit, Sekolah, Pengadilan, KUA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pertanahan Nasional, tawaran mendapat uang/barang ketika Pilkades/Pilkada/pemilu, tawaran untuk menjadi pegawai dengan membayar sejumlah uang, tawaran untuk menjadi pegawai dari saudara/teman, tawaran dari keluarga/teman ketika penerimaan masuk sekolah, dan tawaran untuk membayar uang damai saat ditilang petugas polisi lalu lintas.
2. Pada 2015 dari keseluruhan pengalaman masyarakat berurusan dengan layanan publik dan mendapatkan tawaran, sebesar 41,36 persen diantaranya terjadi peristiwa korupsi. Persentase kejadian korupsi yang dialami masyarakat pada seluruh layanan publik atau mendapatkan tawaran pada periode 2012 hingga 2015 cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan intensitas kejadian korupsi yang dialami oleh masyarakat semakin tinggi.
3. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa tujuan membayar melebihi ketentuan ketika mengurus di layanan publik adalah demi mempercepat proses pengurusan sebesar 43,53 persen dan sebagai tanda terima kasih sebesar 35,69 persen.

XXIII. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2015

A. Indeks Perilaku Anti Korupsi 2015

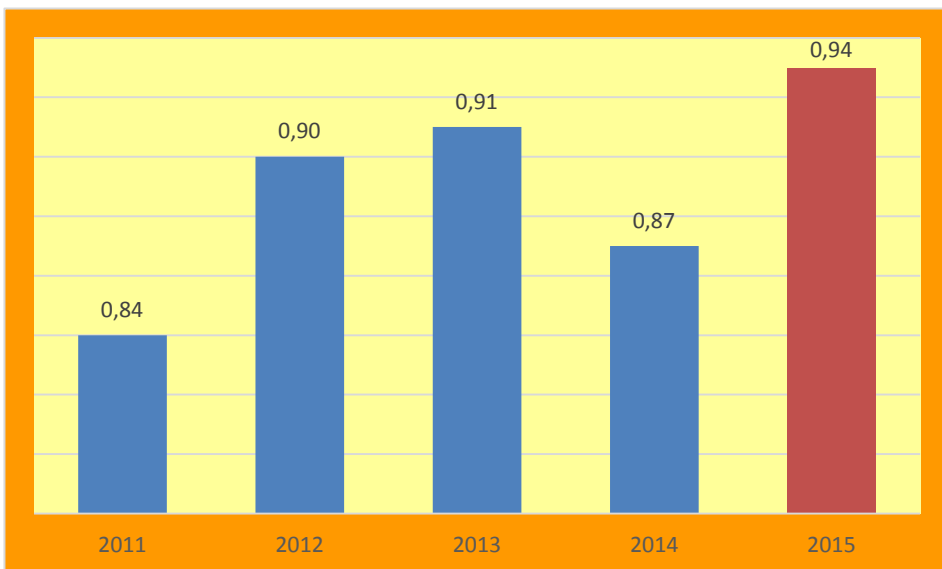
1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan standar hidup layak digambarkan melalui pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.
2. Badan Pusat Statistik mengukur IPM di Indonesia menggunakan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Proyeksi Penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010).

Grafik 23.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010–2015



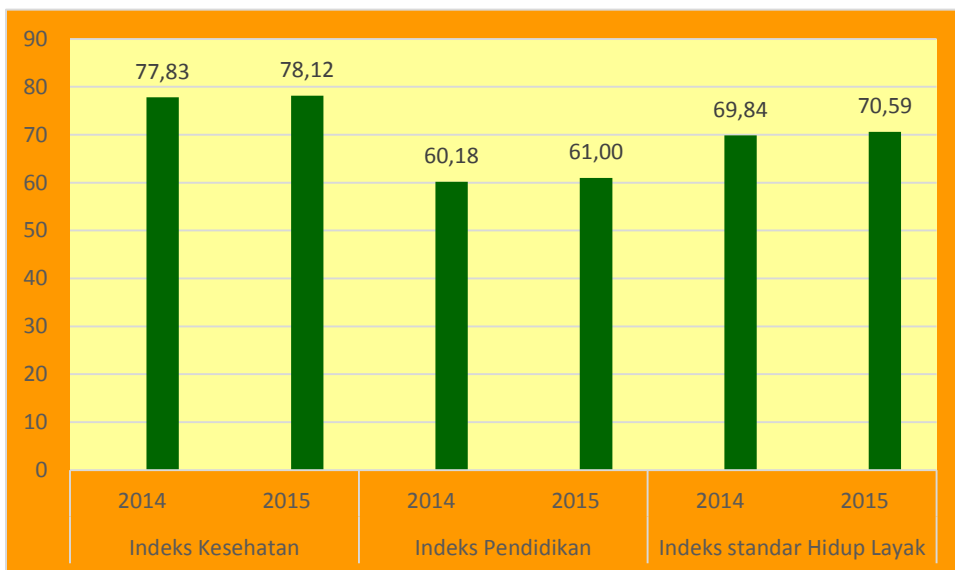
3. Pada tahun 2015, angka IPM Indonesia sebesar 69,55. Capaian ini telah melampaui target pembangunan nasional pada tahun 2015 yang menargetkan IPM sebesar 69,40. Akselerasi yang tinggi diduga merupakan salah satu penyebab terlampainya target APBN tersebut. Pada tahun 2015, IPM Indonesia tumbuh 0,94 persen atau bertambah 0,65 poin dibandingkan IPM tahun 2014. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,87 persen dan merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode 2010–2015.

Grafik 23.2
Tren Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2011–2015



4. Pertumbuhan IPM yang tinggi pada tahun 2015 didorong oleh peningkatan semua indeks komponen pembentuknya. Indeks pendidikan merupakan komponen IPM yang mengalami akselerasi paling tinggi. Pada tahun 2015 indeks pendidikan mencapai 61,00 atau meningkat 0,82 poin dari tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan indeks standar hidup layak yang mengalami peningkatan 0,75 poin. Sementara itu indeks kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup saat lahir mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan.
5. Peningkatan indeks pendidikan utamanya disebabkan oleh capaian indeks harapan lama sekolah yang meningkat cukup tinggi sebesar 0,90 poin dari tahun 2014. Hal ini menggambarkan semakin tingginya peluang penduduk 7 tahun ke atas dalam mengakses pendidikan dan semakin dekatnya angka harapan lama sekolah tersebut dengan target maksimum yang diharapkan.

Grafik 23.3
Indeks Komponen IPM Indonesia, 2014–2015



6. Pada periode 2014–2015, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (1,37 persen), Provinsi Jawa Timur (1,19 persen), dan Provinsi Sulawesi Barat (1,16 persen). Sebaliknya, pada periode yang sama, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling lambat, yaitu Provinsi Kalimantan Utara (0,17 persen), Provinsi Maluku (0,46 persen), dan Provinsi Kalimantan Timur (0,47 persen). Berdasarkan status pencapaiannya, 8 provinsi berada pada kategori pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, sejak 2014 hingga 2015, masih terdapat satu provinsi yang berstatus pembangunan manusia “rendah” atau nilai IPM kurang dari 60, yaitu Provinsi Papua.

Tabel 23.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2014–2015

Provinsi	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp 000)		IPM		
									Capaian		Pertumbuhan (%)
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014–2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	69,35	69,50	13,53	13,73	8,71	8,77	8 297	8 533	68,81	69,45	0,93
Sumatera Utara	68,04	68,29	12,61	12,82	8,93	9,03	9 391	9 563	68,87	69,51	0,93
Sumatera Barat	68,32	68,66	13,48	13,60	8,29	8,42	9 621	9 804	69,36	69,98	0,89
Riau	70,76	70,93	12,45	12,74	8,47	8,49	10 262	10 364	70,33	70,84	0,73
Jambi	70,43	70,56	12,38	12,57	7,92	7,96	9 141	9 446	68,24	68,89	0,95
Sumatera Selatan	68,93	69,14	11,75	12,02	7,66	7,77	9 302	9 474	66,75	67,46	1,06
Bengkulu	68,37	68,50	13,01	13,18	8,28	8,29	8 864	9 123	68,06	68,59	0,78
Lampung	69,66	69,90	12,24	12,25	7,48	7,56	8 476	8 729	66,42	66,95	0,80
Kep. Bangka Belitung	69,72	69,88	11,18	11,60	7,35	7,46	11 691	11 781	68,27	69,05	1,14
Kepulauan Riau	69,15	69,41	12,51	12,60	9,64	9,65	13 019	13 177	73,40	73,75	0,48
DKI Jakarta	72,27	72,43	12,38	12,59	10,54	10,70	16 898	17 075	78,39	78,99	0,77
Jawa Barat	72,23	72,41	12,08	12,15	7,71	7,86	9 447	9 778	68,80	69,50	1,02
Jawa Tengah	73,88	73,96	12,17	12,38	6,93	7,03	9 640	9 930	68,78	69,49	1,03
DI Yogyakarta	74,50	74,68	14,85	15,03	8,84	9,00	12 294	12 684	76,81	77,59	1,02
Jawa Timur	70,45	70,68	12,45	12,66	7,05	7,14	10 012	10 383	68,14	68,95	1,19
Banten	69,13	69,43	12,31	12,35	8,19	8,27	11 150	11 261	69,89	70,27	0,54
Bali	71,20	71,35	12,64	12,97	8,11	8,26	12 831	13 078	72,48	73,27	1,09
Nusa Tenggara Barat	64,90	65,38	12,73	13,04	6,67	6,71	8 987	9 241	64,31	65,19	1,37
Nusa Tenggara Timur	65,91	65,96	12,65	12,84	6,85	6,93	6 934	7 003	62,26	62,67	0,66
Kalimantan Barat	69,76	69,87	11,89	12,25	6,83	6,93	8 175	8 279	64,89	65,59	1,08
Kalimantan Tengah	69,39	69,54	11,93	12,22	7,82	8,03	9 682	9 809	67,77	68,53	1,12
Kalimantan Selatan	67,47	67,80	11,96	12,21	7,60	7,76	10 748	10 891	67,63	68,38	1,11
Kalimantan Timur	73,62	73,65	13,17	13,18	9,04	9,15	11 019	11 229	73,82	74,17	0,47
Kalimantan Utara	72,12	72,16	12,52	12,54	8,35	8,36	8 289	8 354	68,64	68,76	0,17
Sulawesi Utara	70,94	70,99	12,16	12,43	8,86	8,88	9 628	9 729	69,96	70,39	0,61
Sulawesi Tengah	67,18	67,26	12,71	12,72	7,89	7,97	8 602	8 768	66,43	66,76	0,50
Sulawesi Selatan	69,60	69,80	12,90	12,99	7,49	7,64	9 723	9 992	68,49	69,15	0,96
Sulawesi Tenggara	70,39	70,44	12,78	13,07	8,02	8,18	8 555	8 697	68,07	68,75	1,00
Gorontalo	67,00	67,12	12,49	12,70	6,97	7,05	8 762	9 035	65,17	65,86	1,06
Sulawesi Barat	64,04	64,22	11,78	12,22	6,88	6,94	8 170	8 260	62,24	62,96	1,16
Maluku	65,01	65,31	13,53	13,56	9,15	9,16	7 925	8 026	66,74	67,05	0,46
Maluku Utara	67,34	67,44	12,72	13,10	8,34	8,37	7 234	7 423	65,18	65,91	1,12
Papua Barat	65,14	65,19	11,87	12,06	6,96	7,01	6 944	7 064	61,28	61,73	0,73
Papua	64,84	65,09	9,94	9,95	5,76	5,99	6 416	6 469	56,75	57,25	0,88
Indonesia	70,59	70,78	12,39	12,55	7,73	7,84	9 903	10 150	68,90	69,55	0,94

XXIV. SUPLEMEN: METODOLOGI

1. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan positif Indeks Harga Konsumen (IHK). Sebaliknya, perubahan negatif IHK disebut deflasi. IHK tersebut dihitung dengan menggunakan formula *Modified Laspeyres*.

Bahan dasar penyusunan diagram timbang (bobot) IHK adalah hasil Survei Biaya Hidup (SBH) atau *Cost of Living Survey*. SBH diadakan 5 (lima) tahun sekali, SBH terakhir diadakan tahun 2012, mencakup 136,080 rumah tangga di Indonesia yang dipantau baik pengeluaran konsumsinya maupun jenis barang/jasa yang dikonsumsi selama setahun penuh.

Berdasarkan hasil SBH diperoleh paket komoditas yang representatif, dapat dipantau harganya, dan selalu tersedia di pasaran. Paket komoditas nasional sebanyak 859 barang/jasa, bertambah dari 774 barang/jasa pada paket komoditas tahun 2007. Hal ini sejalan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Bobot awal setiap barang/jasa merupakan persentase nilai konsumsi setiap barang/jasa terhadap total rata-rata nilai konsumsi per rumah tangga per bulan, berdasarkan hasil SBH. Sejak Januari 2014, penghitungan inflasi mulai menggunakan tahun dasar 2012 (sebelumnya menggunakan tahun dasar 2007) berdasarkan hasil SBH 2012. Cakupan kota bertambah dari 66 menjadi 82 kota.

Jumlah barang/jasa yang dicakup bervariasi antarkota, yang terkecil di Kota Singaraja sebanyak 225 barang/jasa, sedangkan yang terbanyak di Jakarta sebanyak 462 barang/jasa. Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) yang diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Inflasi umum (*headline inflation*)

Inflasi umum adalah komposit dari inflasi inti, inflasi *administered prices*, dan inflasi *volatile goods*.

a. Inflasi inti (*core inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum, seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran, yang sifatnya cenderung permanen, *persistent*, dan bersifat umum. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasa inti sebanyak 751, antara lain: kontrak rumah, upah buruh, mie, susu, mobil, sepeda motor, dan sebagainya.

b. Inflasi yang harganya diatur pemerintah (*administered prices inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya secara umum diatur oleh pemerintah. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasanya sebanyak 23, antara lain: bensin, tarif listrik, rokok, dan sebagainya.

c. Inflasi bergejolak (*volatile goods*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Berdasarkan tahun dasar 2012, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai inflasi *volatile foods*. Jumlah komoditas sebanyak 85, antara lain : beras, minyak goreng, cabai, daging ayam ras, dan sebagainya.

Responden

Harga dari paket komoditas dikumpulkan/dicatat setiap hari, setiap minggu, setiap 2 minggu, atau setiap bulan dari pedagang atau pemberi jasa eceran. Mereka termasuk yang berada di pasar tradisional, pasar modern, dan outlet mandiri (seperti toko eceran, praktek dokter, restoran siap saji, bengkel, rumah tangga yang mempunyai pembantu, dan sebagainya),

2. Produk Domestik Bruto

PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa (produk) akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDB atas dasar harga berlaku (nominal PDB) dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung angka-angka PDB adalah (1) pendekatan produksi, menghitung nilai tambah dari proses produksi setiap kategori/aktivitas ekonomi, (2) pendekatan pendapatan, menghitung semua komponen nilai tambah, dan (3) pendekatan pengeluaran, menghitung semua komponen pengeluaran PDB. Secara teoritis, ketiga pendekatan ini akan menghasilkan nilai PDB yang sama.

3. Ekspor-Impor

Data Nonmigas diperoleh dari KPPBC (Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai), data Migas dari KPPBC, Pertamina dan BP Migas, Sistem pencatatan statistik ekspor menggunakan *General Trade* (semua barang yang keluar dari Daerah Pabean Indonesia tanpa kecuali dicatat), sedangkan impor pada awalnya menggunakan *Special Trade* (dicatat dari Daerah Pabean Indonesia kecuali Kawasan Berikat yang dianggap sebagai “luar negeri”), namun sejak bulan Januari 2008 sistem pencatatan statistik impor juga menggunakan *General Trade*, Sistem pengolahan data menggunakan sistem *carry over* (dokumen ditunggu selama satu bulan setelah transaksi, apabila terlambat dimasukkan pada pengolahan bulan berikutnya),

Data ekspor-impor yang disajikan pada bulan terakhir merupakan angka sementara

4. Kependudukan

Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Data dasar perhitungan proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 adalah data penduduk hasil SP2010. Penghitungan proyeksi penduduk ini dilakukan dengan menggunakan program RUP (Rural Urban Projection).

Penghitungan proyeksi penduduk mempertimbangkan perapihan umur, dengan tujuan untuk memperkecil kesalahan yang ada dalam data. Penentuan asumsi merupakan proses yang paling penting, mencakup asumsi tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Asumsi kelahiran dibuat berdasarkan tren tingkat kelahiran di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang dilakukan berhubungan dengan tingkat kelahiran di masa mendatang. Asumsi tingkat kematian dibuat berdasarkan tren tingkat kematian di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang dilakukan terkait dengan kesehatan. Asumsi migrasi, untuk proyeksi nasional menyangkut migrasi internasional (melintasi batas negara) masih dianggap nol yaitu seimbang antara yang keluar dan masuk. Sedangkan untuk proyeksi provinsi diperhitungkan migrasi internal yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas provinsi.

Proyeksi penduduk Indonesia dibangun dengan dasar berbagai pengetahuan dari berbagai pihak baik kementerian/lembaga terkait, akademisi dan pakar kependudukan. Hasil proyeksi ini digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi dari kinerja pemerintah.

5. Ketenagakerjaan

Data diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pengumpulan data berbasis sampel, dengan pendekatan rumah tangga. Estimasi ketenagakerjaan Februari 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk, sedangkan Februari–Agustus 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk yang digunakan pada Februari 2014

Definisi yang digunakan antara lain:

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), Pekerja Tidak Penuh terdiri dari:

Setengah Penganggur (*Underemployment*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

Pekerja Paruh Waktu (*Part time worker*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Pengangguran Terbuka (*Unemployment*), adalah mereka yang tidak bekerja tetapi berharap mendapatkan pekerjaan, yang terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja.

6. Upah Buruh

Upah Nominal adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan.

Upah Riil menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh, upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Penghitungan upah nominal buruh tani menggunakan rata-rata tertimbang, sedangkan upah nominal buruh bangunan menggunakan rata-rata hitung biasa.

Pengumpulan data upah buruh tani dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dengan responden petani. Data upah buruh bangunan diperoleh dari Survei Harga Konsumen Perkotaan dengan responden buruh bangunan.

Survei Harga Perdesaan dilaksanakan di 33 provinsi, sedangkan Survei Harga Konsumen Perkotaan dilaksanakan di 82 kota.

7. Nilai Tukar Petani (NTP) 2012=100

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Indeks harga yang diterima petani (I_t) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani (I_b) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

NTP dihitung dengan menggunakan formula:

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Formula atau rumus yang digunakan dalam penghitungan I_t dan I_b adalah formula Indeks Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres Indices*). Pengumpulan data harga untuk penghitungan NTP dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dan Survei Konsumen Perdesaan, dengan cakupan 33 provinsi di Indonesia yang meliputi lima subsektor yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Responden Survei Harga Perdesaan

adalah petani produsen, sedangkan responden Survei Harga Konsumen Perdesaan adalah pedagang di pasar perdesaan.

NTUP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana komponen Ib hanya terdiri dari BPPBM. Dengan dikeluarkannya konsumsi rumah tangga dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

8. Harga Produsen Gabah dan Beras di Penggilingan

Harga di Tingkat Petani adalah harga yang disepakati pada waktu terjadinya transaksi antara petani dengan pedagang pengumpul/tengkulak/pihak penggilingan yang ditemukan pada hari dilaksanakannya observasi dengan kualitas apa adanya, sebelum dikenakan ongkos angkut pasca panen.

Harga di Tingkat Penggilingan adalah harga di tingkat petani ditambah dengan besarnya biaya ke penggilingan terdekat.

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga minimal yang harus dibayarkan pihak penggilingan kepada petani sesuai dengan kualitas gabah sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah. Penetapan harga dilakukan secara kolektif antara Departemen Pertanian, Menko Bidang Perekonomian, dan Bulog.

Gabah Kering Panen (GKP) adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 25,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 10,0 persen.

Gabah Kering Giling (GKG) adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 14,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 3,0 persen.

Gabah Kualitas Rendah adalah gabah yang mengandung kadar air minimum dari 25,0 persen dan hampa/kotoran minimum 10,0 persen.

Survei Monitoring Harga Gabah dilaksanakan di 25 propinsi di Indonesia yang meliputi 158 kabupaten terpilih (sampel). Dari masing-masing kabupaten terpilih diambil tiga kecamatan tetap dan satu kecamatan tidak tetap. Responden adalah petani produsen yang melakukan transaksi penjualan gabah. Pencatatan harga dilaksanakan setiap bulan, tetapi saat panen raya (Maret s.d. Mei dan Agustus) pencatatan harga dilakukan setiap minggu. Panen dengan sistem tebasan tidak termasuk dalam pencatatan ini.

Beras Kualitas Premium adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) maksimum 10 persen.

Beras Kualitas Medium adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 10,1-20 persen.

Beras Kualitas Rendah adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 20,1 - 25 persen.

Survei harga produsen beras di tingkat penggilingan dilakukan di 26 provinsi. Responden survei harga produsen beras di penggilingan adalah unit penggilingan di tingkat kecamatan yang memiliki kapasitas giling cukup besar dan dianggap representatif. Jumlah sampel survei tersebut sebanyak 478 penggilingan, dengan periode survei dilakukan setiap bulan.

9. A. Indeks Harga Produsen (IHP)

Indeks Harga Produsen (IHP) adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Selain itu dapat juga digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi (PDB/PDRB), distribusi barang, margin perdagangan, dan sebagainya.

Sesuai dengan *Manual Producer Price Index* (PPI), penghitungan IHP yang ideal dirancang menurut tingkatan produksi-*Stage of Production* (SoP), yakni *preliminary demand* (produk awal), *intermediate demand* (produk antara), dan *final demand* (produk akhir). Namun IHP (2010=100) yang disajikan BPS baru mencakup *final demand* (produk akhir).

IHP dihitung menggunakan formula *Laspeyres* yang dimodifikasi, dengan tahun dasar 2010=100. Hal ini berkaitan dengan sumber data yang digunakan untuk menyusun diagram timbang yaitu Tabel Input-Output 2010 Updating. Data IHP tersebut disajikan BPS secara triwulanan, dan baru sampai tingkat/level nasional dalam bentuk indeks gabungan, indeks sektor dan indeks subsektor.

Harga yang digunakan untuk menghitung IHP bersumber dari Survei Harga Produsen dan data sekunder. Pengumpulan harga dilakukan setiap bulan (tanggal 1-15). Pemilihan responden dilakukan secara *purposive*, sedangkan pemilihan komoditas menggunakan kriteria *cut off point*. Pengelompokan komoditas dalam IHP didasarkan pada Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI).

Mulai tahun 2014, pengumpulan data Survei Harga Produsen mengalami perluasan cakupan yaitu Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman. Pengumpulan data dilakukan setiap bulan, tanggal 1-15 di 18 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Tengah,

Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua). Pada triwulan I-2015, penyajian data IHP (2010=100) selain terdiri dari IHP Gabungan yang meliputi Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan, juga disajikan IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman.

B. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB adalah harga indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara/daerah, Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri ataupun yang diekspor dan komoditas yang berasal dari impor,

IHPB Konstruksi adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan yang dapat menggambarkan perkembangan statistik harga bahan bangunan/konstruksi dapat digunakan sebagai dasar untuk penghitungan eskalasi nilai kontrak sesuai dengan Keppres No,8 Tahun 2003, dan telah direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No,105/PMK,06/2005 tanggal 9 November 2005, serta didukung oleh Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No,11/SE/M/2005 tanggal 16 Desember 2005, Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IHPB Konstruksi diambil dari data *Bill of Quantity* (BoQ) kegiatan konstruksi,

Penghitungan IHPB tahun dasar 2010=100 mencakup 317, sedangkan perdagangan internasional masing-masing mencakup 93 kelompok Harmonized System (HS) untuk IHPB ekspor maupun impor, IHPB disajikan dalam 3 sektor yakni: Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Industri, Data harga yang digunakan dalam penghitungan IHPB dikumpulkan dari 34 provinsi di Indonesia setiap bulannya, Formula yang digunakan untuk menghitung IHPB adalah formula Modified Laspeyres, Penimbang (*weight*) yang digunakan dalam penghitungan IHPB adalah nilai barang yang dipasarkan oleh pedagang grosir untuk setiap komoditas terpilih yang diolah dari Tabel Input-Output 2010 Updating,

10. Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang datanya diperoleh dari Survei Tendensi Bisnis (STB) yang dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Bank Indonesia, Survei ini dilakukan setiap triwulan di beberapa kota besar terpilih di seluruh provinsi di Indonesia, Jumlah sampel STB sebanyak 2,400 perusahaan besar dan sedang, dengan responden pimpinan perusahaan,

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan BPS melalui Survei Tendensi Konsumen (STK). Sebelum triwulan I-2011, BPS hanya melaksanakan STK di wilayah Jabodetabek, tetapi sejak triwulan I-2011 pelaksanaan STK diperluas di seluruh provinsi, Jumlah sampel pada triwulan I-2012 sebanyak 14,232 rumah tangga,

ITB dan ITK dihitung dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa variabel, Tujuan penghitungan ITB dan ITK adalah memberikan informasi dini tentang perkembangan perekonomian baik dari sisi pengusaha maupun sisi konsumen serta perkiraan kondisi bisnis dan kondisi konsumen triwulan mendatang,

11. Produksi Tanaman Pangan

Angka produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas (rata-rata hasil per hektar).

Angka Sementara (ASEM) 2015, diperoleh dari hasil perkalian antara realisasi luas panen dan produktivitas pada periode Januari–Desember 2015.

Data realisasi luas panen diperoleh dari laporan bulanan Mantri Pertanian/Kepala Cabang Dinas Kecamatan (KCD) secara lengkap dari seluruh kecamatan di Indonesia. Data realisasi produktivitas diperoleh dari hasil Survei Ubinan yang dilakukan setiap *subround* (caturwulan/empat bulanan) oleh BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian setempat.

Penghitungan produksi ASEM 2015 dilakukan menurut *subround* sebagai berikut:

1. **Produksi *subround* 1** (Januari–April) merupakan hasil perkalian antara realisasi luas panen *subround* 1 dengan realisasi produktivitas *subround* 1.
2. **Produksi *subround* 2** (Mei–Agustus) merupakan hasil perkalian antara angka realisasi luas panen *subround* 2 dengan angka realisasi produktivitas *subround* 2.
3. **Produksi *subround* 3** (September–Desember) merupakan hasil perkalian antara realisasi luas panen *subround* 3 dengan realisasi produktivitas *subround* 3.
4. **Produksi Januari–Desember** merupakan penjumlahan produksi *subround* 1, *subround* 2, dan *subround* 3.
5. **Luas panen Januari–Desember** merupakan penjumlahan luas panen *subround* 1, *subround* 2, dan *subround* 3.
6. **Produktivitas Januari–Desember** adalah hasil bagi antara produksi Januari–Desember dengan luas panen Januari–Desember.

12. Industri

Industri yang dimaksudkan adalah industri manufaktur (*manufacturing industry*) dengan cakupan perusahaan industri berskala besar, sedang, kecil, dan mikro, Perusahaan industri berskala besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, perusahaan industri berskala sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang, perusahaan industri berskala kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 orang, sedangkan perusahaan industri berskala mikro adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang, Indeks produksi industri besar dan sedang merupakan hasil pengolahan data hasil dari Sampel Survei Industri Besar dan Sedang (IBS) yang dilakukan secara bulanan, dengan sampling unit perusahaan industri berskala besar dan sedang, Banyaknya perusahaan IBS yang ditetapkan sebagai sampel adalah 1.703 perusahaan, Metode penghitungan indeks produksi bulanan menggunakan “Metode Divisia”, Indeks produksi industri mikro dan kecil merupakan hasil pengolahan data hasil dari Sampel Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) yang dilakukan secara triwulanan, dengan sampling unit perusahaan industri berskala mikro dan kecil, Banyaknya perusahaan IMK yang ditetapkan sebagai sampel adalah 24.000 perusahaan, Metode penghitungan indeks produksi IMK triwulanan menggunakan “Metode Paasche yang dimodifikasi”, Semua Indeks disajikan pada level 2-digit KBLI 2009 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009), Indeks produksi IBS dan IMK digunakan sebagai dasar penghitungan tingkat pertumbuhan produksi IBS dan IMK, yang disajikan dalam BRS Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur triwulanan,

13. Pariwisata

Data pariwisata mancanegara (wisman) diperoleh setiap bulan dari laporan Ditjen Imigrasi, yang meliputi seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia. Wisman yang masuk dirinci menurut WNI (berdasarkan jenis paspor) dan WNA (berdasarkan jenis visa), termasuk di dalamnya *Crew WNA*, baik laut maupun udara. Untuk data karakteristik wisman yang lebih detil diperoleh dari hasil pengolahan kartu kedatangan dan keberangkatan (*arrival/departure card*). Namun pada tahun 2015 penghitungan Jumlah kunjungan wisman dilengkapi dengan data lalu lintas WNA yang terdiri dari:

- a. Kunjungan minimal WNA melalui pos lintas batas (PLB) darat
- b. Kunjungan WNA lainnya dan WNA berada di Indonesia kurang dari satu tahun

- Tidak bekerja (wisata lanjut usia mancanegara, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dakwah/rohaniawan, berobat, mengadakan penelitian, dan lain-lain)
- Bekerja (bidang konstruksi, konsultan, instruktur, dan lain-lain)

Data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel diperoleh dari hasil Survei Hotel yang dilakukan setiap bulan terhadap seluruh hotel bintang serta sebagian (sampel) hotel non bintang (hotel melati) di seluruh Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah kamar tersedia, jumlah kamar terpakai, jumlah tamu yang datang (menginap) maupun jumlah tamu yang keluar dari hotel setiap harinya.

Wisatawan mancanegara (wisman) ialah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun.

Pelancong (Excursionist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, di mana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

TPK Hotel adalah persentase banyaknya malam kamar yang dihuni terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia.

Rata-rata lamanya tamu menginap adalah hasil bagi antara banyaknya malam tempat tidur yang terpakai dengan banyaknya tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya.

14. Transportasi Nasional

Data transportasi diperoleh setiap bulan dari PT (Persero) Angkasa Pura I dan II, Kantor Bandara yang dikelola Ditjen Perhubungan Udara, PT (Persero) KAI (Kantor Pusat dan Divisi Jabodetabek), PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I s.d, IV, dan Kantor Pelabuhan yang dikelola Ditjen Perhubungan Laut, Data yang disajikan mencakup jumlah penumpang berangkat dan jumlah barang dimuat dalam negeri, Khusus untuk transportasi udara disajikan jumlah penumpang berangkat baik domestik maupun internasional.

15. A. Kemiskinan

- a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

- b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- c. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- d. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
- e. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) bulan September 2015. Sebagai informasi tambahan, digunakan juga hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

B. Ketimpangan Pengeluaran

- a. Tingkat ketimpangan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya tingkat ketimpangan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan adalah *Gini Ratio* dan ukuran Bank Dunia.
- b. *Gini Ratio* adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan secara menyeluruh. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio bernilai 0 berarti pemerataan sempurna (seluruh penduduk mempunyai pengeluaran yang sama). Sementara Gini Rasio bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Nilai Gini Rasio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.
- c. Bank Dunia dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk terendah,

kelompok 40 persen penduduk menengah, dan kelompok 20 persen penduduk teratas. Tingkat ketimpangan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pengeluaran (proksi pendapatan) pada kelompok 40 persen penduduk terbawah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi.
2. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/ menengah.
3. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

BPS dalam mengukur tingkat ketimpangan penduduk September 2015 di Indonesia menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2015. Hal ini dilakukan mengingat data pendapatan sulit diperoleh.

16. Produksi Hortikultura

Pengumpulan data produksi dan luas panen hortikultura dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas (KCD)/Mantri Tani/Petugas Pengumpul Data Tingkat Kecamatan dengan metode perkiraan pengamatan lapang. Pengumpulan data menggunakan daftar register kecamatan dan daftar isian Statistik Pertanian Hortikultura (SPH). Daftar nama kecamatan yang digunakan keadaan pada Semester I Tahun 2013 dengan jumlah kecamatan sebanyak 6.911 kecamatan. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isian dokumen SPH dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Hasilnya diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kota untuk diolah. Validasi data dilakukan dalam forum sinkronisasi hasil pencatatan dan pengolahan baik di tingkat kabupaten/kota, dan provinsi maupun tingkat nasional.

Bentuk hasil produksi cabai besar adalah buah segar dengan tangkai. Cabai besar terdiri dari cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau keriting.

Bentuk hasil produksi cabai rawit (cabai rawit merah dan cabai rawit hijau) adalah buah segar dengan tangkai.

Bentuk hasil produksi bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun.

17. Struktur Ongkos Usaha Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan 2014

Survei usaha rumah tangga pertanian menggunakan 2 jenis kerangka sampel yaitu kerangka sampel pemilihan blok sensus dan pemilihan rumah tangga. Untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel yang digunakan yaitu daftar blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan cakupan ST2013 yang distratifikasi menurut jenis komoditas utama yang diurutkan menurut strata.

Blok sensus yang memenuhi syarat (*eligible*) adalah blok sensus yang memiliki jumlah *eligible* rumah tangga sebanyak 10 atau lebih. Sedangkan, kerangka sampel untuk pemilihan sampel rumah tangga, yaitu daftar nama kepala rumah tangga usaha tanaman pangan hasil pemutakhiran rumah tangga di setiap blok sensus terpilih yang diurutkan menurut komoditas utama dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, budidaya ikan dan penangkapan ikan, serta tanaman kehutanan siap tebang.

Komoditas yang dicakup dalam survei ini adalah komoditas yang menjadi prioritas pembangunan pertanian dan memiliki batas minimal usaha yang ditentukan kementerian terkait.

Batas Minimal Usaha dan Jumlah Sampel

Subsektor Pertanian	Komoditas	Batas Minimal Usaha	Jumlah Sampel		
			Musim Kemarau	Musim Hujan	Jumlah
Tanaman Pangan	Padi Sawah	1.700 m ²	55.964	61.291	117.255
	Padi Ladang	1.700 m ²	2.448	3.949	6.397
	Jagung	1.500 m ²			67.100
	Kedelai	2.000 m ²			9.382
Tanaman Hortikultura	Cabai Merah	200 m ²	13.542	6.090	19.632
	Cabai Rawit	200 m ²	24.067	10.265	34.332
	Bawang Merah	140 m ²	6.604	2.993	9.957
	Jeruk	25 pohon			7.300
Tanaman Perkebunan	Kelapa Sawit	15 pohon			27.726
	Karet	250 pohon			46.569
	Tebu	650 m ²			8.831
Peternakan	Sapi Perah				1.420
	Sapi Potong				59.537
	Ayam Ras Pedaging				897
	Ayam Ras Petelur				568
Budidaya Perikanan	Rumput Laut				8.011
	Bandeng				9.444
	Udang Windu				3.550
Penangkapan Ikan	Kapal Motor				6.733
	Perahu Motor Tempel				22.354
Budidaya Kehutanan	Jati				28.917
	Mahoni				9.880
	Sengon				26.203

Metode sampling yang digunakan adalah dua tahap. Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus, dipilih sejumlah blok sensus secara *probability proportional to size* dengan *size* jumlah rumah tangga usaha subsektor hasil pencacahan lengkap (ST2013-L). Tahap kedua, dari kerangka sampel rumah tangga dipilih sejumlah rumah tangga secara sistematis. Rumah tangga usaha pertanian terpilih diwawancarai oleh petugas yang telah dilatih.

Pengumpulan data biaya produksi berpedoman pada prinsip *opportunity cost*, yaitu dilakukan penilaian harga pasar untuk lahan milik sendiri, benih produksi sendiri, dan pekerja keluarga tidak dibayar.

Usaha pertanian adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual/ditukar atas risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga).

Rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga yang salah satu anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Untuk tanaman pangan, termasuk juga yang bertujuan untuk konsumsi sendiri atau tidak dijual.

Nilai Produksi:

- Tanaman pangan: adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumahtangga dari usaha per satu hektar komoditas tanaman pangan per musim tanam.
- Tanaman hortikultura: adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha satu hektar komoditas tanaman hortikultura per musim tanam untuk tanaman semusim (cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) dan usaha per 100 pohon tanaman menghasilkan selama setahun yang lalu untuk tanaman tahunan (jeruk).
- Tanaman perkebunan: adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha satu hektar komoditas tanaman perkebunan untuk tanaman semusim (tebu) dan tanaman tahunan (kelapa sawit dan karet) selama setahun yang lalu.
- Peternakan: adalah total nilai produksi yang bersumber dari pertambahan bobot, produksi telur dan susu, produksi ikutan, dan jasa peternakan selama setahun dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha peternakan per ekor (sapi potong dan sapi perah) atau per 1.000

ekor (ayam ras petelur), atau per 5.000 ekor (ayam ras pedaging) yang cara pemeliharaan tenak dikandangkan.

- Budidaya ikan: adalah nilai produksi budidaya yang dihasilkan rumah tangga usaha budidaya ikan per siklus per satuan tertentu (rumput laut, bandeng dan udang windu dalam satuan hektar).
- Penangkapan ikan: adalah nilai dari produksi hasil tangkapan rumah tangga usaha penangkapan ikan dalam satu trip yang dihitung mulai dari berangkat melakukan penangkapan ikan sampai kembali ke tempat asal.
- Tanaman kehutanan: adalah nilai produksi (selisih nilai dari tanaman kehutanan pada saat pencacahan dengan nilai tanaman setahun yang lalu untuk tanaman yang sudah dipanen/ditebang dan atau tanaman siap panen/tebang) dan ongkos produksi untuk usaha budidaya tanaman kehutanan yang siap tebang dan atau ditebang selama setahun yang lalu per 100 pohon.

Ongkos/Biaya Produksi:

- Tanaman pangan: adalah total ongkos/biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk usaha satu hektar komoditas tanaman pangan per musim tanam yang mencakup kegiatan produksi hingga kualitas standar (padi adalah gabah kering panen/GKP, jagung adalah pipilan kering, dan kedelai adalah biji kering) dan sudah memasukkan perkiraan sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, perkiraan sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, perkiraan upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan perkiraan bunga kredit modal sendiri/bebas bunga yang dihitung dengan cara imputasi sesuai harga pasar.
- Tanaman hortikultura: adalah rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk usaha satu hektar tanaman hortikultura per musim tanam untuk tanaman semusim (cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) dan per 100 pohon untuk tanaman tahunan yang menghasilkan (jeruk) pada periode pencacahan yang mencakup kegiatan produksi hingga kualitas standar (cabai merah dan cabai rawit adalah buah segar dengan tangkai, bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun, dan jeruk adalah buah segar) dan sudah memperkirakan/mengimputasi besarnya sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan bunga kredit model sendiri/bebas bunga.

- Tanaman perkebunan: adalah seluruh ongkos/biaya yang benar-benar telah digunakan (bukan jumlah yang dibeli/disimpan) selama setahun yang lalu untuk seluruh bidang tanaman untuk tanaman semusim dan pada seluruh pengeluaran tanaman perkebunan semusim yang panen. Benih, tanaman pelindung, pupuk, stimulan, dan pestisida yang bukan pembelian diperkirakan nilai sesuai harga setempat.
- Peternakan: adalah biaya yang benar-benar telah digunakan (bukan jumlah yang dibeli/disimpan) selama setahun yang lalu oleh rumah tangga yang cara pemeliharaan ternak dikandangan. Biaya tersebut adalah biaya yang benar-benar dibayarkan oleh peternak ditambah dengan imputasi dari biaya yang tidak dibayarkan oleh peternak seperti biaya pakan yang tidak dibeli, biaya pengurusan ternak oleh pekerja tidak dibayar (peternak atau pekerja keluarga).
- Budidaya ikan: adalah biaya yang meliputi biaya benih/bibit, pupuk dan obat-obatan, pakan dihitung baik yang berasal dari pembelian maupun bukan pembelian (diperkirakan nilainya), upah pekerja baik pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga (diperkirakan upahnya), dan biaya lainnya mencakup sewa lahan (termasuk perkiraan sewa lahan milik sendiri dan bebas sewa), alat/sarana usaha (termasuk perkiraan bebas sewa dan perbaikan kecil/pemeliharaan) dan lainnya (bunga kredit/pinjaman, penyusutan barang modal, pajak tak langsung, pengangkutan, jasa perikanan, dan sebagainya).
- Penangkapan ikan: adalah biaya yang meliputi upah pekerja dihitung untuk pekerja dibayar maupun perkiraan upah untuk pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, bahan bakar minyak (bensin, solar, minyak tanah), oli/pelumas, garam/es, perbekalan baik yang berasal dari pembelian maupun perkiraan nilai dari bukan pembelian, biaya lainnya (sewa alat/sarana, penyusutan barang modal), dan lainnya (umpan, pajak tak langsung, jasa perikanan, wadah, dan sebagainya).
- Tanaman kehutanan: adalah seluruh ongkos/biaya yang dikeluarkan yang sudah termasuk perkiraan sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, perkiraan sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, perkiraan upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan perkiraan bunga kredit modal sendiri/bebas sewa selama setahun yang lalu per 100 pohon untuk tanaman yang sudah dipanen/ditebang dan atau tanaman siap panen/tebang (tanaman yang sudah cukup umur dan secara ekonomis sudah dapat dipanen/ditebang atau digunakan kayunya).

Periode tanam musim kemarau (MK) adalah rumah tangga yang menanam tanaman pada periode Februari–September 2013 dan atau Februari–Mei 2014.

Periode tanam musim hujan (MH) adalah rumah tangga yang menanam tanaman pada periode Oktober 2013–Januari 2014.

Produktivitas ayam ras petelur adalah jumlah butir telur yang dihasilkan dari 1.000 ekor ayam ras petelur produktif per hari.

Survei Kehutanan 2014

Metode sampling yang digunakan adalah metode sampling dua tahap terstratifikasi. Pada tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus (blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan cakupan ST2013 pada desa-desa yang terletak di kawasan hutan (yang di-*overlay* dengan peta kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan) dan diurutkan menurut strata), dipilih sejumlah blok sensus secara *probability proportional to size* dengan *size* jumlah rumah tangga hasil ST2013-L. Tahap kedua, dari kerangka sampel rumah tangga dipilih 10 rumah tangga secara sistematis. Jumlah sampel untuk Survei Kehutanan sebanyak 99.993 rumah tangga.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Rumah tangga di sekitar kawasan hutan adalah rumah tangga yang bermukim di desa yang berada di dalam dan di tepi kawasan hutan.

Perladangan berpindah adalah suatu kegiatan usaha tani tanaman semusim/pangan secara tradisional/pindah-pindah di dalam maupun di luar kawasan hutan tanpa memperhatikan aspek pelestarian sumber daya hutan, tanah, dan air.

Pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar adalah kegiatan memungut/mengambil hasil hutan dan juga menangkap satwa-satwa liar di hutan seperti: memungut kayu, getah, kulit kayu, buah-buahan, rumput, rotan, tumbuhan obat, gaharu, serta menangkap ayam hutan, babi hutan, rusa, dan sebagainya.

18. Pendataan Potensi Desa (Podes)

Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Sejak saat itu, Podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sepuluh tahun untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, ataupun Sensus Ekonomi. Dengan demikian, fakta penting terkait ketersediaan

infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau perkembangannya secara berkala dan terus menerus.

Podes 2014 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (yaitu: desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait). Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki batas wilayah yang jelas, (2) memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya, dan (3) memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Salah satu tujuan podes adalah menyediakan data dasar bagi keperluan penentuan klasifikasi/tipologi wilayah, seperti perkotaan-perdesaan, wilayah tertinggal, wilayah pesisir dan sebagainya. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan klasifikasi wilayah desa berdasarkan tingkat kesulitan geografis. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, salah satu komponen yang digunakan untuk pengalokasian dana desa adalah IKG.

BPS telah menyusun IKG untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. IKG disusun melalui metode Analisis Faktor. IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala 0–100 yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.

19. Nilai Tukar Eceran Rupiah

Nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain bervariasi. Nilai tukar mata uang untuk transaksi besar yang meliputi aktivitas ekspor, impor, *swap*, *derivative*, dan lain-lain, dipantau dan dilaporkan secara periodik oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, transaksi eceran penukaran mata uang melalui *money changer* (tempat penukaran mata uang) yang tersebar di seluruh Indonesia menggambarkan tingkat *retail spot rate* suatu mata uang.

BPS melaporkan informasi nilai tukar eceran rupiah secara periodik. Statistik yang dihasilkan dapat digunakan untuk melihat pengaruh nilai tukar transaksi besar terhadap nilai tukar transaksi eceran, perkembangan nilai tukar rupiah transaksi eceran, melengkapi informasi *real-time* yang beredar di internet, dan sebagainya.

Mata uang asing yang dimonitor mencakup empat jenis, yaitu dolar Amerika (USD), dolar Australia (AUD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR) dengan alasan merupakan mata uang yang hampir selalu diperdagangkan di 34 provinsi di Indonesia, sehingga dapat dimonitor transaksinya.

20. Perdagangan Komoditas Strategis 2015

Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2015 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup 186 kabupaten/kota terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 152 kabupaten/kota. Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan perdagangan dan non perdagangan. Perusahaan perdagangan terdiri dari perusahaan perdagangan menengah, besar, dan kecil, baik sebagai distributor, subdistributor, agen, sub-agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, eksportir, importir, maupun pengecer. Untuk perusahaan non perdagangan terdiri dari perusahaan/usaha pertanian, industri pengolahan dan peternakan. Komoditi yang dicakup dalam survei ini adalah sebanyak 5 komoditi, yaitu: beras, cabai merah, bawang merah, jagung pipilan, dan daging ayam ras. Produsen jagung, bawang merah, dan cabai merah didekati melalui petani komoditas terpilih. Produsen beras didekati melalui industri penggilingan padi. Sementara itu produsen daging ayam ras didekati melalui kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, serta pedagang ayam ras yang melakukan pembelian ayam hidup lalu dipotong dan dilakukan proses pembersihan bulu dan dijual kembali ke pedagang daging ayam ras lainnya. Kerangka sampel yang dibentuk ada dua, yaitu kerangka sampel pedagang dan kerangka sampel produsen. Banyaknya sampel perusahaan/usaha/pengusaha perdagangan menengah dan besar serta produsen secara keseluruhan sebanyak 3.500 perusahaan. Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditi utama yang diperdagangkan berdasarkan 5 komoditi terpilih. Untuk perusahaan yang bersumber dari SE06-UMB, seluruhnya diambil sebagai perusahaan sampel, sedangkan sisanya dipilih secara sistematis pada setiap komoditi. Jika jumlah perusahaan/usaha dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh perusahaan/usaha akan dicacah. Sedangkan sampel industri penggilingan dipilih dari kerangka sampel industri pengolahan secara *systematic sampling*.

21. Indeks Perilaku Anti Korupsi

- a. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2015 adalah indikator komposit yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan oleh BPS. SPAK 2015 merupakan survei dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan pada bulan November 2015 di 33 provinsi, 170

kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan jumlah sampel sebanyak 10.000 rumah tangga.

- b. Analisis mengenai perilaku anti korupsi dalam survei ini hanya untuk representasi level nasional.
- c. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama, yakni **persepsi atau penilaian** masyarakat terhadap kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai yang dipahami maupun sikap diri terhadap korupsi dan **pengalaman langsung** pada jenis layanan publik tertentu yang biasa diakses, menyangkut perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), nepotisme (*nepotism*).
- d. Variabel penyusun IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK 2015 menggunakan *explanatory factor analysis*.
- e. Responden adalah kepala rumah tangga atau pasangannya yang dipilih dengan acak (Tabel *Kish*) dan diwawancarai secara langsung (tatap muka).

22. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Ketersediaan Data

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010–SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional–SUSENAS)

- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.
- Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Dalam menghitung IPM, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Berikut tabel yang menyajikan nilai-nilai tersebut.

Indikator	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rupiah	1 007 436	26 572 352

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Variabel dalam IPM

1. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang

yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

4. Pengeluaran per kapita

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Menghitung Indeks Komponen

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

Dimensi Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

Menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Pengelompokan IPM

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

IPM < 60 : IPM rendah

60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang

70 ≤ IPM < 80 : IPM tinggi

IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

ISSN 2087-930X



9 772087 930006